DISERTASI

REKONTRUKSI HUKUM PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum

Oleh:

ABDUL KHAIR, SH, MH
NIM : 10302000124

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021

DISERTASI

REKONTRUKSI HUKUM PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum

Oleh:

ABDUL KHAIR, SH, MH
NIM : 10302000124

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG

Lembar Pengesahan

REKONTRUKSI HUKUM PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN

DISERTASI

OLEH :

ABDUL KHAIR, SH, MH
NIM : 10302000124

Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Tertutup

guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum,

telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal

seperti tertera di bawah ini :

PROMOTOR,	CO- PROMOTOR,
Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum	**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum**
NIDN.0605036205	**NIDN.0621057002**

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S. H., M. Hum.

NIDN. 06.2105.7002

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Abdul Khair., SH., MH
NIM	: 10302000124

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Disertasi yang diajukan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor di universitas maupun perguruan tinggi manapun).

2. Disertasi adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian Penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan co-Promotor.

3. Dalam disertasi tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkannya sebagai acuan dan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka..

4. Demikian ini saya buat dengan sesungguhnya dan apbila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Desember 2021
Yang membuat pernyataan

ABDUL KHAIR., S.H.,M.H

MOTTO

ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ
فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن
مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: *"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*(Q.S. Al-Ahzab:5)

PERSEMBAHAN

Disertasi ini Kupersembahkan Kepada:

Kedua Orang Tua ku, Walaupun Ayah Ku Telah Tiada

Tapi Pesan-Pesannya Selalu memberikan Motivasi Kepadaku

Keluarga Kecilku

Teman-Teman IAIN Palangka Raya

Rekan-Rekan ku PDIH Angkatan ke XIV

Khusus untuk 4 sekawan

Bangsa dan Negara Indonesia

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya kepada penulis, sehingga dapat menyeleseaikan Disertasi ini, tepat waktu sesuai dengan program. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari dunia yang gelap gulita kepada dunia yang terang benderang.

Disertasi ini berjudul: "**Rekonstruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan"**. Disertasi ini membahas tentang pengangkatan anak yang sampai saat ini belum berbasis nilai keadilan, sehingga perlu direkonstruksi agar hak-hak akan angkat dapat terlindungi.

Penulis dalam menyelesaikan disertasi ini banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Yang Terhormat bapak Drs. Bedjo Santoso, MT.,Ph.D, beserta seluruh dosen dan staf yang telah memberikan bantuan berupa kesempatan/waktu, sarana dan prasarana kepada penulis untuk menimba ilmu Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, juga sebagai Promotor, yang sangat telah banyak meluangkan waktu dan dengan penuh semangat, sabar, dengan kedalaman ilmu dan kebesaran jiwanya telah memberikan kesempatan, membimbing, dan mendorong penulis dalam menempuh pendidikan S3 di PDIH UNISSULA Semarang;

3. Ibu Prof. Dr. Hj Anis Masdurohatun, SH, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Unissula selaku Co-Promotor, yang dengan kecerdasan intelektual dan spiritualnya, syarat pengalaman dan kesabarannya dengan diskusi yang bersahaja telah membantu penulis dan memberikan petunjuk dalam menyelesaikan disertasi ini;
4. Kedua orang tua penulis, Ayahda M. Darsani (alm) dan Ibunda Nunsiah yang telah banyak berkurban dalam membesarkan dan mendidik penulis, dan selalu mendo‟akan keberhasilan penulis. Insya Allah apa yang pian berikan selama ini akan bernilai ibadah disisi Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal Alamin.
5. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan semangat kebersamaannya telah membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan, menyusun berbagai tugas, menyusun Disertasi ini serta melayani dalam berbagai administrasi.
6. Seluruh staf administrasi (Mas Azis, Mas Iluk dan Mba Erin) yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan pelayanan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Rekan-rekan angkatan ke XIV Program Doktor Ilmu Hukum Unissula Semarang yang dengan penuh ketekunan, semangat dan ceria untuk menyelesaikan studi S3, kalian semua sangat memberikan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan.
8. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 3;
9. Civitas Akademi IAIN Palangka Raya yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di PDIH UNISSULA Semarang;

10. Bapak Usman, S.Ag, SS, MHI, Kepala Perpustakaan IAIN Palangka Raya yang banyak meluangkan waktu untuk melayani penulis dalam mencari buku-buku literatur;
11. Ibu Dr. Helwina Handayani, M.Si, Staf Khusus Sub.Bag Hukum dan Pengaduan kantor Komisi Perlindungan Anak Jakarta;
12. Ibu Dra. Norhayati, MH selaku Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan penggalian data;
13. Ibu Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang telah bersedia memberikan waktu kepada penulis untuk melaksanakan wawancara;
14. Bapak Drs. H. Lukmanul Hakim, M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palangka Raya yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian;
15. Keluarga penulis yang dengan penuh ketulusan kasih, kesabaran, pengertian dan pengorbanan yang sangat besar baik terhadap waktu dan segala hal telah mendampingi serta selalu berdo‟a kepada Allah SWT., untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Unissula Semarang, ditambah dengan keberadaan anak-anak penulis yang menjadikan penyemangat penulis.
16. Seluruh informan dan siapa saja yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari sempurna, ketidaksempurnaan itu semata-mata bersumber dari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu kritik dan saran serta bimbingan dari semua pihak, khususnya Dewan Penguji yang bersifat konstruktif senantiasa Penulis terima untuk kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Sebagai penutup dari kata pengantar ini penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian Disertasi ini, semoga apa yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamin

Palangka Raya, Desember 2021
Penulis,

ABDUL KHAIR

ABSTRAK

Latar belakang disertasi ini adalah masih adanya ditemukan ketidakadilan dalam regulasi pengangkatan anak di Indonesia seperti orang tua angkat tidak mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran, penggantian identitas anak angkat oleh orang tua angkatnya dan pengangkatan anak secara ilegal. Oleh sebab itu regulasi pengangkatan anak ini perlu direkonstruksi. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis regulasi pengangkatan anak saat ini di Indonesia yang belum berbasis nilai keadilan; 2) Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan hukum pengaturan pengangkatan anak di Indonesia, dan 3) Untuk menemukan formula rekonstruksi hukum pengaturan pengangkatan anak di Indonesia agar berbasis nilai keadilan.

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 3 kerangka teori yaitu Teori Keadilan sebagai Grand Theory, Teori Perlindungan Hukum sebagai Middle Theory dan Teori Hukum Progresif sebagai Applied Theory.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah: jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Paradigma yang digunakan adalah paradigma positivesme. Pendekatan penelitian ada 4 (empat) macam yakni (1) pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, (2) pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, (3) pendekatan historis *(historical approach)*, dan (4) pendekatan Kasus *(case approach)*. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Untuk teknik analisa data dilakukan secara deskriftif kualitatif.

Hasil penelitian ini bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di mana didalamnya ada mengatur tentang pengangkatan anak, dan aturan pelaksananya masih ada kelemahannya yaitu: (1) masih ada ditemukan di masyarakat orang tua angkat yang tidak mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran; (2) Masih ada orang tua angkat yang mengganti identitas awal anak angkat; (3) Masih ada pengangkatan anak secara illegal.

Untuk mengatasi permasalahan ini maka regulasi pengangkatan anak perlu di rekonstruksi yaitu:

Pertama, Penambahkan norma baru yaitu pasal 89A ayat (1), (2) dan (3) berisi tentang sanksi hukum bagi orang tua angkat yang tidak mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran dan atau merubah identitas anak angkat.

Kedua adalah Penambahan norma baru pasal 89B ayat (1) dan (2) berisi tentang sanksi bagi orang tua angkat yang mengangkat anak secara ilegal atau pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan.

Kata Kunci: ***Rekonstruksi, Regulasi Anak Angkat, Nilai Keadilan***

ABSTRACT

The background of this dissertation is that there are still injustices found in the regulation of adoption in Indonesia, such as adoptive parents not registering their adopted child on the birth certificate, changing the identity of the adopted child by the adoptive parents and illegal adoption. Therefore, this regulation on child adoption needs to be reconstructed. The aims of this study are: 1) To analyze the current adoption regulations in Indonesia which are not based on the value of justice; 2) To analyze the legal weaknesses of the regulation of child adoption in Indonesia, and 3) To find a formula for the reconstruction of the law on the regulation of adoption in Indonesia so that it is based on the value of justice.

The theory used in this study has 3 theoretical frameworks, namely Justice Theory as Grand Theory, Legal Protection Theory as Middle Theory and Progressive Legal Theory as Applied Theory.

The research method used is: this type of research is normative juridical, while the nature of the research is descriptive analysis. The paradigm used is the paradigm of positivism. There are 4 (four) kinds of research approaches, namely (1) the statutory approach, (2) the conceptual approach, (3) the historical approach, and (4) the case approach. The data sources used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis technique was carried out in a qualitative descriptive manner.

The results of this study indicate that Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which regulates adoption of children, and the implementing rules still have weaknesses, namely: (1) there are still found in the community of adoptive parents who do not register their adopted child on the birth certificate. ; (2) There are still adoptive parents who change the initial identity of the adopted child; (3) There is still illegal adoption of children.

To overcome this problem, the regulation of child adoption needs to be reconstructed, namely:

First, the addition of new norms, namely Article 89A paragraphs (1), (2) and (3) contains legal sanctions for adoptive parents who do not register their adopted child on the birth certificate and or change the identity of the adopted child.

The second is the addition of new norms in Article 89B paragraphs (1) and (2) which contain sanctions for adoptive parents who adopt children illegally or adopt children without going through a court order.

Keywords: Reconstruction, Adoption Regulation, Justice Value

RINGKASAN

REKONTRUKSI HUKUM PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya. Pengangkatan Anak juga wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pasal 39 ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut:

> "Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak".

Memang pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga. Oleh karena itu lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Karena faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa pada masa itu berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi tersebut yaitu dengan lahirnya Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak. Pertama-tama hanya diberlakukan khusus bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa saja, tetapi dalam perkembangannya ternyata banyak masyarakat yang ikut menundukkan diri pada Staatsblad tersebut.

Sejalan dengan perkembangan waktu, pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pengangkatan anak yang pada awalnya terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak, tetapi untuk saat ini masalah pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat. Namun dalam praktek pengangkatan anak didapati berbagai masalah, seperti pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, dan sebagainya. Sehingga untuk melaksanakan ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Negara dan Pemerintah Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap ketertiban jalannya praktik pengangkatan anak, baik dari segi administrasi, dan kepastian hukumnya, maka diterbitkanlah beberapa kebijakan melalui peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang mengatur dan menangani masalah pengangkatan anak, antara lain: Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaaan pengangkatan anak, seperti pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, dan sebagainya. Pencegahan penyimpangan ini pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak, demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun pada kenyataannya di kota Palangka Raya dan di kota-kota lainnya masih ada terjadi berbagai masalah dalam praktek pengangkatan anak, baik dari prosedur, data, legalitas dan keabsahan, konflik kepentingan, serta akibat hukum dalam pengangkatan anak, baik untuk anak itu sendiri maupun orang yang mengangkat anak.

Salah satu contoh adalah ketika observasi awal penulis di kota Palangka Raya, penulis menemukan beberapa permasalahan mengenai penagangkatan anak ini yaitu:

Pertama, ada warga masyarakat yang mengangkat anak orang lain dan mengangkatnya sejak dilahirkan kemudian pada saat membuat akta kelahiran anak angkat tersebut tidak dicatatkan pada akta kelahiran. Disamping itu juga pada akta kelahiran tersebut nama orang tua anak tersebut dicantumkan nama orang tua yang mengangkatnya. Praktik seperti ini termasuk mengganti identitas awal anak angkat dan bertentangan dengan undang-undang pengangkatan anak.

Kedua, masih ada ditemukan pengangkatan anak secara ilegal yaitu pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak ilegal ini adalah langkah awal yang dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan lain berkaitan dengan pengangkatan anak.

Ketiga, ada pasangan suami isteri yang sudah lama menikah tapi tidak punya anak, akhirnya dia meminta anak untuk diangkat menjadi anak angkat dengan tujuan untuk pancingan agar dia bisa punya anak. Namun setelah dia bisa hamil dan punya anak kandung, maka anak pancingan yang telah diangkat

menjadi anak tidak dihiraukan lagi. Anak angkat dianaktirikan, seperti ketika mereka dibelikan pakaian anak kandung dibelikan dengan jenis yang lebih baik, sedangkan anak angkat dibelikan dari jenis yang murah, demikian juga dengan hal-hal lainnya.

Keempat, pasangan suami isteri yang banyak punya anak dan ekonominya dibawah garis kemiskinan sehingga kesulitan membiayai anak-anaknya, akibatnya anaknya ada yang diberikan kepada orang lain dengan harapan anaknya bisa hidup layak dan terayomi. Namun dikemudian hari setelah ekonominya membaik dan dia ingin mengambil lagi anak yang pernah diberikannya sehingga timbul permasalahan.

Kelima, pasangan suami isteri yang memberikan anaknya kepada orang lain suatu ketika dia kangen dengan anaknya dan ingin bertemu, tapi orang tua angkatnya menghalang-halangi atau tidak memberikan akses untuk bertemu antara orang tua kandung dengan anaknya.

Berbagai permasalahan di atas bisa terjadi karena aturan hukum tentang pengangkatan anak sudah tidak bisa lagi menjembataninya sebab dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini di Indonesia. Oleh sebab itu aturan hukum tentang pengangkatan anak ini perlu direkonstruksi agara tidak ada permasalahan dikemudian hari. Maka beranjak dari hal tersebut peneliti berupaya meneliti masalah tersebut dengan judul: "REKONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian desertasi ini dan sesuai dengan latar belakang permasalahan tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi pengaturan pengangkatan anak di Indonesia belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan hukum pengaturan pengangkatan anak di Indonesia?
3. Bagaimana rekonstruksi hukum pengaturan pengangkatan anak di Indonesia agar berbasis nilai keadilan.

C. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dengan ini merupakan penelitian hukum normatif, karena meneliti norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Untuk pengumpulan data pada penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data skunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat komprehensif analitis yaitu berupaya menggambarkan peraturan-peraturan yang sedang berlaku yang juga disebut hukum positif dan selanjutnya dihubungkan dengan teori-teori hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, pendekatan perbandingan *(comparative approach)*, dan dan pendekatan Kasus *(case approach)*.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer.

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3) Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak bagi Golongan Tionghua
4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
6) Kep. Mensos RI No: 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
7) Perpres RI No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk
9) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penduduk
10) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengangkatan Anak
11) Fatwa MUI No. U-335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982, tentang Anak Angkat.

b. Bahan Hukum sekunder

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum skunder adalah yang memberkan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hkum skunder dapat berupa seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang terkait, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan hukum, karya-karya hukum para ahli terkemuka (Pakar).

c. Bahan Hukum Terser

Selanjutnya adalah bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumolatif dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen (Studi Kepustakaan)

Teknik pengumpulan bahan hukum memfokuskan studi pustaka dengan melacak seluruh dokumen utuh peraturan perundang-undangan yang terkait tema penelitian. Pendekatan konseptual atau *conseptual approach* yang lebih esensial dilakukan adalah penelusuran buku-buku hukum *(treaties*) yang di dalamnya banyak terkandung konsep-konsep hukum, yang terkait dengan isu hukum praktek pengangkatan anak.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik di mana data di kumpulkan melalui teknik percakapan dengan tujuan memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara akan di peroleh data kualitatif. Data tersebut diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya. faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data adalah sebagai berikut: (1). Kualitas pewawancara (2). Kualitas yang diwawancarai (3). Sifat dari masalah yang diteliti.

7. Analisa Data

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan metode *deskriftif kualitatif*. Kualitatif artinya mengukur dan menguji data dengan konsep teori dan peraturan perundang-undangan. Dimana, dengan metode ini diharapkan memperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa terhadap Rekontruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan.

D. Kerangka Teori

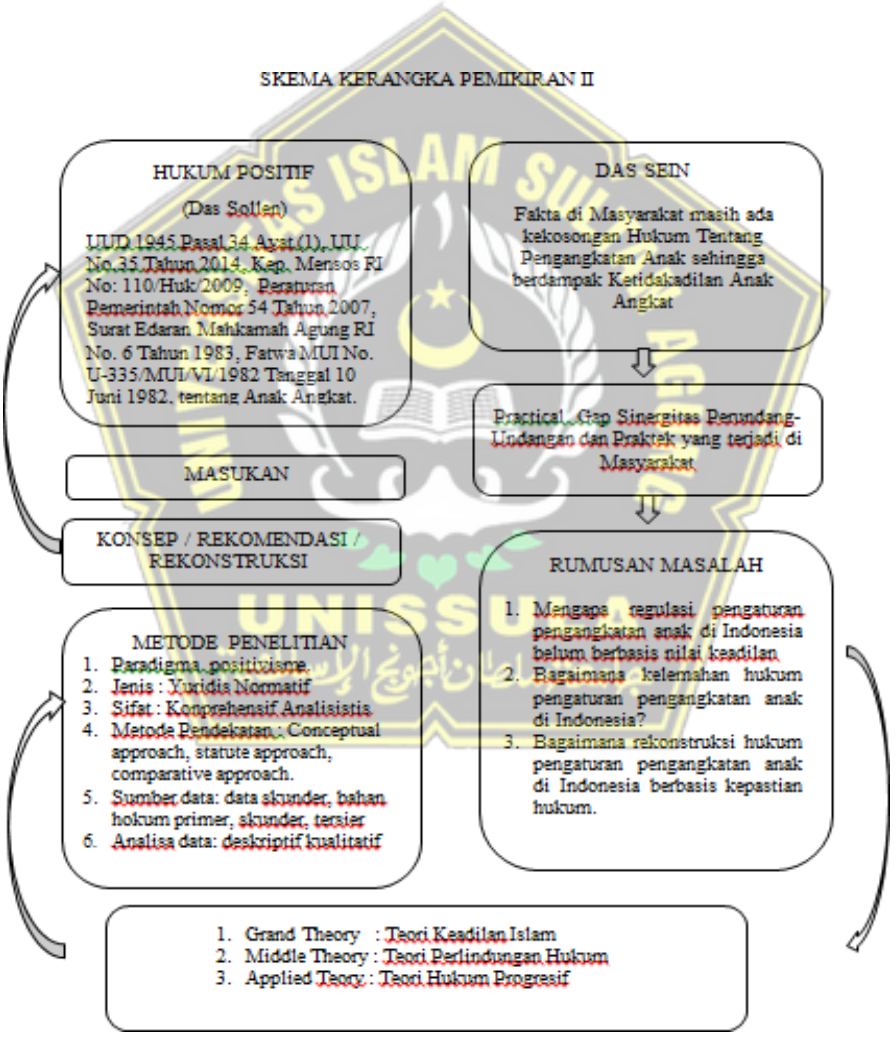
1. Teori Keadilan Islam sebagai Grand Theory
   Teori ini membedah bahwa larangan pengangkatan anak yang memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Juga larangan menasabkan anak angkat dengan orang tua angkatnya. Sebagaimana diatur dalam Surah Al Ahzab ayat 5.

2. Teori Perlindungan Hukum sebagai Middle Theory
   Teori ini membedah bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan anak angkat dan harus dapat memberikan jaminan keamanan dan keadilan terhadap anak angkat.

3. Teori Hukum Progresif sebagai Applied Theory

Teori ini untuk membedah bahwa Selama ini masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui UU Pengangkatan Anak dan tidak memahami prosedur pengangkatan anak, oleh sebab itu pemerintah dan hakim harus aktif memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran



F. Regulasi Pengangkatan Anak Belum Berkeadilan

Berdasarkan penelitian penulis bahwa regulasi pengangkatan anak di Indonesia belum berkeadilan, dengan alasan sebagai berikut:

a) Masih ada orang tua angkat yang tidak mencatatkan anak angkat pada akta kelahiran

Pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat 2a, yang berbunyi: "Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak".

Berdasarkan ketentuan ini bahwa anak angkat harus dicatatkan pada akta kelahiran yang disebut dengan catatan pinggir. Dengan adanya catatan pinggir maka anak angkat akan mengetahui bahwa dirinya adalah anak angkat, demikian juga dengan orang yang melihat akta tersebut akan langsung mengetahui bahwa yang berangkutan adalah anak angkat.

Berdasarkan penjelasan bapak Lukmanul Hakim, bahwa selama ini belum ada warga masyarakat yang mengajukan permohonan untuk mencatatkan anak angkatnya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya. Bagi warga masyarakat yang melakukan pengangkatan anak maka seyogyanya harus dicatatkan pada akta kelahiran, sebagai salah satunya syaratnya adalah harus ada penetapan dari pengadilan atas pengangkatan anak tersebut.

b) Masih ada orang tua angkat yang mengganti identitas anak angkat

Pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat 2a, yang berbunyi: "Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak".

Fakta di masyarakat tidak sedikit pasangan suami isteri mengangkat anak yang baru lahir kemudian sewaktu membuat akta kelahiran anak angkat tersebut nama orang tua anak angkat tersebut dicantumkan nama orang tua yang mengangkatnya seolah-olah anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Helwina, bahwa praktik penggantian identitas anak angkat ini terjadi karena tidak adanya sanksi hukum pada undang-undang atas penggantian identitas anak angkat. Lebih lanjut ibu Helwina menjelaskan bahwa saat ini masih ada kekosongan hukum yaitu belum adanya sanksi pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 atas penggantian identitas anak angkat.

Ketentuan pasal 39 ayat 2a ini sangat bagus dan selaras baik dengan hukum positif maupun hukum Islam, tapi pasal ini pelanggarannya tidak ada ketentuan sanksi pada undang-undang tersebut, akibat sering kali pengangkatan anak orang tua angkat mencantumkan namanya pada akta kelahiran akta kelahiran anak angkatnya.

Pada hukum Islam, Rasulullah saw melarang adanya tindakan tipu-menipu termasuk merubah identitas anak angkat, sebagaimana disebutkan dalam hadis beliau sebagai berikut:

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ ٱلأَسْقَعِ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ:
إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ ٱلْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ ٱلرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ، أَوْيُرِىَ عَيْنَهُ
مَالَمْ تَرَ،أَوْيَقُوْلُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَالَمْ يَقُلْ

Artinya: "Diriwayatkan dari Watsilah bin Asqo" berkata, Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya di antara kebohongan paling besar adalah seseorang mengakukan diri kepada selain ayahnya, mengaku matanya melihat apa yang tidak dilihatnya dan berbicara mencatut nama Rasulullah saw. apa yang tidak beliau ucapakan.

Syariat Islam juga melarang kepada anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka sendiri. Rasulullah saw. bersabda:

مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْه أَوانْتَمَى إِلَى غَيْرِمَوَالِيْهِ فَعَلَيْه لَعْنَةُ اللهِ الْمُتَتَبِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Siapa saja mengaku ayah pada selain ayahnya sendiri dan berintima" pada selain tuannya maka laknat Allah akan terus mengikutinya hingga hari kiamat."

Pada penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan nasab anak yang diangkat dengan kedua orang tua kandungnya dan memberinya status seperti anak kandung, jelas haram dan tidak dibenarkan oleh Islam.

c) Masih ada pengangkatan anak secara ilegal

Ada pasal yang mengharuskan bahwa pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan, hal ini terdapat pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 9 yang berunyi :

"Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."

Pada pasal 1 ayat 9 tersebut pada ujung kalimatnya jelas tertulis berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Palangka Raya dari tahun 2015 sampai 2019 tidak ada yang mengajukan permohonan pengangkatan anak, sebagaimana data di bawah ini:

Tabel 4

Data Perkara Masuk Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya

NO	TAHUN	PERKARA MASUK	PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK	JUMLAH
1	2015	691	-	691
2	2016	313	-	313
3	2017	853	-	853
4	2018	856	-	856
5	2019	992	-	992
	JUMLAH	3.705	-	3.705

Sumber Data: Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Palangka Raya

Demikian juga permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Palangka Raya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5

Data Perkara Masuk Pada Pengadilan Agama Palangka Raya

NO	TAHUN	PERKARA MASUK	PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK	JUMLAH
1	2013	539	1	540
2	2014	614	-	614
3	2015	598	-	598
4	2016	640	-	640
5	2017	583	-	583
6	2018	625	-	625
7	2019	701	-	701
	JUMLAH	4.300	1	4.301

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Palangka Raya

Dari tabel di atas selama 7 tahun ada 4.301 perkara yang masuk, namun permohonan pengangkatan anak Cuma 1 buah permohonan saja.

Penjelasan dari hakim ibu Zuraidah, bahwa masyarakat enggan untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan karena salah satu dari persyaratannya adalah kunjungan dari pekerja sosial ke rumah calon orang tua angkat. Lebih jauh ibu Helwina menjelaskan bahwa tujuan dari pekerja sosial ini ke rumah Calon Orang Tua Angkat (COTA) adalah untuk memastikan:

a) Kondisi rumah COTA
b) Kemampuan ekonomi COTA;
c) Kecakapan COTA.

Survey dari pekerja sosial ini memerlukan waktu 6 s.d 12 bulan karena untuk memastikan agar anak angkat nantinya benar-benar terayomi dan tujuan

pengangkatan anak itu tercapai sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang. Lamanya survey dari tenaga pekerja sosial inilah yang membuat warga masyarakat enggan untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

G. Rekonstruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak UU No.35 Tahun 2014

1. Penambahan Norma Hukum Baru pasal 89A

Berdasarkan fakta seperti diuraikan pada bab sebelumnya bahwa peraturan perundang-undangan pengangkatan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk pengangkatan anak diatur dalam pasal 39 s.d pasal 41.

Pada undang-undang ini sudah ada mencantumkan ketentuan tentang sanksi yaitu dari pasal 77 s.d 89 namun belum lengkap karena belum ada sanksi terhadap pelanggaran pasal 39 s.d 41 sehingga peluang untuk terjadi pelanggaran masih bisa terjadi. Misalnya dapat dilihat pada pasal 39 ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut:

> "Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak".

Pelanggaran terhadap pasal di atas ini tidak ada sanksinya, sehingga tidak sedikit anak angkat yang dirubah identitasnya, seperti pada akta kelahiran anak angkat dicantumkan nama orang tua yang mengangkatnya. Untuk mengatasi masalah ini penulis memberikan pendapat bahwa undang-undang ini perlu di rekonstruksi yaitu dengan cara menambah norma hukum baru yaitu pasal tentang sanksi. Adapun pasal yang penulis usulkan adalah pasal 89 A, yaitu

Pasal 89A

(1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak mencatatkan dalam akta kelahiran atas anak angkatnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2a) dapat dikenakan sanksi perdata berupa kewajiban mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
(2) Setiap orang yang dengan sengaja merubah identitas awal anak angkatnya pada akta kelahiran sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2a) dapat dikenakan sanksi perdata berupa kewajiban bagi orang tua angkat untuk memperbaiki identitas awal anak angkatnya sebagaimana mestinya;
(3) Setiap orang yang dikenakan sanksi perdata karena telah melanggar pasal 89A ayat (1) dan atau ayat (2) sebagaimana telah disebutkan di atas, jika dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung dari putusan pengadilan dia tidak melaksanakannya maka dapat dikenakan hukuman kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan kewajiban tetap melaksanakan sanksi perdata yaitu mencatatkan

anak angkatnya pada akta kelahiran serta tidak merubah identitas anak angkat.

2. Penambahan Norma Hukum Baru pasal 89B

Masih adanya pengangkatan anak secara ilegal di masyarakat yaitu tidak melalui putusan atau penetapan pengadilan seperti diuraikan pada bab IV dapat berdampak negatif. Faktor penyebabnya adalah karena pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak dikenakan sanksi.

Ketentuan tentang pengangkatan anak harus melalui putusan atau penetapan pengadilan diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 angka 9 yang berbunyi sebagai berikut:

> "Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angkat 9 di atas bahwa diakhir bunyi pasal tersebut ada kata berdasakan putusan atau penetapan pengadilan.

Ketentuan lain yang mengaharus pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 20 ayat (1) berbunyi: "Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan."

Untuk mengatasi masalah ini maka perlu dibuat norma hukum baru yaitu pasal 89B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89B

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 yaitu pengangkatan anak tanpa putusan atau penetapan pengadilan dapat dikenakan sanksi perdata berupa diwajibkan untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan setempat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

(2) Setiap orang yang dikenakan sanksi perdata karena telah melanggar pasal 89B ayat (1) sebagaimana telah disebutkan di atas, jika dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung dari putusan pengadilan dia tidak melaksanakannya maka dapat dikenakan hukuman kurungan paling lama 1 bulan 15 hari dan/atau denda paling banyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan kewajiban tetap melaksanakan sanksi perdata yaitu mengajukan permohonan penetapan anak angkat ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

H. Kesimpulan

Sebagai penutup dari disertasi ini, akhirnya penulis memberikan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum pengangkatan anak di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum berbasis nilai keadilan dengan alasan:
   a. Masih ada ditemukan di masyarakat orang tua angkat yang tidak mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran;
   b. Masih ada orang tua angkat yang merubah identitas anak angkatnya seperti nama orang tua kandung anak angkat diganti dengan nama orang tua angkatnya;
   c. Masih ada pengangkatan anak di masyarakat dilakukan secara ilegal, yaitu pengangkatan anak tidak melalui proses putusan atau penetapan pengadilan. Akibat praktik seperti ini bisa menjadi muara pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, seperti ada orang tua kandung yang mengambil lagi anak yang pernah diberikannya kepada orang lain, ada orang tua angkat yang yang menghalangi orang tua kandung untuk bertemu dengan anaknya, dan lain-lain.
2. Kelemahan hukum pengaturan pengangkatan anak di Indonesia yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2014 adalah sebagai berikut :
   a. Tidak ada sanksi hukum bagi orang tua angkat yang tidak mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran
   b. Tidak ada sanksi hukum bagi orang tua angkat yang merubah atau menghilangkan identitas anak angkatnya.
   c. Tidak ada sanksi hukum bagi warga masyarakat yang pengangkatan anak secara ilegal yaitu pengangkatan anak tidak berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan. Dampak pengangkatan anak secara ilegal ini adalah sering tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, akibat negatif yang pernah terjadi adalah ada orang tua angkat yang mencabuli anak angkatnya, dan ada juga orang tua angkat yang berselingkuh dengan anak angkatnya hingga hamil.
3. Perlu adanya rekonstruksi hukum pengaturan pengangkatan anak di Indonesia agar dapat berbasis nilai keadilan, yaitu:
   a. Penambahan norma hukum baru yaitu pasal 89A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yaitu sanksi bagi orang tua angkat yang tidak mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran dan merubah identitas anak angkatnya. Adapun bunyi pasal 89A adalah sebagai berikut:

Pasal 89A

(1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak mencatatkan dalam akta kelahiran atas anak angkatnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2a) dapat dikenakan sanksi perdata berupa kewajiban mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(2) Setiap orang yang dengan sengaja merubah identitas awal anak angkatnya pada akta kelahiran sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2a) dapat dikenakan sanksi perdata berupa kewajiban bagi orang tua angkat untuk memperbaiki identitas awal anak angkatnya sebagaimana mestinya;
(3) Setiap orang yang dikenakan sanksi perdata karena telah melanggar pasal 89A ayat (1) dan atau ayat (2) sebagaimana telah disebutkan di atas, jika dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung dari putusan pengadilan dia tidak melaksanakannya maka dapat dikenakan hukuman kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan kewajiban tetap melaksanakan sanksi perdata yaitu mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran serta tidak merubah identitas anak angkat.

b. Penambahan norma hukum baru yaitu pasal 89B ayat (1) dan ayat (2) berupa sanksi hukum bagi orang tua angkat yang mengangkat anak tidak melalui putusan atau penetapan pengadilan. Adapun bunyi pasal 89B adalah sebagai berikut:

Pasal 89B

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 yaitu pengangkatan anak tanpa putusan atau penetapan pengadilan dapat dikenakan sanksi perdata berupa diwajibkan untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan setempat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
(2) Setiap orang yang dikenakan sanksi perdata karena telah melanggar pasal 89B ayat (1) sebagaimana telah disebutkan di atas, jika dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung dari putusan pengadilan dia tidak melaksanakannya maka dapat dikenakan hukuman kurungan paling lama 1 bulan 15 hari dan/atau denda paling banyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan kewajiban tetap melaksanakan sanksi perdata yaitu mengajukan permohonan penetapan anak angkat ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

I. Implikasi

Untuk mengakhiri Disertasi ini maka penulis akan menyampaikan implikasi kajian, yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis
   Kepada pemerintah diharapkan adanya pengkajian yang mendalam terhadap aturan tentang pengangkatan anak, mengingat sampai sekarang masih seringnya ditemukan penyimpangan, sehingga dikemudian hari pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia dapat memberikan jaminan keamanan dan dan keadilan terhadap anak angkat.

2. Implikasi Praktis

Implikasi secara praktis adalah perlu adanya rekonstruksi hukum terhadap aturan hukum pengangkatan anak, karena sampai saat ini aturan pengangkatan anak ini sudah ketinggalan dengan perkembangan masyarakat.

a. Rekonstruksi hukum normatif

Sebagaimana diatur dalam undang-undang pengangkatan anak bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak angkat, sehubungan dengan itu maka pelanggaran terhadap aturan pengangkatan anak perlu diatasi agar masalah pengangkatan anak tidak akan terulang lagi.

Salah satu yang perlu mendapatkan perhatian adalah perlunya sanksi terhadap pelanggaran hukum pengangkatan anak, seperti sanksi terhadap pemalsuan identitas anak, dan pengangkatan anak secara ilegal.

b. Rekonstruksi Sosiologis

Pengangkatan anak harus sesuai prosedur hukum yang telah ditetapkan, maksudnya adalah agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum berkaitan dengan jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan Anak dan pelaporan.

Pengangkatan anak jika ditinjau dari aspek perlindungan hak anak diperlukan peningkatan bimbingan dalam kegiatan pengangkatan anak oleh Pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan: penyuluhan, konsultasi, konseling, serta pendampingan. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak memerlukan pengawasan yang efektif oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak dan dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan secara tertulis adanya dugaan penyimpangan dan pelanggaran kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.

J. Saran

Adapun saran-saran dari penulis untuk mengatasi permasalahan pengangkatan anak ini adalah sebagai berikut :

1. Pada jangka waktu yang dekat perlu merivisi undang-undang No.35 Tahun 2014 yaitu penambahan norma hukum baru tentang sanksi yaitu pasal 89A ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 89B ayat (1) dan ayat (2). Pada waktu panjang perlu dibuat dibuat Undang-Undang tentang pengangkatan anak yang khusus karena undang-undang pengangkatan anak yang ada sekarang ini masih terintegrasi dalam undang-undang perlindungan anak dan hanya 3 pasal saja yaitu pasal 39 sampai pasal 41.

2. Perlu diadakaan sosialisasi tentang undang-undang pengangkatan anak, agar masyarakat bisa mengetahui dan diharapkan kedepan tidak ada lagi oang tua angkat yang merubah identitas anak angkat, dan juga tidak ada lagi pengangkatan anak yang secara ilegal. Pada saat ini masih ada warga masyarakat yang tidak memahami undang-undang pengangkatan anak dan prosedurnya.
3. Diharapkan para pembuat Undang-undang dapat dengan jeli melihat kekosongan aturan hukum tentang pengangkatan anak, mengingat lembaga pengangkatan anak ini akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak kearah kemajuan. Sehubungan dengan itu maka hukum pengaturan pengangkatan anak yang sudah ada ini perlu di rekonstruksi.

CURIKULUM VITEI

Nama : ABDUL KHAIR, S.H.,M.H
Tempat, Tgl. Lahir : Pematang Benteng, 1 Desember 1968
Alamat : Jl. Widuri II No.3 RT. 05 RW.06 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, G.Obos XII, Palangka Raya, Kalimantan Tengah Kode Pos 73112, No. HP : 0857 5422 0339
Email : abdul.khair@iain-palangkaraya.ac.id
Pendidikan : 1. S1, Fak. Hukum, STIH SA, Banjarmasin, 1994
2. S2, Fak. Hukum UII Yogyakarta, 2005
3. S3, PDIH, UNISSULA, 2021
Pekerjaan : PNS Pada IAIN Palangka Raya
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Keluarga : Menikah
Nama Isteri : Hilwiah, S.Pd
Anak : 1. Nina Mahmudah
2. Linda Mahfuzah
3. Airin Norwijayanti Azima
Karya Ilmiah :

1. The Muallaf Nurturing Between In Map And Fact
2. Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak
3. Politik Hukum Perburuhan Indonesia
4. Electrik Comerce Ditinjau Dari Hukum Perdata
5. Praktik Jual Beli Barang Kadaluarsa di Kota Palangka Raya
6. Pembinaan dan Pemetaan Muallaf di Kalimantan Tengah
7. Dinamika Penataan Regulasi Penataan Syari‟ah
8. Kemadekan Hak Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya

9. Prinsip-Prinsip Negara Hukum Pada Piagam Madinah dan UUD 1945

Palangka Raya, 11 Desember 2021
Yang Membuat

ABDUL KHAIR

RECONSTRUCTION OF REGULATORY LAW APPOINTMENT OF CHILDREN BASED ON THE VALUE OF JUSTICE

A. Background

According to Law Number 35 of 2014 Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it is stated that adoption can only be carried out in the best interests of the child and is carried out based on local customs and statutory provisions. Adoption of a child does not break the blood relationship between the adopted child and his biological parents. Adoption of a child must also be registered in the birth certificate, without losing the child's initial identity. For more details, see Article 39 paragraph (2a) which reads as follows:

> "The adoption of the child as referred to in paragraph (1) must be registered in the birth certificate, without losing the child's initial identity".

Indeed, adoption has become a community need and is part of the family law system, because it involves the interests of individuals in the family. Therefore, the adoption agency, which has become a community culture, will follow the development of situations and conditions in line with the level of intelligence and the development of the community itself.

Due to the fact that the institution of adoption is part of the law that lives in society, the Dutch East Indies government that was in power at that time tried to make a separate rule regarding the adoption, namely the birth of Staatsblad Number 129 of 1917, which regulates the adoption of children. At first it was only applied specifically to groups of people of Chinese descent, but in its development it turned out that many people had also submitted to the Staatsblad.

In line with the development of time, adoption of children experienced a shift. The adoption of a child was initially primarily intended for the benefit of the person who adopted the child, but for now the issue of adoption is aimed at the benefit of the adopted child. However, in the practice of adopting children, various problems were found, such as adoption without proper procedures, falsification of data, and so on. Thus, to implement the provisions regarding child adoption as regulated in the Child Protection Act, the Government stipulates Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption.

The State and the Government of Indonesia are obliged and responsible for the orderliness of the practice of adopting children, both in terms of administration and legal certainty, so several policies are issued through laws and regulations and jurisprudence that regulate and handle child adoption issues, including: Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 1979 concerning Adoption of Children, Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare, Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning Completion of Circular Letter of the Supreme Court

of the Republic of Indonesia Number 2 of 1979, Circular Letter of the Chief Justice of the Supreme Court RI Number 4 of 1989 concerning Child Adoption, several articles in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Circular Letter of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2005 concerning Child Adoption. To implement the provisions regarding child adoption in Articles 39 to 41 of Law Number 23 of 2002, the government issued Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption.

With the enactment of this Government Regulation, it is intended that child adoption be carried out in accordance with statutory regulations so that irregularities that occur in society in the implementation of child adoption can be prevented, such as adoption of children without proper procedures, falsification of data, and so on. Prevention of this deviation can ultimately protect and improve the welfare of the child, for the sake of the future and the best interest of the child. However, in reality, in Palangka Raya and other cities, there are still various problems in the practice of adopting children, both in terms of procedures, data, legality and legitimacy, conflicts of interest, as well as legal consequences in adopting children, both for the child himself and for others. who raised the child.

One example is when the author's initial observations in the city of Palangka Raya, the author found several problems regarding the adoption of this child, namely:

First, there are community members who adopt other people's children and adopt them from birth then when making a birth certificate the adopted child is not recorded on the birth certificate. In addition, the birth certificate also includes the names of the parents who adopted it. This practice includes changing the original identity of the adopted child and is contrary to the adoption law.

Second, there are still found illegal adoptions, namely the adoption of children not through a court order. This illegal adoption is the first step that can lead to other deviations related to child adoption.

Third, there is a married couple who have been married for a long time but do not have children, finally he asks the child to be adopted as an adopted child with the aim of provoking him so that he can have children. However, after she was able to get pregnant and have a biological child, the provoked child who had been adopted as a child was ignored. Adopted children are abused, such as when they buy clothes for their biological children to buy better types, while adopted children are bought from cheap ones, as well as other things.

Fourth, a married couple who have many children and whose economy is below the poverty line so that it is difficult to finance their children, as a result, their children are given to other people in the hope that their children can live

properly and be protected. But later on, after his economy improved and he wanted to take back the child he had given him, problems arose.

Fifth, a married couple who gave their child to someone else once missed their child and wanted to meet him, but his adoptive parents prevented or did not provide access to meet the biological parents with their child.

The various problems above can occur because the legal rules regarding child adoption are no longer able to bridge them because they are no longer in accordance with current developments in Indonesia. Therefore, the rule of law regarding the adoption of this child needs to be reconstructed so that there are no problems in the future. So moving on from this, the researcher seeks to examine the problem with the title: RECONSTRUCTION OF REGULATORY LAW APPOINTMENT OF CHILDREN BASED ON THE VALUE OF JUSTICE.

B. Problem Formulation

The formulation of the problem in this dissertation research and in accordance with the background of the problems mentioned above are as follows:

1. Why is the regulation on child adoption in Indonesia not based on the value of justice?
2. What are the weaknesses of the legal regulation of child adoption in Indonesia?
3. How is the legal reconstruction of child adoption arrangements in Indonesia so that it is based on the value of justice.

C. Research Method

The research methods used in this study are as follows:

1. Research Type

This type of research is a normative legal research, because it examines the norms or laws and regulations related to child adoption. For data collection in normative legal research, it is carried out by means of library research in the form of secondary data as a basic material to be researched by conducting a search on regulations and other literature related to the problems studied or often referred to as library law research.

2. Nature of Research

The nature of the research that the author uses in this study is a comprehensive analytical research that seeks to describe the regulations currently in force which are also called positive law and are then linked to legal theories.

3. Research Approach

This study uses 4 (four) approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach, the comparative approach, and the case approach.

4. Data Source

a. Primary Legal Materials.

The primary legal materials in this research are:

12) 1945 Constitution
13) Civil Code
14) Staatsblad 1917 Number 129 concerning Adoption of Children for the Chinese Group
15) Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection
16) Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts
17) Kep. Minister of Social Affairs RI No: 110/Huk/2009 concerning Requirements for Adoption of Children
18) RI Presidential Decree No. 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration
19) Decree of the Minister of Home Affairs Number 54 of 1999 concerning Guidelines for the Implementation of Population Registration
20) Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Population Administration
21) Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 6 of 1983 concerning Examination of Applications for Adoption of Children
22) MUI Fatwa No. U-335/MUI/VI/1982 dated June 10, 1982, concerning Adopted Children.

b. Secondary Legal Material

What is meant by secondary legal materials are those that provide explanations for primary legal materials. Secondary legal materials can be in the form of law books, related legal journals, scientific papers related to law, legal works of leading experts (Pakar).

c. Terser Legal Material

Furthermore, tertiary legal materials are materials that provide instructions or explanations for primary and secondary laws, for example dictionaries, encyclopedias, cumulative indexes and so on.

5. Data Collection Techniques

The data collection techniques in this study are as follows:

a. Document Study (Library Study)

The technique of collecting legal materials focuses on literature study by tracking all complete documents of laws and regulations related to the

research theme. The conceptual approach or conceptual approach that is more essential is to search for legal books (treaties) which contain many legal concepts, which are related to legal issues in the practice of adopting children.

b. Interview

Interview or interview is a technique in which data is collected through conversational techniques with the aim of obtaining data or information from the results of interviews to obtain qualitative data. The data was obtained from the Child Protection Commission, Religious Courts, District Courts, and the Population and Civil Registry Office (Disdukcapil) of Palangka Raya City. The factors that influence the use of interviews as a data collection tool are as follows: (1). Interviewer quality (2). Quality of the interviewees (3). The nature of the problem under study.

7. Data Analysis

The collected legal materials were analyzed using a qualitative descriptive method. Qualitative means measuring and testing data with theoretical concepts and laws and regulations. Where, with this method is expected to obtain a clear picture of the subject matter. In this study, the authors conducted an analysis of the Legal Reconstruction for Adoption of Children Based on Justice Values.

D. Theoretical Framework

1. Islamic Justice Theory as Grand Theory

This theory dissects that the prohibition of adoption is what ends the adopted child's relationship with his biological parents. It is also a prohibition to impose an adopted child with his adoptive parents. As regulated in Surah Al Ahzab verse 5.

2. Legal Protection Theory as Middle Theory

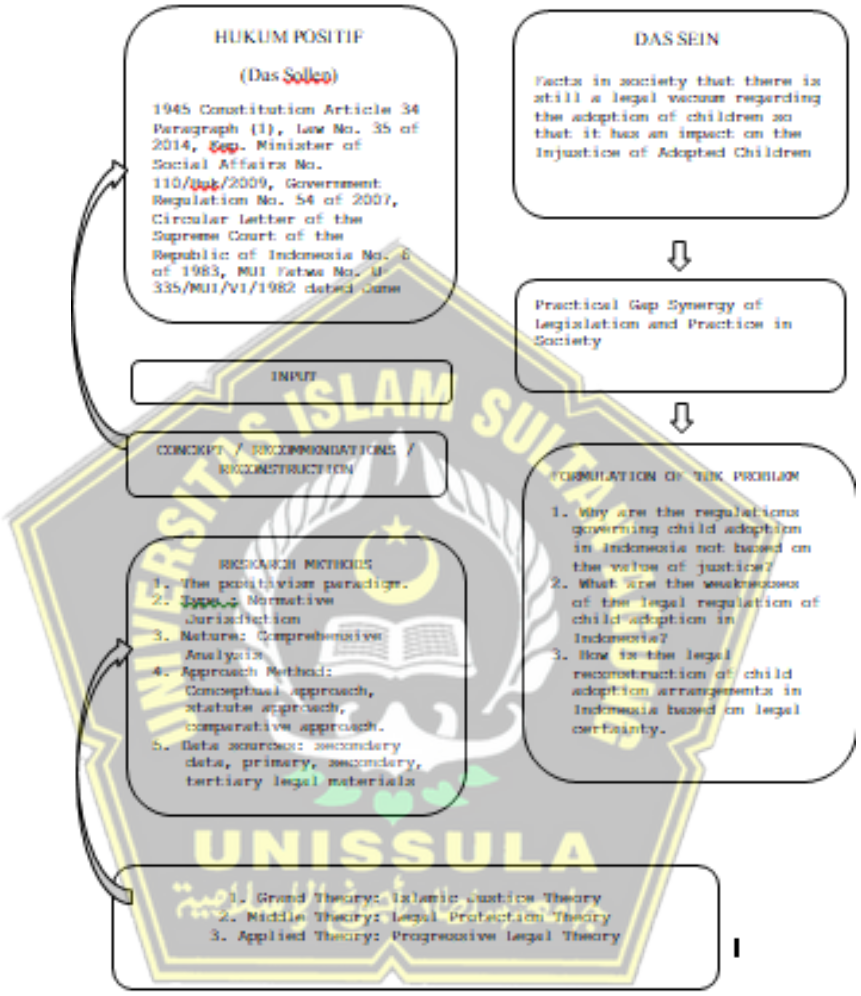
This theory examines that the purpose of adoption is for the benefit of the adopted child and must be able to guarantee security and justice for the adopted child.

3. Progressive Legal Theory as Applied Theory

This theory is to dissect that so far there are still many people who do not know the Child Adoption Law and do not understand the procedure for adopting children, therefore the government and judges must actively provide enlightenment to the public about the procedure for adopting children in accordance with applicable legal regulations.

E. Framework of Thought

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN II



F. Unfair Adoption Regulations

Based on the author's research that the regulation of adoption in Indonesia is not fair, for the following reasons:

a) There are still adoptive parents who do not register their adopted child on the birth certificate

In Law Number 34 of 2014 concerning Child Protection Article 39 paragraph 2a, which reads: "The adoption of the child as referred to in

paragraph (1) must be registered in the birth certificate, without losing the child's initial identity".

Based on this provision, the adopted child must be recorded on the birth certificate which is called a marginal note. With a marginal note, the adopted child will know that he is an adopted child, as well as people who see the deed will immediately know that the person involved is an adopted child.

Based on the explanation of Mr. Lukmanul Hakim, that so far there have been no members of the public who have submitted an application to register their adopted child with the Population and Civil Registry Office of the City of Palangka Raya. For citizens who carry out the adoption of a child, it should be recorded on the birth certificate, as one of the conditions is that there must be a decision from the court on the adoption of the child.

b) There are still adoptive parents who change the identity of the adopted child

In Law Number 34 of 2014 concerning Child Protection Article 39 paragraph 2a, which reads: "The adoption of the child as referred to in paragraph (1) must be registered in the birth certificate, without losing the child's initial identity".

It is a fact in society that not a few married couples adopt a new born child, then when making the birth certificate of the adopted child, the name of the adoptive child's parents is included in the name of the parent who adopted him as if the child was like his own biological child.

Based on the results of an interview with Mrs. Helwina, that the practice of changing the identity of an adopted child occurs because there is no legal sanction in the law for changing the identity of an adopted child. Furthermore, Mrs. Helwina explained that currently there is still a legal vacuum, namely the absence of sanctions in Law Number 34 of 2014 for changing the identity of adopted children.

The provisions of article 39 paragraph 2a are very good and are in line with both positive law and Islamic law, but this article does not violate any provisions for sanctions in the law, as a result of the adoption of adoptive parents' children, their names are often included on the birth certificates of their adopted children's birth certificates.

In Islamic law, the Messenger of Allah forbade any acts of deception, including changing the identity of an adopted child, as stated in his hadith as follows:

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ ٱلْأَسْقَعِ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ:

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَي غَيْرِ أَبِيْهِ، أَوْيُرِى عَيْنَهُ مَالَمْ تَرَ،أَوْيَقُوْلُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَالَمْ يَقُلْ

Meaning: "Narrated from Watsilah bin Asqo 'said, Rasulullah saw. said: "Indeed, among the biggest lies is that a person confesses to someone other than his father, admits that his eyes see what he does not see, and speaks profaning the name of the Messenger of Allah. what he didn't say.

Islamic law also prohibits children from depending on lineage other than their own parents. Rasulullah saw. said:

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوِانْتَمَى إِلَى غَيْرِمَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Meaning: "Whoever claims to be a father to other than his own father and has intimacy with someone other than his master, the curse of Allah will continue to follow him until the Day of Resurrection."

In the explanation above, it can be seen that the adoption of a child which is carried out by severing the nasab relationship of the adopted child with his biological parents and giving him the status of a biological child, is clearly forbidden and is not justified by Islam.

c) There are still illegal adoptions

There is an article that requires that the adoption of a child must go through a court order, this is contained in law number 35 of 2014 concerning Child Protection, article 1 number 9 which reads:

"Adopted Child is a Child whose rights are transferred from the sphere of authority of the Parental Family, legal guardian, or other person who is responsible for the care, education, and rearing of the Child into the family environment of the adoptive Parent based on a court decision or determination."

Article 1 paragraph 9 states that at the end of the sentence it is clearly written based on a court decision or decision.

Based on the results of the author's research at the Palangka Raya District Court from 2015 to 2019 no one submitted an application for adoption, as shown below:

Table 4
Case Data Entered at the Palangka Raya District Court

NO	YEAR	ENTRY THINGS	APPLICATION FOR APPOINTMENT OF CHILDREN	TOTAL
1	2015	691	-	691
2	2016	313	-	313
3	2017	853	-	853
4	2018	856	-	856
5	2019	992	-	992
	JUMLAH	3.705	-	3.705

Data Source: Palangka Raya District Court Annual Report

Likewise, the application for adoption at the Palangka Raya Religious Court can be seen in the following table:

Table 5
Case Data Entered at the Palangka Raya Religious Court

NO	YEAR	ENTRY THINGS	APPLICATION FOR APPOINTMENT OF CHILDREN	TOTAL
1	2013	539	1	540
2	2014	614	-	614
3	2015	598	-	598
4	2016	640	-	640
5	2017	583	-	583
6	2018	625	-	625
7	2019	701	-	701
	JUMLAH	4.300	1	4.301

Source: Palangka Raya Religious Court Annual Report

From the table above, for 7 years there were 4,301 cases that came in, but only 1 application for adoption.

The explanation from the judge, Ms. Zuraidah, was that the community was reluctant to submit an application for adoption to the court because one of the requirements was a visit from social workers to the prospective adoptive parents' house. Furthermore, Mrs. Helwina explained that the purpose of this social worker at the home of prospective adoptive parents (COTA) is to ensure:

a) COTA house condition

b) COTA's economic capability;
c) COTA skills.

This survey from social workers takes 6 to 12 months because to ensure that the adopted child will be truly protected and the purpose of adopting the child is achieved in accordance with what is regulated by law. This lengthy survey of social workers has made the community members reluctant to apply for adoption to the court.

G. Legal Reconstruction of Child Adoption Regulations Act No. 35 of 2014

1. Addition of new legal norms article 89A

Based on the facts as described in the previous chapter that the legislation on child adoption is Law Number 35 of 2014 an amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. The adoption of children is regulated in articles 39 to 41.

This law already includes provisions regarding sanctions, namely from articles 77 to 89 but it is not complete because there are no sanctions for violations of articles 39 to 41 so that the opportunity for violations to occur can still occur. For example, it can be seen in Article 39 paragraph (2a) which reads as follows:

"The adoption of the child as referred to in paragraph (1) must be registered in the birth certificate, without losing the child's initial identity".

Violation of the above article has no sanctions, so that not a few adopted children have their identities changed, such as on the birth certificates of adopted children the names of the adopting parents are included. To overcome this problem, the author gives the opinion that this law needs to be reconstructed, namely by adding a new legal norm, namely the article on sanctions. The article that the author proposes is article 89 A, namely:

Article 89A

(1) Anyone who intentionally does not register his adopted child in the birth certificate as referred to in Article 39 paragraph (2a) may be subject to civil sanctions in the form of an obligation to register his adopted child on the birth certificate in accordance with the provisions of the legislation;
(2) Anyone who intentionally changes the initial identity of his adopted child on the birth certificate as regulated in Article 39 paragraph (2a) may be subject to civil sanctions in the form of an obligation for adoptive parents to correct the initial identity of his adopted child as appropriate;

(3) Any person who is subject to a civil sanction for violating Article 89A paragraph (1) and or paragraph (2) as mentioned above, if within 1 (one) year from the court's decision he does not implement it, he may be subject to imprisonment. a maximum of 1 month and/or a maximum fine of Rp. 3,000,000 (three million rupiah), with the obligation to continue to carry out civil sanctions, namely registering the adopted child on the birth certificate and not changing the identity of the adopted child.

2. Addition of new legal norms article 89B

The existence of illegal adoptions in the community that is not through a court decision or decision as described in chapter IV can have a negative impact. The contributing factor is that violations of this provision are not subject to sanctions.

Provisions regarding child adoption must go through a court decision or decision regulated by Law Number 35 of 2014 article 1 number 9 which reads as follows:

> "Adopted Child is a Child whose rights are transferred from the sphere of authority of the Parental Family, legal guardian, or other person who is responsible for the care, education, and rearing of the child into the family environment of the adoptive Parent based on a court decision or stipulation."

Based on the provisions of Article 1 point 9 above that at the end of the sound of the article there is a word based on a court decision or decision.

Another provision that requires the adoption of a child through a court order is the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption, article 20 paragraph (1) which reads: "Applications for adoption that have met the requirements are submitted to the court to obtain a court order."

To overcome this problem, it is necessary to create a new legal norm, namely Article 89B which reads as follows:

Article 89B

(1) Anyone who intentionally violates the provisions as referred to in Article 1 point 9, namely the adoption of a child without a court decision or decision may be subject to civil sanctions in the form of being obliged to file an application for adoption at the local Court in accordance with the provisions of the applicable law;
(2) Any person who is subject to a civil sanction for violating Article 89B paragraph (1) as mentioned above, if within 1 (one) year from the court's decision he does not implement it, he may be subject to a maximum imprisonment of 1 month and 15 days. and/or a maximum fine of IDR

4,000,000 (four million rupiah), with the obligation to continue to carry out civil sanctions, namely submitting an application for the determination of an adopted child to the Court in accordance with the provisions of the applicable law.

H. Conclusion

In closing this dissertation, the writer finally concludes as follows:

1. The legal regulation of adoption in Indonesia, namely Law Number 35 of 2014 amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection has not been based on the value of justice for the following reasons:
   a. There are still people who adopt adoptive parents who do not register their adopted child on the birth certificate;
   b. There are still adoptive parents who change the identity of their adopted child, such as the name of the adoptive child's biological parents being replaced with the name of the adoptive parent;
   c. There are still adoptions in the community that are carried out illegally, namely the adoption of children does not go through a decision process or court order. As a result of this practice, it can lead to other violations of law, such as biological parents taking back a child they once gave to someone else, adopting parents preventing biological parents from meeting their child, and so on.

2. Weaknesses in the legal regulation of child adoption in Indonesia, namely law number 35 of 2014 are as follows:
   a. There are no legal sanctions for adoptive parents who do not register their adopted child on the birth certificate
   b. There are no legal sanctions for adoptive parents who change or eliminate the identity of their adopted child.
   c. There are no legal sanctions for members of the public who adopt children illegally, namely the adoption of children not based on court decisions or decisions. The impact of illegal adoption of children is that they often do not meet the requirements that have been set, the negative result that has happened is that there are adoptive parents who molested their adopted children, and there are also adoptive parents who have an affair with their adopted child until they become pregnant.
3. There is a need for a legal reconstruction of child adoption arrangements in Indonesia so that it can be based on the value of justice, namely:

   a. The addition of new legal norms, namely Article 89A paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3), namely sanctions for adoptive parents who do not register their adopted child on the birth certificate and change the identity of the adopted child. Article 89A reads as follows:

Article 89A

(1) Anyone who intentionally does not register his adopted child in the birth certificate as referred to in Article 39 paragraph (2a) may be subject to civil sanctions in the form of an obligation to register his adopted child on the birth certificate in accordance with the provisions of the legislation;

(2) Anyone who intentionally changes the initial identity of his adopted child on the birth certificate as regulated in Article 39 paragraph (2a) may be subject to civil sanctions in the form of an obligation for adoptive parents to correct the initial identity of his adopted child as appropriate;

(3) Anyone who is subject to a civil sanction because he has violated Article 89A paragraph (1) and or paragraph (2) as mentioned above, if within 1 (one) year from the court's decision he does not implement it, he may be subject to imprisonment. a maximum of 1 month and/or a maximum fine of Rp. 3,000,000 (three million rupiah), with the obligation to continue to carry out civil sanctions, namely registering the adopted child on the birth certificate and not changing the identity of the adopted child.

b. The addition of new legal norms, namely Article 89B paragraph (1) and paragraph (2) in the form of legal sanctions for adoptive parents who adopt a child not through a court decision or determination. Article 89B reads as follows:

Article 89B

(1) Anyone who intentionally violates the provisions as referred to in Article 1 point 9, namely the adoption of a child without a court decision or decision may be subject to civil sanctions in the form of being obliged to file an application for adoption at the local Court in accordance with the provisions of the applicable law;

(2) Any person who is subject to a civil sanction for violating Article 89B paragraph (1) as mentioned above, if within 1 (one) year from the court's decision he does not implement it, he may be subject to a maximum imprisonment of 1 month and 15 days. and/or a maximum fine of IDR 4,000,000 (four million rupiah), with the obligation to continue to carry out civil sanctions, namely submitting an application for the determination of an adopted child to the Court in accordance with the provisions of the applicable law.

I. Implication

To end this dissertation, the author will convey the implications of the study, which are as follows:

1. Theoretical Implications

It is hoped that the government will conduct an in-depth study of the rules regarding child adoption, considering that until now irregularities are still often found, so that in the future the adoption of children carried out by the community in Indonesia can provide guarantees.

2. Practical Implications

The practical implication is that there is a need for a legal reconstruction of the legal rules for adopting children, because until now these rules for adopting children have been left behind with the development of society.

a. Reconstruction of normative law

As stipulated in the adoption law that the purpose of adopting a child is in the best interest of the adopted child, in connection with this, violations of the rules for adopting a child need to be addressed so that the issue of adoption will not be repeated.

One thing that needs attention is the need for sanctions against violations of the adoption law, such as sanctions against falsifying the identity of children and illegal adoption.

b. Sociological Reconstruction

The adoption of a child must be in accordance with established legal procedures, meaning that the implementation is in accordance with the legal provisions relating to the type of adoption, the requirements for child adoption, procedures for child adoption, guidance in the implementation of child adoption, supervision of the implementation of child adoption and reporting.

Adoption of children when viewed from the aspect of protecting children's rights, it is necessary to increase guidance in child adoption activities by the Government and the community through activities: counseling, consultation, counseling, and mentoring. So that the public gets correct information and understands the requirements, procedures and procedures for implementing child adoption.

Adoption of children requires effective supervision by the government and the community to prevent deviations or violations in the adoption of children and in the event or suspicion of deviations or violations of the implementation of child adoption, the public can submit a written complaint of alleged irregularities and violations to the enforcement officers. law and/or the Indonesian Child Protection Commission, local social agencies or the Minister.

J. Suggestion

The suggestions from the author to overcome the problem of child adoption are as follows:

1. In the near term, it is necessary to revise Law No. 35 of 2014 namely the addition of new legal norms regarding sanctions, namely Article 89A paragraphs (1), (2) and (3) as well as Article 89B paragraph (1) and paragraph (2). In the long term, it is necessary to make a special law on child adoption because the current adoption law is still integrated into the child protection law and only has 3 articles, namely articles 39 to 41.
2. There needs to be socialization about the law on adoption, so that the public can know and it is hoped that in the future there will be no more adoptive parents who change the identity of adopted children, and also no more illegal adoptions. At this time there are still community members who do not understand the adoption law and its procedures.
3. It is hoped that the legislators will be able to clearly see the void of legal rules regarding child adoption, considering that this child adoption institution will always follow the development of the community itself, which continues to move towards progress. In this regard, the existing regulation on child adoption needs to be reconstructed.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

CURIKULUM VITEI

Name : ABDUL KHAIR, S.H., M.H
Place, Date. Born : Pematang Benteng, December 1, 1968
Address : Jl. Widuri II No. 3 RT. 05 RW.06 Ex. Menteng district. Jekan Raya, G. Obos XII, Palangka Raya, Central Kalimantan Postal Code 73112, No. HP : 0857 5422 0339
Email : abdul.khair@iain-palangkaraya.ac.id
Education : 1. S1, Fak. Law, STIH SA, Banjarmasin, 1994
2. S2, Fak. UII Yogyakarta Law, 2005
3. S3, PDIH, UNISSULA, 2021
Occupation : Civil Servant at IAIN Palangka Raya
Gender : Male
Religion : Islam
Islam
Status : Married
Family
Wife's Name : Hilwiah, S.Pd
Children : 1. Nina Maheasy
2. Linda Mahfuzah
3. Airin Norwijayanti Azima
Scientific work :

1. The Muallaf Nurturing Between In Map And Fact
2. Critical Analysis of Wahbah Az-Zuhaili's Thoughts on the Determination of Divorce
3. Indonesian Labor Law Politics
4. Electric Commercial Viewed from Civil Law
5. The Practice of Buying and Selling Expired Goods in Palangka Raya City
6. Guidance and Mapping of Converts in Central Kalimantan
7. Dynamics of Shari'ah Structuring Regulations
8. The Perpetuation of the Palangka Raya City DPRD's Initiative Rights
9. Principles of the rule of law in the Medina Charter and the 1945 Constitution

Palangka Raya, 11 December 2021
What makes



Abdul Khair

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul ……...……... i

Lembar Pengesahan iii

Lembar Pernyataan iv

Motto v

Persembahan vi

Kata Pengantar vii

Abstrak xi

Abstract xii

Ringkasan (Bahasa Indonesia) xiii

Ringkasan (Bahasa Inggeris) xxix

Daftar Isi ……..…….…….... xlv

Daftar Skema lii

Daftar Tabel liii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……...…….. 1

B. Rumusan Masalah ……...……..……. 10

C. Tujuan Penelitian ……..…..…..……. 10

D. Kegunaan Penelitian ……..……..... 11

1. Keguanaan Secara Teorites ……....…..... 11

2. Kegunaan Secara Praktis ……....……... 12

E. Kerangka Konsep ……...……...…..…… 12

1. Rekonstruksi ……..…..…….. 12

2. Anak Angkat ……..……...……..….. 14

a. Pengertian Anak Angkat ……..……..……. 14

b. Macam-Macam Anak ……...……..……. 19

c. Prinsip dan Tujuan Anak Angkat……...……..…… 22

3. Persyaratan Calon Anak Angkat (CAA)……...……..…..…….. 23

4. Persyaratan Calon Orang Tua Angkat……..…..…….. 24
5. Pengangkatan Anak Secara Langsung……..……..…….. 26
6. Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Pengasuhan Anak …..…… 30
7. Nilai Keadilan ……..…..…….....……..… 36
a. Keadilan dalam Persfektif Hukum Positif…….…...…… 36
b. Konsep Keadilan dalam Persfektif Hukum Islam……...…… 40
c. Konsep Keadilan dalam Persfektif Para Filosof …….....……. 44
d. Konsep Keadilan Menurut Persfektif Zaman Modern……...……. 47
F. Kerangka Teori ……..…….. 53
2. Teori Keadilan Islam sebagai Grand Theory / Teori Utama ….....…. 54
3. Teori Perlindungan Hukum sebagai Middle Theory/Teori Menengah..... 56
4. Teori Hukum Progresif sebagai Applied Theory ….....…… 58
G. Kerangka Pemikiran ……..…….. 61
H. Metode Penelitian ……..…….. 63
1. Paradigma Penelitian ……..……..…… 64
2. Jenis Penelitian ……..…….. 66
3. Sifat Penelitian ……..…….... 68
4. Pendekatan Penelitian ……..…….....…….... 69
a. Pendekatan Konseptual ……..……...…. 70
b. Pendekatan Perundang-Undangan ……..……..… 71
c. Pendekatan Perbandingan ……..……..……. 72
d. Pendekatan Kasus 73
5. Sumber Data ……..……..……...……. 74
6. Teknik Pengumpulan Data …..……..……...……. 76
7. Analisis Data ……..……...…….…. 78
I. Sistematika Penulisan ……..……...… 78
J. Orisinalitas Penelitian ……...……..... 81

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Pengangkatan Anak ……..…...……. 85
1. Sejarah Pengangkatan Anak di Indonesia……...……... 85

2. Sejarah Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam……..…...……. 89
B. Pengangkatan Anak Dalam Persfektif Hukum Islam 94
C. Adopsi sebagai Lembaga Hukum …….…….……..……..…. 97
D. Kedudukan Anak Angkat ……...……... 101
1. Kedudukan Anak Angkat Menurut Burgerlik Wetbook (BW) …..……. 101
2. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Adat……...……..….. 106
3. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam ……...…… 112
E. Latar Belakang Pengangkatan Anak……....……..... 114
F. Hak dan Kewajiban Anak Angkat……..…...…….. 126
1. Hak Hak Anak Angkat ……..……...…...… 127
2. Kewajiban Anak Angkat ……..…...……. 129
G. Pencatatan Anak Angkat dalam Catatan Sipil ……...……..….. 130
H. Akibat hukum pengangkatan anak ……..…...… 135
1. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Staatblad 1927 Nomor 129 136
2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak …….……..…..... 139
3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat …….……... 140
4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam ……... 142
I. Pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan…….…..... 147

BAB III : PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK BELUM BERKEADILAN

A. Dasar Hukum Pengangkatan Anak …….……...……...…. 153
B. Perkembangan Aturan Pengangkatan Anak di Indonesia …….……....… 165
C. Prosedur Pengangkatan Anak di Indonesia ……. …..…... 170
1. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Staatsblad 1917 Nomor 129…..... 171
2. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak……..... 172
3. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak……...… 174

D. Prosedur Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan……..… 177
E. Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) Oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia ……..….. 179

BAB IV: KELEMAHAN HUKUM PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA

A. Penegakan Hukum di Indonesia……..……...……. 192
1. Kebijakan Penegakan Hukum ……..……...……. 195
2. Problematika Penegakan Hukum di Indonesia……..……...…… 198
3. Dampak Penegakan Hukum di Indonesia ……..……...……. 213
4. Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia..... 216
B. Kelemahan Peraturan Perundangan Pengangkatan Anak ……....…….. 217
1. Staatblaads No.129 Tahun 1917 ……...……. 217
a. Pasal-Pasal Terkait Pengangkatan Anak 217
b. Kelemahan Staatblaads No.129 Tahun 1917 ……..……...… 218
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak…..... 219
a. Gambaran Umum Pasal-Pasal UU No.35 Tahun 2014 ……..…..…. 220
b. Kelemahan Undamg-Undang No.35 Tahun 2014……..…..….. 233
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama..... 242
a. Gambaran Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 242
b. Kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ……....….. 244
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak …….…..... 245
a. Gambaran Pasal-pasal Permensos RI No.110/Huk/2009……....…… 245
b. Kelemahan Permensos RI No.110/Huk/2009 ……....…… 250
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak…….....……. 252
a. Gambaran Pasal-Pasal PP No.54 Tahun 2007 ……...… 253
b. Kelemahan PP No.54 Tahun 2007…….…..….. 260

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil…..... 262
a. Gambaran Umum Perpres RI No.6 Tahun 2018 ……...…..… 263
b. Kelemahan Perpres RI No. 96 Tahun 2018 ……...……...…..…. 284
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk……...…..… 285
a. Gambaran Pasal-Pasal Permendagri No.54 Tahun 1999 ……...…… 285
b. Kelemahan Permendagri No.54 Tahun 1999 ……...……. 294
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No.2 Tahun 1979 yang mengatur tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak 295
a. Dasar lahirnya SEMA No.6 Tahun 1983 ……...….. 295
b. Isi SEMA No.6 Tahun 1983 ……...…….. 296
c. Kelemahan SEMA No.6 Tahun 1983 ……...……. 313
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor U-335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982, tentang Anak Angkat……...…… 314
a. Isi Fatwa MUI Nomor U-335/MUI/VI/1982 ……...…….. 314
b. Kelemahan Fatwa MUI Nomor U-335/MUI/VI/1982 ……...…… 315
C. Ketidakadilan Regulasi Pengangkatan Anak ……...……. 316
1. Masih ada orang tua angkat yang tidak mencatatkan Anak Angkat pada Akta Kelahiran 316
2. Masih Ada Orang Tua Angkat Yang Mengganti Identitas Anak Angkat..... 317
3. Masih ada Pengangkatan Anak Secara Elegal 320

BAB V: REKONTRUKSI HUKUM PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Prosedur Pengangkatan Anak di Beberapa Negara Tetangga……...…..… 328
1. Negara Malaysia ……...……. 328
a. Pengangkatan Anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

Taiping……..…….. 329
b. Prosedur Pengangkatan Anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat…....….. 330
c. Perlindungan Anak Menurut Akta Kanak-kanak 2001…….....….... 334
2. Negara Singapura ……..……....…. 336
a. Latar Belakang Pengangkatan Anak di Singapura……..…....……. 336
b. Persyaratan Pengangkatan Anak di Singapura…….....……. 337
c. Permohonan laporan studi……..…..…....…... 339
d. Adopsi anak kedua dan selanjutnya……..... 340
e. Cara mengadopsi anak di Singapura……...…..…. 341
3. Negara Thailand ……..…….... 346
a. Persyaratan Pengangkatan Anak di Thailand…….…….... 346
b. Prosedur Pengangkatan Anak di Thailand…….…….... 347
B. Perbandingan Regulasi Pengangkatan Anak Negara Indonesia dan Negara Tetangga 350
1. Perbandingan Pengangkatan Anak Negara Indonesia dan Malaysia 351
a. Persamaan 351
b. Perbedaan 351
2. **Perbandingan Pengangkatan Anak Negara Indonesia dan** Singapura...
a. Persamaan 353
b. Perbedaan 354
3. Perbandingan Pengangkatan Anak Negara Indonesia dan Thailand.. 355
a. Persamaan 355
b. Perbedaan 355
4. Regulasi yang perlu diadopsi dari negara tetangga 356
C. Beberapa Putusan Pengadilan Berkaitan dengan Permohonan Pengangkatan Anak ……..... 356
1. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Nomor 274/Pdt.P/2019/ PA.Pdn……...…… 357
2. Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0067/Pdt.P/2017/PA.Kds…....… 369
3. Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 889/Pdt.P/2012/PN-Sbg…....… 380

D. Rekonstruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak…..…....….....… 388
1. Penambahan Norma Hukum Baru pasal 89A UU No. 35 Tahun 2014..... 388
2. Penambahan Norma Hukum Baru pasal 89B UU No. 35 Tahun 2014..... 393

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan ……...……...….. 399
B. Saran-Saran……..…….....….... 401
C. Implikasi Kajian …….……..... 402
Daftar Pustaka…….……..... 405
Glosarium 415

Lampiran-Lampiran

1. Curikulum Vitei 417
2. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari KPA RI 418

DAFTAR SKEMA

Halaman

Skema 1 : Skema Kerangka Pikir I 62

Skema 2 : Skema Kerangka Pikir II 63

Skema 3 : Proses Pengangkatan Anak WNI 177

Skema 4 : Proses Pengangkatan Anak WNA 177

Skema 5 : Proses Pengangkatan Anak WNI oleh WNA di Indonesia 183

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Daftar Alamat Yayasan Sayap Ibu ……..……. 30

Tabel 2 : Orisinalitas Penelitian …….……. 81

Tabel 3 : Komponen Standar Pelayanan Pencatatan Anak ….....…. 134

Tabel 4 : Data Perkara Yang Masuk Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya …….....…… 324

Tabel 5 : Data Perkara Yang Masuk Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya …….....…… 324

Tabel 6 : Rekonstruksi Berupa Penambahan Hukum Baru pasal 89A ayat Ayat (1), (2) dan (3) 390

Tabel 7 : Rekonstruksi Berupa Penambahan Hukum Baru Pasal 89B Ayat (1) dan (2) 396

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harapan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami, namun kadang-kadang naluri ini terbentur oleh takdir ilahi dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun di usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka harapan untuk memiliki anak tidak akan terpenuhi, sehingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka mereka mengambil jalan dengan pengangkatan anak.[1] Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.[2] Masyarakat mengenal pengangkatan anak dengan istilah adopsi.[3]

Anak yang dijadikan anak angkat ini biasanya anak dari keluarga yang tidak mampu untuk memeliharanya terutama dari segi memenuhi kebutuhan hidupnya dan pendidikan, atau bisa juga anak terlantar seperti anak yang dibuang oleh orang tuanya.

---

[1] Berbagai usaha dilakukan oleh setiap pasangan suami isteri untuk memperoleh anak, baik melalui teknologi yang paling mutakhir seperti bayi tabung yang tentunya menguras begitu banyak biaya tetapi ada pula cara praktis yang paling sering digunakan adalah pengangkatan anak atau dikenal dengan adopsi, beragam motivasi yang dimiliki oleh setiap pasangan suami isteri misalnya untuk melanjutkan keturunan tetapi ada pula sebagai "pancingan" bagi hadirnya seorang anak kandung. Pengetahuan masyarakat awam yang masih kurang mengenai prosedur adopsi yang benar seringkali menyebabkan status anak adopsi tidak sah di hadapan hukum. Lihat Dessy Balaati, *"Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia",* Jurnal Lex Privatum, Vol. 1, No. 1, Januari-Maret 2013, hal. 138.

[2] Pasal 1 Butir (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

[3] Adopsi dari segi etimologi yaitu asal usul, kata pengangkatan anak berasal dari bahasa Belanda *"Adoptie"* atau "adoption" (bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak.

Padahal hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan perlindungan terhadap hak anak yang secara eksplisit termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat (1) yang berbunyi "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Agar hidupnya sejahtera maka seorang anak hendaknya tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Namun tidak sedikit anak-anak yang diterlantarkan karena beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi seperti kemiskinan. Orang tua yang merasa tidak sanggup untuk memenuhi hak-hak anaknya rela menyerahkan anak kandungnya ke panti asuhan bahkan ada yang tega menterlantarkan anaknya. Disisi lain, ada keluarga mampu yang sangat mengharapkan kedatangan seorang anak. Namun apa daya Tuhan berkehendak lain dengan tidak memberikan keluarga tersebut keturunan. Sehingga untuk mendapatkan keturunan, mereka dapat melakukan pengangkatan anak.

Selanjutnya pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada Pasal 34 (1) berbunyi sebagai berikut: "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara".[4] Berdasarkan bunyi pasal ini bahwa anak-anak terlantar harus dipelihara oleh negara. Namun pada kenyataannya kemampuan pemerintah Indonesia masih sangat terbatas sehingga belum sepenuhnya dapat melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar ini.

[4] Pasal 34 ayat UUD 1945 Amandemen ke 4

Untuk mengatasi masalah ini secara sosiologis masyarakat ikut berpartisipasi, misalnya keluarga mampu ada yang mengadopsi anak yang diambil dari anak terlantar karena orang tua kandungnya tidak dapat membiayainya secara layak. Misalnya ada kejadian di kota Palangka Raya sepasang suami isteri yang sudah lama menikah namun tidak mempunyai anak, akhirnya mengadopsi anak dari seorang perempuan yang merasa tidak mampu untuk merawat anaknya akibat ditelantarkan suaminya karena berstatus sebagai isteri kedua.[5]

Berita yang menarik juga adalah Gubernur Kalimantan Tengah priode 2016-2021 bapak Sugianto Saberan[6] mengangkat anak, dimana anak ini ditemukan oleh salah seoang warga kota Palangka Raya dalam kardus di depan rumahnya pada tanggal 29-06-2016.[7] Setelah anak tersebut diangkat anak oleh bapak Gubernur kehidupannya menjadi lebih baik dan sampai sekarang tumbuh dengan baik dan sehat.

Pada kenyataannya tidak semua anak angkat bernasib baik, kejadian di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan seorang ayah angkat tega mencabuli anak angkatnya yang bernama NH (17) selama dua tahun hingga melahirkan bayi perempuan. Kasatreskrim Polres Luwu AKP Faisal Syam mengatakan, pelaku melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2018 saat sang anak berusia 15 tahun. "Korban

[5]Kejadian di Kota Palangka Raya seorang perempuan berstatus sebagai isteri kedua dan suaminya adalah seorang sopir, begitu perempuan itu hamil suaminya tidak menghiraukan lagi. Perempuan ini tidak punya biaya untuk melahirkan anak, akhirnya anak yang masih dalam kandungan itu diberikan kepada keluarga yang belum mempunyai anak dengan catatan semua biaya melahirkan akan ditanggung oleh keluarga yang akan mengadopsi.

[6]Gubernur Kalimantan Tengah 25 Mei 2016-2021 adalah H. Sugianto Sebaran

[7]Borneonews Online, https://www.borneonews.co.id/berita/36153-gubernur-kalimantan-tengah-sudah-adopsi-bayi-eliza-az-zahra, Minggu, 26-04-2020 pukul 10.18 wib

adalah pelajar SMA di Luwu, kelas 3 dan telah melahirkan anak perempuan di Puskesmas Bua pada pekan lalu," [8]

Secara yuridis masalah anak angkat ini sudah ada aturan hukumnya mulai dari undang-undang sampai kepada peraturan pemerintah, tujuannya adalah agar pengangkatan anak ini benar-benar untuk melindungi kepentingan anak seperti hak untuk hidup secara layak, dan hak untuk mendapatkan pendidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya. Pengangkatan Anak juga wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.[9] Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pasal 39 ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut:

> "Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak".

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang

[8] Kompas.Com,https://regional.kompas.com/read/2020/03/13/11034981/dicabuli-2-tahun-anak-angkat-di-luwu-lahirkan-bayi-perempuan, Di lihat Kamis 16-04-2020 Pukul 13.31 wib.

[9] Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

berkembang di daerah yang bersangkutan.[10] Pengangkatan anak meliputi mengusahakan anak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dan orang disekelilingnya serta menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan ras, warna, kebangsaan atau sosial. Dalam hal pengangkatan anak (adopsi), kepentingan orang tua yang mengangkatnya dengan sejumlah motif yang ada dibelakangnya dapat terpenuhi dengan baik, sedangkan di pihak lain kepentingan anak yang diangkat atas masa depannya yang lebih baik dan harus lebih terjamin kepastiannya. Di samping itu pula kehormatan orang tua kandungnya sendiri dengan tujuan-tujuan tertentu dari penyerahan anaknya itu harus dipenuhi.[11]

Dikalangan masyarakat Indonesia, pengangkatan anak lazim dilakukan dengan cara yang berbeda-beda menurut hukum adat setempat. Bila seseorang tidak memperoleh anak walaupun telah bertahun-tahun menikah sedangkan ia menginginkan mendapat anak, maka dalam keadaan demikian ia mengangkat anak orang lain dijadikan anak sendiri, baik dengan memutuskan hubungan anak itu dengan orang tua kandungnya maupun tidak.[12] Orang tua ada yang percaya, bahwa dengan mengangkat anak orang lain ia akan memperoleh anak kandung. Maka

[10] Muderis Zaini, 1995, *Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, hal. 7.
[11] *Ibid.*, hal. 19.
[12] Pengangkatan anak lebih menekankan pada kekhawatiran pada calon orang tua angkat akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (keluarga yang tidak memiliki anak) akan mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak itu akan menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia akan terlepas dari golongan sanak saudaranya semula. Lihat Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*¸ Rajawali Pers, Jakarta, hal. 34.

dianggaplah pengangkatan anak sebagai pancingan bagi kelahiran seorang anak kandung.[13]

Memang pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorangan dalam keluarga. Oleh karena itu lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Karena faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa pada masa itu berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi tersebut yaitu dengan lahirnya Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak. Pertama-tama hanya diberlakukan khusus bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa saja, tetapi dalam perkembangannya ternyata banyak masyarakat yang ikut menundukkan diri pada Staatsblad tersebut.[14]

Sejalan dengan perkembangan waktu, pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pengangkatan anak yang pada awalnya terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak, tetapi untuk saat ini masalah pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat. Namun dalam Praktik pengangkatan anak didapati berbagai masalah, seperti masih ada ditemukan

[13] Bastian Tafal, 1985, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Jakarta, Rajawali Press, hal. 44.

[14] Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hal. ix.

di masyarakat orang tua angkat yang tidak mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran, orang tua angkat yang mengganti identitas anak angkat, pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, dan sebagainya. Sehingga untuk melaksanakan ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Negara dan Pemerintah Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap ketertiban jalannya praktik pengangkatan anak, baik dari segi administrasi, dan kepastian hukumnya, maka diterbitkanlah beberapa kebijakan melalui peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang mengatur dan menangani masalah pengangkatan anak, antara lain: Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.[15]

[15] *Ibid.*, hal. xii-xiii.

Berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaaan pengangkatan anak, seperti pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, dan sebagainya. Pencegahan penyimpangan ini pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak, demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun pada kenyataannya di kota Palangka Raya dan di kota-kota lainnya masih ada terjadi berbagai masalah dalam Praktik pengangkatan anak, baik dari prosedur, data, legalitas dan keabsahan, konflik kepentingan, serta akibat hukum dalam pengangkatan anak, baik untuk anak itu sendiri maupun orang yang mengangkat anak.

Salah satu contoh adalah ketika observasi awal penulis di kota Palangka Raya, penulis menemukan beberapa permasalahan mengenai pengangkatan anak ini yaitu:

Pertama, orang tua angkat tidak mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran.

Kedua, ada warga masyarakat yang mengangkat anak orang lain dan mengangkatnya sejak dilahirkan kemudian pada saat membuat akta kelahiran, pada akta kelahiran tersebut nama orang tua anak tersebut dicantumkan nama orang tua yang mengangkatnya. Praktik seperti ini termasuk pemalsuan identitas dan bertentangan dengan undang-undang pengangkatan anak.

Ketiga, masih ada ditemukan pengangkatan anak secara ilegal yaitu pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak ilegal ini

adalah langkah awal yang dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan lain berkaitan dengan pengangkatan anak.

Keempat, ada pasangan suami isteri yang sudah lama menikah tapi tidak punya anak, akhirnya dia meminta anak untuk diangkat menjadi anak angkat dengan tujuan untuk pancingan agar dia bisa punya anak. Namun setelah dia bisa hamil dan punya anak kandung, maka anak pancingan yang telah diangkat menjadi anak tidak dihiraukan lagi. Anak angkat dianaktirikan, seperti ketika mereka dibelikan pakaian anak kandung dibelikan dengan jenis yang lebih baik, sedangkan anak angkat dibelikan dari jenis yang murah, demikian juga dengan hal-hal lainnya.[16]

Kelima, pasangan suami isteri yang banyak punya anak dan ekonominya dibawah garis kemiskinan sehingga kesulitan membiayai anak-anaknya, akibatnya anaknya ada yang diberikan kepada orang lain dengan harapan anaknya bisa hidup layak dan terayomi. Namun dikemudian hari setelah ekonominya membaik dan dia ingin mengambil lagi anak yang pernah diberikannya sehingga timbul permasalahan.[17]

Keenam, pasangan suami isteri yang memberikan anaknya kepada orang lain suatu ketika dia kangen dengan anaknya dan ingin bertemu, tapi orang tua angkatnya menghalang-halangi atau tidak memberikan akses untuk bertemu antara orang tua kandung dengan anaknya.[18]

---

[16] Hasil wawancara dengan ibu Zuraidah Khatimah, Hakim seniur Pengadilan Agama Kota Palangka Raya pada tanggal 5 Januari 2021.

[17] Hasil wawancara dengan ibu Helwina Handayani, Staf Khusus Sub.Bag Hukum dan Pengaduan pada Komisi Perlindungan Anak (KPA) RI tanggal 11-10-2020.

[18] *Ibid.*

Berbagai permasalahan di atas bisa terjadi karena aturan hukum tentang pengangkatan anak sudah tidak bisa lagi menjembataninya, karena dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini di Indonesia. Oleh sebab itu aturan hukum tentang pengangkatan anak ini perlu direkonstruksi agara tidak ada permasalahan dikemudian hari. Maka beranjak dari hal tersebut peneliti berupaya meneliti masalah tersebut dengan judul: "REKONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian desertasi ini dan sesuai dengan latar belakang permasalahan tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi pengaturan pengangkatan anak di Indonesia belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan hukum pengaturan pengangkatan anak di Indonesia?
3. Bagaimana rekonstruksi hukum pengaturan pengangkatan anak di Indonesia agar berbasis nilai keadilan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mengapa hukum pengaturan pengangkatan anak di Indonesia belum berbasis nilai keadilan.

2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan hukum pengaturan pengangkatan anak yang belum memenuhi nilai-nilai keadilan di Indonesia.
3. Untuk menemukan formula rekonstruksi hukum pengaturan pengangkatan anak di Indonesia agar berbasis nilai-nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian disertasi ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan secara teorites penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teorites kegunaan penelitian ini adalah dapat mengembangkan konsep pemikiran baru mengenai pengaturan hukum pengangkatan anak terutama regulasinya, pelaksanaannya, sarana-sarana dan prasarana, dalam hal ini termasuk juga kebijakan untuk mengevaluasi pelaksanaan hukuman atau sanksi.
b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran hukum lebih lanjut, baik untuk peneliti sendiri maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan;
c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan bagi kepustakaan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan secara praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah dalam mengevaluasi hukum pengaturan pengangkatan anak agar berbasis nilai keadilan.
b. Membantu pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan perubahan undang-undangan dengan meninjau kembali berbagai aturan pengangkatan anak.
c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para teoritisi dan praktisi hukum terutama dalam rangka praktik pengangkatan anak yang sah berbasis nilai keadilan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Sebelum peneliti mendefinisikan tentang rekonstruksi terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan dari kata rekonstruksi itu sendiri. Maksudnya adalah agar dapat diketahui perbedaan dan makna dari istilah tersebut, dan diharapkan pembaca dapat memahami maksud dari penelitian ini.

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata "konstruksi" yang artinya adalah pembangunan yang kemudian di tambah dengan

imbuhan “re” pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi” yang berarti pengembalian seperti semula.[19]

B.N. Marbun berpendapat dalam buku Kamus Politik secara online mengartikan rekonstruksi ada 2, yaitu: 1) Rekonstruksi berarti pengembalian seperti semula; 2) Penyusunan atau penggambaran kembali; dari bahan-bahan yang ada disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadiannya semula.[20]

Andi Hamzah berpendapat pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.[21]

Jadi rekonstruksi dapat diartikan dengan membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai–nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Maka untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Sehingga sesuatu yang akan dicoba untuk dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang

[19] Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 942.

[20] B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 469.

[21] Andi Hamzah, 2004, *Kamus Hukum*, Bandung, Ghalia Indonesia, hal.502.

berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

Satjipto Rahardjo berpendapat sebagai berikut:

> "Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya."[22]

Berbagai pendapat dan uraian di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa konsep rekonstruksi yang diamksud disini adalah melakukan pembaharuan terhadap konstruksi suatu sistem atau bentuk, dalam penelitian ini dikaitkan dengan pembaharuan hukum pengaturan pengangkatan anak di Indonesia.

2. Anak Angkat

a. Pengertian Anak Angkat

Pengangkatan anak atau adopsi berasal dari kata *Adoptie* dalam bahasa Belanda atau adoption dalam bahasa Inggris. *Adoption* artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak disebut *adoption of a child*. Dalam bahasa arab disebut "*tabanny*" diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan "*ittikhadzahu*", yaitu menjadikannya sebagai anak.[23]

[22] Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Bandung, Alumni, hal. 153.

[23] Abidin, Abdullah Kelib, 2018, *Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal USM Law Review Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hal. 18.

Secara terminologi istilah tabanni menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabanni*) yaitu pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.[24]

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.[25] Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.[26]

Selanjutnya dalam hukum adat, berkaitan dengan pengangkatan anak terdapat bermacam-macam istilah, misalnya mupu anak di Cirebon, ngukut anak di suku Sunda Jawa Barat, nyentanayang di Bali, anak angkat di Batak Karo, meki anak di Minahasa, ngukup anak di suku Dayak Manyan, dan mulang jurai di Rejang, anak

[24] Andi Samsu Alam dan Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, Kencana, hal. 19

[25] Tim Penyusun, 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 31.

[26] Pasal 1 Butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

akon di Lombok Tengah, napuluku atau wengga di Kabupaten Paniai Jayapura, dan anak pulung di Singaraja.[27]

Menurut Hilman Hadikusuma seorang pakar hukum adat dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat, "anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.[28]

Pengertian pengangkatan anak menurut M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata yaitu mengangkat anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya dan bahwa pengangkatan anak itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak itu secara lahir maupun batin merupakan anak sendiri.[29]

Bertling berpendapat bahwa anak angkat adalah bukan waris terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya, melainkan ia mendapatkan keuntungan sebagai anggota rumah tangga, jikalau barang-barang gono gini tidak mencukupi, pada pembagian harta peninggalan nanti anak angkat dapat minta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.[30]

Menurut Juli Astuti yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami isteri, namun diambil dan dipelihara serta dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang

---

[27] Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 4.

[28] Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju, Hal.1

[29] Soerojo Wignjodipoero, 1994, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, hal. 118

[30] Bertling, *Pengantar dan Asas-Asas Huk um Adat*, Jakarta, Gunung Agung, hal.185

diangkatnya dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.[31]

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.[32]

Selanjutnya menurut Muderis Zaini, anak angkat adalah penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnya sendiri.[33]

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.[34] Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

[31] Muderis Zaini, 1999, *Adopsi Suatu Tinjauan…., Ibid*, hal. 5

[32] Pasal 1 butir (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

[33] Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Suatu Tinjauan…. Ibid* , hal. 85.

[34] Pasal 1 Butir (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Pengangkatan Anak juga wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.[35]

Selain pengangkatan anak, Negara Indonesia juga mengenal istilah adopsi. Adapun pengertian adopsi menurut Surojo Wignjodipuro[36] adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Menurut Ensiklopedi Umum bahwa: ”Adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang–undangan.[37]

Fuad Muhammad Fachruddin memberikan definisi anak angkat dalam kontek adopsi adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri.[38]

M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata berpendapat anak adopsi adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri.[39]

---

[35] Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
[36] Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Suatu Tinjauan …, Ibid*, hal.5
[37] Abdidin Abidin, *Ibid.* hal 18.
[38] Siska Lis, *Ibid.*, hal.19.
[39] Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Semarang, Bumi Aksara, hal.34.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas maka adopsi adalah berpindahnya kekuasaan orang tua kandung terhadap anak angkat ke orang tua angkat yang dapat menimbulkan putusnya hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat dan timbulnya hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat selayaknya anak kandung dengan segala akibat hukumnya.

Selain pengangkatan anak, anak angkat, dan adopsi, ada juga yang disebut dengan anak asuh. Masyarakat Indonesia terkadang keliru menafsirkan antara anak angkat dengan anak asuh. Anak angkat dan anak adopsi dengan anak asuh memiliki makna yang berbeda. Pengertian anak asuh berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak asuh berbeda dengan anak angkat ataupun anak adopsi. Anak asuh tidak menimbulkan akibat yang sama dengan anak angkat maupun anak adopsi. Anak asuh tidak memiliki hak waris, karena pemeliharaan anak asuh hanya sebatas menjamin perawatan, pendidikan dan kesehatan anak itu.

b. Macam-Macam Anak

Para ahli hukum membagi macam-macam anak angkat yaitu sebagai berikut:

1) Anak Tiri

Anak tiri adalah anak kepada isteri atau suami seseorang daripada perkawinan yang terdahulu.

2) Anak Susuan

Anak susuan adalah anak yang disusui dengan cara masuknya air susu seorang wanita kepada anak kecil dengan syarat-syarat tertentu.

3) Laqith

Anak laqith adalah anak yang dipungut di jalanan, sama dengan anak yatim, bahwa anak seperti ini lebih patut di namakan Ibnu Sabil, yang dalam Islam dianjurkan untuk memeliharanya.

4) Anak Asuh

Anak asuh erat kaitannya dengan program wajib belajar yang dicanangkan Presiden RI pada tanggal 2 Mei 1984 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh sebatas berkaitan dengan bantuan biaya pendidikan agar anak asuh dapat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tingkat dasar sampai selesai. Oleh sebab itu, lembaga anak asuh berbeda dengan lembaga anak angkat.

5) Anak Piara

Menurut Hukum adat lembaga anak piara, yaitu seseorang menitipkan seorang anak kepada orang lain untuk dipelihara. Lembaga ini berbeda dengan lembaga pengangkatan anak, karena orang tua yang dititipi tersebut hanya melakukan tugas sebagai pemelihara. Demikian pula akibat hukumnya berbeda dengan pengangkatan anak.

6) Anak Angkat

Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan : "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari

lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan". Sedangkan menurut Pasal 171 huruf h KHI yaitu : "Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan".

Pendapat sarjana lain yaitu J.A. Nota jenis-jenis anak angkat adalah sebagai berikut:[40]

1) Pengangkatan anak sempurna, adalah pengangkatan seorang anak dengan tujuan untuk memutuskan hubungan kekeluargaan seorang anak dengan keluarga semula dan dengan mengadakan hubungan kekeluargaan yang baru antara yang diangkat dengan yang mengangkat.
2) Pengangkatan anak sederhana, adalah pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan dengan keluarga asli.
3) Pengangkatan anak secara langsung, adalah pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.
4) Pengangkatan anak oleh seorang wanita atau laki -laki, adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah.
5) Pengangkatan anak anumerta, adalah permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri yang hidup terlama, setelah meninggalnya suami atau istri yang lain, dengan syarat apabila ternyata pada waktunya mengambil alih pengangkatan anak masih dalam ikatan perkawinan, akan tetapi kematian menghalangi pengangkatan anaknya.

[40] Dewi Sartika, 2002, *Keduduk an Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya*, Semarang, hal.45.

c. Prinsip dan Tujuan Anak Angkat

Prinsip pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak pada pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (pasal 2 ayat (1) huruf a)
2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
3) COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA;
4) dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut, dan;
5) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
6) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak (pasal 2 ayat 2).

Sedangkan tujuan Pengangkatan Anak menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Persyaratan Calon Anak Angkat (CAA)

Persyaratan anak angkat adalah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak pada pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:[41]

a. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak;
d. memerlukan perlindungan khusus.

Persyaratan Calon Anak Angkat (CAA) sebagaimana disebutkan di atas ini dibagi lagi menjadi beberapa katagori, yaitu sebagai berikut:

a. anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.[42]

Pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pengangkatan anak pada penjelasan pengertian bahwa sepanjang ada alasan mendesak dan sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Yang

[41] Permensos RI No. 110 pasal 4
[42] *Ibid.*,Pasal 6

dimaksud dengan "ada alasan mendesak" seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan "anak memerlukan perlindungan khusus" adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.[43]

2. Persyaratan Calon Orang Tua Angkat

Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 tidak hanya mengatur persyaratan Calon Anak Angkat (CAA), namun juga mengatur Calon Orang Tua Angkat (COTA). Adapun COTA ini di atur dalam pasal 7, yang berbunyi sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;

[43] Muhammad Heriawan, 2017, *Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Persfektif Perlindungan Anak*, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017, hal. 177

f. tidak merupakan pasangan sejenis;

g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;

h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;

i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;

j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;

l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan

m. memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.

n. Umur COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak. (pasal 7 ayat 2);

o. Ada persetujuan tertulis dari CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari CAA.

p. COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun. (pasal 8 ayat 1);

q. Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat. (pasal 8 ayat 2);

r. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA. (pasal 8 ayat 3).

3. Pengangkatan Anak Secara Langsung

Adapun yang dimaksud dengan pengangkatan anak secara langsung adalah Calon Anak Angkat sedang berada dalam pengasuhan orang tua kandung atau wali, hal ini terdapat dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial nomor 110 Tahun 2009. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa Pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia secara langsung hanya dapat dilakukan oleh COTA baik suami maupun isteri berkewarganegaraan Indonesia.[44]

Bagi pasangan yang ingin mengangkat anak secara langsung, maka harus memenuhi persyaratan baik persyaratan material maupun persyaratan administratif. Adapun untuk persyaratan material adalah sebagai berikut:[45]

a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
f. tidak merupakan pasangan sejenis;
g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;

[44] Permensos RI No. 110 Tahun 2009 pasal 18.
[45] *Ibid*., pasal 20.

i. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak;
j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi setempat;
l. memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
m. memperoleh izin Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Sedangkan persyaratan administratif bagi Calon Orang Tua Angkat (COTA) untuk pengangkatan anak secara langsung Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
b. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
c. Copy Akta Kelahiran COTA;
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
e. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
f. Kartu Keluarga dan KTP COTA;
g. Copy Akta Kelahiran CAA;
h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
i. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;

j. Surat Pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;

k. Surat Pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;

l. Surat Pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;

m. Surat Pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;

n. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan

m. Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Tata Cara pengangkatan anak secara langsung diatur dalam pasal 22 Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009, yaitu pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut:[46]

a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 21 ayat (1);
b. Kepala Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial Propinsi/Kab/Kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA;
c. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
d. Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke propinsi;
e. Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
f. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota; dan
g. Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.

[46] *Ibid*, pasal 22

Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

6. Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Pengasuhan Anak

Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak diatur dalam pasal 23 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009, yaitu: "Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, CAA harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak"[47] dan pada pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CAA harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.[48]

Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak adalah melalui yayasan yang berbadan hukum yang telah ditunjuk pemerintah, yaitu Yayasan Sayap Ibu. Sampai saat ini yayasan sayap itu ada memiliki 4 lokasi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1
Daftar Alamat Yayasan Sayap Ibu

NO	Nama Yayasan	Alamat
1	Yayasan Sayap Ibu Jakarta	Jl. Barito II No.55 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
2	Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta Memiliki 3 Panti	Jl. Rajawali No.3 Pringwulung Condongcatur, Depok, Slamen, Yogyakarta
3	Yayasan Sayap Ibu Cabang Banten	Jl. Raya Graha Utama No.33B RT.04 RW.1 Kel. Pondok Kacang Barat, Kec.

[47] *Ibid*, pasal 23 ayat (1)
[48] *Ibid*, pasal 23 ayat (2)

		Pondok Aren, Kota Tenggerang Selatan, Banten, 15226
4	Yayasan Sayap Ibu Cabang Provinsi Jawa Timur	Jl. Rungkut Asri Timur 19 No.6 Surabaya, Jawa Timur, 60293

Sumber: http://sayapibujakarta.org

Persyaratan Calon Orang Tua Angkat (COTA) pada pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak ada 2 yaitu: (1) persyaratan material; dan (2) persyaratan administratif.[49]

Adapun persyaratan material Calon Orang Tua Angkat (COTA) adalah sebagai berikut:[50]

a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;

b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;

d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;

f. Tidak merupakan pasangan sejenis;

g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;

h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;

i. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;

[49] *Ibid*, Pasal 24
[50] *Ibid*, Pasal 25

j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;

l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;

m. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten; dan

n. Memperoleh izin untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Berikut ini akan diuraikan persyaratan administratif Calon Orang Tua Angkat (COTA) sebagaimana diatur dalam pasal 26, yaitu:[51]

a. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
b. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
c. Copy Akta Kelahiran COTA;
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
e. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
f. Kartu Keluarga dan KTP COTA;
g. Copy Akta Kelahiran CAA;
h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
i. Surat Pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;

[51] *Ibid.*, Pasal 26 ayat (1)

j. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;

k. Surat Pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;

l. Surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;

m. Surat Pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;

n. Surat Pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;

o. Laporan Sosial mengenai Anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;

p. Surat penyerahan anak dari orang tua/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;

q. Surat Penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;

r. Surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;

s. Laporan Sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial instansi sosial provinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak;

t. Surat Keputusan izin asuhan dari kepala instansi sosial;

u. Laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak;

v. Surat Rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota;

w. Surat Rekomendasi pertimbangan perizinan pengangkatan anak dari Tim PIPA daerah; dan

x. Surat Keputusan Izin untuk Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi untuk ditetapkan di pengadilan.

Persyaratan administrartif COTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[52]

Sedangkan Tata Cara Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut : [53]

a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 26 ayat (1);

[52] *Ibid*., Pasal 26 Ayat (2)
[53] *Ibid*., Pasal 27 Ayat (1)

b. Kepala Instansi Sosial Propinsi menugaskan Pekerja Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;

c. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara;

d. Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara;

e. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi di atas kertas bermaterai cukup;

f. Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA:

g. Kepala Instansi Sosial Propinsi membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Propinsi;

h. Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;

i. dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;

j. Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten/kota;

k. Kepala Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.

Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.[54]

7. Nilai Keadilan

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak. Guna mewujudkan suatu keadilan harus mengetahui apa arti keadilan itu seutuhnya. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang setidaknya mendekati, dan dapat memberi gambaran apa arti keadilan. Definisi keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan.

a. Keadilan dalam Persfektif Hukum Positif

Keadilan dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah ke-adilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*un-lawful, lawless)* dan orang yang tidak fair (*un-fair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan

[54] *Ibid*., Pasal 27 Ayat (2)

memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.[55]

Istilah keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan. Dimana ada konsep keadilan maka disitu pun ada konsep ketidakadilan. Biasanya keduanya disandingkan dan dalam konteks kajian hukum ada banyak contoh ketidakadilan yang merupakan antithese dari keadilan dalam bidang hukum misalnya di Indonesia, seperti : ketidakadilan dalam kasus Poso, terhadap rakyat kecil, kasus Prita, ketidakadilan pemberitaan oleh media massa, ketidakadilan pembagian BLT, serta ketidakadilan gender.

Diskursus mengenai keadilan terjadi di semua belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seperti yang diuraikan di muka, terjadinya gejolak sosial yang ada di Indonesia diduga disebabkan oleh belum terciptanya keadilan seperti yang diharapkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Mengingat hal-hal yang telah diuraikan di atas, di samping itu hadirnya keadilan semakin dibutuhkan dengan semakin meningkatnya jumlah manusia yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan hidup dan meningkatnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Mensikapi adanya beberapa

[55] Inge Dwisvimia, 2011, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September 2011, hal. 523.

permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.

Hubungan antara keadilan dan hukum positif baru mulai abad 8 yang dilatarbelakangi oleh adanya kekacauan dalam masyarakat, tidak puasnya rakyat dengan pemerintahan aristokrasi pada saat itu dan penyalahgunaan kekuasaan. Sejak waktu itu maka masalah hubungan antara keadilan dan hukum positif menguasai alam pikiran bangsa Yunani, dan pada hakekatnya semua pikiran-pikiran tentang hukum. Dalam hubungannya dengan filsafat ilmu hukum, keadilan diwujudkan melalui hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak perlu dalam kehidupan bersama manusia. Tanpa hukum kehidupan manusia menjadi kacau dan akan kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.[56]

Friedmann mengatakan, para ahli fikir Romawi telah meletakkan dasar-dasar ilmu hukum dengan analisis modern, walaupun sumbangan mereka terhadap filsafat hukum tidak banyak namun telah menjadi dasar dalam prinsip keadilan. Dari mulai

[56] Sewu, P. Lindawaty S, 2006, *Kegunaan Filsafat Hukum Dalam Mengupas Tuntas Permasalahan Hukum Kontekstual*, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana, Vol. 5 (1),2006, hlm. 25-38, lihat Inge Dwisvimia, 2011, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No. 3 September 2011, hal. 528.

Cicero sampai Plato dan Aristoteles, mulai dari tulisan mengenai hukum kontrak ataupun menuju pada pemikiran-pemikiran yang mendalam tentang fungsi dan problema-problema hukum di dalam masyarakat. Kekacauan-kekacauan sosial, konflik-konflik intern, sering terjadinya pergantian pemerintahan, banyaknya kezaliman dan kesewenang-wenangan, merupakan dorongan ektern untuk merenungkan hubungan antara keadilan tertinggi dengan hukum positif.[57]

Homerus bahwa hukum merupakan pusat kajian dan merupakan sesuatu yang pasti dan tetap. Keadilan masih identik dengan perintah dan kewenangan. Kesadaran akan adanya pertentangan antara hukum positif dan keadilan menjadi lebih menonjol sejak abad kedelapan. Keadaan itu timbul karena adanya rasa tidak aman dalam masyarakat, rasa tidak puas terhadap sistem pemerintahan aristokrasi dan banyaknya penyalahgunaan kekuasaan. Pada masa itu memang pertentangan antara keadilan versus ketidakadilan terjadi. Adanya hal-hal tersebut di atas menjadi pusat perhatian para ahli fikir Yunani, sama halnya dengan pemikiran tentang hukum sejak saat tersebut bahkan sampai sekarang.[58]

Melihat dari uraian mengenai terminologi keadilan di atas jelaslah bahwa untuk dapat melihat adanya gambaran keadilan terdapat ukuran tersendiri yang dapat mengukurnya. Bersandar pada gambaran itulah maka penulis mengambil kesimpulan bahwa keadilan dalam hukum terbagi pada 2 (dua) hal yakni keadilan menurut perundang-undangan (*legal justice*) atau keadilan dalam Praktik (*practical justice*).

[57] W. Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Press, hal. 118.
[58] Homerus, dalam Inge Dwisvimia, 2011, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No. 3 September 2011, hal. 529.

Keadilan berdasarkan perundang-undangan didasarkan pada hukum yang tertulis dan ada dalam teks perundang-undangan.

Memaknai keadilan memang selalu berawal dari keadilan sebagaimana juga tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan memang tidak secara tersurat tertulis dalam teks tersebut tetapi pembuat undang-undang telah memandang dalam pembuatan produk perundang-undangannya didasarkan pada keadilan yang merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri. Misalnya pada teori teori etis bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*), yang dimuat dalam teori tujuan hukum klasik sedangkan dalam teori prioritas modern tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

b. Konsep Keadilan dalam Persfektif Hukum Islam

Pada hakikatnya keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Berdasarkan beberapa teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Kebanyakan orang percaya jika ketidakadilan harus segera dilawan dan dihukum, serta banyak gerakan sosial dan politis yang ada di seluruh dunia memperjuangkan dan menegakkan keadilan.[59]

[59]Afifa Rangkuti, 2017, *Konsep Keadilan Dalam Persfektif Islam*, Tazkiya, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1, Januari-Juni 2017, hal. 3.

Keadilan berasal dari bahasa arab "*adl*" yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan di perlakukan sesuai harkat dan mertabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan YME. Hak-hak manusia adalah hak-hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat.[60]

Al-qur‟an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkut-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata *'adl*. Kata-kata sinonim seperti qisth, hukm dan sebagainya digunakan oleh Al-qur‟an dalam pengertian keadilan.

Pada al-Qur‟an masalah adil ini ada dalam Surah An Nahl ayat 90 yang berbunyi sebagai berikut:



> Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."[61]

[60] Afifa Rangkuti, *Ibid.*, hal. 3.
[61] QS. An-Nahl ayat 90.

Keadilan menurut pandangan Islam merupakan tonggak kehidupan seseorang yang berhati nurani karena dengan kuatnya *standard of Morality*, maka akan mampu meletakkan suatu perkara secara proporsional dan terbebas dari keberpihakan atau kepentingan sepihak/golongan. Keadilan tidak dapat dipengaruhi oleh perasaan senang, terpaksa, permusuhan, kedudukan, dan lain-lain. Adil di kaca mata Islam adalah salah satu norma yang menunjukkan tingkat ketaqwaan seseorang muslim terhadap ajaran yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Besar Muhammad SAW.[62]

Ukurannya bagi sebutan orang yang adil, masyarakat yang adil dan pemerintah yang adil adalah orang yang mengatakan sebenar-benarnya apa-apa yang dia ketahui karena rasa takut kepada Allah SWT, bukan takut kepada manusia atau jabatan, serta kekuasaan. Jadi ukurannya adalah mengemukakan kebenaran tanpa dipengaruhi oleh apapun kecuali atas nama Allah SWT seperti firman Allah dalam Surat An Nissa ayat 135 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ
ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن
تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka

[62] Hans Kalsen dalam Subhan Amin, 2019, *Keadilan Dalam Persfektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, Jurnal El-Afkar Vol. 8 Nomor I, Januari-Juni 2019, hal. 8.

> janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.[63]

Masyarakat yang adil adalah mereka menjadikan hukum sebagai Panglima dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dimana interaksi antar manusia sangat kuat terjadi, kemungkinan untuk tidak berlaku adil mungkin saja terjadi. Akan tetapi bila hukum dijadikan panglima dalam kehidupan sehari-hari Insya Allah keadilan akan selalu berada di dalamnya, sebab sesuatu yang tidak dapat disangkal ialah adanya hubungan antara hukum dan keadilan. Untuk menegakan keadilan perlu adanya hukum yang bebas dari unsur-unsur negatif.

Perspektif tentang keadilan sebagaimana dirumuskan di atas, menurut Satjipto Rahardjo, seperti dikutip oleh Angkasa bahwa keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia.[64]

Lebih lanjut Angkasa mengatakan bahwa Karena keadilan adalah ukuran yang dipakai seseorang dalam memberikan terhadap objek yang berada di luar diri orang tersebut. Mengingat objek yang dinilai adalah manusia maka ukuran-ukuran yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain tidak dapat dilepaskan dengan bagaimana seseorang tersebut memberikan konsep atau makna tentang manusia. Apabila seseorang melihat orang lain sebagai mahluk yang mulia maka perlakuan seseorang akan mengikuti anggapan yang dipakai sebagai ancangan dan sekaligus

[63] Al Qur‟an Surah Annisa ayat 135

[64] Manullang, E. Fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Buku Kompas*, Jakarta dalam Subhan Amin, 2019, *Keadilan Dalam Persfektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, Jurnal El-Afkar Vol. 8 Nomor I, Januari-Juni 2019, hal. 9.

akan menentukan ukuran yang dipakai dalam menghadapi orang lain. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa masalah keadilan tidak dapat dilepaskan dengan filsafat tentang manusia.[65]

c. Konsep Keadilan dalam Persfektif Para Filosof

Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat jutitia bereat mundus*.[66] Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

Pertama adalah keadilan distributif, yaitu keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

Kedua adalah keadilan korektif, artinya adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Atau dengan kata lain keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak.

[65] Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya dalam Subhan Amin, 2019, *Keadilan Dalam Persfektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, Jurnal El-Afkar Vol. 8 Nomor I, Januari-Juni 2019, hal. 10.

[66] Angkasa, 2010, *Filsafat Hukum (Materi Kuliah)*, Magister Ilmu Hukum Hukum UNSOED, Perwokerto, hal.106

Plato berpendapat bahwa keadilan hanya ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu.[67] Untuk istilah keadilan ini Plato menggunakan kata yunani" Dikaiosune" yang berarti lebih luas, yaitu mencakup moralitas individual dan sosial.[68] Penjelasan tentang tema keadilan diberi ilustrasi dengan pengalaman saudagar kaya bernama Cephalus. Saudagar ini menekankan bahwa keuntungan besar akan didapat jika kita melakukan tindakan tidak berbohong dan curang. Adil menyangkut relasi manusia dengan yang lain.[69]

Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim untuk menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa.melihat besarnya jasa yang diberikan.

Ulpianus berpendapat bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang mestinya untuknya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).[70]

Justinian menyatakan bahwa "keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya" sedangkan

[67] Ansori, Abdul Gafur, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gajah Mada Universisty Press, Yogyakarta, dalam Subhan Amin, hal. 5.

[68] Rawl, John, *Teori Keadilan*, dalam Subhan Amin, *Ibid*, hal. 5.

[69] Suparmono, Rudi, *Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum*, dalam Subhan Amin, hal. 5.

[70] Ulpianus dalam Angkasa, *Ibid*, hal. 6.

Herbert Spenser berpendapat bahwa setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari lain orang.[71]

Roscoe Pound yang melihat indikator keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa perumusan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.[72]

Nelson meyatakan bahwa "Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi" dan John Salmond yang menyatakan bahwa norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar ke-makmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia.

Hans Kelsen, menyatakan bahwa keadilan tentu saja juga digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif, terutama kecocokan dengan undang-undang. Ia menggangap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relative dengan sebuah norma "adil" hanya kata lain dari "benar".

Menurut Jhon Rawls, konsep keadilan ialah suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas-asas, "bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan

[71] *Ibid.*
[72] *Ibid.*

memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpuan yang mereka kehendaki.

d. Konsep Keadilan Menurut Persfektif Zaman Modern

Pemikiran modern tentang keadilan dalam kamus Bahasa Indonesia istilah keadilan berasal dari kata adil, artinya tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi keadilan diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil. Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan "*justice*" kata dasarnya "jus". Perkataan "jus" berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari "*justice*" adalah hukum. Dari makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata "*justice*" sebagai "*lawfullness*" yaitu keabsahan menurut hukum.

Pengertian lain yang melekat pada keadilan dalam makna yang lebih luas adalah "*fairness*" yang sepadan dengan kelayakan. ciri adil dalam arti layak atau pantas, dapat dilihat dari istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hukum. Misalnya "*priciple of fair play*" yang merupakan salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik, "*fair wage*" diartikan sebagai upah yang layak yang sering ditemui dalam istilah hukum ketenagakerjaan. Hal yang sama dikemukakan dalam konsep keadilan Aristoteles yang disebutnya dengan "*fairness in human action*", Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia.

Konsep keadilan pada jaman modern diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara lain munculnya aliran liberalisme yaitu suatu aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abab ke-XVII Masehi. Aliran ini mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari mazhab kaum Stoa

khususnya individualisme, sanksi moral dan penggunaan akal. Pada bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan demokrasi yang dapat menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menekankan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran kaum liberal.[73]

Pada konteks kebebasan tersebut, di dalam konsepsi liberalisme terkandung cita toleransi dan kebebasan hati nurani. Bagi kaum liberalis keadilan adalah ketertiban dari kebebasan atau bahkan realisasi dari kebebasan itu sendiri. Teori keadilan kaum liberalis dibangun di atas dua keyakinan. Pertama aalah manusia menurut sifat dasarnya adalah makhluk moral. Kedua adalah ada aturan-aturan yang berdiri sendiri yang harus dipatuhi manusia untuk mewujudkan dirinya sebagai pelaku moral. Berdasarkan hal ini keadilan dipahami sebagai suatu ketertiban rasional yang di dalamnya hukum alamiah ditaati dan sifat dasar manusia diwujudkan.

Berbeda dengan kaum liberal, penganut utilitarianisme menolak digunakannya ide hukum alam dan suara akal dalam teori mereka. Konsep keadilan pada aliran ini didasarkan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebaikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi orang banyak.

Teori ini dikritik oleh anti utilitarianisme yang dipelopori oleh Dworkin dan Nozick. Menurut mereka utilitarianisme yang memperioritaskan kesejahteraan mayoritas, menyebabkan minoritas atau individu-individu yang prefensinya tidak

[73] Tower Sargent, Lyman, dalam Bahder Johan Nasution, 2014, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Moderen*, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, hal. 122.

diwakili oleh mayoritas di dalam suatu negara akan dihiraukan dan sebagai akibatnya mereka dirugikan atau kehilangan hak-haknya.[74] Bagi penentang utilitrian, keadilan menolak argumen yang menyatakan bahwa hilangnya kebebasan sebagian orang dapat dibenarkan atas asas manfaat yang lebih besar yang dinikmati oleh orang-orang lain. Oleh sebab itu dalam suatu masyarakat yang adil, kebebasan warganegara yang sederajat tetap tidak berubah, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar kepentingan politik ataupun pada pertimbangan kepentingan sosial.[75]

Kritik Nozick terhadap utilitarianisme adalah bahwa utilitarianisme mengorbankan kebebasan individu untuk kepentingan mayoritas, utilitarianesme tidak mempertimbangkan fakta bahwa kehidupan seorang individu adalah satu-satunya kehidupan yang ia miliki. Kritik ini didasarkan pada pandangan politik yang dianut Nozick yang menuntut suatu komitmen ontologis terhadap moralitas dan organisasi sosial tertentu yang disebutnya dengan negara minimalis. Menurutnya negara minimalis ini bukan hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran moral tertentu, akan tetapi negara itu juga merupakan ajaran moral. Oleh sebab itu apabila memiliki negara yang fungsinya lebih luas dan tidak terbatas hanya sebagai penjaga malam, serta mengutamakan kepentingan mayoritas, berarti mencabut terlalu banyak kebebasan warga negara, hal itu dapat bertentangan dengan moral dan keadilan.

Menurut Hampstead serangan Nozick terutama ditujukan kepada rumus bahwa negara diperlukan atau merupakan alat terbaik untuk melakukan keadilan

[74] John Rawls, dalam Bahder Johan Nasution, 2014, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Moderen*, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, hal. 122.

[75] John Rawls, *Ibid*, hal. 123.

distributive [76]. Menanggapi masalah ini Nozick mengatakan bahwa bila tiap orang memegang atau mempertahankan haknya yang diperoleh dengan sah, maka secara total distribusi dari hak-hak itu juga adil. Dalam keadaan seperti ini sudah barang tentu tidak ada tempat bagi negara melakukan campur tangan, apalagi memberi rumusan-rumusan atau prinsip-prinsip yang harus dianut dalam distribusi hak diantara warga negara. Negara cukup berfungsi sebagai penjaga malam, penjaga terhadap usaha pencurian dan menjaga hal-hal lain yang berhubungan dengan tindakan untuk mempertahankan hak-hak warga negara.

Kelemahan dari teori Nozick yang kental dengan warna individualistik dan liberal ini terletak dalam penerapannya, yaitu sangat sulit untuk melakukan kontrol baik dalam mengontrol negara minimilis maupun dalam kegiatan masyarakat. Artinya adalah bagaimana mengontrol para individu yang sekian banyak dalam suatu negara dan bagaimana mengontrol kegiatan para individu di dalam berbagai lapangan usaha. Ini semua tidak bisa diserahkan kepada kekuatan pasar dan kehendak para individu semata-mata. Teori Nozick tersebut juga kurang realistis karena memisahkan individu dari kondisi masyarakat masa kini dengan kondisi kapitalisme dan liberalisme yang sudah sangat berubah.

Bertolak dari peristilahan di atas, di dalam literatur ilmu hukum konsep keadilan mempunyai banyak pengertian sesuai dengan teori-teori dan pengertian tentang keadilan yang dikemukakan para ahli. Telaah pustaka menunjukkan bahwa masalah keadilan sejak dahulu telah menjadi bahan kajian baik dikalangan ahli

[76] Hampstead, dalam Bahder Johan Nasution, 2014, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan*…, hal. 122.

filsafat maupun dikalangan agamawan, politikus maupun para pemikir atau ahli hukum sendiri. Akan tetapi sampai saat ini apabila timbul pertanyaan definisi keadilan. Ukuran yang digunakan untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak Akan timbul berbagai jawaban dan jawaban itu biasanya tidak pernah atau jarang memuaskan sehingga terus menjadi perdebatan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berbagai rumusan mengenai keadilan merupakan rumusan yang relatif. Persoalan ini pada akhirnya mendorong banyak kalangan untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan kepada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya berdasarkan pertimbangan mereka sendiri.

Dari sekian banyak pengertian dan teori-teori yang dikemukakan para ahli, pada umumnya menyangkut mengenai hak dan kebebasan, peluang dan kekuasaan pendapat dan kemakmuran. Berbagai definisi keadilan yang menunjuk pada hal di atas antara lain dapat dilihat dari pengertian keadilan sebagai berikut:

1. "the constant and perpetual disposition to render every man his due";
2. "the end of civil society;
3. "the right to obtain a hearing and decision by a court which is free of prejudice and improper influence";
4. "all recognized equitable rights as well as technical legal right";
5. "the dictate of right according to the consent of mankind generally";
6. "conformity with the principle of integrity, rectitude and just dealing".[77]

[77] The Encyclopedia Americana dalam Bahder Johan Nasution, 2014, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan*… hal. 123.

Pengertian yang sama dikemukakan oleh Rudolph Heimanson yang mendefinisikan keadilan yaitu: *redressing a wrong, finding a balance between legitimate but conflicting interest*".[78] Definisi ini menggambarkan bahwa nilai keadilan melekat pada tujuan hukum. Ide keadilan dicerminkan oleh keputusan yang menentang dilakukannya hukuman yang kejam, melarang penghukuman untuk kedua kalinya terhadap kesalahan yang sama.

Menolak diterapkannya peraturan hukum yang menjatuhkan pidana terhadap tindakan yang dilakukan sebelum ada peraturan yang mengaturnya, menolak pembentukan undang-undang yang menghapus hak-hak dan harta benda seseorang. Teori lain yang menyatakan bahwa keadilan melekat pada tujuan hukum dikemukakan oleh Tourtoulon yang dengan tegas menyatakan "*lex injusta non est lex*" yaitu hukum yang tidak adil bukanlah hukum. sebaliknya ide keadilan itu menuntut pemberian kepada setiap orang hak perlindungan dan pembelaan diri.[79]

Pada dasarnya makna dari suatu pengertian atau definisi keadilan berupaya memberi pemahaman untuk mengenal apa itu keadilan. Dari definisi tersebut akan diketahui ciri-ciri suatu gejala yang memberi identitas atau tanda tentang keadilan. Akan tetapi tugas untuk menjelaskan keadilan, sifat dasar dan asal mula keadilan, atau mengapa suatu gejala tertentu disebut keadilan bukan merupakan tugas definisi keadilan, melainkan hanya dapat diterangkan dengan bantuan teori keadilan.

[78] Rudolf Heimanson dalam Bahder Johan Nasution, 2014, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan*… hal. 124.

[79] Radbruch dan Dabin dalam Bahder Johan Nasution, 2014, *Ibid*, hal. 124.

F. Kerangka Teori

Penelitian pada hakekatnya adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Masalah penelitian dapat timbul karena adanya kesulitan yang mengganggu kehidupan manusia atau semata-mata karena dorongan ingin tahu sebagai sifat naluri manusia.

Teori merupakan piasu analisis/paradigma yang digunakan untuk mengupas masalah yang terjadi dimeja penelitian, jadi teori ibaratnya pisau untuk membelah sebuah roti, jika dapat menggunakan pisau yang tepat, dan menggunakannya secara tepat pula, maka hasilnya akan memuaskan.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.[80]

Menurut Snelbecker ada tiga kegunaan teori dalam penelitian. *Pertama*, sebagai pensistematiskan temuan-temuan penelitian. *Kedua*, sebagai pendorong untuk menyusun hipotesis. Dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-

[80] Sardar Ziauddin, 1996, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, Mizan, hal. 43

jawaban serta membuat ramalan-ramalan atas dasar penemuan. *Ketiga,* sebagai penyaji penjelasan dalam menjawab pertanyaan.[81]

1. Teori Keadilan Islam sebagai Grand Theory / Teori Utama

Keadilan merupakan harapan yang dapat dirasakan bagi seluruh umat manusia, karena keadilan merupakan sebuah cita-cita luhur setiap negara untuk menegakkan keadilan. Karenanya Islam menghendaki pemenuhan tegaknya keadilan.[82]

Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.[83]

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak

---

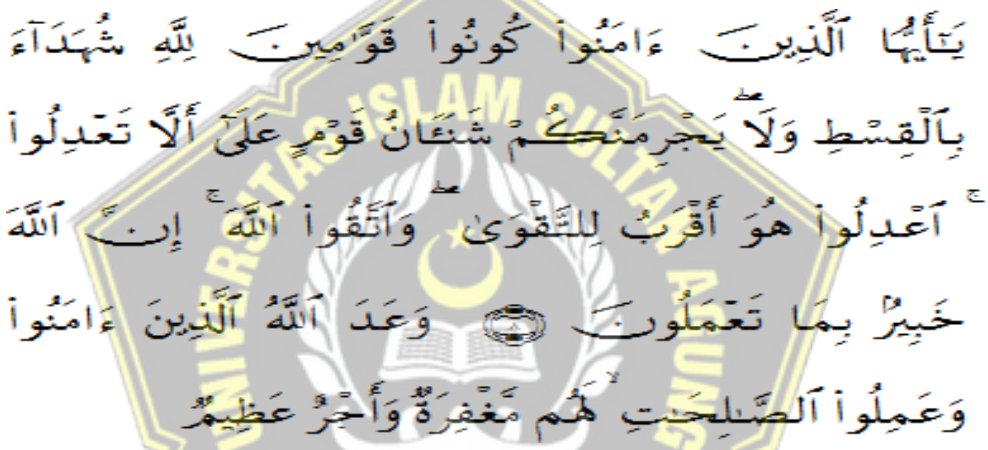
[81] *Ibid,* hal. 86.

[82] Fauzi Almubarok, 2018, *Keadilan Dalam Perspektif Iislam*, Jurnal Istighna, Vol. 1, No 2, Juli 2018 P-ISSN 1979-2824, hal.115.

[83] Juhaya S. Praja, 2009, *Filsafat Hukum Islam,* Tasikmalaya, Lathifah Press, hal.72

berlaku adil kepada orang lain. Oleh sebab itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undang-undang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri.[84]

Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan.[85] Misalnya Surah Al Maidah ayat 8 dan 9, yaitu:


يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ
بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ
ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ
خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih, bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar"[86]

84 Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, 2003, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, Malaysia, Univesiti Teknologi Malaysia, hal. 116.

85 Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 58. Dan surat al-Syuura ayat 15

86 Al Qur"an Surah Al Maidah ayat 8-9

2. Teori Perlindungan Hukum sebagai Middle Theory/Teori Menengah

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa "Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.

Selanjutnya dia menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimilikinya berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.[87]

Philipus M Hadjon,[88] membagi perlindungan hukum bagi rakyat menjadi dua hal, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif, maksudnya adalah bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
2) Perlindungan Hukum Represif, maksudnya adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan terhadap rakyat Indonesia adalah implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap

[87] Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya, PT.Bina Ilmu, hal. 1-2

[88] Philipus M.Hadjon, *op.cit*., hal. 4

harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di negara Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *"Rule of The Law"*. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah.[89]

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.[90]

Lebih lanjut Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

[89] Philips M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum ....Ibid*, hal. 38
[90] Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, hal. 121

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[91] Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.[92]

3. Teori Hukum Progresif sebagai Applied Theory

Hukum progresif di Indonesia memiliki kesesuaian dengan hukum Islam, karena sama-sama mementingkan kemaslahatan manusia. Ijtihad dalam hukum Islam juga menunjukkan bahwa dalam hukum Islam menolak untuk mempertahankan status quo dalam hukum. Asas-asas hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk mewujudkan kebahagiaan umatnya.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum.

Pikiran progresif sarat dengan keinginan dan harapan. Ada satu hal yang penting bahwa lahirnya hukum progresif dalam khazanah pemikiran hukum,

[91] Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 3

[92] Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 14

berkaitan dengan upaya mengkritisi realitas pemahaman hukum yang sangat positivistik.

Paradigma hukum progresif adalah melihat faktor utama dalam hukum adalah manusia itu sendiri. Sebaliknya paradigma hukum positivistis meyakini kebenaran hukum di atas manusia. Dalam hal ini manusia boleh dimarjinalkan asal hukum tetap tegak. Sebaliknya paradigma hukum progresif berfikir bahwa justru hukum boleh dimarjinalkan untuk mendukung eksistensialitas kemanusian, kebenaran dan keadilan. Agenda utama dari paradigma hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan tentang hukum. Penerimaan faktor manusia di pusat pembicaraan hukum tersebut membawa manusia untuk mempedulikan faktor perilaku (*behavior, experience*) manusia.

Memahami istilah progresivisme dalam konteks hukum progresif dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Progresivisme bertolak dari pandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik, dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral.
2. Hukum progresif mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka sebagai konsekuensinya hukum selalu dalam proses menjadi. Oleh karena itulah hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat disegala lapisan.
3. Hukum progresif mempunyai watak menolak status quo ketika situasi ini menimbulkan kondisi sosial yang dekanden dan korup. Hukum progresif

memberontak terhadap status quo, yang berujung pada penafsiran hukum yang progresif.

4. Hukum progresif mempunyai watak yang kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak status quo. Paradigma "hukum untuk manusia" membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.[93]

Oleh sebab itu Satjipto Rahardjo berfikir secara progresif, berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relative. Sehingga hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusian. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu, namun itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), tentu saja berbeda dengan paradigma hukum positivistis-praktis yang selama ini diajarkan di perguruan tinggi.[94]

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan prosedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut

[93] Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Antony Lib, hal. 60.

[94] Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Semarang, hal. 9

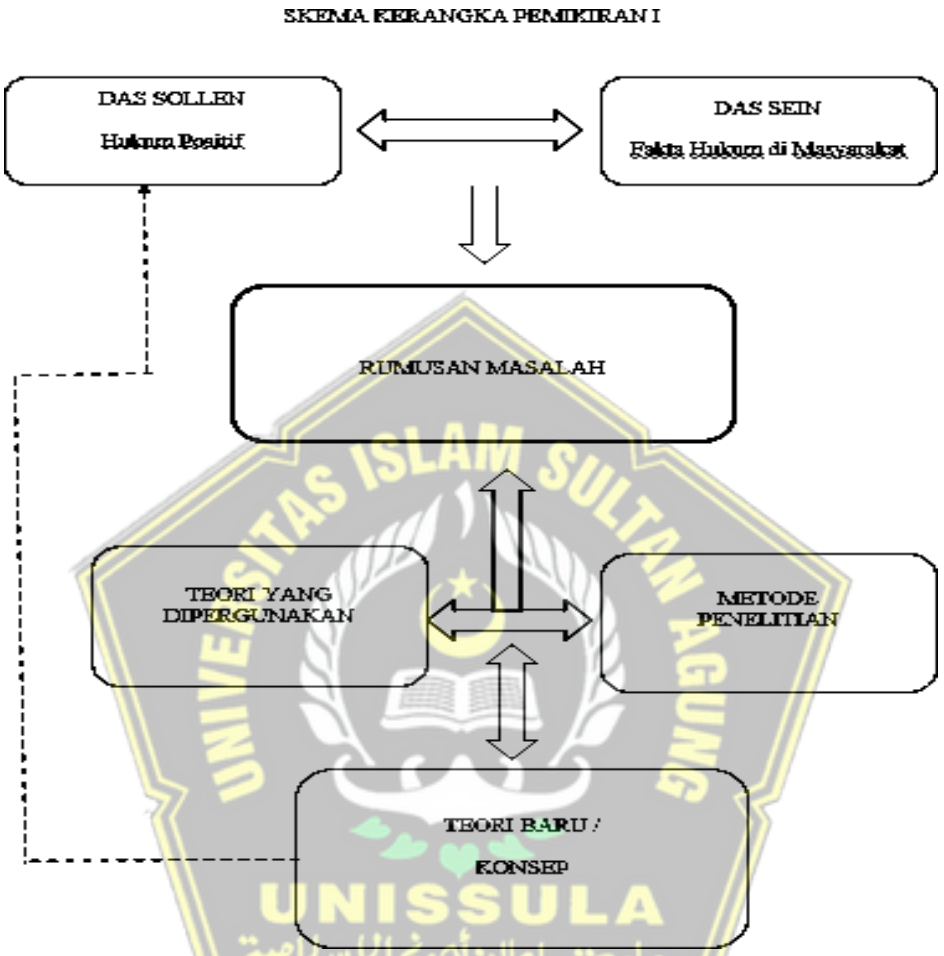
hukum disatu pihak dan keadilan sejati atau keadilan substansial di pihak lain. Sehingga dengan adanya dua macam dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa dalam praktiknya hukum itu ternyata dapat digunakan untuk menyimpangi keadilan substansial. Penggunaan hukum yang demikian itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan. Maka progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan berhukum dalam masyarakat. Namun apabila dramaturgi hukum menjadi buruk seperti selama ini terjadi di negara Indonesia, yang menjadi sasaran adalah para aparat penegak hukumnya, seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat. Meskipun, apabila kita berfikir jernih dan berkesinambungan, tidak sepenuhnya mereka dipersalahkan dan didudukan sebagai satu-satunya terdakwa atas rusaknya wibawa hukum di negara Indonesia.[95]

G. Kerangka Pemikiran

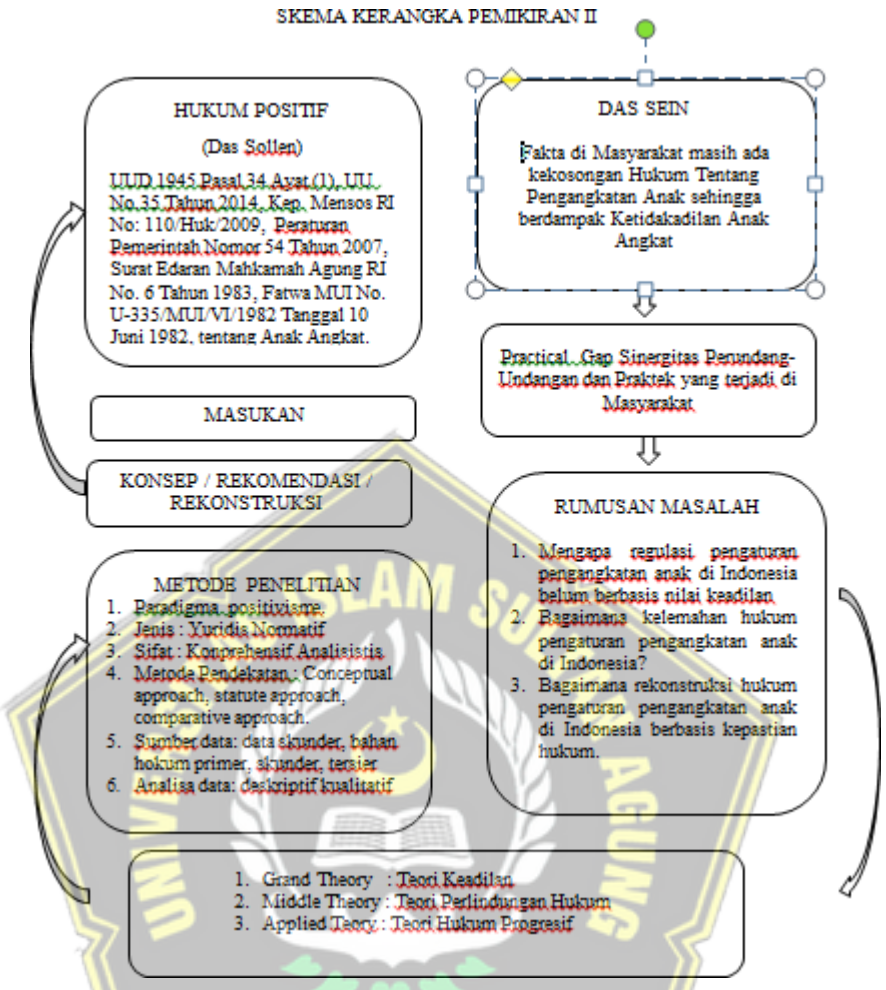
Untuk memudahkan penulis mengkaji penelitian ini maka disusun kerangka pikir mengenai Rekontruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan yang terbagi ke dalam beberapa pikiran, yaitu penulis melakukan eksploarasi Praktik pengangkatan anak, dan kemudian melakukan tinjauan hukum

[95] Satjipto Rahardjo dalam Mukhidin, 2014, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September – Desember 2014, hal. 280.

terhadap Praktik pengangkatan anak di Indonesia dengan menggunakan penelitian empiris-normatif. Lebih lanjut penulis gambarkan sebagai berikut:



Bagan 1. Skema Kerangka Pemikiran 1



Bagan 2. Skema Kerangka Pemikiran 2

H. Metode Penelitian

Riset sekarang ini semakin berkembang dan digunakan dalam berbagai bidang untuk menemukan hal-hal yang baru. Penemuan baru ini digunakan sebagai bentuk menciptakan pengetahuan baru atau sebagai bentuk memperbaiki penemuan sebelumnya yang mana dalam faktanya harus ada pembaharuan. Dalam riset tidak pernah lepas dari namanya metode penelitian yang digunakan.

Metode penelitian adalah langkah yang harus dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian ini memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

Istilah penelitian berasal dari bahasa Inggris, yaitu research, yang berasal dari dua kata re dan search. Pengartian leksikal re diartikan : kembali dan search : mencari. Dengan demikian secara harfiah, dapat diartikan pencarian kembali. Sedangkan metode yaitu posedur atau tata cara guna mengatahui suatu hal dengan langkah-langkah yang sistematis.

Sedangkan Metode dalam dunia riset merupakan cara atau proses yang dipilih oleh peneliti secara spesifik sebagai bentuk menyelesaikan perihal masalah yang diajukan dalam riset. Pengertian dari metodologi penelitian yaitu ilmu yang mengajarkan atau menjelaskan tentang bagaimana harusnya penelitian tersebut dilaksanakan.

Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam permasalahan penelitian ini maka disusun kerangka penelitian sebagai berikut:

1. Pradigma Penelitian

Istilah Paradigma berasal dari Thomas Kuhn, yang kemudian berkembang sedemikian rupa. Konteks paradigma dan paradigmatik, bergulat dengan berbagai

kisah para ilmuan yang memperdebatkan bagaimana seharusnya ia diposisikan.[96] Kuhn menjelaskan bahwa perjalanan dimulai dari paradigma lama pada normal sains, lalu dalam perjalannya muncul anomali, yang kemudian melahirkan krisis, lalu terjadi revolusi sains, hingga muncul teori baru.[97]

Paradigma dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya. Ia dapat meliputi kode etik, maupun pandangan dunia, yang mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu.[98]

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma positivisme. Paradigma positivisme mencakup pada pendekatan sistematis dalam mengumpulkan data dilapangan dan menemukan hukum-hukum alam yang terjadi. Comte beranggapan bahwa hukum alam merupakan pernyataan dari keteraturan hubungan yang terjadi diantara Praktik sosial dengan sosial lainnya. Untuk itu, paradigma positivistik harus mampu menjawab persoalan dan tantangan terhadap gejala secara empiris. Paradigma positivistik percaya bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan metode yang digunakan mampu menemukan hukum-hukum alam dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, paradigma positivistisme dianggap real dan bermanfaat untuk menyederhanakan fenomena sosial yang terjadi.

---

[96] Sulaiman, 2018, *Paradigma Dalam Penelitian Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2, (Agustus, 2018), hal. 256.

[97] Thomas S. Kuhn, 1970, *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago Press, Chicago, hal. 10.

[98] Liek Wilardjo, 1990, *Realita dan Desiderata*, Yogyakarta, Duta Wacana University Press, hal. 134.

Paradigma positivistik memperhatikan keterbukaan tehadap data baru dan diklaim sebagai satu-satunya pengetahuan yang sejati unutk mengimplikasi dari kekuatan ilmiah dengan menjelaskan fakta-fakta secara empiris. Secara tidak langsung, paradigma positivistik meletakkan dan mengklaimkan dirinya sebagai metodologi ilmiah yang menunjukkan watak idiologi. Paradigma positivistik dalam kajian sosiologi dikemukakan juga oleh Talcott Parson yang membagi paradigma positivistik utilitarian dan anti-intelektual. Paradigma positivistik yang dikemukakan oleh Parson sebagai titik untuk menekankan bahwa perilaku manusia bersifat deterministik. Asumsi ini mengandung bahwa perilaku hanya terkandung sebagai suatu fungsi saja dari situasi. Secara teoritis Parson menyatakan bahwa tindakan manusia yang mengatur atau mengendalikan pilihan alat dan tujuan diabaikan. Dalam paradigma tersebut bahwa perilaku manusia tunduk kepada lingkungan pada proses subjektif sama sekali diabaikan. Oleh sebab itu, perilaku manusia dikaitkan dengan alam dan lingkungan yang tentunya bersifat materil dari aspek genetis.[99]

2. Jenis Penelitian

Soerjono Sukanto seorang tokoh sosiologi hukum menjelaskan bahwa dalam ilmu hukum ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum emperis.[100]

Penelitian hukum normatif menggunakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundangan, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

[99] *Ibid.*, hal.32

[100] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tnjauan Singkat*, Cet. Ke-11, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal.13.

Menteri hingga Surat Edaran Mahkamah Agung. Dalam penelitian ini seorang peneliti selalu mendasarkan pemikirannya pada aturan perundangan sebagai bahan hukum utama. Penelitian atas bahan-bahan hukum seperti perundan-undangan dan putusan pengadilan tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah penelitian sosial, mengingat ia memisahkan hukum dari segala bentuk analisis non hukum.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.[101]

Sedangkan penelitian hukum empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan *(field research)* adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk mempelajari kejadian yang ada dilapangan atau masyarakat yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

Jenis Penelitian dengan judul Rekontruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan ini merupakan penelitian hukum normatif, karena meneliti norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

Untuk pengumpulan data pada penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data skunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain

[101]Soerjono Soekanto, dalam Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, hal. 197.

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.[102] Akhirnya Johanes menyimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library research)* berdasarkan data skunder.[103]

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat komprehensif analitis yaitu berupaya menggambarkan peraturan-peraturan yang sedang berlaku yang juga disebut hukum positif dan selanjutnya dihubungkan dengan teori-teori hukum. Analisis data yang dilakukan tidak lepas dari ruang lingkup permasalahan dan mendasarkan kepada teori atau konsep yang bersifat umum untuk menjelaskan semua data.[104]

Adapun prosesnya dimulai dengan mengelompokkan informasi dan data yang sama menurut sub aspek dan hubungannya satu dengan yang lain. Selanjutnya setelah dilakukan analisis dan interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang lain dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif.

---

[102] Soerjono Soekanto dalam Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, hal. 26.

[103] Johanes Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Rineka Cipta, hal.13

[104] Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 38.

4. Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah dari sebuah penelitian baik pada pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Kalau cara pendekatannya tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannyapun dapat digugurkan. Hal itu tentu tidak dikehendaki oleh peneliti. Demikian pula dalam penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, maka menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Oleh karena itu diperlukan untuk mengetahui pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif.[105]

Pada umumnya pendekatan penelitian yang digunakan dalam Penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5 (lima) macam pendekatan yakni (1) pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, (2) pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, (3) pendekatan historis *(historical approach)*, (4) pendekatan Kasus *(case approach)* dan (5) pendekatan perbandingan *(comparative approach)*.[106]

Pada penelitian hukum nornatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat di tinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konsepsionil mutlak di perlukan, maka di dalam menyusun kerangka konsepsionil diperlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.[107]

---

[105] Suhaimi, 2018, *Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal YUSTITIA Vol. 19 No. 2 Desember 2018, hal. 207

[106] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif…. Ibid*, hal. 14

[107] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 3

Adapun Disertasi Rekontruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan ini menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, pendekatan perbandingan *(comparative approach)* dan pendekatan Kasus *(case approach)*.

Untuk lebih jelasnya akan peneliti uraikan tentang pendekatan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a) **Pendekatan konseptual *(conceptual approach).***

Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Pendekatan konsep digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran (multi tafsir). Jikalau seorang peneliti salah dalam memahami konsep hukum, maka merupakan konsekuensi logis akan mengalami kesalahan dalam penelitiannya. Dalam ilmu hukum, konsep hukum pidana akan berbeda dengan hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi dan hukum lainnya. Oleh karena itu pendekatan konsep ini menjadi sangat penting digunakan.[108]

b) **Pendekatan Perundang-undangan *(statute approach)***

Salah satu pendekatan yang dilakukan pada penelitian normatif adalah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1) Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
2) All-inclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
3) Systematic bahwa disamping bertautan antara satu dengan lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.[109]

[108] Suhaimi, 2018, *Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum…, Ibid*, hal. 208.
[109] Johnny Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, hal. 206.

Menurut Peter Machmud bahwa pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.[110]

Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan sebagainya.

c) **Pendekatan Perbandingan *(comparative approach)***

Pendekatan perbandingan *(comparative approach)* merupakan jenis pendekatan yang peneliti gunakan untuk mencoba membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara. Untuk itu dalam penelitian ini dikenal dengan 2 Pendekatan perbandingan *(comparative approach)*, yakni pendekatan perbandingan makro *(macro comparative approach)* serta pendekatan perbandingan mikro *(microcomparative approach)*.

Pendekatan menggunakan perbandingan makro *(macro comparative approach)* digunakan untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi diberbagai negara, sedangkan pendekatan perbandingan mikro *(microcomparative approach)* hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode waktu tertentu.

Pentingnya pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum karena dalam hukum tidak dimugkinkan dilakukan suatu eksprimen. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan

[110] Peter Machmud, 2016, *Penelitian Hukum….,* hal. 93

lembaga hukum yang lain. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui tentang persamaan dan perbedaannya dari kedua lembaga hukum tersebut.[111]

Sedangkan Sunaryati, berpendapat bahwa dengan melakukan perbandingan hukum akan dapat ditarik kesimpulan: *pertama*, kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula. *Kedua*, kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.[112]

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut.

d) **Pendekatan Kasus *(case approach)***

Pendektan kasus kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.[113] Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam Praktik hukum.[114] Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti

---

[111] Suhaimi, 2018, *Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum…, Ibid*, hal. 208.

[112] Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.hal. 2. Lihat juga Suhaimi, 2018, *Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum…, Ibid*, hal. 208.

[113] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, hal.134.

[114] Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Publishing, hal. 26

adalah ratio decidendi, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya".

Dengan pendekatan kasus ini, diharapkan pertimbangan hakim dapat menambah argumentasi hukum dalam penelitian ini.

1. Sumber Data

Mengenai sumber data dalam penelitian pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data skunder.[115]

Adapun data dalam penelitian skunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokomen-dokomen resmi, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel serta dokomen-dokomen yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas. Untuk bahan hukum skunder ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Bahan hukum primer diperoleh dari kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan penelitian terdahulu. Sehingga bahan hukum primer dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui catatan-

[115] Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitiam Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal.13.

catatan, arsip, dan dokumen dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi primer. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak bagi Golongan Tionghua;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
6. Kep. Mensos RI No: 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
7. Perpres RI No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penduduk;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengangkatan Anak;
11. Fatwa MUI No. U-335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982, tentang Anak Angkat.

b) Bahan Hukum sekunder

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum skunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum skunder

dapat berupa seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang terkait, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan hukum, karya-karya hukum para ahli terkemuka (Pakar).

c) Bahan Hukum Terser

Selanjutnya adalah bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumolatif dan seterusnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen (Studi Kepustakaan)

Teknik pengumpulan bahan hukum memfokuskan studi pustaka dengan melacak seluruh dokumen utuh peraturan perundang-undangan yang terkait tema penelitian. Pendekatan konseptual atau *conseptual approach* yang lebih esensial dilakukan adalah penelusuran buku-buku hukum *(treaties*) yang di dalamnya banyak terkandung konsep-konsep hukum,[116] yang terkait dengan isu hukum Praktik pengangkatan anak.

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Disebut deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang

[116] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 24

bersifat khusus. Mengenai hal ini, peneliti akan membahas permasalahan Praktik pengangkatan anak secara umum terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan Rekontruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Keadilan.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik di mana data di kumpulkan melalui teknik percakapan dengan tujuan memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara akan di peroleh data kualitatif. Data tersebut diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya. faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data adalah sebagai berikut: (1). Kualitas pewawancara (2). Kualitas yang diwawancarai (3). Sifat dari masalah yang diteliti.[117]

Masalah yang akan digali dalam wawancara ini adalah sebagai berikut:

1) Pemalsuan identitas anak angkat;
2) Pengangkatan anak tanpa prosedur atau ilegal;
3) Diskriminasi antara anak kandung dan anak angkat
4) Ingin mengambil kembali anak angkat
5) Orang tua angkat menghalang-halangi pertemuan antara anak angkat dengan orang tua kandung.

[117] Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI-Press, hal. .21-25

7. Analisis Data

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan metode *deskriftif kualitatif*. Kualitatif artinya mengukur dan menguji data dengan konsep teori dan peraturan perundang-undangan. Dimana, dengan metode ini diharapkan memperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa terhadap Rekontruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan.

Penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu; Norma Hukum Positif, Yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan Doktrin (pendapat sarjana). Ketiga dasar tersebut, mempunyai urutan secara hierarkis. Maksudnya untuk mencari apa yang akan dijadikan sebagai dasar menganalisis, maka pertama-tama haruslah dicari terlebih dahulu norma hukum positifnya, lalu baru dicari bagaimana yurisprudensi yang terkait dengan itu, dan pada tahap akhir barulah dicari, bagaimana doktrin yang terkait dengan masalah tersebut dipergunakannya ketiga hak tersebut sebagai dasar, merupakan konsekuensi dari dipergunakannya optik yang preskriptif dan adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom.[118]

I. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya laporan hasil ilmiah yang standar dalam bentuk disertasi, maka laporan ini menjelaskan secara teknis prosedural. Hal ini untuk

[118]Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Juni 2020, hal. 27

mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan disertasi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan.

Pembahasan disertasi ini terbagi menjadi enam bab, dari setiap bab terdiri dari sub bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Paradigma Penelitian, Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Pendekatan konseptual, Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan perbandingan, Pendekatan Kasus, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisa Data, Sistematika Penulisan, Orisinalitas Penelitian, dan Waktu Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang: Sejarah Pengangkatan Anak, Sejarah Pengangkatan Anak Menurut Staatsblad 1917 Nomor 129, Sejarah Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Sejarah Pengangkatan Anak Menurut Perundang-undangan RI, Sejarah Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam, Sejarah Pengangkatan Anak di Indonesia, Adopsi sebagai Lembaga Hukum, Kedudukan Anak Angkat, Latar Belakang Pengangkatan Anak, Hak dan Kewajiban Anak Angkat, Pencatatan Anak Angkat dalam catatan sipil, Akibat hukum pengangkatan anak, dan Pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan,

BAB III Mengatur tentang Pengangkatan Anak Di Indonesia, Berisi tentang Dasar Hukum Pengangkatan anak, Perkembangan Aturan Pengangkatan Anak di

Indonesia, Prosedur Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan, Pengaturan Anak Angkat, Prosedur Pengangkatan Anak, Proses Permohonan Pengangkatan Anak, Dampak Pengangkatan Anak, dan Pengangkatan Anak Oleh Warga Negara Asing,

BAB IV Berisi Kelemahan Undang-Undang Pengangkatan Anak. Membahas tentang Penegakan Hukum, Kebijakan Penegakan Hukum, Problematika Penegakan Hukum di Indonesia, Dampak dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, Problematika Penegakan Hukum di Indonesia, dan Kelemahan Peraturan Perundangan Pengangkatan Anak, Ketidakadilan Regulasi Pengangkatan Anak, Masih Ada orang tua angkat yang tidak mencatatkan anak angkatnya di akta kelahiran, masih ada Penggantian Identitas Anak Angkat dan Masih ada Pengangkatan Anak Secara Elegal.

Bab V tentang Rekontruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Keadilan, berisi tentang Prosedur Pengangkatan Anak di beberapa Negara Tetangga, Perbandingan Regulasi Pengangkatan Anak Negara Indonesia dan Negara Tetangga, Beberapa Putusan Pengadilan Berkaitan dengan Permohonan Pengangkatan Anak, dan Rekonstruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Keadilan.

BAB VI Penutup, berisikan kesimpulan dan saran.

J. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran pada perpustakaan dan sumber informasi lainnya, penelitian yang memiliki fokus kajian tentang Rekontruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan, penulis belum menemukan disertasi yang membahas masalah ini. Disertasi yang memiliki relevansi dengan disertasi ini, sebagai bahan pembanding orisinalitas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Orisinilitas Penelitian

No.	Judul Disertasi	Penulis Disertasi	Temuan Desertasi	Kebaruan Penelitian
1	Rekonstruksi Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila	Herwin Sulistyowati, UNISSULA, Semarang, 2020	1. Sanksi pidana kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual anak dalam konsep pemidaan di Indonesia adalah bertentangan dalam persfektif Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, HAM, dan Hukum Islam 2. Kelemahan lain adalah pada substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum	1. Perlu adanya rekonstruksi nilai, sanksi pidana harus berdasarkan nilai-nilai pancasila. 2. Rekonstruksi Norma pada pasal 81 ayat (7) yang berisi ancaman pidana mati dihapus
2	Rekonstruksi Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing Yang Berbasis Nilai Keadilan	Maria Olfah, Mahasiswa UNISSULA, Semarang, 2019	Hasil penelitian Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry adoption) belum berkeadilan karena proses pengangkatan anak berupa gugatan ke pengadilan, dengan hasil akhir dalam bentuk putusan pengadilan karena pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh	Perlu ada rekonstruksi hukum terhadap pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara asing agar anak WNI yang diangkat tersebut tidak dirugikan

			Warga Negara Asing tidak mewajibkan anak angkat memperoleh hibah dari orang tua angkatnya yang Warga Negara Asing.	
3	Kekuatan Hukum Akta Pengangkatan Anak Yang Dibuat Dihadapan Notaris Sesudah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	Deasy Evi Phani Togatorop	1. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak sesuai Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah tidak sah dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan negeri setempat 2. Akibat hukum pengang-katan anak yang tidak sesuai hukum adat adalah pengang katan anak tersebut tidak sah dan diakui secara adat, selain itu terhadap pengang katan anak tersebut dapat dimintakan pembatalan kepa da pengadilan negeri atau pengadilan agama setempat.	Pengangkatan anak harus sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan
4	Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam	Happy Budiyana Sari, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009	1.Berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini kelak berkaitan dengan sistem waris dan perkawinan. 2. Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan mendasar terhadap kewenangan Peradilan Agama. Salah satu perubahan itu adalah perkara pengangkatan anak	Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab

			termasuk kewenangan baru pengadilan agama sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 20.	
5	Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Kaliwungu Pemerintah Kabupaten Semarang".	Triyono, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006	Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang karena faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukumnya dari praktik pengangkatan anak itu sendiri. Misalnya bila orang tua angkatnya yang semula tidak mempunyai anak setelah mempunyai anak maka perhatian ke anak angkat menjadi berkurang baik dari segi pendidikan maupun dari segi materi, faktor sosial yaitu menyangkut pengaruh sosial terhadap pengangkatan anak yang membutuhkan waktu untuk penyesuaian terhadap perbuatan hukum tersebut, faktor psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan dari anak angkat tersebut yang ditimbulkan adanya perpindahan lingkungan yang secara cepat dan sekaligus.	Diperlukan adanya peraturan khusus yang berupa Undang-undang yang mengatur mengenai lembaga pengangkatan anak secara lengkap dan memenuhi semua aspirasi rakyat untuk semua golongan penduduk Indonesia
6	Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumny Dalam Pembagian Warisan Menurut	Jiiy Ji"Ronah Muayyah Universitas Diponegoro Semarang 2010	Akibat hukum anak angkat tidak bernasab dan tidak sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya Anak Angkat mewaris dengan jalan hak wasiat wajibah	Anak Angkat bisa mendapat warisan dengan cara wasiat wajibah

	Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam		dengan ketentuan tidak melebihi 1/3 dari harta warisan	
7	Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) yang Dilakukan oleh Warga Masyarakat di Indonesia	Husnah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009	Pengangktan anak (adopsi) pada kenyataannya dimasyarakat banyak terjadi penyimpangan. Penyimpangan tersebut adalah pengangkatan anak tanpa melalui prosedur	Pelaksanaan undang-undang pengangkatan anak perlu ada pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Pengangkatan Anak

1. Sejarah Pengangkatan Anak di Indonesia

Pengangkatan anak bukanlah hal yang baru di Indonesia. Mulai dulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan aturan hukum dan perasaan hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan.

Pada negara Indonesia pengangkatan anak mulai menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan karena menyangkut kepentingan orang perorangan dalam keluarga. Oleh sebab itu lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi ini, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad nomor 129 Tahun 1917 yang mengatur tentang pengangkatan anak yang dalam bab II diatur tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa.

Pada Staatsblad ini ada disebutkan bahwa yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda ataupun janda yang tidak mempunyai anak laki-laki dengan ketentuan bahwa janda yang

bersangkutan tidak ditingglkan amanah berupa surat wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak.

Pada Staatsblad 1917 nomor 129 ini hanya sebagai pedoman bahwa yang boleh diangkat yaitu anak laki-laki sedangkan untuk anak perempuan dengan tegas diatur dalam pasal 15 ayat 2 bahwa "pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum".

Setelah zaman kemerdekaan pada tahun 1958 diterbitkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang mengatur Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada Undang-Undang ini mengenai hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak dimuat dalam pasal 2.[119] Selanjutnya pada tahun 1977 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang mengatur tentang gaji pegawai negeri sipil yang memungkinkan mengangkat anak di Pengadilan Negeri.[120] Sejak itu pengangkatan anak mulai banyak dilakukan oleh para pegawai negeri sipil dengan berbagai motivasi.

Pada tahun 1978 dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 yang mengatur tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak, khususnya anak angkat maka pada Tahun 1979 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979

[119] Pasal 2, Undang-Undang No.62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LN No. 113 Tahun 1958, TLN No. 1647.

[120] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 7 Tahun 1977, LN No. 11 Tahun 1977, TLN No. 3098

tentang Kesejahteraan Anak, dalam Undang-Undang ini pun diatur secara tegas motif dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat tersebut seperti yang diatur pada pasal 12 Undang-undang ini.[121]

Selanjutnya pada tahun 1983 dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Surat Edaran ini merupakan petunjuk dan pedoman bagi para hakim dalam mengambil keputusan atau penetapan bila ada permohonan pengangkatan anak.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Maksud dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial ini adalah sebagai suatu pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak, agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

Kemudian dalam rangka untuk melindungi, dan pemenuhan hak-hak serta peningkatan kesejahteraan anak, akhirnya pada tahun 2002 disahkanlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan merupakan

[121] Pasal 12, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN No.32 Tahun 1979, TLN No. 3143.

salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang sering muncul yaitu dengan memberikan kesempatan kepada orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak dengan tujuan agar kepentingan terbaik bagi anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan masyarakat setempat.

Kemudian pada tahun 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh serta Nias, yang telah menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan para relawan asing untuk mengangkat anak-anak korban bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami tersebut sebagai anak angkat. Akhirnya para LSM dan Badan Sosial keagamaan lainnya berpendapat bahwa praktik seperti ini sangat membahayakan akidah bagi anak yang diangkat oleh orang asing tersebut maka dibentuklah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak yang mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 2005.

Banyaknya penyimpangan yang ada dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak yaitu pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak maka untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut diperlukan adanya suatu aturan secara khusus tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang sesuai prosedur, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Hal ini dimuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak yang merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengaturan pengangkatan anak di Indonesia dalam perundang-undangan beberapa kali mengalami kegagalan akibat adanya perbedaan yang prinsipil mengenai konsepsi pengangkatan anak. Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ada berdasarkan pada konsepsi pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 dan tradisi pengangkatan anak zaman jahiliyah yang berbeda dengan konsepsi pengangkatan anak yang diatur dalam hukum Islam. Namun beberapa hal mendasar mengenai pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam mulai dimuat dalam perundang-undangan, yaitu Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41.

Pada saat sekarang undang-undang nomor 23 Tahun 2002 ini sudah dirasa ketinggalan dengan perkembangan masyarakat sehingga diganti dengan undang-undang nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Sejarah Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Sebenarnya sejarah pengangkatan anak sudah ada dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut menjelaskan,bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah ada dan dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa

Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa lain pada zaman kuno.[122] Sebelum Islam datang, pengangkatan anak dikalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun temurun yang dikenal dengan istilah "*tabanni*" yang artinya mengambil anak angkat.[123]

Pada sejarah Islam masalah pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mantan Rektor Universitas Al-Azhar Kairo Mesir Mahmud Syaltut dan juga seorang mujtahid menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah diPraktikkan oleh masyararkat bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang diPraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan sebutan *at-tabanni* dan sudah menjadi tradisi secara turun-menurun.[124]

Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anak Rasulullah ini diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy. Kemudian Allah menurunkan ayat tentang larangan perbuatan tersebut dalam firmanNya QS. Al-Ahzab: 4-5.

Bunyi surah al Ahzab ayat 4 adalah sebagai berikut:

[122] H. Ahmad Kamil, dkk., *Op cit*. hal 98.

[123] Muderiz Zaini, 1995, *Adopsi Suatu Tinjaian dari Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 50.

[124] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak* ... Ibid, hal. 22

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰۤـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ

Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).[125]

Sedangkan bunyi surah al Ahzab ayat 5 adalah sebagai berikut:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[126]

Surat al-Ahzab tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut: "Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu dada manusia". Pangkal ayat ini adalah dasar hidup untuk jadi pegangan bagi orang yang mempunyai aqidah Tauhid.

[125] Al Qur"an Surah Al Ahzab ayat 4.
[126] *Ibid*, ayat 5.

Pada ayat tersebut dijelaskan yang pada intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum yang memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dari asbabun nuzul ayat Al-Qur‟an tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan anak itu boleh dilakukan, karena Nabi Muhammad saw telah memPraktikkannya, tetapi pengangkatan anak itu tidak mengubah status nasab seseorang, karena Allah SWT telah menyatakannya dalam Al-Qur‟an bahwa status nasab Zaid tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya berkata, "sesungguhnya ayat ini turun (untuk menjelaskan) keadaan Zaid bin Haritsah, mantan budak Rasulullah SAW sebelum diangkat sebagai nabi, Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai anak sehingga dipanggil Zaid bin Muhammad.[127]

Sedangkan menikahi bekas istri anak kandung diharamkan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini dan tetap tidak boleh saling mewaris.

Pasal 209 ayat (2) KHI menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, paling banyak sepertiga dari harta warisan.[128] Lembaga wasiat wajibah merupakan bagian dari kajian wasiat pada umumnya. Persoalan wasiat

[127] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Diterjemah M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al Atsari, 2007, *Tafsir Ibnu katsir Jilid 6,* Pustaka Imam As-Syafi‟i, Jakarta, hal 442

[128] Ribyal Ka‟bah, dalam Haedah Faradz, 2009, *Penangkatan Anak Menurut Hukum Islam,* Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 N0. 2 Mei 2009, hal. 156.

wajibah sangat relevan dengan kajian hukum pengangkatan anak (*taban-ni*) dalam Hukum Islam, karena salah satu akibat dari peristiwa hukum pengangkatan anak adalah timbulnya hak wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkatnya.[129]

Al-Imam Al-Lausi juga menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menasabkan ayah kepada yang bukan ayahnya. Unsur kesengajaan menasabkan seseorang kepada seorang ayah yang bukan ayahnya padahal ia mengetahui ayahnya yang sebenarnya, adalah penyebab haramnya perbuatan tersebut, tetapi mengambil dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya.[130]

Fatwa majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada Maret 1984 mengemukakan sebagai berikut:

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak

[129] Ahmad Kamil & M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungandan Pengangkatan anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 125

[130] Zakaria Ahmad, dalam Haedah Faradz, 2009, *Penangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 N0. 2 Mei 2009, hal. 157.

sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal salih yang dianjurkan oleh agama Islam.

4. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 juga merendahkan martabat bangsa.

B. Pengangkatan Anak Dalam Persfektif Hukum Islam

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W., pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dengan istilah tabanni yang berarti mengambil anak angkat. Secara terminologis tabanni menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabbani*) "Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya". Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.[131]

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau

[131] Kamil, Ahmad, dan Fauzan,M, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hal.96.

pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orangtua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya.

Selain melarang tawaruts (saling mewarisi) antara anak dan ayah angkatnya. Islam juga membolehkan untuk menikahi istri anak angkat atau sebaliknya. Allah SWT telah menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy Al‟ Asadiyyah bekas istri Zaid bin Haritsah. Dengan tujuan wallahu a‟lam supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluanya (setelah talak dan habis „iddahnya) sebagaimana firman Allah SWT dalam QS : Al-Ahzab ayat 37 yang artinya

> “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu‟min untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya.”

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3) Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal/alamat.

4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.[132]

Dengan demikian, menurut hukum Islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang hubungannya seperti pemeliharaan anak. Oleh karena itu, ada penulis dari kalangan Islam yang cenderung menyebut hubungan demikian pengangkatan anak melainkan memungut anak (*laqiety*) yang secara tegas dibedakan dengan pengangkatan anak (adopsi). Tetapi pada umumnya orang tidak keberatan dengan istilah pengangkatan anak (adopsi) asalkan diberi arti sebagaimana dimaksud oleh agama Islam di atas.[133]

Menurut fatwa MUI pusat, bahwa mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.[134]

Ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari pelarangan merubah nasab anak angkat dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya adalah sebagai berikut:

---

[132] Zaini, Muderis, *Op. Cit*., hal. 54

[133] Mardani, 2019, *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2, Desember 2019, hal.119-120.

[134] MUI Pusat, dalam Mardani, 2019, *Pengangkatan Anak*..., hal.125.

1) Islam sangat memperhatikan tegaknya lembaga keluarga dan menjaga hak-hak anggotanya karena faktor kekerabatan. Hubungan ini dapat terganggu bahkan dapat hancur karena hadirnya orang lain dalam keluarga tersebut;
2) Untuk menghindari kesalahpahaman antara yang halal dan haram. Kehadiran anak angkat dalam suatu keluarga apalagi disamakan dengan akan kandung, berarti ia telah menjadi mahram yang tadinya bukan mahram dan boleh saling kawin. Anehnya lagi boleh jadi tidak berlaku ayat yang melarang melihat aurat tertentu keluarga ayah angkatnya. Padahal pembolehan ini hanya berlaku kepada keluarga tertentu saja; dan
3) Masuknya anak angkat dalam salah satu keluarga dapat menimbulkan permusuhan dalam keluarga tersebut. Dapat antara anggota keluarga atau antara mereka dengan anak angkat itu. Seharusnya anak angkat tidak mendapat warisan sehingga menutup atau mengurangi bagian yang harus dibagikan kepada ahli waris lain.[135]

C. Adopsi sebagai Lembaga Hukum

Hukum sebagai institusi keadilan akan menjalankan fungsinya melalui suatu proses tertentu menuju ke suatu arah tertentu dalam rangka mewujudkan keadilan, sehingga keadilan menjadi sesuatu yang konkrit sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Penegakan hukum, dalam kehidupan

[135] M. Anshari, 2014, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung, Mandar Maju, hal. 130.

ketatanegaraan dijalankan oleh pemerintah (*executive organ*) dan oleh pengadilan (judicial organ).[136]

Peraturan baik yang dibuat oleh badan tertentu di dalam suatu negara atau yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, akan secara efektif berfungsi mewujudkan ketertiban dan keadilan manakala perilaku anggota dalam masyarakat sesuai dengan hukum itu. Namun jika tidak dijalankan maka keadilan dan ketertiban masyarakat akan jauh dari terwujud. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban itu dalam masyarakat yang berhukum melalui pendekatan-pendekatan tertentu. Penegakan hukum dalam rangka keadilan dan ketertiban harus dikelola dengan baik guna menjamin dipatuhinya hukum dalam masyarakat.[137]

Berhubung anak angkat tidak mempunyai hubungan mahram dengan keluarga orang tua angkatnya, maka berlaku hukum sebagai berikut:[138]

1) Orang tua angkat beserta keluarganya tidak berhak menjadi wali pernikahan anak angkat perempuan;
2) Anak angkat laki-laki tidak berhak menjadi wali pernikahan saudara angkat perempuan;
3) Orang tua angkat beserta keluarganya tidak boleh khalwah (berdua-duaan) dengan anak angkat yang berlainan jenis dan telah baligh;

[136] Anna Triningsih, 2015, *Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law dan Common Law)*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, hal. 135.

[137] Satjipto Rahardjo, 2008, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Publishing, hal.284.

[138] Mardani, 2019, *Pengangkatan Anak…*, hal.129.

4) Menurut Imam Syafi‟i, persentuhan kulit anak angkat dengan orang tua angkat beserta keluarganya yang berlainan jenis membatalkan wudu; dan
5) Anak angkat tidak berhak saling mewarisi dengan orang tua angkat dan keluarganya, karena harta pusaka hanya diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan pernikahan dengan orang yang wafat. Oleh karena itu, bila orang tua angkat ingin memberikan sesuatu harta benda kepada anak angkatnya, hendaklah diberikan sewaktu mereka masih hidup (dalam bentuk hibah) atau dalam bentuk wasiat.

Mengacu pada beberapa motivasi adopsi sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat dimengerti bahwa adopsi merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang mempunyai fungsi sosial yang tidak kecil artinya bagi keluarga dan masyarakat keseluruhan. Dalam konteks ini maka adopsi telah menempatkan diri sebagai lembaga yang dibutuhkan masyarakat, dan oleh karenanya diperlukan pengaturan yang jelas demi tercapainya ketertiban dalam mekanisme pelaksanaannya.

Pengaturan sebagaimana tersebut di atas diperlukan karena dalam adopsi paling tidak ada dua kepentingan yang ingin dilindungi, yakni kepentingan orang tua angkat dan kepentingan anak yang akan diangkat. Bagi orang tua angkat akan terjamin kepastian hukumnya terutama terhadap motivasi melakukan adopsi yang diijinkan oleh pemerintah, sementara bagi kepentingan anak akan lebih terjamin masa depannya terhadap kemungkinan adanya tujuan yang menyimpang dari adopsi yang semestinya. Sebagai suatu lembaga hukum maka kepentingan masyarakat akan terjamin karena misi hukum adalah mempertahankan ketertiban dan perdamaian diantara manusia.

Sebagai suatu lembaga hukum maka adopsi memerlukan landasan hukum sebagai dasar pengaturannya. Bagaimana sebenarnya pengaturan adopsi ini di Indonesia mengingat adopsi ini tidak saja dikenal oleh hukum adat Tionghoa yang kemudian diadopsi oleh hukum Belanda tetapi juga karena pengangkatan anak ini sudah sejak nenek moyang kita dikenal dalam lingkungan masyarakat adat. Pengaturan mengenai pengangkatan anak dalam adat Indonesia sangat variatif, tergantung pada sistem kekerabatan yang berlaku dalam wilayah adat tersebut terutama mengenai konsekuensi hukum yang ditimbulkannya.

Apabila dalam suatu wilayah adat memberlakukan sistem kekerabatan parental (misalnya Jawa) maka pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Anak angkat akan ngangsu sumur loro atau ngombe sumurloro, artinya selain memiliki hubungan hukum dengan orang tua angkat juga hubungan hukum tetap ada dengan orang tua kandungnya. Pada sistim kekerabatan patrelenial (misalnya Bali) pengangkatan anak membawa konsekuensi hukum lepasnya hubungan hukum antara anak dengan orangtua kandung dan beralih pada orang tua angkat.[139]

Menurut pendapat seorang Sarjana Hukum Belanda yang khusus mempelajari tentang pengangkatan anak, yaitu J.A. Nota bahwa pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum, melalui mana seorang berpindah kedalam ikatan keluarga yang baru

[139] M. Budiarto, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum,* Jakarta, Akademika Pressendo, hal. 27.

sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan-hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.[140]

Pada hukum di negeri Belanda (yang berlaku dl wilayah Hindia Belanda berdasarkan asas korkordansi) semula tidak mengenal adopsi. Sebagaimana disinggung di atas, lembaga ini pada awalnya merupakan kebiasaan masyarakat Tionghoa yang mengangkat anak laki-laki sebagai upaya melanjutkan keturunan bagi mereka yang dalam perkawinannya tidak memiliki anak, selain itu juga adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak akan mampu melestarikan abu para leluhurnya. Realitas yang demikian kemudian direspon oleh pemerintah Belanda dengan mengeluarkan Stb.1917 No.129. Konsekuensi hukum dari adanya adopsi dalam hukum tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 Stb 1917 No. 129 yang menyatakan bahwa adopsi tersebut membawa konsekuensi gugurnya hubungan keperdataan antara keluarga alam dengan anak yang diadopsi.

D. Kedudukan Anak Angkat

1. Kedudukan Anak Angkat Menurut Burgerlik Wetboek (BW)

Menurut pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang

[140] Dewi Sartika, 2002, *Keduduk an Anak Angk at Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya*, Semarang, Pustaka Pelajar, hal.45.

dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Maksudnya adalah akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.[141]

Akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam Staatblaad 1917 Nomor 129, maka anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (ps. 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (pasal 12 ayat (1), anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat; karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).[142]

KUHPerdata atau BW tidak mengenal masalah adopsi, yang diatur dalam BW adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yakni dalam BW buku I bab XII bagian ke III pasal 280 sampai dengan 290. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan adopsi karena KUHPerdata tidak mengenal adopsi maka bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah.

Namun demikian di negeri Belanda sendiri baru-baru ini Staten General telah menerima baik sebuah Undang-undang tentang adopsi. Landasan pemikirannya ialah timbulnya golongan manusia baru di seluruh Eropa yakni:

a. Para orang tua yang telah kehilangan anak, dan tidak mendapatkan anak lagi secara wajar.

---

[141] http://www.lbhapik.or.id/adopsi

[142] Staatsblaad di atas Penulis kutip dari Budiarto, 1991, cet ke-2., *Pengangkatan Anak ditinjau dari segi hukum*, Jakarta, Akademika Pressindo, hal.21- 22

b. Anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya yang meninggal dalam peperangan.

c. Lahirnya banyak anak di luar perkawinan.

Menurut pandangan hukum barat dijelaskan siapa yang boleh mengadopsi dan boleh di adopsi.

Siapa yang boleh mengadopsi diatur dalam Stb 1917 No. 129 pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki beristeri atau pernah beristeri tak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, boleh mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya.

Pada ayat 2 disebutkan, bahwa pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut, bersama-sama dengan isterinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri. Sedang ayat 3 menyatakan, apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi, dan oleh suaminya yang telah meninggal dunia tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaktub ayat ke satu pasal ini, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh isterinya, maka pengangkatan itupun tak boleh dilakukannya.

Pasal 6 dan 7 mengatur tentang siapa saja yang dapat diadopsi. Pasal 6 menyebutkan yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristeri pun tak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Pasal 7 ayat 1 menyebutkan, orang yang diangkat harus paling sedikit 18 tahun lebih muda

daripada usia suami dan paling sedikit 15 tahun lebih muda daripada si isteri atau si janda yang mengangkatnya. Sedang ayat 2 mengemukakan, bahwa apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun keluarga di luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia diangkat.

Pada Staatsblad 1917 No. 129 tak ada satu pasal pun yang menyebutkan masalah motif dan tujuan daripada pengangkatan anak secara konkret, kecuali pasal 15 ayat 2 yang dapat dijadikan pedoman dalam pembahasan tentang adopsi. Pasal/ ayat tersebut mengemukakan: "pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara membuat akta otentik adalah batal demi hukum".

Ketentuan tersebut beranjak dari sistem kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki menurut anggapan Tionghoa akan melanjutkan keturunan mereka dikemudian hari. Di samping itu anak laki-lakilah yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya. Motif lain dalam pengangkatan anak adalah sebagai pancingan yang dilatarbelakangi oleh kepercayaan, bahwa dengan mengangkat anak tersebut, maka keluarga yang mengangkatnya akan mendapat anak kandung sendiri.[143]

Perbuatan adopsi telah dikenal oleh berbagai negara sejak zaman dahulu, sebagaimana diterangkan dalam encyclopaedia of religion and ethics:

> "Kinship is a well-recognized and widely practiced mode of strengthening societies pounded, as savage and Barbarous societies are, on real or pretended community of blood by means of artificial kinship strangers are adopted into a clan or kindred. Various methods are employed for this purpose, of wich the most celebrated is the blood covenant.

[143] Soeroso, *Op. Cit*, hal. 178-181

Maksudnya bahwa keluarga buatan telah dikenal dan dilakukan di seluruh dunia sebagai model/cara untuk memperoleh kedudukan di masyarakat primitif, apakah atas dasar pertalian darah atau dianggap seakan-akan ada pertalian darah. Dengan keluarga buatan ini orang asing pun dapat diperlakukan sebagai salah satu anggota keluarga. Banyak cara yang dipergunakan untuk ini, upacara yang paling terkenal adalah penyajian darah (*the blood covenant*).

Adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian Hukum kekeluargaan, dengan demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Bagaimana pun juga lembaga adopsi ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak ke arah kemajuan. Dengan demikian, karena tuntutan masyarakat walaupun dalam KUH Perdata tidak mengatur masalah adopsi ini, sedang adopsi itu sendiri sangatlah lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini. Karena itulah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda Staatsblad nomor 129 tahun 1917, khusus pasal 5 sampai 15 yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini. untuk golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah Staatsblad 1917 nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing.

Oleh karena hanya satu-satunya Staatsblad 1917 nomor 129 seperti disebutkan, oleh pemerintah Belanda yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdata / BW yang ada, maka untuk mengemukakan data adopsi menurut versi Hukum Barat ini semata-mata beranjak dari Staatsblad tersebut.

Keterangan mengenai adopsi yang telah ada yaitu yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, berupa Undang-undang atau ketentuan-ketentuan untuk seluruh Indonesia tentang hukum perdata dan hukum dagang bagi orang-orang termasuk Tionghoa. Dari pasal 5 Staatsblad tersebut dapat diketahui, bahwa yang dimaksudkan adalah untuk memberi kesempatan kepada sepasang suami istri/duda/janda yang tidak mempunyai anak laki-laki untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang dapat menurunkan garis keturunan. Dengan demikian pengangkatan anak perempuan jelas tidak dibolehkan, bahkan mendapat ancaman batal karena hukum menurut ketentuan pasal 15 Staatsblad tersebut.

Akibat hukum yang terpenting dari adopsi, ialah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), hak waris, hak alimentasi (pemeliharaan), dan juga soal nama. Menurut pasal 14 Stb. 1917 no. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.

2. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Adat

Pengangkatan anak menurut sebagian wilayah hukum adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum Barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat.

Sedangkan dilihat dari motivasi pengangkatan anak, berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan anak yaitu

UU Nomor35 tahun 2014 yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang diangkat.

Dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kerabataannya yang dilakukan secara kekerabatan. Anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula. Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik materiil maupun immaterial.[144] Suroyo Wingnjodipuro menyebutkan bahwa adopsi dalam hal ini harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Kedudukan hukum anak yang diangkat demikian ini adalah sama dengan anak kandung daripada suami isteri yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus, seperti yang terdapat di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias, dan Kalimantan.[145]

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dan tidak ada anak lelaki sebagai penerus keturunan di lingkungan masyarakat patrilinial atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan di lingkungan masyarakat matrilinial, maka diangkatlah kemenakan bertali darah. Dikarenakan adat perkawinan setempat seperti berlaku di daerah Lampung antara wanita Lampung dengan orang luar daerah, di

[144] Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, cet. Ke-2 , hal. 32.

[145] *Ibid*, hal. 33.

dalam perkawinan memasukkan mantu (ngurukken mengiyan), maka diangkatlah si menantu menjadi anak angkat dari salah satu kepala keluarga anggota kerabat, sehingga si suami menjadi anak adat dalam hubungan bertali adat.

Mengenai hal ini dalam hukum adat tidak ada keseragaman pendapat. Misalnya Dr. R. Wiijono Prodjodikoro SH, dalam bukunya "*Hukum Warisan di Indonesia*", menjelaskan bahwa dalam lingkungan hukum adat sudah pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Purworejo, pada tanggal 06-10-1937, bahwa seorang anak angkat menurut hukum adat, tetap berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya sendiri.[146]

Menurut pendapat Djojo Tirta bahwa Anak angkat menerima "air dari dua sumber", misalnya kalangan masyarakat Batak (patrilineal), setelah anak itu diangkat menjadi anak oleh orang tua angkatnya, maka hubungan kekeluargaan dengan ayah kandungnya menjadi terputus sama sekali, dan anak tersebut masuk ke dalam clan ayah angkatnya.[147]

Status anak angkat dalam hukum adat masyarakat Bali hampir sama dengan pengertian anak angkat dalam hukum barat yang juga memutuskan dan memasukkan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya sebagai anak kandung yang diberi hak-hak yang sama dengan status anak sah atau anak kandung.

Berbeda dengan kedudukan dan status anak angkat dalam sistem hukum adat di Jawa. Di daerah Jawa pengangkatan anak tidak memustukan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat itu, hanya anak angkat didudukkan

[146] Djaya S Meliala, 1996, *Adopsi (Pengangkatan Anak) dalam Yurisprudensi*, Bandung, Tarsito, hal. 5.

[147] *Ibid*

sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya, dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandungnya, sehingga hukum adat Jawa memberikan pepatah bagi anak angkat dalam hal hak waris dikemudian hari dengan istilah " Anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber air sumur. Maksud dari pepatah ini adalah anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orang tua kandung, juga dari harta warisan orang tua angkatnya.[148]

Di daerah Lampung Utara adat menyatakan dengan tegas bahwa anak angkat tidak memperoleh harta warisan dari orang tua kandungnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara akontrario bahwa logika adat masyarakat Lampung Utara memandang bahwa anak angkat harus memperoleh warisan dari orang tua angkatnya. Berbeda dengan di Gresik yang hukum adatnya menyatakan bahwa anak angkat memperoleh hak warisan dari orang tua angkat dan hak warisan dari orang tua kandungnya sendiri.[149]

Pada beberapa daerah seperti lahat (Palembang, Kabupaten Batanghari, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Goa daerah Kepulauan Tidore, dll. Beberapa daerah tersebut secara umum menyatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, anak angkat adalah ahli waris dari orang tuanya sendiri. Anak angkat memperoleh harta warisan dari peninggalan orang tua angkatnya melalui hibah atau pemberian atau wasiat (sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia).[150]

[148] Ahmad Kamil dan fauzan, *Op. Cit*, hal. 45.
[149] *Ibid*
[150] *Ibid*, hal. 46.

Kemudian dikarenakan rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan pada anak kemenakan, ahli famili atau orang lain yang hidup susah, maka si anak diurus dipelihara disekolahkan dan sebagainya, maka terjadilah anak angkat yang berlaku di luar upacara adat resmi, sehingga merupakan hubungan yang bertali budi. Selanjutnya dikarenakan hubungan baik dan rasa persaudaraan di dalam pergaulan sehari-hari antara orang yang satu dan yang lain, atau juga dikarenakan kebutuhan tenaga kerja dalam usaha pertanian rumah tangga dan lain sebagainya, maka terjadilah anak angkat bertali emas.

Betapapun anak angkat itu berhak mewaris dari orang tua angkatnya, namun ia tidak boleh melebihi anak kandung, sebagai mana keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No.37 K/Sip/1959 yang menyatakan bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewaris harta gono gini (harta pencaharian) dari orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal tidak berhak mewaris. Kecuali jika harta gono-gini tidak mencukupi sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Kamar ke III Raad van Justitie tangga) 25 Mei 1939 bahwa anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil.

Pada daerah Minahasa orang yang tidak punya anak tetapi ada anak angkat maka yang mewarisi ayah angkat adalah anak angkat. Begitu pula walaupun ada anak tetapi juga ada anak angkat, maka si anak angkat sama hak mewarisnya dengan anak kandung terhadap harta warisan ayah angkatnya, kecuali terhadap harta kalakeran, oleh karena untuk ini memerlukan persetujuan para anggota kerabat bersangkutan.

Jadi di Minahasa pada dasarnya anak angkat berhak atas harta pencaharian orang tua angkatnya, bahkan berhak pula atas harta bawaan, walaupun di sana sini masih terdapat juga yang tidak mengizinkan. Di samping itu dalam hal pewarisan walaupun anak angkat telah dipecat karena tidak baik perilakunya jika sebelumnya penuh pengabdian kepada orang tua angkatnya, ada kemungkinan bagian warisannya tidak dicabut. Keadaan yang demikian itu menyebabkan di Minahasa sering terjadi sengketa.[151]

Pengangkatan anak menurut hukum Adat secara umum sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia berbeda dengan sistem hukum Barat yang individualistis Liberalistis.[152] Adapun hukum adat kita mempunyai corak sebagai berikut:

1) Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam kaitan kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
2) Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
3) Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulang perhubungan hidup yang konkrit.

[151] Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat, Bandung,* Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 78-81

[152] Muderis Zaini dalam Ashar Sinilele, Jurnal, Al Daulah, 2016, *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Luwu Utara*, Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016 hal. 53-54

4) Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).

3. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. Pertama, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhalwat atau berdua-duan dengan beda jenis kelamin, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi.[153]

Pada hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Demikian halnya tentang implikasi adanya pengangkatan anak sangat berbeda antara konsep hukum barat/BW dan Islam. Bagaimana pandangan hukum

[153] Muhammad Rais, 2016, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Persfektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif*), Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183 – 200, hal. 185.

Islam/lembaga peradilan Islam dalam hal kewarisan anak angkat tentunya akan jauh berbeda dengan ketentuan yang ada di peradilan umum.

Menurut ulama fiqh, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (*al-garabah*), karena hasil perkawinan yang sah (*al-mushaharah*), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dan orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik.[154]

Islam sangat tegas dalam mengatur masalah anak angkat. Salah satunya adalah untuk menjaga hak waris dari para ahli waris agar jatuh pada tangan yang berhak. Pada hukum Islam, anak asuh atau angkat tidak berhak mendapat harta waris. namun demikian hukum Islam tidak sama sekali menutup peluang anak angkat untuk mendapatkan bagian harta dari orang tua ngkatnya, yaitu anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian (Pasal 209 KHI).

[154] Nasroen Harun dkk., 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 1, hal. 29-30.

E. Latar Belakang Pengangkatan Anak

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya. Dengan demikian, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.[155] Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan potret masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan lainnya.[156]

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan Indonesia sebagai Negara hukum telah memberikan perlindungan terhadap hak anak yang secara eksplisit termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (1) yang berbunyi "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Anak demi kepentingan kesejahteraannya secara utuh hendaknya tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Namun tidak sedikit anak-anak yang diterlantarkan karena beberapa faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi seperti kemiskinan. Orang tua yang

[155] Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hal.. vii.

[156] *Ibid*., hal. vii

merasa tidak sanggup untuk memenuhi hak-hak anaknya rela menyerahkan anak kandungnya ke panti asuhan bahkan ada yang tega menterlantarkan anaknya.

Disisi lain ada keluarga yang mampu sangat mengharapkan kedatangan seorang anak. Namun apa daya Tuhan berkehendak lain dengan tidak memberikan keluarga tersebut keturunan berupa anak. Sehingga untuk mendapatkan keturunan mereka harus melakukan pengangkatan anak.

Ada beberapa alasan sehingga ada orang melakukan pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:[157]

a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya;
b. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua kelak;
c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri ;
d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada;
e. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja;
f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan / kebahagiaan keluarga.
g. Pendapat lain adalah Menurut Djaja S. Meliala dalam bukunya berjudul "*Pengangkatan Anak di Indonesia*" bahwa latar belakang dilakukan pengangkatan anak adalah sebagai berikut : [158]

[157] Sukardi, 2018, *Adopsi Anak Dalam Hukum Islam*, Raheema, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 5, No. 2 , Hal. 180.

[158] Djaja S Semliala, 1992, *Pengangkatan Anak* .... hal. 4

h. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan.
i. Tidak mempunyai anak dan keinginan anak untuk menjaga dan memelihara kelak dikemudian hari tua.
j. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah maka akan mempunyai anak sendiri.
k. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
l. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
m. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.

Sedangkan M. Budiarto dalam bukunya yang berjudul "*Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*" bahwa faktor atau latar belakang dilakukan pengangkatan anak, yaitu:

a. Keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak;
b. Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai "pancingan".
c. Masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai.
d. Sebagai belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya.

Sedangkan alasan pengangkatan anak menurut hukum adat ada 14 macam, yaitu sebagai berikut :[159]

[159] Zaini Mudaris, 1992, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 61.

a. Tidak mempunyai anak walaupun sudah lama menikah. Hal ini merupakan alasan yang bersifat umum karena satu-satunya cara bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak dengan mengangkat anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan kelengkapan serta menyemarakkan rumah tangga.
b. Belas kasihan terhadap anak-anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini merupakan alasan yang sangat positif karena membantu anak juga membantu beban orang tua kandung si anak asal didasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dan orang tua kandung.
c. Belas kasihan karena anak tersebut tidak mempunyai orang tua. Hal ini merupakan suatu kewajiban moral bagi yang mampu sebagai misi kemanusiaan.
d. Hanya mempunyai anak laki-laki maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini merupakan alasan yang logis karena umumnya orang ingin mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki.
e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak, untuk dapat mempunyai anak kandung. Alasan ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada sebagian anggota masyarakat.
f. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkatnya mempunyai banyak kekayaan.
g. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. Alasan ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.

h. Faktor kekayaan. Dalam hal ini disamping alasan sebagai pemancing untuk dapat mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat baik bagi orang tua angkatnya maupun anak yang diangkat demi bertambah baik kehidupannya.

i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan ahli waris bagi yang tidak mempunyai anak kandung.

j. Adanya hubungan keluarga sehingga orang tua kandung si anak tersebut meminta suatu keluarga supaya anak tersebut dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.

k. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat alasan timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkatnya.

l. Ada perasaan kasihan atas nasib anak yang tidak terurus. Pengertian tidak terurus dapat berarti orang tuanya masih hidup namun tidak mampu atau tidak bertanggung jawab sehingga anaknya menjadi terkatung-katung. Di samping itu dapat dilakukan terhadap anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia.

m. Untuk mempererat hubungan keluarga. Disini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat.

n. Anak kandung sakit-sakitan atau meninggal dunia sehingga untuk menyelamatkan si anak, anak tersebut diberikan kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia.

Pada mulanya pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang keutuhan dari suatu keluarga yang tidak dikaruniai seorang anak. Selain itu juga untuk mempertahankan keutuhan dari suatu perkawinan. Namun demikian dengan adanya perkembangan masyarakat yang semakin maju, maka berkembang pula motivasi dari pengangkatan anak. Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda. Beberapa motivasi masyarakat tersebut antara lain :[160]

a. Karena tidak mempunyai anak;
b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya;
c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu);
d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung;
f. Untuk menambah tenaga dalam keluarga;
g. Dengan maksud anak yang diangkat mendapat pendidikan yang layak;
h. Karena unsur kepercayaan;

[160] Muderis Zaini, 1999, *ADOPSI, Suatu Tinjaun dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 15.

i. Untuk menyambung keturunan dan mendapat regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung;
j. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat;
k. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak;
l. Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus;
m. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan;
n. Anak dahulu sering penyakitan atau sering meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, masyarakat seringkali melakukan pengangkatan anak baik secara langsung atau tidak langsung melalui proses penetapan pengadilan. Pengangkatan anak secara langsung dapat dilakukan oleh masyarakat dimana biasanya calon anak angkat tersebut masih mempunyai hubungan keluarga dengan calon orang tua angkat. Proses atau cara orang tua angkat dalam melakukan pengangkatan anak secara langsung berbeda-beda, ada yang berhubungan langsung dengan orang tua kandung atau melalui perantara.

Pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorangan

dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi budaya di masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Karena faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga pada masa dulu pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi tersebut yaitu dengan menerbitkan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak. Pertama-tama Staatblad ini hanya diberlakukan khusus bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa saja, tetapi dalam perkembangannya ternyata banyak masyarakat yang ikut menundukkan diri pada Staatsblad tersebut.[161]

Sejalan dengan perkembangannya, secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak juga telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dalam beberapa pasal memuat pengaturan mengenai pengangkatan anak.

Negara dan Pemerintah Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap ketertiban jalannya praktik pengangkatan anak, baik dari segi administrasi, dan kepastian hukumnya, sehingga diterbitkanlah beberapa kebijakan melalui peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang mengatur dan menangani masalah pengangkatan anak, antara lain yaitu: Surat Edaran Mahkamah Agung RI

[161] Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. ix.

Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.[162]

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak angkat. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.

Secara yuridis permohonan pengangkatan anak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

[162] *Ibid*., hal. xii-xiii.

Kewenangan pengadilan negeri dalam hal pengangkatan anak ini disebutkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama." Jadi pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan peradilan umum. Tetapi kemudian ada ketentuan lain dalam undang-undang yang menentukan bahwa terhadap perkara-perkara perdata tertentu menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Kewenangan pengadilan agama disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah;
9. Ekonomi syari"ah.

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain. Tetapi tidak diperbolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah.[163] Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam perihal pengangkatan anak ialah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan. Disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.

Akibat hukum terhadap pengangkatan anak ialah bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang bagi beberapa daerah di Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia. Oleh karena adanya akibat hukum yang terlalu jauh dan luas inilah, disamping faktor-faktor lain dari hal pengangkatan anak itu sendiri, seperti faktor sosial, faktor psikologis, dan lain-lain maka tidak jarang akibat pengangkatan anak menimbulkan berbagai problema dalam masyarakat.

Dewasa ini sering dijumpai masalah yang berkaitan dengan anak khususnya tentang pengangkatan anak di tanah air, kebanyakan masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang bagaimana proses pengangkatan anak yang benar berdasarkan

[163] Muderis Zaini, *Op.Cit.*, hlm. 52

hukum yang telah di atur di negara ini. Hal ini dikarenakan minimnya informasi masyarakat terutama mereka yang masih berdomisili di pelosok negeri. Minimnya informasi yang benar mengenai pengangkatan anak membuat perbuatan hukum tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap yang memungkinkan timbulnya suatu masalah di kemudian hari, terutama bagi warga negara Indonesia yang di angkat oleh warga negara asing, negara harus menjamin kepastian hukum anak tersebut di luar yuridiksi negara Indonesia.

Selain hukum adat dan hukum Islam, Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia saat ini adalah Staatsblaad 1917 Nomor 129, Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 jo Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan KUHPerdata/BW yang pada awalnya tidak mengenal pengangkatan anak namun sejak tahun 1956 kemudian telah diatur, tetapi tidak ada lagi penyesuaian ke dalam KUHPerdata.

Letak perbedaan pengangkatan anak menurut hukum adat bagi orang Indonesia asli dengan adopsi di antara orang Tionghoa yaitu dalam masalah perhubungan hukum antara anak angkat dengan orang tuanya sendiri.

Sejak tahun 1978 telah dikeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA/1/1/2 tanggal 24 Februari 1978, di mana Surat Edaran tersebut mengatur tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing, yang hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri dan tidak dibenarkan pengangkatan tersebut dilakukakan dengan akte Notaris, Hal ini sebagaimana juga

diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, tetapi setelah berlangsung beberapa lama pengangkatan anak tidak lagi melalui pengesahan pengadilan.

F. Hak dan Kewajiban Anak Angkat

Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia, anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini di masa yang akan datang.

Tujuan diadakannya perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dia tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusian. Disamping itu juga agar mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalamnya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya.

1. Hak Hak Anak Angkat

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bab II pasal 2 sampai dengan pasal 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan sebagai berikut:

a. Anak Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar (pasal 2 ayat 1).
b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna (pasal 2 ayat 2).
c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (pasal 2 ayat 3).
d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (pasal 2 ayat 4).
e. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. (pasal 3).
f. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. (pasal 5 ayat 1)
g. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya (pasal 6 ayat 1).

h. Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (pasal 6 ayat 2).

i. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan (pasal 7).

j. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial (pasal 8).[164]

Untuk menjamin kesejahteraan anak angkat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan hak wasiat wajibah bagi anak angkat sebanyak 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Ketentuan ini memberikan jaminan bagi anak angkat untuk memperoleh hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya, walaupun menurut hukum waris anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya. Wasiat wajibah merupakan suatu lembaga yang menjamin hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.[165]

KHI menentukan kewajiban orang orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya bertujuan untuk kemaslahatan anak angkatnya, karena orang tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhan anak angkatnya. Menurut Musthofa, pengaturan wasiat wajibah

[164]Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

[165] Susiana, 2011, *Hak Anak Angkat terhadap Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55, Th. XIII (Desember, 2011), hal. 147.

antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat mencegah dan menghindari konflik/sengketa antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat yang menjadi ahli waris dari orang tua angkat tersebut.

Apabila orang tua angkat tidak memberikan hibah semasa hidupnya dan juga tidak meninggalkan wasiat kepada anak angkatnya, maka hukum Islam tetap memberikan jaminan bagi anak angkat untuk memperoleh hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 209 KHI yang menentukan bahwa:

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

2. Kewajiban Anak Angkat

Selain punya hak maka anak angkat juga ada memiliki kewajiban terhadap orang tua angkat serta orang tua kandungnya. Kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya adalah:

1) Anak Angkat wajib menghormati orang tua angkatnya;
2) Berlaku sopan dan taat terhadap orang tua angkatnya;
3) Membantu pekerjaan orang tua angkatnya;

4) Merawat serta menjaga orang tua angkatnya bila orang tua angkat sudah tua seperti layaknya anak kandung terhadap orang tua kandungnya.
5) Anak angkat wajib menyelesaikan semua urusan orang tua angkatnya setelah orang tua angkatnya meninggal dunia, misalnya tentang hutang piutang.
6) Wajib menyelenggarakan upacara atau perawatan jenazah bila orang tua angkatnya meninggal dunia.

Disamping itu anak angkat juga mempunyai kewajiban terhadap orang tua kandungnya yaitu:

1) Wajib mengunjungi orang tua kandungnya untuk silaturahmi;
2) Apabila anak angkat itu tahu kalau orang tua kandungnya sakit maka kewajiban anak angkat itu merawat dan membantu baik secara moril maupun materiil sesuai kemampuannya;
3) Anak angkat wajib membantu orang tua kandungnya bila kekurangan;
4) Jika orang tua kandung meninggal, kewajiban sebagai anak angkat wajib merawat dan mendo"akannya.

Demikian hak dan kewajiban anak angkat yang diatur dalam undang-undang.

G. Pencatatan Anak Angkat dalam Catatan Sipil

Pencatatan pengangkatan anak yang kelahirannya normal dari perkawinan sah dan asal usulnya jelas, dilakukan di kantor catatan sipil akan menjadi mudah dan tidak mengalami kendala, karena pelaksanaan pencatatannya oleh kantor catatan sipil cukup mencatat pengangkatan anak tersebut di pinggir akta kelahiran si anak angkat.

Pengangkatan anak dilihat dari keberadaan anak yang akan diangkat dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

1) Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asal (*private adoption*).
2) Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam organisasai sosial (*non private adoption*).
3) Pengangkatan anak terhadap anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua asal maupun organisasi sosial, misalnya anak yang ditemukan karena dibuang orang tuanya.

1. Mekanisme Pencatatan Pengangkatan Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 yang salah satunya mengatur tentang Tata Cara Pengisian Formulir Biodata Penduduk, maka seorang anak dapat didaftarkan menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya dengan status hubungan dengan kepala keluarga adalah "lainnya", dan nama ayah ibu kandungnya tetap tercantum dalam kolom nama ayah dan ibu. Apabila anak sudah terdaftar dalam Kartu Keluarga dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), selanjutnya dapat dibuatkan akta kelahiran dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam akta tersebut. Hal ini untuk menjaga agar hubungan si anak tidak terputus sama sekali dengan orang tua biologisnya. Orang tua angkat kemudian dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak sesuai mekanisme yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.[166]

Apabila telah terbit penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai adopsi anak tersebut, maka wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatat sipil selanjutnya membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran dan register akta kelahiran. Catatan pinggir yang dimaksud merupakan keterangan tambahan bahwa anak yang namanya tercantum dalam akta kelahiran telah diadopsi oleh orang tua angkatnya.

Selanjutnya pengangkatan anak yang telah melalui proses pencatatan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, maka dalam Kartu Keluarga hubungan Kepala Keluarga dengan anak angkat adalah sebagai "anak", dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam kolom ayah dan ibu.[167]

2. Pelayanan Pencatatan Akta Pengakuan Anak (Adopsi)

Untuk membuat akta pengakuan anak (adopsi) harus memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut: [168]

a. Salinan Penetapan dari Pengadilan tentang Pengangkatan Anak;

---

166 Dini Eka Wahyuni, S. STP, MT, Kasi Kelahiran, Kematian & Pengesahan Anak Disdukcapil Kota Pontianak, 2016, *Adopsi Anak Dalam Perspektif Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, Artikel, diposting pada laman web Disdukcapil yang lama pada tanggal 15 Desember 2016, hal.1.

[167] *Ibid*, hal. 1

[168] Sumber data pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya.

b. Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan (Asli dan fotocopy);
c. Fotocopy kutipan akta perkawinan orang tua kandung dan orang tua angkat;
d. Fotocopy KK SIAK dan KTP-el orang tua kandung dan orang tua angkat;
e. Bukti/ketetapan ganti nama (apabila sudah ganti nama) dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
f. Bagi penduduk WNA membawa dokumen imigrasi, SKLD dari kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan;
g. Bagi penduduk WNA Tinggal Terbatas membawa SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) dan penduduk WNA Tinggal Tetap membawa KK SIAK dan KTP-el;
h. Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan dan fotocopy KTP-el penerima kuasa

Sedangkan Sistem, Mekanisme dan Prosedurnya adalah sebagai berikut:[169]

a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. Petugas Verifikasi memeriksa berkas persyaratan :
    1) Jika persyaratan tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dulu,

[169] *Ibid.*

2) Jika persyaratan lengkap diteruskan kepada petugas / operator entri data pencatatan sipil setempat.

c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak;

d. Catatan pinggir pada register dan kutipan Akta Kelahiran telah dibuat dan diparaf oleh Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian serta;

e. diparaf oleh kepala Bidang Pendaftaran Pelayanan Pencatatan Sipil;

f. Diparaf oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil;

g. Catatan pinggir pada register dan kutipan Akta Kelahiran ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Untuk lebih jelasnya tentang persyaratan dan mekanisme pencatatan anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka berikut ini akan disajikan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 3
Komponen Standar Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Syarat-syarat Pengangkatan anak : a. Penetapan Pengadilan b. Kutipan Akta Kelahiran c. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan / Surat Nikah Orangtua Angkat d. Fotocopy KTP-el orang tua angkat

		e. Fotocopy KK orang tua angkat
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Pemohon datang di tempat pelayanan dengan membawa persyaratan; b. Petugas menyiapkan formulir permohonan pengangkatan anak untuk diisi pemohon beserta kelengkapan permohonannya c. Petugas mengentri data pemohon dalam komputer dan mencetak dalam draf catatan pinggir d. Kasi membubuhkan paraf dalam draf catatan pinggir pengangkatan anak. e. Apabila draf telah sesuai kemudian dicetak dalam kutipan akta kelahiran f. Kepala Bidang Pencatatan Sipil membubuhkan paraf dalam catatan pinggir dan register Kutipan Akta, g. Petugas memintakan tanda tangan Kepala Dinas dan memberikan stempel dinas catatan pinggir kutipan akta kelahiran, h. Petugas menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada pemohon.
3.	Jangka waktu pelayanan	Maksimal 3 (tiga) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya / Gratis
5.	Produk pelayanan	Dokumen kependudukan berupa catatan pinggir Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak
6.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang pencatatan sipil; b. Media telepon dinas : (0536) 367526 c. Media telp HP dan WA , Hot line service , sms gateway d. Media internet

Sumber : Disdukcapil Kota Palangka Raya 2021

H. Akibat hukum pengangkatan anak

Untuk lebih jelasnya akibat hukum pengangkatan anak ini akan diuraikan terlebih dahulu berdasarkan praturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu

sebagaimana yang diatur dalam Staatblad 1927 No. 129 dan undang-undang No. 62 tahun 1958. Selanjutnya akan dikemukakan tentang akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Adat dan berdasarkan Hukum Islam, serta akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan Praktik di pengadilan.

1. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Staatblad 1927 Nomor 129

Akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam Staatblad 1927 No. 129 yaitu sebagai berikut:[170]

1) Anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, sebagaimana diatur dalam (Pasal 11).
2) Anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (Pasal 12 ayat (1)).
3) Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat, dan
4) Karena pengangkatan anak, maka terputuslah segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).

Secara teori Penegakan hukum harus terakomodasi ke dalam tiga sistem hukum yaitu Hukum Islam, Hukum Sipil (Barat) dan Hukum Adat, akan tetapi konflik antara ketiga sistem hukum itu telah ada sejak masuknya penjajahan Belanda ke Indonesia, dan terus berlanjut hingga sekarang. Sebenarnya pemerintah telah

[170] M. Budiarto, 1991, *Pengangkatan Anak ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta, Akademika Pressindo, hal.21.

berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut, namun hingga sekarang permasalahan ini belum dapat diselesaikan.[171]

Akibat hukum pengangkatan anak dapat berdampak pada perwalian dan kewarisan.[172] Dalam hal perwalian, sejak putusan atau penetapan diucapkan oleh pengadilan maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sehingga sejak saat itu segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat, kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam apabila akan menikah maka yang dapat menjadi wali nikahnya hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya.

Untuk bidang kewarisan, aturan pada hukum Indonesia baik hukum adat, hukum barat maupun hukum Islam memiliki ketentuan waris yang berbeda dan ketiganya memiliki kekuatan hukum yang sama artinya seseorang dapat memilih hukum mana yang akan dipakai dalam menyelesaikan masalah kewarisannya. Dengan demikian status anak angkat sebagai ahli waris atau tidak tergantung pada pengaturan dari sistem hukum yang dimaksudkan.

Pada sistem hukum Islam di Indonesia, masalah kedudukan anak angkat telah disinggung meskipun secara terbatas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedudukan anak angkat hanya disinggung dalam Pasai 171 huruf h dan Pasal 209. Pasal 171 huruf h menyatakan anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih

[171] Busthanul Arifin, 2001, *Menghidupkan Kembali Norma-Norma Hukum Sipil Islam*, Mimbar Hukum. No. 54 Thn XII, Hal 62 dalam Ashar Sinilele, -Jurnal al daulah, Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016, hal.54

[172] Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, 1993, *Al Halal mal Haram fil Islam*, Alih Bahasa H. Muammal Hamidy, Bina llmu, Surabaya, hal. 308. dalam Ashar Sinilele, al Daulah, Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016 hal.54

tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan Pengadilan. Pasal 209 menyatakan bagian anak angkat dalam bidang warisan dibagi menurut ketentuan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 yakni menurut status dan kedudukannya dalam keluarga asal.

Namum pada KHI menambahkan pengaturan dalam Pasal 209 ayat (2) sebagai produk pembaruan hukum Islam di Indonesia bahwa terhadap anak angkat yang tidak mendapat bagian wasiat maka dapat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, artinya wasiat boleh diberikan kepada anak angkat akan tetapi tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan.

Ketentuan wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat yang tidak mendapat wasiat dari orang tua angkatnya sebagaimana tersebut di atas, dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan-ketentuannya[173] yakni; *Pertama*, Tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung. *Kedua*, Tidak memberi kedudukan dan hak untuk mewarisi secara keseluruhan harta peninggalan orang tua angkat. *Ketiga*, Tidak sama bagian anak angkat dengan bagian anak kandung. *Keempat*, Anak angkat tidak menghijab ahli waris yang lain. *Kelima*, bagian anak angkat paling banyak 1/3 bagian dari harta warisan.

Dengan demikian KHI telah menetapkan suatu hak dan kedudukan hubungan kewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat dalam bentuk wasiat wajibah. Meskipun ketetapan kedudukan dan hak itu diatur secara terbatas, hal itu tidak mengurangi status yang positif secara hukum.

[173] M. Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam HukumAdat*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hai. 97.

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU No 23 Tahun 2002 pasal 39 ayat (2) yang mengatakan hal yang senada dengan UU No 4 Tahun 1979 yang telah disebutkan lebih dahulu. Pasal tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan darah, hal ini mengisyaratkan bahwa pengangkatan anak tidak memiliki akibat hukum apa pun. Dan hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat hanya sebatas hubungan pemeliharaan saja.

Ketidakjelasan kedudukan anak angkat inilah yang menyebabkan akibat hukum yang akan diterima setelah pengangkatan anak pun masih ada keraguan, apakah anak tersebut sama dengan anak kandung atau tidak. Jika anak tersebut sama dengan anak kandung maka ia berhak mendapatkan waris. Akan tetapi jika tidak maka ia tidak berhak mendapat waris akan tetapi mendapatkan wasiat wajibah sebagaimana yang disebutkan dalam KHI.

Menurut asas perlindungan anak maka seorang anak berhak atas perlindungan dari orang tuanya, sedangkan orang tua wajib melindungi anaknya dengan berbagai cara. Oleh sebab itu hubungan antara orang tua dengan anak itu harus dipelihara dan dipertahankan sepanjang hidup masing-masing. Pelaksanaan pengangkatan anak pada hakikatnya merupakan suatu pemutusan hubungan antara orang tua kandung dengan anak kandung. Dengan demikian, maka pengangkatan anak adalah pada dasarnya tidak sesuai dengan asas perlindungan anak.[174]

[174] Arif Gosita, 2013, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, cet. ke-3, hal.53.

Jika orang tua tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak, maka pemeliharaan dan pembinaan anak kandung dapat saja diserahkan atau dapat dilakukan oleh orang lain tanpa harus menyerahkan anak kandung untuk diangkat oleh yang bersangkutan. Penyerahan ini berarti juga melepaskan diri dari tanggung jawab untuk memelihara dan membina anak kandung sendiri. Apabila ia mendapat uang imbalan untuk penyerahan anak tersebut, maka tindakannya merupakan tindakan penjualan anak. Ini bukanlah suatu tindakan usaha perlindungan anak, melainkan memanfaatkan anak bersama dengan pihak pengangkat anak.

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Pengangkatan anak yang merupakan bagian dari Hukum Adat, di beberapa daerah telah mengalami perkembangan sehingga kadang-kadang timbul masalah di dalam pengangkatan anak secara adat. Persoalan yang sering muncul adalah mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak dibedakan dengan pemeliharaan anak, karena pengangkatan anak menimbulkan akibat-akibat hukum tersendiri. Bila dibandingkan antara pemeliharaan anak dengan pengangkatan anak, maka yang bersifat pemeliharaan itu adalah lebih menyeluruh, walaupun pengangkatan anak terdapat di seluruh Nusantara. [175]

[175] Khusdjono, *Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Benda Perkawinan Orang Tua Angkat (Studi Pada Masyarakat Tionghoa Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)*, hal.4

Sehingga terlihat jelas bila seorang anak telah diangkat atau diadopsi oleh orang tua angkatnya, maka akan timbul akibat hukum dari perbuatan pengangkatan/adopsi tersebut. Contoh pada hukum di Indonesia, bila seorang anak telah diangkat oleh keluarga angkatnya, maka anak tersebut akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung orang tuanya. Anak angkat akan mendapatkan kewajiban seperti menghormati orang tua atau walinya, sedangkan hak yang anak tersebut akan dapatkan ketika telah diangkat adalah warisan dari keluarga angkatnya, yang dapat berupa tanah, harta kekayaan, uang, dan materi yang dapat diwariskan lainnya.

Pada hukum adat, Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing.[176] Sepanjang perbuatan pengangkatan anak telah menghapuskan perangainya sebagai "orang asing" dan menjadikannya perangai "anak" maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya dalam hukum adat.

Namun boleh jadi, bahwa terhadap kerabatnya kedua orang tua yang mengambil anak itu anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal dari ayah atau ibu angkatnya atas barang-barang dimana kerabat tersebut tetap mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia mendapat barang-barang yang diperoleh dalam perkawinan. Pengangkatan anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan. Pengadilan dalam Praktik telah merintis

[176] Sunarmi, *Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Batak Toba* (*Suatu Analisis Berdasarkan Hukum Adat*). Universitas Sumatera Utara, hal.6.

mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orang tua sebagai berikut :

1) Hubungan darah, adapun mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orangtua kandung.
2) Hubungan waris, adapun dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orang tua angkat.
3) Hubungan perwalian, adapun dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua kandung akan beralih kepada orang tua angkat.
4) Hubungan marga, gelar, kedudukan adat: dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung, akan tetapi ia akan mendapat dari orang tua angkat.

4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

a) Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya.

Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.

b) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.

c) Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahrom dan saling mewarisi.

d) Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.[177]

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.[178]

Pada hukum Islam pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini dan tetap tidak bisa saling mewarisi.

Menurut hukum kewarisan Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Pada dasarnya hukum Islam telah

[177] Windi Arista, 2017, *Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Yang Berasal Dari Anak Saudara Kandung Menurut Hukum Adat*, Jurnal Hukum Uniski, Vol.6 No.1 Edisi Juli-Desember 2017, hal. 75.

[178] Muhammad Heriawan, 2017, *Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindunagn Anak*, Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017, hal. 177.

menetapkan adanya ahli waris yang jika memenuhi syarat dan tidak terhalang ia tetap berhak mewarisi harta peninggalan orang tua yang meninggal (pewaris). Diantaranya adalah anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Anak disini adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, bukan anak yang lahir dari luar nikah (zina).

Yusuf Qardawi, seorang ahli fiqh kontemporer berpendapat bahwa dalam masalah warisan, anak angkat tidak berhak mewarisi atas harta warisan orang tua angkatnya karena anak angkat tidak mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan yang sebenarnya. Hal semacam ini dalam al Qur‟an dipandang tidak menjadi penyebab untuk menerima harta warisan. Dan dalam perkawinan, Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa‟ Ayat (23) bahwa diantara perempuan-perempuan yang haram dinikahi adalah janda anak kandung, bukan janda dari anak angkat.[179]

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam al Qur‟an surat An Nisa ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ
وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ
ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ
أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

[179] Yusuf Qardawi, 1982, Ahli Bahasa Huamal Hamidi, *Halal Haram dalam Islam,* Jilid I dan II Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 303

> Artinya : "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya. (Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau: Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang".[180]

Berdasarkan keterangan di atas kiranya jelas bahwa hukum merupakan konkritisasi nilai dari sistem nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yaitu suatu keadaan yang dicita-citakan dalam kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut.[181]

Pengangkatan anak tersebut termasuk perbuatan hukum yang menyangkut gejala sosial dan unsur hukum. Ini berarti suatu kenyataan hukum yang hidup di masyarakat memerlukan ketentuan sendiri untuk mengaturnya. Hukum Islam yang bersifat universal mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, baik yang berupa ibadah mahdah maupun ghoiru mahdah, diantaranya adalah mengenai pengangkatan anak yang dilarang, namun pengangkatan dapat dibenarkan oleh hukum Islam, Jika perbuatan tersebut akan membawa kemaslahatan bagi anak angkat tersebut.

Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Maslahat dapat dijadikan sumber penetapan hukum apabila :

---

[180] Q.S An-Nisa‟ Ayat 23
[181] *Ibid,* hal. 37

1. Adanya kesesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah (*maqosidu al-syariah*)
2. Maslahat itu harus masuk akal, artinya bahwa maslahat mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian bahwa apabila maslahat diterima oleh akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al hajj Ayat 78 yang berbunyi sebagai berikut :


وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ
وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ
الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong".

Dan Hadist nabi SAW :

لاضرر ولا ضرر

Artinya : “Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan”[182]

Dalam hukum Islam ada perintah untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Anak angkat, dalam kaitannya dengan harta warisan orang tua angkatnya, secara hukum tidak berhak menerima bagian. Dalam keadaan demikian syariat Islam membuka pintu wasiat bagi orang tua angkat untuk memberikan hartanya sebagian guna kelanjutan pemeliharaan hidupnya.

I. Pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan tertentu yaitu untuk dipelihara dan dibesarkan dalam kelurga angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis. Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian akan melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, dan lembaga pengangkatan anak akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri dan terus beranjak ke arah kemajuan.

Dilihat dari aspek akibat hukum dari pengangakatan anak dalam hukum adat adalah dengan masuknya anak angkat kedalam suatu keluarga yang mengangkatnya maka putuslah hubungan keluarga kandung dengan anak angkat tersebut. Hanya saja terdapat perbedaan dengan adopsi menurut hukum barat, perbedaannya adalah dalam

[182] Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (cetakan ke II), Bandung, Kencana Prenada Media Group, hal 200

hukum adat pengangakatan anak disyaratkan dengan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung si anak angkat, biasanya merupakan benda-benda yang dikeramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis. Dilihat dari segi motivasi dalam melakukan pengangkatan anak, pengangkatan anak dalam hukum adat lebih menekankan pada kekhawatiran pada calon orangtua angkat akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (keluarga yang tidak memiliki anak) akan mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak itu akan menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia akan terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.[183]

Bagaimana akibat hukum terhadap anak angkat yang pengangkatan anaknya tidak melalui penetepan pengadilan dan hidupnya diserahkan ke panti asuhan. Hal ini jelas bahwa pengangakatan anak telah melalui proses yang salah yaitu melakukan pengangkatan anak tetapi tidak melalui pengadilan. Orang tua angkat hanya datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersedia membuatkan Kartu Keluarga (KK) dengan membawa beberapa dokumen terkait seperti misalnya surat keterangan dari RT, RW, Kelurahan setempat yang menyatakan bahwa mengetahui anak tersebut akan dijadikan sebagai anak angkat, yang kemudian dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian setempat agar lebih kuat, orangtua angkat juga memberikan surat pernyataan asal usul dari si anak yang akan diangkat yang kemudian diberi materai untuk ditandatangani, lalu pengurusan selanjutnya diakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan

[183] Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*¸ Jakarta, Rajawali Pers, hal. 34.

dibuatkan lah surat keterangan yang ditandatangani oleh Walikota/Bupati. Pada saat itu agar sah menjadi anak angkatnya. Prosesnya hanya 3 bulan saja dan tanpa melewati pengadilan. Menurut orang tua angkat yang mengajukan pengangkatan anak ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengatakan bahwa, hal itu telah sah dan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan maka bukti-bukti pengangkatan telah ada dan tidak dapat dipermasalahkan.

Hal ini menjadi bertentangan manakala undang-undang mengatur bahwasanya pengangkatan anak haruslah melewati penetapan pengadilan seperti yang terdapat dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, menyebutkan "permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan".

Penetapan pengadilan disini berperan sangat penting dalam mengatur masalah hukum, seperti yang kita ketahui hal ini dapat memberikan kepastian hukum secara penuh terhadap perlindungan anak angkat apabila tata cara pengangkatan anaknya melalui penetapan pengadilan. Maka di sinilah tanggungjawab orangtua angkat dipertanyakan, bagaimana tanggung jawab orangtua angkat yang harusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak yang diangkatnya sedangkan cara atau proses pengangkatan anaknya saja tidak melalui prosedur yang benar.

Akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangakatan anak tanpa melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh orangtua-orangtua yang tidak ingin direpotkan dengan birokrasi yang ada di negara Indoensia adalah ;

a) Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuk nya anak angkat menjadikan ia sebagai

mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat orang lain yang seharunya haram dilihatnya

b) Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orangtua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orang tua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama Islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanya lah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya.

c) Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orantua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.

Akibat-akibat hukum ini dapat terjadi karena calon orang tua angkat tidak memiliki pengetahuan mengenai tatacara pengangkatan anak serta motivasi yang salah. Akibat hukum lain yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan menurut penulis adalah tidak ada hubungan hukum antara orang tua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang

berlaku. Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat.

Maksudnya disini adalah hak dan kewajiban antara anak dan orang tua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orangtua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat di pengadilan manakala terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orang tua angkat dan anak angkat.

Pada dokumen Penetapan Pengadilan yang menjadi dasar pengangkatan anak ini terdapat berbagai macam hak dan kewajiban orang tua dan juga anak angkat. Orang tua angkat sebagai orang tua yang menggantikan orang tua kandung mempunyai kewajiban yang sama seperti orang tua pada umumnya, seperti misalnya memelihara, mendidik, mengasuh anak tersebut walaupun status anak hanya anak angkat seperti yang terdapat dalam pasal 26 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwasanya kewajiban orang tua mengasuh, memeliihara, mendidik serta melindungi anak, orang tua juga wajib mengawasi tumbuh kembang anak sesuai dengan minat dan bakatnya.

Sebaliknya sebagai anakpun walau statusnya anak angkat juga memiliki kewajiban kepada kedua orang tua angkatnya sama dengan kewajiban anak lainnya yang salah satunya adalah menghormati dan mencintai orang tua, wali, guru, dan juga tanah air bangsa dan Negara dan juga melaksanakan etika dan akhlak yang mulia hal

ini sesuai dalam pasal 19 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pada dasarnya setiap pengangkatan anak harus dilakukan melaui proses hukum dengan produk penetapan dari pengadilan. Melalui proses hukum ini bertujuan untuk melakukan penertiban Praktik hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkatnya. Tujuan dari pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan juga dokumen hukum. Dokumen hukum disni maksudnya ada penetapan pengadilan. Dokumen ini penting adanya karena menjelaskan secara jelas bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal dan hal ini sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangakatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggungjawab hukum dan hal yang lainnya. Hal ini menjadi sangat penting bagi orang tua lain yang ingin mengangkat anak untuk melakukannya secara benar menurut tata cara yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK YANG BELUM KERKEADILAN

A. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Dasar hukum pengangkatan anak menurut Direktorat Rehabiltasi Sosial Anak adalah sebagai berikut:[184]

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

2. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menurut penjelasan ibu Helwina, dasar hukum pengangkatan anak saat ini adalah sebagai berikut: [185]

1. Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur adopsi Warga Negara Tionghoa di Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

[184] Direktorat Rehabilatsi Sosial Anak Tahun 2018

[185] Hasil wawancara dengan ibu Dr. Helwina Handayani, M.Si, Staf Khusus Sub.Bag Hukum dan Pengaduan pada Komisi Perlindungan Anak (KPA) RI tanggal 11-10-2020

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No.2 Tahun 1979 yang mengatur tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak;
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor U-335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982, tentang Anak Angkat.

Berikut ini disajikan beberapa pasal dari undang-undang ini, yang terkait dengan dasar dari pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Mengenai pengangkatan anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ada diatur pada pasal 39, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.

(2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.

(2) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.

(3) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

(4) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.

Pasal 41A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ini ada 44 pasal dan hampir semua pasal berkenaan anak angkat, dalam hal ini ada beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar, yaitu sebagai berikut:

Pasal 19

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 20

(1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
(2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 21

(1) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
(2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial nomor 110 ini ada 53 pasal, namun dalam hal ini ada beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar yaitu:

Pasal 24

Persyaratan COTA pada pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak meliputi :

a. persyaratan material; dan
b. persyaratan administratif.

Pasal 25

Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:

a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
f. tidak merupakan pasangan sejenis;
g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
i. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
m. memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten; dan
n. memperoleh izin untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Pasal 26

Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, yaitu harus melampirkan :

a. Surat Keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
b. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
c. Copy Akta kelahiran COTA;
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
e. Copy Surat Nikah/Akta Perkawinan COTA;
f. Kartu Keluarga dan KTP COTA;
g. Copy Akta Kelahiran CAA;
h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;

i. Surat Pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
j. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
k. Surat Pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
l. Surat Pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
m. Surat Pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
n. Surat Pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
o. Laporan sosial mengenai Anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;
p. Surat penyerahan anak dari orangtua/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit/kepolisian/masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
q. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
r. surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
s. laporan Sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial instansi sosial propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak;
t. surat keputusan izin asuhan dari kepala instansi sosial;
u. laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak;
v. surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
w. surat rekomendasi pertimbangan perizinan pengangkatan anak dari Tim PIPA daerah; dan
x. surat Keputusan Izin untuk Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi untuk ditetapkan di pengadilan.

(1) Persyaratan administrartif COTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam KUHPerdata, pengangkatan anak (adopsi) tidak mungkin dilakukan karena KUHPerdata memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mengadakan keturunan. Karena adopsi di kalangan bangsa Tionghoa merupakan suatu perbuatan yang lazim dilakukan maka soal adopsi ini mendapat pengaturan sendiri sebagaimana diatur dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Bab II.

Tim pengkajian bidang hukum Islam pada pembinaan hukum nasional dalam seminar evaluasi pengkajian hukum tahun 1980/1981 di Jakarta pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan untuk menyusun rancangan undang-undang tentang Anak Angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

1. Lembaga pengangkatan anak tidak dilarang dalam hukum Islam, bahkan ajaran Islam membenarkan dan menganjurkan dilakukannya pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
2. Ketentuan mengenai pengangkatan anak perlu diatur dengan undang-undang yang memadai.
3. Istilah yang digunakan hendaknya disatukan dalam perkataan "pengangkatan anak" dengan berusaha memadukan istilah-istilah lain.
4. Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusnya hubungan darah anak angkat dengan orang tua dan keluarga kandung anak yang bersangkutan.

Jadi ketentuan yang mengatur mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia pada saat sekarang ini, adalah : 1. Hukum positif, 2. Hukum Adat; 3. Hukum Islam; Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945

menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Adapun susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 A Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Untuk lingkungan peradilan agama diatur dalam Undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 49 Undang-undang tersebut menyebutkan yaitu: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, sedekah dan ekonomi syariah." Kewenangan ini bertambah jumlahnya bila dibandingkan dengan kewenangan Pengadilan Agama berdasarakan Undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 yang hanya meliputi 6 (enam) bidang, yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Selanjutnya ada penambahan 3 (tiga) bidang kewenangan, yaitu zakat, infaq, dan ekonomi syariah. Kewenangan pengadilan agama dibidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf a Undang-undang RI No. 3 tahun 2006 menyebutkan:

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Ada satu penambahan kewenangan sub bidang perkawinan, yaitu penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 20. Kewenangan ini tidak disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989. Ketentuan pasal 49 Undang-undang RI

Nomor 3 tahun 2006 menegaskan tentang asas personalitas keislaman. Ketentuan yang demikian juga terdapat pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989 yang selanjutnya berkembang pendapat bahwa pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan agama, meskipun secara eksplisit pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak mengaturnya.

Rapat Kerja Nasional (Rekernas) Mahkamah Agung RI juga cenderung mengarah pada pendapat bahwa sepanjang memenuhi asas personalitas keislaman maka pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan agama. Sebelum berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 beberapa pengadilan agama telah mengabulkan permohonan pengangkatan anak, antara lain Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Bengkulu.[186]

Ada 2 pandangan yang bisa dikemukakan berkaitan kewenangan pengadilan agama terhadap penetapan pengangkatan anak sebelum lahirnya Undang-undang No. 3 tahun 2006. Pandangan itu masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, memandang pengadilan agama tidak berwenang mengadili pengangkatan anak. Menurut Undang-undang RI No. 14 tahun 1970 juncto Undang-undang RI No. 35 tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, badan-badan peradilan hanya berwenang menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa*), sedangkan perkara permohoanan (*voluntair*) bukan menjadi wewenang badan-badan peradilan, kecuali ditentukan undang-undang menjadi

[186] M. Fauzan, 2001, *Permohonan Pengangkatan Anak bagi Keluarga Muslim adalah Wewenang Absolut Peradilan Agama*, dalam Mimbar Hukum, Al-Hikmah, Jakarta, hal. 73.

wewenang badan peradilan.[187] Dengan demikian, kewenangan itu harus disebutkan secara eksplisit dalam perundang-undangan.

Permohonan pengangkatan anak tidak ditentukan oleh Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagai wewenang pengadilan agama. Apabila pengadilan agama memberikan penetapan voluntair yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak dan ternyata putusan tersebut bukan merupakan wewenangnya sebagaimana ditentukan undang-undang, maka putusan tersebut tidak berdasarkan hukum.[188] Pandangam demikian sejalan dengan pandangan Asikin Kusuma Atmaja dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987 yang menyatakan kewenangan pengadilan terhadap voluntair jurisdictie terbatas pada hal-hal yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.[189]

Adapun ketentuan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan bidang kewarisan yang didalamnya terdapat anak angkat yang dapat diberi wasiat atau wasiat wajibah. Bidang kewarisan tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama. Dasar kewenangan mengadili tidak dapat diadasarkan pada keberadaan Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian ketentuannya secara emplisit ditafsirkan bahwa pengadilan agama berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak. Lain halnya, apabila permohonan itu berupa pengesahan pengangkatan anak yang diajukan mempunyai urgensi dengan perkara kewarisan

[187] Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1970.
[188] Musthofa Sy, 2002, *Peradilan Agama di Indonesia*, Malang, Kencana, hal. 10
[189] M. Yahya Harahap, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Pustaka Kartini, hal. 32

yang merupakan kewenangan pengadilan agama, maka pengadilan agama dapat memberikan putusan yang bersifat deklaratif mengenai pengangkatan anak.

Kedua, memandang pengadilan agama berwenang mengadili pengangkatan anak. Pengadilan agama sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam terkait dengan asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.[190] Oleh karena itu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,[191] maka lahir beberapa yurisprudensi pengangkatan anak dalam konteks saling menolong dan semangat akidah hukum Islam.

Pandangan terakhir ini sesuai dengan pendapat K. Wantjik Saleh mengenai hukum acara perdata bahwa pengadilan selain memberikan putusan perkara perdata juga memberikan penetapan terhadap perkara permohonan. Permohonan dimaksud harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada atau hukum tak tertulis yang hidup memerlukan suatu penetapan semacam itu.[192]

Perbedaan pandangan mengenai kewenangan pengadilan agama terhadap perkara pengangkatan anak ini harus berakhir setelah lahirnya Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006 yang dalam Pasal 49 dan penjelasannya secara tegas menentukan kewenangan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah kewenangan pengadilan agama.

---

[190] Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
[191] *Ibid.*, Pasal 28 Ayat (1)
[192] K. Wantjik Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata Rbg/HIR*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 96

B. Perkembangan Aturan Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia

Ada beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak angkat, yaitu sebagai berikut:

1. Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur adopsi Warga Negara Tionghoa di Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No.2 Tahun 1979 yang mengatur tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak;
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor U-335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982, tentang Anak Angkat.

Pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan pada masyarakat Indonesia yang bhineka (plural) tidak mudah dan mengalami banyak pertentangan. Sejak pasca proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia sampai awal era reformasi, hanya ada satu pasal yang mengatur pengangkatan anak, yaitu Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan ketentuan pasal itu pun sebatas tujuan pengangkatan anak.

Sementara Staatsblad warisan kolonial yang mengatur pengangkatan anak untuk penduduk golongan Tionghoa tersebut substansinya sudah ketinggalan zaman (*out of date*), bahkan secara perlahan dan pasti ditinggalkan oleh golongan Tionghoa sendiri.

Sejak melewati pintu gerbang proklamasi sampai memasuki pintu gerbang reformasi, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara memadai pelaksanaaan pengangkatan anak di Indonesia. Di era reformasi, pengaturan pengangkatan anak tersebut mulai terwujud dengan lahirnya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak, yang di dalamnya juga mengatur pengangkatan anak.

Dalam perspektif perlindungan anak, pada dasarnya secara yuridis pengangkatan anak hanya bisa ditolelir jika memang semata-mata dilakukan demi kepentingan kesejahteraan anak sebagaimana ditegaskan dalam pasal 12 ayat (1) UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. pasal 39 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari upaya

perlindungan anak sebagaimana dikehendaki pasal I ayat (2) dan pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002, yakni guna menjamin dan melindungi anak bersangkutan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini jelas sangat relevan dengan tujuan sesungguhnya dibolehkannya pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam di mana pengangkatan anak hanya dibolehkan manakala memang sudah terdapat urgensi yang memadai, semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak bersangkutan.

Pengertian anak angkat menurut Undang-Undang tersebut adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengaturan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41. Pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengalami perubahan secara revolusioner. Hal-hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak tersebut sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. (Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. (Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). (Pasal 39 Ayat (3) dan Ayat (5) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
5. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. (Pasal 39 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
6. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan pada pelaksanaan pengangkatan anak (Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Analisis pendekatan historis menunjukkan bahwa ketentuan pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya dalam Undang-Undang tersebut merupakan asas kunci yang selama ini diperjuangkan oleh umat Islam. Asas kunci itu pula yang menjadi kendala pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu teramat panjang. Ketika asas itu dapat ditampung, pengaturan pengangkatan

anak dalam undang-undang dapat terwujud dan akan memberikan arah pengaturan pengangkatan anak yang lebih baik.[193]

Reformasi hukum pengangkatan anak tersebut mengatur hal-hal yang bersifat prinsip dalam pengangkatan anak dengan memperhatikan hukum agama. Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut, sebagaimana Ketentuan Peralihan (*overgangsbepalingen*) Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan: Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Hal-hal yang bersifat prinsip itu antara lain pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya dan harus seagama. Ketentuan tersebut telah mereformasi konsepsi pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 nomor 129 dan sebagian hukum adat di Indonesia. Ketentuan pengangkatan anak tersebut telah memberi arah baru pengangkatan anak di Indonesia. Kendati pengaturan pengangkatan anak dalam perundangan-undangan belum lengkap dan tuntas, karena masih banyak hal yang seharusnya juga diatur dalam sebuah undang-undang mengenai pengangkatan anak, namun setidaknya telah memberi harapan lebih baik bagi perkembangan hukum pengangkatan anak di Indonesia.

[193] Musthofa Sy, *Arah Baru Pengangkatan Anak di Indonesia*, http://www.arsip. badilag.net/data/ARTIKEL/ Artikel

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak ditindaklanjuti lagi dengan ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada tanggal 3 Oktober 2007. Peraturan Pemerintah tersebut untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini mencakup ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6, jenis pengangkatan anak diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11, syarat-syarat pengangkatan anak diatur dalam pasal Pasal 12 sampai dengan Pasal 18, tata cara pengangkatan anak terdapat pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 25. Selanjutnya adalah bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak terdapat pada Pasal 26 sampai dengan Pasal 31, sedangkan pengawasan pada pelaksanaan pengangkatan anak terdapat pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 38.

C. Prosedur Pengangkatan Anak di Pengadilan

Ada beberapa prosedur pengangkatan anak yang diatur oleh peraturan, berikut ini akan dijelaskan mulai dari staatsblad 1917 Nomor 129, Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

1. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Staatsblad 1917 Nomor 129

Pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yaitu pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa dalam sistem hukum di Indonesia. Dari ketentuan dalam stbl. 1917 No. 129 tampak bahwa peraturan itu menghendaki agar setiap pengangkatan anak memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat memaksa (*Compulsory*), sehingga tidak dipenuhinya persyaratan dimaksud akan mengakibatkan batalnya pengangkatan anak. Ordonansi dalam stbl.1917 No.129 mengatur tentang pengangkatan anak pada Bab II yang berkepala *"Van adoptie"*. Bab II ini terdiri dari 11 pasal, yaitu dari pasal 5 sampai dengan pasal 15 sebagai berikut :

1) Yang dapat mengangkat anak adalah: suami, istri, janda, atau duda (Pasal 5).
2) Yang dapat diangkat anak, ialah : hanya orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan yang belum diadopsi oleh orang lain (Pasal 6).
3) Yang diadopsi harus sekurang-kurangnya delapan belas tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya lima belas tahun lebih muda dari istri atau janda yang mengadopsinya (Pasal 7 ayat (1)).
4) Adopsi hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris (Pasal 10 ayat (1).
5) Anak adopsi demi hukum harus memakai nama keluarga orang tua angkatnya (Pasal 11).
6) Adopsi menyebabkan putusnya hubungan hukum antara orang tua adopsi dengan orang tua kandungnya (Pasal 14).

7) Adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum (Pasal 15 ayat (2).[194]

Staatsblad Tahun 1917 No.129 ini hanya berlaku untuk orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Namun karena keperluan bagi masyarakat Indonesia, maka masyarakat Indonesia ada juga yang memakainya dengan cara menundukkan diri, mengingat hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Indonesia adalah tidak tertulis sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak

Prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur :

a) Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunteer (*jurisdiction voluntaria*);
b) *Petitum* Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam *petitum* permohonan;
c) Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk "Penetapan", sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya

[194] Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 79.

pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (*inter-country adoption*) pengadilan akan menerbitkan "Putusan" Pengesahan Pengangkatan Anak.[195]

Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1) Syarat-syarat bagi orang tua angkat:
   a. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
   b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan.
2) Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:
   a. Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan Surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.
   b. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai ijin tertulis dari Menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.[196]

[195] *Ibid*., hal. 119.
[196] Dessy Balaati, 2013, *"Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia",* Jurnal Lex Privatum, Vol. 1, No. 1, Januari-Maret 2013, hal. 141.

3. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengaturan mengenai Prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut:

1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
   a) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
   b) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);
   c) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
   d) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
   e) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
   f) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
   g) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
   h) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;
   i) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.

2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
   b) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
   c) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
3. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
4. Proses Penelitian Kelayakan.
5. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.
7. Penetapan Pengadilan.
8. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.[197]

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan disajikan skema prosedur pengangkatan anak yang dibuat oleh Direktorat Rehabilatasi Sosial Anak, yaitu sebagai berikut:

[197] Dessy Balaati, 2013, *"Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia",* Jurnal Lex Privatum, Vol. 1, No. 1, Januari-Maret 2013, hal. 141-142.

Skema 3

Prosedur Pengangkatan Anak Antar WNI



Sumber : Direktorat Rehabilatasi Sosial Anak Jakarta

Skema 4
Prosedur Pengangkatan Anak Antar WNI dan WNA



Sumber : Direktorat Rehabilatasi Sosial Anak Jakarta

D. Prosedur Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan

Pengangkatan anak bukanlah adopsi (Inggris) dan bukan pula *tabanni* (Arab) yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak sendiri. Adapun proses permohonan penetapan pengangkatan anak di pengadilan adalah sebagai berikut:

a. Prosedur Pengajuan Permohonan

1. Permohonan diajukan dengan surat pemohonan yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama setempat.
2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di depan ketua pengadilan yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut.
3. Permohonan disampaikan kepada ketua pengadilan, kemudian didaftarkan dalam buku registrasi dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar perskot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh pengadilan tersebut.
4. Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Proses Pengajuan Permohonan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada ketua Pengadilan;
2. Kemudian surat permohonan diberi registrasi oleh panitera;
3. Ketua Pengadilan akan menunjuk hakim yang akan menangani permohonan tersebut;

4. Setelah itu hakim yang menangani perkara tersebut menetapkan hari dan tanggal sidang;
5. Jurusita memanggil pemohon dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan;
6. Setelah pemohon dan saksi hadir sidang dibuka oleh hakim yang menangani permohonan tersebut ;
7. Kemudian hakim memeriksa segala bukti dan saksi sekiranya pengajuan pemohon beralasan maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan pertimbangan:
    a) atas dasar tolong menolong.
    b) Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak.
    c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
    d) Pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
    e) Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi, mereka hanya mempunyai hubungan keperdataan dan kepada anak angkat hanya dapat diberikan wasiat wajibah maksimal 1/3 dari warisan orang tua angkatnya.
    f) Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tetap ajnabi (asing) dan harus tetap menjaga mahramnya.

8. Hakim akan membacakan putusan dari permohonan pengangkatan anak tersebut dan selanjutnya Sidang ditutup oleh hakim.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila yaitu:

a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya;
b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya;
c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal / alamat;
d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut di atas bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya juga terhadap pendidikannya.

E. Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) Oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi kesejahteraan anak. Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah dalam semua

tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Intercountry Adoption adalah pengangkatan anak yang calon orang tua angkat yang keduanya adalah Warga Negara Asing, salah satu calon orang tua angkat adalah Warga Negara Asing (pasangan campur/mixed couple), dan calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia yang mengangkat anak Warga Negara Asing. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan peraturan perundang -undangan tentang pengangkatan anak sudah ada sejak zaman sebelum perang di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam Staatsblad Tahun 1917 No. 129. Dalam Bab II Staatsblad tersebut diatur tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa. [198]

Setelah zaman kemerdekaan yaitu pada tahun 1958 dikeluarkanlah Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini, terdapat peraturan tentang pengangkatan anak yaitu dalam Pasal 2. Setelah keluarnya undang-undang tentang kewarganegaraan, pada tahun 1978 dikeluarkanlah Surat Edaran Direktur Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978. Surat Edaran tersebut mengatur tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing.

Peraturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing tahun ke tahun diperbaharui, peraturan terbaru tentang pengangkatan anak dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

[198] Fransiska Hildawati Tambunan, 2013, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)*, Unnes Law Journal 2 (2) (2013) hal. 98.

Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Selain peraturan tersebut ada juga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung yang dikeluarkan untuk mengatur pengangkatan anak, yaitu SEMA No. 2 Tahun 1979 yang disempurnakan oleh SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak.

Akhirnya dengan keluarnya SEMA No. 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak yang lebih menekankan bahwa agama anak angkat harus sama dengan agama calon orang tua angkatnya. Peraturan-peraturan pengangkatan anak tersebut tidak terlepas dari upaya perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Khusus pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing bukan hanya berpengaruh pada anak angkat saja tetapi juga terhadap kewarganegaraannya, sehingga perlu juga mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diketahui bahwa pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*) dan calon anak angkat harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak.

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing adalah upaya terakhir (*ultimum remidium*), dimana persyaratan untuk mendapat hak asuh anak tidaklah mudah. COTA Warga Negara Asing harus memenuhi persyaratan material dan persyaratan administratif, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 Pasal 44 dan Pasal 45 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Tahapan pertama yang harus dilakukan oleh Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Asing yang ingin melakukan pengangkatan anak adalah melakukan konsultasi terhadap Kementerian Sosial. Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dijelaskan Konsultasi dilakukan agar calon orang tua angkat mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, dengan maksud memberikan informasi tentang pengangkatan anak dan memberikan motivasi untuk mengangkat anak.

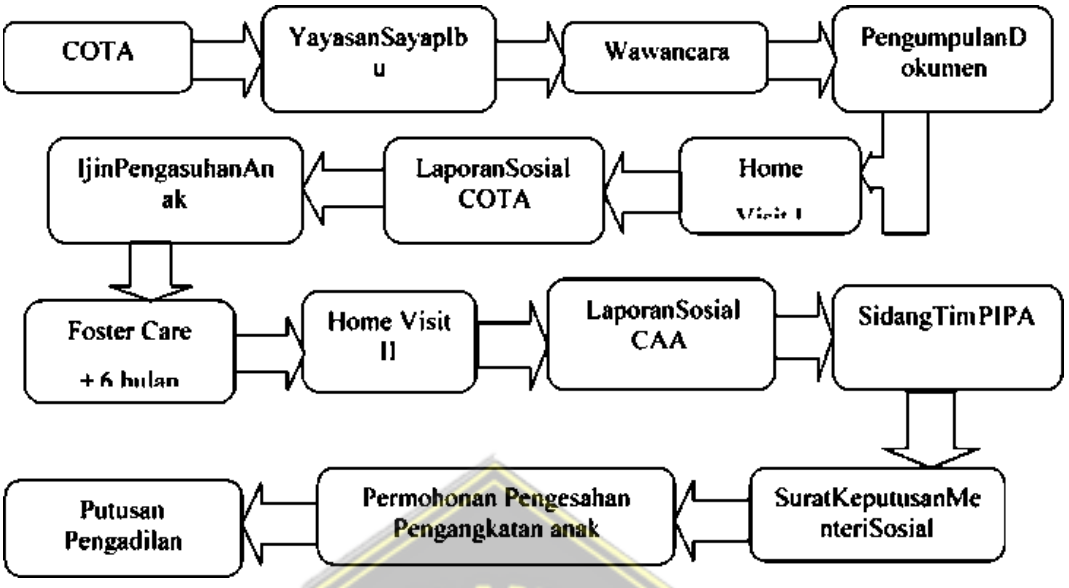
Proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry adoption*) dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Pasal 46 ayat (1) tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang kemudian diolah untuk lebih mudah dimengerti melalui bagan berikut[199]

Skema 5

Proses Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption) di Indonesi[200]

[199] Fransiska Hildawati Tambunan, 2013, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)*, Unnes Law Journal 2 (2) (2013) hal 97.

[200] *Ibid*, hal. 98.



Berikut ini akan penulis uraikan mengenai prosedur pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, yaitu:

Calon Anak Angkat (CAA) pada pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh COTA yang Warga Negara Asing harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak.[201] Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) Warga Negara Asing, CAA harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.[202]

Pengajuan permohonan pengangkatan anak, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melampirkan penetapan pengadilan yang menetapkan bahwa CAA terlantar. [203]

[201] Pemensos No 110 Tahun 2009 pasal 41 ayat (1)
[202] *Ibid.*, ayat (2)
[203] *Ibid.*, ayat (3)

Persyaratan COTA pada pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing di Indonesia ada 2 macam, yaitu sebagai berikut :

1) persyaratan material; dan
2) persyaratan administratif.

Adapun persyaratan material untuk pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing adalah sebagai berikut:[204]

1) sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA ;
2) berada dalam rentang umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun pada saat COTA mengajukan permohonan pengangkatan anak;
3) beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5) berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
6) tidak merupakan pasangan sejenis;
7) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8) dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
9) memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya ;

[204] *Ibid.*, pasal 44

10) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
11) membuat pernyataan tertulis akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
12) dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
13) COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun ;
14) Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
15) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
16) Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal COTA melalui kedutaan atau perwakilan negara COTA;
17) CAA berada di Lembaga Pengasuhan Anak;
18) Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
19) memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

Sedangkan persyaratan administratif pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing di Indonesia adalah sebagai berikut:[205]

1) Surat keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah;
2) Surat keterangan kesehatan dari Dokter Spesialis Jiwa Pemerintah yang menyatakan COTA tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa;
3) Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah;
4) Akte kelahiran COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
5) Copy paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap ;
6) (KITAP); serta surat keterangan tempat tinggal;
7) Copy KTP orang tua kandung CAA dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung CAA dan/ atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung CAA dan/ atau penetapan pengadilan tentang agama CAA;
8) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) COTA dari MABES POLRI;
9) Copy Akte Perkawinan yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
10) Copy Akte Kelahiran anak kandung COTA, apabila COTA telah mempunyai seorang anak;

[205] *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

11) Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA yang dilegalisir oleh kedutaan besar negara COTA dan dilihat dan dicatat di Deplu dan Dephukham;
12) Surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial,
13) Surat izin dari orang tua/wali di atas kertas bermaterai cukup;
14) Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
15) Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
16) Membuat surat penyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
17) Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun;

18) Surat pernyataan dan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
19) Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hakhak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
20) Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
21) Surat izin dari pemerintah negara asal COTA yang dilegalisir Departemen Luar Negeri setempat;
22) Persetujuan dari keluarga COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
23) Laporan sosial mengenai CAA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
24) Surat penyerahan anak dari ibu kandung kepada rumah sakit/kepolisian/ masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
25) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
26) laporan sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial;
27) Surat Keputusan Izin Asuhan yang ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri Sosial RI tentang pemberian izin pengasuhan sementara;

28) Laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak mengenai perkembangan anak selama diasuh sementara oleh COTA;

29) Foto CAA bersama COTA;

30) Surat Keputusan TIM PIPA tentang pertimbangan izin pengangkatan anak;

31) Surat Keputusan Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang pemberian izin pengangkatan anak untuk diproses lebih lanjut di pengadilan; dan

32) Penetapan pengadilan bahwa status CAA sebagai anak terlantar.

Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[206]

Sedangkan Tata Cara pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing di Indonesia adalah sebagai berikut:[207]

1) COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Menteri Sosial di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 45 ayat (1);

[206] *Ibid*, pasal 45 ayat (2)
[207] *Ibid*, pasal 46 ayat (1)

2) Menteri c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
3) Direktur Pelayanan Sosial Anak atas nama Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Izin Pengasuhan Anak Sementara kepada COTA melalui Lembaga Pengasuhan Anak;
4) Penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada COTA;
5) Bimbingan dan pengawasan dari Pekerja Sosial selama pengasuhan sementara;
6) COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak disertai pernyataan mengenai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial di kertas bermaterai cukup;
7) Kunjungan rumah oleh Pekerja Sosial Departemen Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
8) Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam Tim PIPA;
9) Diterbitkannya Surat rekomendasi dari TIM PIPA tentang perizinan pertimbangan pengangkatan anak;
10) Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Izin pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan;

11) Apabila permohonan pengangkatan anak ditolak maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung/wali yang sah/kerabat, Lembaga Pengasuhan Anak, atau pengasuhan alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak;
12) Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Departemen Sosial; dan
13) Departemen Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.

Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. [208]

Demikian proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara ASing (WNA) yang berada di Indonesia. Namun demikian pengangkatan anak oleh WNA terhadap anak WNI ini adalah upaya terakhir.

[208] *Ibid*, Pasal 46 ayat (2)

BAB IV

KELEMAHAN HUKUM PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA

A. Penegakan Hukum di Indonesia

Pada saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia karena masih ada keprihatinan yang mendalam dari ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum. Dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa tidak saja hukum perdata namun juga hukum pidana menempati peringkat pertama yang mendapat sorotan tetapi juga celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Bidang hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah untuk dijadikan indikator apakah reformasi hukum yang dijalankan di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum. Hukum pidana bukan hanya berbicara tentang putusan pengadilan atas penanganan perkara pidana, tetapi juga meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana, demikian juga dengan hukum perdata dan hukum lingkungan.[209]

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan

[209] Eman Sulaiman, 2016, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Ash Shahabah, Jurnal Pendididkan Dan Studi Islam, hal. 64.

oleh masyarakat yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.[210]

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum

[210] Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 42.

merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal dari kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokad.[211]

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu: supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.[212]

Menurut Daliyo hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap hukum ini berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang penting[213]

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945 yang berbunyi: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

[211] Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hal. 32.
[212] Utrecht, 1996, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Intermasa, hal.13
[213] Daliyo J. B., 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenhallindo, hal.30

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dengan begitu maka perilaku alat negara, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan penduduk harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.[214]

Hukum Negara ialah aturan bagi negara itu sendiri, bagaimana suatu negara menciptakan keadaan yang relevan, keadaan yang menentramkan kehidupan sosial masyarakatnya, menghindarkan dari segala bentuk tindak pidana maupun perdata. Namun keadaan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, pemberitaan di media masa sangat memilukan. Bahkan dari hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan bahwa 56,0 % publik menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia, hanya 29,8 % menyatakan puas, sedangkan sisanya 14,2 % tidak menjawab. Sebuah fenomena yang menggambarkan betapa rendahnya wibawa hukum di mata publik.[215]

1. Kebijakan Penegakan Hukum

Kebijakan adalah kepandaian, atau kemahiran, atau kebijaksanaan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak pemerintah, seperti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran dari haluan-haluan pemerintah mengenai

[214] Hasaziduhu Moho, 2019, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019, ISSN : 1829-7463 Universitas Dharmawangsa, hal. 2.

[215] *Ibid*, hal. 65.

moneter yang perlu dibahas oleh anggota DPR.[216] Sedangkan penegakan adalah proses, cara, perbuatan, menegakkan. Selain itu hukum memiliki beberapa pengertian atau definisi yaitu sebagai berikut:

a) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
b) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup bermasyarakat;
c) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam, dsb) yang tertentu;
d) Keputusan (pertimbangan) yang diterapkan oleh hakim (di pengadilan) dalam bentuk vonis.[217]

Sedangkan pendapat Sudikno Mertokusomo hukum adalah aturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yaitu keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi bagi yang melanggarnya. [218]

Jadi arti kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, jaksa, hakim, serta pengacara.

---

[216] W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 149

[217] *Ibid*, hal, 410

[218] Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hal. 40.

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Merdeka dan bermartabat berarti dalam penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan, yaitu keadilan untuk semua. Sebab apabila penegakan hukum dapat mengaplikasikan nilai keadilan, tentulah penerapan fungsi hukum tersebut dilakukan dengan cara-cara berpikir yang filosofis dan berkeadilan.

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).[219]

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaaan atau penegakan hukum keadilan harus dijunjung tinggi. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan.[220]

Pada pasal 27 UUD 1945 dengan jelas tercantum yaitu "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

[219] *Ibid*, hal. 145
[220] *Ibid*, hal. 146.

Rumusan tersebut mengandung makna bahwa semua warga negara Republik Indonesia memiliki persamaan hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh ada yang dinamakan diskriminasi terhadap warga negara. Bahkan tafsiran tersebut juga menyangkut prinsip persamaan itu berlaku bagi siapa saja, apakah ia seorang warga negara atau bukan, selama mereka adalah penduduk Negara Republik Indonesia mereka harus diperlakukan sama.[221]

2. Problematika Penegakan Hukum di Indonesia

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum yaitu para penegak hukum. Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu atau penegak hukum menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum.[222]

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara

[221]Jimly Asshiddiqie, 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Grafika, hal. 110

[222]Eman Sulaiman, 2016, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Ash Shahabah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, hal. 67.

negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.[223]

Struktur hukum atau pranata hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (LP). Kewenangan lembaga penegak hukum ini dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran yaitu warga masyarakat. Disamping itu harus mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh warga masyarakat. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partispasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-

[223] Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika, Kajian Sosiologi Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 50

norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.[224]

Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat serta judicial corruption yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai sekarang sulit untuk diberantas. Adanya *judicial corruption* jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktik korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum (hakim, jaksa, polisi dan advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. Misalnya, kalau hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan. Maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan dampaknya.

[224] Soerjono Soekanto, dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Press, hal. 20.

Budaya/Kultur Hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku di masyarakat, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi: petugas strata atas, menengah dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauhmana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya. Dalam penegakkan hukum, menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, kemungkinan penegak hukum mengahadapi hal-hal sebagai berikut:

a) Sampai sejauhmana petugas penegak hukum terikat dengan peraturan yang ada;
b) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan;

c) Teladan seperti apakah yang sebaiknya dicontohkan oleh petugas kepada masyarakat;

d) Sampai sejauhmanakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.[225]

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dapat mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Kondisi nyata yang terjadi saat ini di Indonesia mengindikasikan adanya kegagalan aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Kegagalan penegakan hukum secara keseluruhan dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan (*unability*) dan ketidakmauan (*unwillingness*) dari aparat penegak hukum itu sendiri. Ketidakmampuan penegakan hukum diakibatkan profesionalisme aparat yang kurang, sedangkan ketidakmauan penegakan hukum berkait masalah KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, masalah ini sudah menjadi rahasia umum. Terlepas dari dua hal di atas lemahnya penegakan hukum di

[225] Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 95

Indonesia juga dapat dilihat dari ketidakpuasan masyarakat karena hukum yang nota benenya sebagai wadah untuk mencari keadilan bagi masyarakat, tetapi malah memberikan rasa ketidakadilan.

Akhir-akhir ini ada isu yang sedang hangat-hangat di perbincangkan salah satunya adalah permasalahan korupsi. Kasus ini seakan sudah menjadi tradisi yang mendarah daging di Negara Indonesia. Penyakit korupsi melanda seluruh lapisan masyarakat bahkan yang menjadi perhatian saat ini adalah para aparat yang seharusnya menjadi penegak hukum dalam kasus ini juga ikut terkait di dalamnya. Salah satu lembaga yang menjadi perhatian adalah lembaga peradilan.

Korupsi telah merambat dan mengotori hampir seluruh institusi penegakan hukum kita termasuk lembaga peradilan. Misalnya saja tentang salahnya penegakan hukum di Indonesia seperti saat seseorang mencuri sandal, ia disidang dan didenda hanya karena mencuri sandal seorang Briptu yang harganya sangat murah, sedangkan para koruptor di Indonesia bisa dengan leluasa merajalela, menikmati hidup seakan tanpa dosa, karena mereka memandang rendah hukum yang ada di negara Indonesia.

Kita ambil contoh Arthalyta Suryani beberapa tahun lalu, yang menempati ruang tahanan yang terbilang mewah dari tahanan yang lain karena lengkap dengan fasilitas seperti televisi, kulkas, AC, bahkan sampai ruang karokean. Hal ini kemudian memperlihatkan diskriminasi di dalam pemutusan perkara oleh lembaga peradilan di Indonesia dimana rakyat miskin yang tidak mempunyai kekuatan financial seakan hukum begitu runcing kepadanya sedangkan para orang-orang yang berduit menganggap hukum itu bisa dibeli bahkan sel tahanan mereka tidak layaklah

dikatakan sebagai sel tetapi hotel berbintang sedangkan rakyat miskin begitu merasakan sedihnya ketika berada dalam sel tahanan.

Persamaan di hadapan hukum yang selama ini di kampanyekan oleh pemerintah nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Hukum yang berlaku sekarang di Indonesia seakan-akan berpihak kepada segelintir orang saja. Supremasi hukum di Indonesia masih harus diperbaiki untuk mendapat kepercayaan masyarakat dan dunia internasional teutama sistem hukum Indonesia. Masih banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara kita. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Namun keadaan yang sebaliknya terjadi di Indonesia. Hukum seakan tajam kebawah namun tumpul keatas. Ini terbukti dengan banyaknya kasus yang terjadi, contohnya saja kasus nenek Minah yang divonis 1,5 bulan penjara karena mencuri tiga buah kakao. Dari segi manapun mencuri memang tidak dibenarkan. Namun, kita juga harus melihat dari sisi kemanusiaan. Betapa tidak adilnya ketika rakyat kecil seperti itu betul-betul ditekan sedangkan para pejabat yang korupsi jutaan bahkan miliaran rupiah bebas begitu saja, walaupun ada yang terjerat hukuman tapi penjaranya bagaikan kamar hotel.

Masyarakat awam pun pasti mengetahui apa yang dimaksud keadilan. Berbeda dengan kasus yang melibatkan rakyat kecil yang seharusnya memang bisa diselesaikan dengan rasa keadilan serta kekeluargaan, para pimpinan negara yang terhormat malah melakukan banyak korupsi dan tak terselesaikan masalahnya.

Para penegak hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat dan penasihat hukum. Di tangan merekalah terletak suatu beban kewajiban untuk

mengimplementasikan suatu prinsip keadilan sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua secara optimal dan maksimal. Namun hal sebaliknya terjadi di Indonesia. Banyak kasus penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya. Banyak keganjilan yang terjadi didalam penegakan hukum itu seperti dengan mudahnya seseorang yang mempunyai uang mendapatkan fasilitas di ruang tahanan atau ada beberapa kasus yang sangat mengganjal keputusan yang di putuskan seperti kasus pencurian sandal di atas.

Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, beliau mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan objeknya.

Penegakkan hukum dari aparat kepolisian juga dinilai sangat kurang, bisa dilihat dengan banyaknya penilangan kepada kendaraan bermotor yang berakhir dengan istilah UUD (Ujung-Ujungnya Duit) atau biasa disebut uang sogokan. Serta ada pula masalah tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai kurang serta tidak didasari dengan landasan hukum yang tepat. Seperti kebijakan bagi pengendara motor yang diharuskan menyalakan lampu utama pada siang hari yang dinilai kurang realistis. Karena menyalakan lampu pada siang hari sama saja dengan pemborosan energi, sesungguhnya cahaya matahari sudah cukup terang bagi pengguna jalan. Dan alasan karena banyaknya terjadi kecelakaan siang hari oleh para pengguna sepeda motor tentu bukan karena lampu atau cahaya yang kurang.

Dengan adanya pemanasan global dan yang dicanangkan pemerintah tentang save energy-pun dipertanyakan karena memang menyalakan lampu pada siang hari adalah pemborosan energi. Beberapa Undang-undang yang seharusnya dibuat setiap tahun dengan jumlah yang sudah ditetapkan pun molor sehingga hanya ada sedikit Undang-undang yang sudah terealisasikan. Hal ini tentu menjadi catatan bagi pemerintah yang seharusnya hukum itu untuk keteraturan serta tercipta kedamaian di negara Indonesia menjadi amburadul.

Selain dengan masalah-masalah tersebut tentu dengan adanya hukum yang lemah maka ketahanan negara juga akan lemah. Bisa kita lihat dari berbagai macam kasus tentang perbatasan negara maupun pencaplokan wilayah dan budaya yang dilakukan oleh negara tetangga. Pemerintah Indonesia sangat lamban dalam mengambil sikap dalam hal pertahanan dan keamanan Negara. Adanya kesenjangan sosial di wilayah perbatasan Indonesia serta kota-kota lain di Indonesia serta sarana dan infrastruktur di daerah perbatasan yang sangat kurang dan menjadi masalah yang harus ditanggapi serius oleh pemerintah. Masyarakat perbatasan tentu merasa dianak-tirikan oleh pemerintah karena tidak adanya peran pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, dan tentu hal ini menjadi senjata bagi negara lain untuk mencaplok daerah perbatasan sebagai daerah negaranya karena negara tersebut mengambil hati masyarakat dengan memberi berbagai macam kebutuhan oleh negara tersebut berbeda dengan apa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.

Hal tersebut menyebabkan bahwa hukum di Indonesia walaupun dibuat dengan berlandaskan pancasila serta UUD 1945 namun dalam pelaksanaannya tidak ada jiwa pancasila yang melekat dalam setiap penegak hukum serta pemerintah

Indonesia. Dengan melemahnya penegakan hukum di Indonesia tentu sedikit demi sedikit menyebabkan keadilan di Indonesia akan terkikis dengan adanya sikap pemerintah yang seakan hanya mementingkan dirinya sendiri, jabatan dan kekuasaan politik bagi diri dan partainya.

Sungguh menjadi sesuatu yang ironis ketika kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya menjadi berkurang, dan ketika itulah masyarakat akan menjadi merasa tersakiti serta tak percaya kepada pemerintah yang sedang berkuasa, padahal kepercayaan adalah salah satu tiang keadilan dan kemakmuran. Ketika hukum yang hanya memihak golongan tertentu maka keadilan juga akan memudar dan akan meruntuhkan derajat dan martabat negara. Dengan runtuhnya derajat negara, runtuh pula negara tersebut dan akan mudah bagi pihak-pihak yang merasa diuntungkan dengan situasi ini yaitu adanya intervensi asing dalam masalah negara.

Karena intervensi itu sendiri sudah mulai muncul ketika banyaknya media asing yang memberitakan tentang bobroknya negara Indonesia. Sebagai salah satu contoh adalah dimana ada media asing yang memberitakan tentang banyaknya jembatan yang tak layak di Indonesia. Masyarakat terutama para siswa yang ingin bersekolah harus menantang nyawa dengan menyeberangi sungai hanya dengan seutas tali. Dalam hal ini diimana peran pemerintah? Hanya ada janji saja yang entah kapan akan ditepati. Hukum memang salah satu cara untuk memberikan keadilan, dan hukum seharusnya ditegakkan dengan bijaksana, tegas dan apa adanya serta tidak memihak.

Selain beberapa faktor di atas, faktor uang juga mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Beberapa kasus bisa menjadi cerminan lemahnya hukum di

Indonesia ketika sudah berbenturan dengan uang, misalnya saja kasus korupsi yang menjerat nama Gayus Tambunan. Kasus ini memang sudah di selesaikan dipengadilan, tetapi walaupaun Gayus telah ditempatkan di dalam penjara, nyatanya dia masih bebas untuk berwisata ke Bali bahkan sampai keluar negeri yaitu Makau. Ini karena lemahnya iman para petugas yang seharusnya menegakkan keadilan hukum.

Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak hukum untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan

yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.[226]

Penegakan hukum yang carut-marut, kacau, dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Selain itu Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan harus memenuhi empat faktor, yaitu:

1. Hukum dan peraturan itu sendiri.

   Kemungkinannya adalah terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Bisa juga ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.

2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum.

   Penegak hukum antara lain seperti polisi, jaksa, hakim, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum dan hukum pun tidak bisa berjalan dengan baik.

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.

   Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum

[226] Jimly Asshiddiqie, 2012, *Makalah Penegakan Hukum*, diakses dari google.com pada 25 Oktober 2020.

tidak akan berjalan dengan semestinya. Misalnya prasarana yang kurang baik atau kurang lengkap.

4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.

Dipihak lain perlu juga disadari bahwa penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan di atas merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan.

Naminem Laedere semata bukanlah keadilan, demikian pula *Suum Cuique Tribuere* yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Keadilan yang mendekati kutub Naminem Laedere adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub Suum Cuique Tribuere. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup-dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani.[227]

Penegakan hukum yang acap kali menciderai rasa keadilan, baik keadilan menurut pandangan yuridis maupun keadilan menurut masyarakat. Hal inilah salah

[227]Abdul Anshori Ghofur, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hal. 55-56

satu pemicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menegakan hukum di tengah masyarakat.

Jika kita pandang dari kacamata sosiologi hukum, kita dapat mengasumsikan bahwa ada dua faktor yang paling menonjol yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menegakan hukum yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal (yang berasal dari penegak hukum itu sendiri) salah satu contoh, adanya kecenderungan dari aparat penegak hukum dalam menegakan hukum berpedoman pada undang-undang semata sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan faktor eksternal (yang berasal dari luar penegak hukum itu sendiri) misalnya ketika terjadi peristiwa hukum adanya kecenderungan masyarakat yang menyelasaikan dengan caranya sendiri.

Lembaga hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. Idealnya, lembaga hukum tidak boleh sedikitpun bergoyah dalam menerapkan keadilan yang didasarkan atas ketentuan hukum dan syari"at yang telah disepakati bersama. Hukum menjamin agar keadilan dapat dijalankan secara murni dan konsekuen untuk seluruh rakyat tanpa membedakan asal-usul, warna kulit, kedudukan, keyakinan dan lain sebagainya.

Jika keadilan sudah tidak ada lagi maka masyarakat akan mengalami ketimpangan. Oleh karena itu, lembaga hukum dalam masyarakat madani harus

menjadi tempat mencari keadilan. Hal ini bisa diciptakan jika lembaga hukum tersebut dihormati, dijaga dan dijamin integritasnya secara konsekuen. [228]

Jika kita berkaca kepada potret penegakan hukum di Indonesia setelah menilik dari berbagai kasus belumlah berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan buruk. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas salah satunya Praktik korupsi yang menggurita, namun ironisnya para pelakunya sangat sedikit yang terjerat oleh hukum. Kenyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil, dalam hal ini aparat menegakkan hukum cepat tanggap, karena sebagaimana diketahui yang terlibat kasus korupsi merupakan kalangan berdasi yang memiliki kekuatan (*power*) untuk menginterfensi efektifitas dari penegakan hukum itu sendiri.

Realita penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan menciderai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat pada hukum, khususnya aparat penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana sama-sama diketahui para pencari keadilan yang note bene adalah masyarakat kecil sering dibuat frustasi oleh para penegak hukum yang nyatanya lebih memihak pada golongan berduit. Sehingga orang sering menggambarkan kalau hukum Indonesia seperti jaring laba-laba yang hanya mampu menangkap hewan-hewan kecil, namun tidak mampu menahan hewan

[228] Miftah Thoha, 2003, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 218

besar tetapi hewan besar tersebutlah yang mungkin menghancurkan seluruh jaring laba-laba. [229]

Problematika penegakan hukum yang mengandung unsur ketidakadilan mengakibatkan adanya issu mafia peradilan, sehingga ada istilah keadilan dapat dibeli. Munculnya bahasa-bahasa yang sarkastis dengan plesetan HAKIM (Hubungi Aku Kalau Ingin Menang), KUHAP diplesetkan sebagai Kurang Uang Hukuman Penjara, UUD (Ujung-Ujungnya Duit) tidaklah muncul begitu saja. Kesemuanya ini merupakan "produk sampingan" dari bekerjanya lembaga-lembaga hukum itu sendiri. Ungkap-ungkapan ini merupakan reaksi dari rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena bekerja lembaga-lembaga hukum yang tidak profesional maupun putusan hakim/putusan pengadilan yang semata-mata hanya berlandaskan pada aspek yuridis. Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya.

3. Dampak Penegakan Hukum di Indonesia

Penyelewengan atau inkonsistensi hukum di Indonesia sudah berlangsung lama, bahkan sudah bertahun-tahun hingga sekarang, sehingga bagi masyarakat Indonesia ini merupakan bukan lagi menjadi rahasia umum. Hukum yang dibuat berbeda dengan hukum yang dijalankan, contoh paling dekat dengan lingkungan adalah penilangan pengemudi kendaraan yang melanggar tata tertib lalu lintas. Mereka yang melanggar tata tertib lalu lintas tidak jarang ingin berdamai di tempat

[229] Jimly Asshiddiqie, *op.cit*. hal. 156

atau menyelewengkan hukum, kemudian seharusnya aparat yang menegakkan hukum tersebut dapat menangani sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, namun tidak jarang penegak hukum tersebut justru mengambil kesempatan atas pelanggaran tersebut.

Oleh karena itu, akibat-akibat yang ditimbulkan dari masalah penyelewengan hukum tersebut diantaranya, yaitu:

1. Ketidakpercayaan masyarakat pada hukum

   Masyarakat ada yang berpendapat bahwa hukum banyak merugikan mereka, terlebih lagi soal materi sehingga mereka berusaha untuk menghindarinya. Karena masyarakat percaya bahwa uanglah yang berbicara, dan dapat meringankan hukuman. Fakta-fakta yang ada diputar balikan dengan materi yang siap diberikan untuk penegak hukum. Kasus-kasus korupsi di Indonesia tidak terselesaikan secara tuntas karena para petinggi negara yang terlibat di dalamnya mempermainkan hukum dengan menyuap sana sini agar kasus ini tidak terungkap, akibatnya kepercayaan masayarakatpun menjadi hilang.

2. Penyelesaian konflik dengan kekerasan

   Penyelesaian konflik dengan cara kekerasan contohnya ialah pencuri ayam yang dipukuli warga masyarakat, juga pencuri sandal yang dihakimi oleh warga. Memang konflik yang terjadi di sekelompok masyarakat di Indonesia banyak yang diselesaikan dengan kekerasan, contoh lain adalah kasus tawuran antar pelajar, tawuran antar suku yang memperebutkan wilayah, atau ada salah satu suku yang tersakiti sehingga dibalas degan kekerasan. Mereka tidak

mengindahkan peraturan-peraturan kepemerintahan, dengan masalah secara geografis. Ini membuktikan masyarakat Indonesia masih ada yang tidak tertib hukum. Seharusnya masalah seperti maling sandal atau ayam dapat ditangani oleh pihak yang yang berwajib, bukan dihakimi secara seenakanya oleh warga masyarakat.

3. Pemanfaatan Inkonsistensi Penegakan Hukum untuk Kepentingan Pribadi

Ada kasus di Indonesia yaitu warga masyarakat yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi. Contohnya ialah pengacara yang menyuap polisi ataupun hakim untuk meringankan terdakwa, sedangkan polisi dan hakim yang seharusnya bisa menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang sedang terlibat kasus hukum bisa jadi lebih condong pada banyaknya materi yang diberikan oleh salah satu pihak yang sedang terlibat dalam kasus hukum tersebut.

4. Penggunaan Tekanan Asing dalam Proses Peradilan

Peristiwa pengrusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu perusahaan asing yang membuka usahanya di Indonesia, mereka akan minta bantuan dari negaranya untuk melakukan upaya pendekatan kepada Indonesia, agar mereka tidak mendapatkan hukuman yang berat, atau dicabut izin memproduksinya di Indonesia.[230] Contohnya adalah penambangan batu bara di wilayah Kalimantan, juga pembabatan hutan yang membabi buta oleh perusahaan asing.

[230] Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 312

4. Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia ini merupakan fakta dan data yang ditunjukkan dari hasil survei terhadap masyarakat oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan bahwa 56,0 % publik menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia, hanya 29,8 % menyatakan puas, sedangkan sisanya 14,2 % tidak menjawab. Mereka yang tak puas terhadap penegakan hukum di Indonesia merata di semua segmen. Mereka yang tinggal di kota maupun desa, berpendidikan tinggi maupun rendah, juga yang berasal dari ekonomi atas maupun ekonomi bawah.

Berdasarkan fakta bahwa mereka yang tinggal di desa dan berasal dari ekonomi bawah serta berpendidikan rendah lebih tidak puas jika dibandingkan dengan mereka yang berada di kota dan berpendidikan tinggi. Hal ini disebabkan karena mereka yang berada di desa dan kelompok ekonomi bawah lebih sering menghadapi kenyataan merasa diperlakukan tidak adil jika berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Uraian di atas menunjukkan betapa rusaknya hukum di Indonesia. Mungkin yang tidak mendapat sorotan adalah lembaga pemasyarakatan karena tidak banyak orang yang mengamatinya. Tetapi lembaga ini sebenarnya juga tidak dapat dikatakan sempurna. Lembaga yang seharusnya berperan dalam memulihkan sifat para warga binaan (terpidana) ternyata tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Jumlah narapidana yang melebihi dua kali lipat dari kapasitasnya menjadikan nasib narapidana juga semakin buruk. Mereka tidak tambah sadar, tetapi justru belajar melakukan tindak pidana baru setelah berkenalan dengan narapidana lainnya.

Tentunya ini jauh dari konsep pemidanaan yang sesungguhnya bertujuan untuk merehabilitasi terpidana. Bahkan fakta yang ada hari ini, beberapa narapidana dengan leluasanya membuat "aturan" sendiri dengan merubah hotel prodeo tersebut menjadi hotel bak bintang lima.

B. Kelemahan Peraturan Perundangan Pengangkatan Anak

1. Staatblaads No.129 Tahun 1917

a. Pasal-pasal Terkait Pengangkatan Anak

Berikut ini akan disajikan pasal-pasal yang berkaitan dengan pengangkatan anak pada Staatblaads nomor 129 Tahun 1917, yaitu sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Seorang laki-laki beristeri atau pernah beristeri tak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, boleh mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya.
(2) Pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut, bersama-sama dengan isterinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri.
(3) Apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi, dan oleh suaminya yang telah meninggal dunia tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaktub ayat ke satu pasal ini, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh isterinya, maka pengangkatan itupun tak boleh dilakukannya.

Pasal 6

yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristeri pun tak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain.

Pasal 7

(1) Orang yang diangkat harus paling sedikit 18 tahun lebih muda daripada usia suami dan paling sedikit 15 tahun lebih muda daripada si isteri atau si janda yang mengangkatnya.
(2) Apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun keluarga di luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia diangkat.

Pasal 15

(2) Pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara membuat akta otentik adalah batal demi hukum"

b. Kelemahan Staatblads No.129 Tahun 1917

Adapun kelemahan dari staatblads No.129 Tahun 1917 ini adalah sebagai berikut:

1) Staatblaads ini dibuat oleh pemerintah koloneal Belanda sehingga serat dengan kepentingan politik, misalnya anak yang boleh diangkat hanya anak yang berjenis kelamin laki-laki saja.
2) Staatblaads ini bertentangan dengan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak bisa lagi diterapkan pada Negara Republik Indonesia yang sudah merdeka ini.
3) Pada Staatsblaad 1917 nomor 129 ini dinyatakan bahwa pengangkatan anak melalui Notaris, kemudian setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa pengangkatan anak menggunakan Putusan Pengadilan, terdapat

penafsiran yang berbeda tentang kewenangan Notaris dalam membuat Akta Pengangkatan Anak. Masalah yang terjadi adalah Pengangkatan anak hanya dilakukan melalui Akta Notaris, tanpa dilanjutkan di Pengadilan.

Notaris mempunyai kewenangan dalam membuat Akta Pengangkatan Anak berdasarkan Staatsblad, namun setelah adanya Peraturan Pemerintah 54 tahun 2007 notaris memang tetap dibolehkan membuat Akta Pengangkatan Anak, namun akta tersebut hanya dapat dijadikan alat bukti untuk pengajuan di Pengadilan. Perlindungan Hukum preventif yang dilakukan adalah pengangkatan anak dilakukan dengan itikad baik dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan Perlindungan Hukum Refresif mencegah adanya konflik terkait status akta yang dibuat sebelum adanya Peraturan Pemerintah 54 tahun 2007, akta tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah tersebut.

Akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Notaris hanya sah sebagai perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, namun akta tersebut tidak dapat memindahkan hak dan kewajiban orang tua kandung ke orang tua angkat, jika tidak dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan. Pengangkatan anak yang tidak dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan, dapat menyebabkan batal demi hukum.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sebelum penulis uraikan lebih jauh masalah kelemahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak, terlebih dahulu akan diuraikan tentang konsideran dan pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

a. Gambaran Umum Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Jumlah pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini ada IX bab dan 53 pasal, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal I Romawi berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
2. Pasal 1 menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang ini yang terdiri dari 18 bagian.

3. Pasal 2 s.d pasal 5 tetap seperti bunyi pasal terdahulu yang terdapat pada undang-undang nomor 23 tahun 2002.
4. Pasal 6 mengalami perubahan, adapun bunyi pasal 6 yang sekarang adalah sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

5. Pasal 9 juga mengalami perubahan, sehingga bunyi pasal 9 adalah sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

6. Pasal 12 juga mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

7. Pasal 14 juga mengalami perubahan yaitu ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) dan penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
    a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
    b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
    c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
    d. memperoleh Hak Anak lainnya.

8. Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
e. pelibatan dalam peperangan; dan
f. kejahatan seksual.

9. Ketentuan pasal 20, 21, 22, 23 dan 24 diubah

10. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2).

11. Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Keempat : Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga
12. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah
13. Ketentuan Pasal 27 ayat (4) diubah
14. Ketentuan Pasal 28 diubah
15. KetentuanPasal 33 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah
16. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

17. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a)

Pasal 39

(1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.

(2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.

(3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.

(4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

(5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

18. Ketentuan Pasal 41 diubah

19. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A

20. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah

21. Ketentuan Pasal 44 diubah

22. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) diubah

23. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B

24. Ketentuan Pasal 46 , 47, 48, 49, 51, 53 diubah

25. Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1)

26. Ketentuan Pasal 55, 56, 58 (2) diubah

27. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 59

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. Anak dalam situasi darurat;

b. Anak yang berhadapan dengan hukum;

c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

f. Anak yang menjadi korban pornografi;

g. Anak dengan HIV/AIDS;

h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;

i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;

j. Anak korban kejahatan seksual;

k. Anak korban jaringan terorisme;

l. Anak Penyandang Disabilitas;

m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

28. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A

29. Ketentuan Pasal 60, 63, 64, 65, 66, 67 diubah

30. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C
31. Ketentuan Pasal 68, 69, diubah
32. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 69A dan Pasal 69B
33. Ketentuan Pasal 70 diubah dan huruf b ditambah penjelasan
34. Ketentuan Pasal 71 diubah
35. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, dan Pasal 71D
36. Ketentuan Pasal 72, 73 diubah
37. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

a. Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
b. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

38. Ketentuan Pasal 74, 75, 76 diubah

39. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA

40. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 76G

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 76H

Setiap Orang dilarang merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 76J

(1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
(2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

41. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

42. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 77A dan Pasal 77B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

a. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

63. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

43. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

a. Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
c. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

44. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 82

a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
b. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

45. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

46. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

47. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

48. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

49. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
b. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

50. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

51. Pasal II. Adapun bunyi pasal II aturan peralihan adalah sebagai berikut:

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

b. Kelemahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Jika dikaitkan dengan pengangkatan anak, maka undang-undang ini masih terasa ada kelemahan, yaitu:

1. Undang-undang ini sangat bersifat administratif saja sehingga kurang memperhatikan atau kurang memperdalam apa sebabnya seseorang/badan yayasan sosial mau melepaskan anak untuk diangkat menjadi anak angkat oleh orang lain, dan juga sebaliknya tidak memperdalam apa latar belakang sesorang sehingga mau menerima anak orang lain untuk diangkat menjadi anaknya;
2. Undang-undang ini juga tidak memperhatikan seberapa jauh pengetahuan keduabelah pihakakan akibat hukum tentang pengangkatan anak;
3. Undang-undang memberikan sanksi yang tegas, namun arahnya masih secara umum dan tidak ada sanksi terhadap penyalahgunaan prosedur pengangkatan anak. Misalnya dapat dilihat pasal-pasal tentang larangan dan sanksi yaitu:
   1) Pasal 76 A yang berbunyi:

      Setiap orang dilarang:

      a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau

      b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pelanggaran terhadap pasal 76 A akan dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 77 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

a. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

2) Pasal 76 B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pelanggaran terhadap pasal 76 B akan dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 77 B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3) Pasal 76 C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pelanggaran terhadap pasal 76 C akan dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 80 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

4) Pasal 76 D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pelanggaran terhadap pasal 76 D akan dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 81 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

a. Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

c. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5) Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pelanggaran terhadap pasal 76 E ini akan dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 82 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
b. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6) Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pelanggaran terhadap pasal 76 F ini akan dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 83 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

7) Pasal 76 G

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pelanggaran terhadap pasal 76 G ini akan dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 86 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

8) Pasal 76 H

Setiap Orang dilarang merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pelanggaran terhadap pasal 76 H ini akan dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 87 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

9) Pasal 76 I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pelanggaran terhadap pasal 76 I ini akan dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 88 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

10) Pasal 76J

(1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.

(2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Pelanggaran terhadap pasal 76 J ini akan dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 89 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dari pemaparan di atas bahwa untuk perlindungan anak berkenaan dengan larangan dan sanksi, hanya terfokus pada:

a. Larangan memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif;
b. Larangan menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.
c. Larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
d. Larangan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

e. Larangan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

f. Larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;

g. Larangan menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;

h. Larangan merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

i. Larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

j. Larangan dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.

Dari paparan di atas terlihat bahwa pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum ada mengatur tentang:

a. Sanksi menghilangkan identitas awal anak angkat;
b. Sanksi memutus hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya;
c. Sanksi pengangkatan anak tanpa putusan atau penetapan pengadilan, karena inilah awal mula penyalahgunaan pengangkatan anak.

Pelanggaran terhadap undang-undang pengangkatan anak sudah berlarut-larut belum diatasi secara tepat, akibatnya sangat berpotensi merugikan anak angkat.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Sebelum penulis uraikan lebih jauh masalah kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terlebih dahulu akan diuraikan tentang konsideran dan pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut.

a. Gambaran Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Berikut ini penulis akan menggambarkan pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal I berbunyi sebagai berikut:

   Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)

2. Ketentuan Pasal 2 diubah

3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan pasal baru yakni Pasal 3A, , yang berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 3A

   Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan UndangUndang.

4. Ketentuan Pasal 4,5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49 diubah

   Pasal 49

   Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
   a. perkawinan;
   b. waris;
   c. wasiat;
   d. hibah;
   e. wakaf;
   f. zakat;
   g. infaq;
   h. shadaqah; dan
   i. ekonomi syari'ah.

5. Ketentuan Pasal 50 diubah

6. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 52A
7. Ketentuan Pasal 90 diubah
8. Ketentuan Pasal 105 diubah
9. Di antara Pasal 106 dan BAB VII disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 106A
10. Pasal II

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

b. Kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Terhadap Pengangkatan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini mengatur masalah peradilan agama. Jika dikaitkan dengan pengangkatan anak adalah salah satu proses pengangkatan anak adalah harus melalui penetapan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Bagi yang beragama Islam kalau ingin mengangkat anak, maka prosesnya melalui Pengadilan Agama. Semestinya pada undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini ada juga mengatur tentang masalah pengangkatan anak. Namun dalam kenyataannya sama sekali tidak ada mengatur masalah bagaimana prosedur penetapan pengangkatan anak melalui pengadilan agama.

Hal ini perlu dilakukan mengingat saat ini banyak sekali warga masyarakat yang melakukan pengangkatan anak.

4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Sebelum penulis uraikan lebih jauh mengenai kelemahan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, akan terlebih dahulu diuraikan mengenai konsederan Peraturan Menteri Sosial ini. Peraturan Menteri Sosial ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2009.

a. Gambaran Pasal-Pasal Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Jumlah pasal-pasal pada Peraturan Menteri Sosial ini ada IX bab dan 53 pasal, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 3 pasal.

   Pada pasal 1 menjelaskan tentang berbagai istilah yang ada pada peraturan menteri ini, seperti arti pengangkatan anak, Calon Orang Tua Angkat (COTA), Calon Anak Angkat (CAA), orang tua tunggal, pengangkatan anak antara warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, Lembaga Pengasuhan Anak, Anak Terlantar, Pekerja Sosial, Penetapan atau Keputusan Pengadilan, dan lain sebagainya.

   Pasal 2 ada 2 ayat, mengatur tentang prinsip pengangkatan anak, adapun bunyi pasal 2 ini adalah sebagai berikut:

(1) Prinsip pengangkatan anak, meliputi :

a. pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
c. COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA;
d. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut; dan
e. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

Sedangkan pasal 3 mengatur tentang tujuan pengangkatan anak, untuk lebih jelasnya berikut ini akan disajikan pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan ini ditujukan sebagai acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

2. Bab II mengatur tentang persyaratan Calon Anak Angkat (CAA) dan Calon Orang Tua Angkat (COTA). Bab II ini terdiri dari 2 bagian, yaitu:

Bagian 1 mengatur tentang persyaratan Calon Anak Angkat (CAA), yaitu pasal 4, 5 dan 6. Adapun bunyi pasal ini adalah sebagai berikut:

Pasal 4

Syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi:
a. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
d. memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 5

Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif CAA yang meliputi:
a. copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
b. copy kartu keluarga orang tua CAA; dan
c. kutipan akta kelahiran CAA.

Pasal 6

Persyaratan CAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi :

a. anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Sedangkan bagian ke 2 mengatur tentang Persyaratan Calon Orang Tua Angkat (COTA), ini ada 2 pasal yaitu pasal 7 sampai dengan pasal 8. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Persyaratan Calon Orang Tua Angkat

Pasal 7

(1) Persyaratan COTA meliputi :
1. sehat jasmani dan rohani;
2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. tidak merupakan pasangan sejenis;
7. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
9. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
10. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
12. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
13. memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.

(1) Umur COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.
Persetujuan tertulis dari CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari CAA.

Pasal 8

1. COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
2. Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.

3. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA.

3. Bab IV, mengatur tentang kewenangan yang terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 12 s.d 16. Kewenangan disini maksudnya adalah kewenangan memberikan ijin untuk pengangkatan anak.
4. Bab V mengatur tentang pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia. Pada bagian ini ada 2 bagian. Bagian pertama mengatur tentang pengangkatan anak secara adat kebiasaan, ada 1 pasal yaitu pasal 17. Untuk bagian ke 2 mengatur pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagian ke 2 ini dibagi lagi menjadi 3 pragraf. Paragraf pertama mengatur tentang pengangkatan anak secara langsung yang terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 18, 19, 20, 21, dan 22.

   Paragraf ke dua mengatur tentang Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Pengasuhan Anak, terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 23, 24, 25, 26, dan 27. Paragraf ke tiga, mengatur tentang Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal, terdiri dari 8 pasal, yaitu pasal 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 dan 35.
5. Bab VI mengatur tentang Pengangkatan Anak oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang salah Seorangnya Warga Negara Asing, ini ada 6 pasal, yaitu pasal 36, 37, 38, 39, 40, dan 41.
6. Bab VII mengatur tentang Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang teridiri dari 2 bagian.

   Bagian pertama mengatur masalah Pengangkatan Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing di Indonesia, terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 42, 43, 44, 45, dan 46.

Bagian ke dua, mengatur tentang Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Indonesia Oleh Warga Negara Indonesia, terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 47, 48 dan 49.

7. Bab VIII yaitu mengatur tentang Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia, bab ini ada 3 pasal yaitu pasal 50, 51 dan 52.
8. Bab IX yaitu bab Penutup yaitu pasal 53 dan 54.

b. Kelemahan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Kelemahan dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak ini jika dikaitkan dengan permasalahan pengangkatan anak dilapangan adalah tidak ada sanksinya secara perdata atau secara pidana jika ada yang melanggarnya. Adapun pasal-pasal atau ayat yang dianggap masih lemah dan rentan untuk dilanggar oleh warga masayarakat adalah sebagai berikut:

1) Pasal 2 ayat (1) huruf b yang berbunyi: pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Ketentuan ini masih sering dilanggar, misalnya orang tua angkat tidak mengijinkan orang tua kandungnya untuk bertemu dengan anaknya. Kasus yang pernah peneliti temukan di kota Palangka Raya.[231]

Faktor penyebab pelanggaran terhadap masalah ini adalah karena dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 ini tidak memberikan sanksi terhadap pelanggaran ini.

2) Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

   Ketentuan ini sering dilanggar oleh orang tua angkat, karena pelanggaran terhadap ayat 2 ini tidak ada sanksinya, sehingga pelanggarannya berulang-ulang.

3) Pasal 21 ayat (1) huruf l yang berbunyi sebagai berikut: Surat Pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak.

   Ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf l ini sering terjadi ketika ada pasangan suami isteri yang sudah lama menikah tapi mereka tidak kunjung punya anak,

[231] Pasangan suami isteri bernama Ar dan Mus yang sudah menikah selama 7 tahun belum mempunyai anak dan akhirnya meminta anak sejak dilahirkan pada tahun 2014. Setelah dilahirkan di Rumah Bidan anak itu langsung dibawa pulang oleh orang tua angkatnya. 3 hari kemudian ibu kandungnya menelpon melalui HP untuk menanya keadaan anaknya, ibu angkatnya pun menjawab dan memberikan informasi tentang keadaan anak tersebut. Pada hari ke 7 ibu kandung menelpon lagi melalui HP dan dijelaskan lagi oleh ibu angkat tentang keadaan anak angkatnya. Pada hari ke 10 ibu kandungnya menelpon lagi melalui HP, tapi ibu angkatnya tidak mau lagi memberikan informasi dan ibu angkat menjawab agar jangan lagi menelpon. Sampai sekarang ibu kandung tidak pernah lagi menelponnya.

akhirnya pasangan suami isteri tersebut mengangkat anak sebagai pancingan. tidak lama setelah mengangkat anak isterinya hamil dan mereka pun punya anak kandung. Setelah pasangan suami isteri itu punya anak, mereka sangat menyayangi anak kandungnya dan anak angkat kurang mendapat perhatian lagi. Terjadi diskriminasi terhadap anak angkat, misalnya kasih sayang, pendidikan, pakaian dan lain-lain, misalnya anak kandung diberikan pakaian yang lebih baik daripada anak angkat.

4) Pasal 22 ayat (2) yang berbunyi: Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

Mayoritas pengangkatan anak di masyarakat tidak diajukan kepengadilan untuk minta putusan atau penetapan pengadilan. Menurut penjelasan Dra. Hj. Hatimah Juraidah, hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, orang tua angkat tidak mau repot dalam melakukan pengangkatan anak karena persyaratannya yang cukup banyak.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Sebelum penulis uraikan lebih jauh mengenai kelemahan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, akan terlebih dahulu diuraikan mengenai gambaran pasal-pasal Peraturan Menteri Sosial ini. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan

Anak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2007, ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Andi Mattalatta, dimasukkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123.

Peraturan Presiden ini dimasukkan kesini karena memang ada beberapa pasal yang berkaitan dengan pengangkatan anak yaitu pasal 1 angka 1, pasal 4, 6 ayat (1), pasal 10 dan pasal 20.

a. Gambaran Pasal-Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Agar dapat bisa dipahami dengan baik tentang kelemahan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka terlebih dahulu penulis paparkan pasal-pasal yang ada dalam peraturan pemerintah ini.

1. Bab I mengatur tentang ketentuan umum, pasal 1 menjelaskan tentang ketentuan umum yang ada dalam peraturan pemerintah ini yang berkaitan dengan pengangkatan anak, yaitu:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
b) Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau

orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

c) Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

d) Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

e) Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.

f) Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

g) Pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak.

h) Instansi sosial adalah instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun di daerah.

i) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

2. Pasal 2 s.d 6 mengatur tentang pengangkatan anak dan kewajiban orang tua angkat

3. Bab II yaitu pasal 7 sd 11 mengatur tentang jenis-jenis pengangkatan anak

Pasal 7

Pengangkatan anak terdiri atas:

a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan

b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi: a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan

setempat; dan b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(pasal 8)

Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing diatur dalam pasal 11 yang berbunyi:

> Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
> a. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
> b. pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan.

Pada Bab III mengatur tentang syarat-syarat pengangkatan anak ada 7 pasal, yaitu pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Pasal 12

(1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
   a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
   b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
   c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
   d. memerlukan perlindungan khusus.
(2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
   b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
   c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus

Persyaratan Calon orang tua angkat diatr dalam pasal 13, yaitu harus memenuhi syarat-syarat:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;

d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
f. tidak merupakan pasangan sejenis;
g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Bab IV Mengatur Tata Cara Pengangkatan Anak terdiri dari dua bagian, bagian pertama adalah mengatur Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, disini ada 3 pasal, yaitu pasal 19, 20, dan 21.

Pasal 19

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 20

(1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
(2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 21

(1) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

(2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Bagian Kedua mengatur Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing, sebagaimana pasal di bawah ini:

Pasal 22

(1) Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.

(2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 23

Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 22.

Pasal 24

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 25

(1) Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bab V berisi tentang Bimbingan Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam hal ini ada 6 pasal, yaitu pasal 26, 27, 28, 29, 30 dan 31.

Pasal 26

Bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan:
a. penyuluhan;
b. konsultasi;
c. konseling;
d. pendampingan; dan
e. pelatihan.

Pasal 27

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.
(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. meningkatkan pemahaman tentang pengangkatan anak;
    b. menyadari akibat dari pengangkatan anak; dan
    c. terlaksananya pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dimaksudkan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. memberikan informasi tentang pengangkatan anak; dan
    b. memberikan motivasi untuk mengangkat anak.

4. Bab VI mengatur tentang Pengawasan Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Disini ada 7 pasal, yaitu pasal 32, 33, 34, 35, 36, 37 dan 38.

Pasal 36

Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Departemen Sosial.

Pasal 37

Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan antara lain oleh:
a. orang perseorangan;
b. keluarga;
c. kelompok;
d. lembaga pengasuhan anak; dan
e. lembaga perlindungan anak.

Pada bab VII mengatur tentang Pelaporan, pada bagian ini ada 4 pasal, yaitu pasal 39, 40, 41, dan 42.

Pasal 39

Pekerja sosial menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan orang tua angkat dan perkembangan anak dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat kepada Menteri atau kepala instansi sosial setempat.

Pasal 40

Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, orang tua angkat harus melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat paling singkat sekali dalam 1 (satu) tahun, sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41

Semua administrasi yang berkaitan dengan pengangkatan anak berada di departemen yang bertanggung jawab di bidang sosial.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bab VIII mengatur Ketentuan Peralihan ada 1 pasal yaitu pasal 43, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Bab IX mengatur tentang Ketentuan Penutup, disini ada 1 pasal yaitu pasal 44 yang berbunyi:

Pasal 44

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

b. Kelemahan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Jika dikaitkan dengan pengangkatan anak, maka Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ada terdapat kelemahan-kelemahan, yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 1 angka 1, juga pasal 10, pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut: orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

   Pada peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa pengangkatan anak harus berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan, dalam praktiknya di

masyarakat mayoritas tidak melalui penetapan pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan, ada beberapa alasan sehingga pengangkatan anak tidak melalui keputusan atau penetapan pengadilan, yaitu:

a) Tidak mengetahui bahwa kalau pengangkatan anak itu harus melalui keputusan atau penetapan pengadilan;
b) Selama ini tidak ada masalah pengangkatan anak tanpa keputusan pengadilan atau penetapan pengadilan.

2) Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut: Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

   Pasal ini sangat sulit dilaksanakan karena kebanyakan pengangkatan anak sejak anak dilahirkan sehingga anak angkat tersebut sama sekali tidak mengetahui orang tuanya yang sebenarnya.[232]

3) Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.

   Ketentuan dari pasal 6 ayat (1) sering tidak diindahkan oleh orang tua angkat, apalagi jika anak angkat diambil sejak dilahirkan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Sap bahwa dia memiliki anak angkat seorang perempuan yang diangkat sejak anak tersebut dilahirkan, sampai saat ini usianya sudah 17 tahun. Saya tidak akan memberitahukan kepada anak angkat saya bahwa dia adalah anak

[232] Hasil wawancara dengan ibu Dr. Helwina Handayani, M.Si, Staf Khusus Sub.Bag Hukum dan Pengaduan pada Komisi Perlindungan Anak (KPA) Jakarta tanggal 11-10-2020.

angkat, tujuan merahasiakan ini adalah untuk menjaga mental anak angkat tersebut.[233]

4) Pasal 35 yang berbunyi: Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan wawancara peneliti pada kantor Dinas Sosial kota Palangka Raya bahwa pengawasan terhadap anak angkat ini sulit dilaksanakan karena sampai saat ini mayoritas pengangkatan anak tidak ada yang mengajukan sesuai prosedur kepada Kantor Dinas Sosial, sehingga data tidak lengkap. Akibatnya adalah keberadaan anak angkat sulit dilacak karena tidak diketahui alamatnya.[234]

Demikian kelemahan-kelemahan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini. Faktor penyebab kelemahan ini adalah karena Peraturan Pemerintah ini bukan bersifat undang-undang sehingga tidak boleh memberikan sanksi, akibatnya pelanggaran terhadap pasal-pasalnya sering terjadi.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Sebelum penulis uraikan lebih jauh mengenai kelemahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, akan terlebih dahulu diuraikan mengenai gambaran umum pasal-pasal Peraturan Presiden ini.

[233] Hasil wawancara dengan bapak Sap di Palangka Raya pada tanggal 11-01-2021

[234] Hasil Wawancara dengan Ega, pegawai Dinas Sosial Kota Palangka Raya pada tanggal 12-01-2021

Peraturan Presiden ini dimasukkan kesini karena memang ada beberapa pasal yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

a. Gambaran Umum Pasal-pasal Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Jumlah pasal-pasal peraturan presiden ini ada 83 pasal, diantara pasal tersebut ada yang mengatur tentang tata cara pendaftaran anak angkat. Untuk lebih jelasnya akan penulis gambarkan pasal-pasalnya yaitu sebagai berikut:

1. Bab I mengatur tentang ketentuan umum, yaitu ada 1 pasal dan berisi 16 bagian, diantaranya adalah:

   Pasal 1

   Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

   1. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
   2. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
   3. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
   4. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
   5. Dan seterusnya

2. Bab II mengatur Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama ada 7 paragraf. Paragraf 1 mengatur

masalah umum yaitu 1 pasal. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 2

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
a. pencatatan biodata Penduduk;
b. penerbitan KK;
c. penerbitan KTP-el;
d. penerbitan KIA;
e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
f. pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan

3. Paragraf 2 mengatur tentang Pencatatan Biodata Penduduk, disini ada 6 pasal, yaitu pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Berikut ini akan disajikan beberapa pasal yaitu sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap:
   a. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
   c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
(2) Selain pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan biodata dilakukan terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupatenl Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
c. bukti pendidikan terakhir.

Pasal 5

(1) Disdukcapil Kabupatenl Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
    a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
    b. Surat Keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK

Pasal 6

(1) Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
    a. Dokumen Perjalanan; dan
    b. kartu tzin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.
(2) Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
    a. Dokumen Perjalanan;
    b. surat keterangan tempat tinggal; dan
    c. kartu izin tinggal tetap

4. Paragraf 3 mengatur tentang Penerbitan Kartu Keluarga, disini ada 4 pasal, yaitu pasal 10, 11, 12 dan 13. Berikut ini akan disajikan sebagian dari pasal tersebut, yaitu:

Pasal 10

(1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk OrangAsing terdiri atas:
    a. penerbitan KK baru;
    b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
    c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
(2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
    a. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
    b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan

c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 11

(1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
   a. Buku Nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
   b. Surat Keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. Surat Keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
   d. Surat Keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
   e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.

(2) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
   a. Izin tinggal tetap;
   b. Buku Nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain;dan
   c. Surat Keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12

Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:
a. KK lama; dan
b. Surat Keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

5. Paragraf 4 mengatur tentang Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dalam hal ini ada 9 pasal, yaitu pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22. Berikut ini akan disajikan beberapa pasal yaitu sebagai berikut:

Pasal 14

Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk OrangAsing terdiri atas:
a. Penerbitan KTP-el baru;
b. Penerbitan KTP-el karena pindah datang;
c. Penerbitan KTP-el karena perubahan data;

d. Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
e. Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
f. Penerbitan KTP-eI di luar domisili.

Pasal 15

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
a. Telah berusia 17 (tu:uh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
b. KK.

Pasal 16

Penerbitan KTP-e1 baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
b. KK;
c. Dokumen Perjalanan; dan
d. Kartu izin tinggal tetap.

6. Paragraf 5 mengatur tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak, dalam hal ini ada 1 pasal yaitu pasal 23. Adapun bunyi pasal 23 adalah sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Pemerintah menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 1 7 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
(2) Penerbitan KIA dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KIA diatur dengan Peraturan Menteri.

7. Paragraf 6 mengatur tentang Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan, dalam hal ini ada 5 pasal, yaitu pasal 24, 25, 26, 27 dan 28. Berikut ini akan disajikan beberapa pasal yaitu sebagai berikut:

Pasal 24

Pendaftaran perpindahan Penduduk terdiri atas:
a. Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
c. Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
d. Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.

Pasal 25

(1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.

(2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Dalam satu desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
   b. Antar desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan;
   c. Antar kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kabupaten/kota;
   d. Antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
   e. Antar provinsi.

(3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di daerah asal dengan menunjukkan KK.

(4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.

(5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

Pasal 26

Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
a. KK;
b. kartu seleksi calon transmigran; dan
c. surat pemberitahuan pemberangkatan.

8. Paragraf 7 Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, disini ada 2 pasal yaitu pasal 29 dan 30. Berikut ini akan disajikan pasal yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
a. Penduduk korban bencana alam;
b. Penduduk korban bencana sosial;
c. orang terlantar; dan
d. komunitas terpencil.

(2) Hasil pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan Pendaftaran Penduduk diatur dalam Peraturan Menteri.

9. Bagian II tentang Pencatatan Sipil, dibagi menjadi beberapa paragrap. Adapun paragrap pertama mengatur tentang umum, disini ada 2 pasal. Adapun pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 31

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:
a. kelahiran;
b. lahir mati;
c. perkawinan;
d. pembatalan perkawinan;
e. perceraian;
f. pembatalan perceraian;
g. kematian;
h. pengangkatan anak;
i. pengakuan anak;

j. pengesahan anak;
k. perubahan nama;
1. perubahan status kewarganegaraan;
m. Peristiwa Penting lainnya;
n. pembetulan akta; dan
o. pembatalan akta.

Pasal 32

(1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
a. WNI; dan
b. Orang Asing.

(2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pemegang izin kunjungan;
b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
c. pemegang izin tinggal tetap.

10. Paragraf 2 tentang Kelahiran, disini ada 3 pasal yaitu pasal 33, 34 dan 35.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:
a. surat keterangan kelahiran;
b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah
c. KK; dan
d. KTP-e1.
(2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
(3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
(4) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan:
a. surat keterangan kelahiran;
b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan

c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
d. surat keterangan pindah luar negeri.

(5) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
a. surat keterangan kelahiran;
b. Dokumen Perjalanan; dan
c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu tzin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

Pasal 34

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:
a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan atau
b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukan sebagai suami istri.

Pasal 35

(1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan:
a. kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat;dan
b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua.

(2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan kelahiran WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
a. keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang dinegara setempat;
b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua; dan
c. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah

11. Paragraf 3 berisi tentang Pencatatan Lahir Mati, disini hanya ada 1 pasal yaitu pasal 36. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 36

Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan
a. surat keterangan lahir mati; atau
b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

12. Paragraf 4 mengatur tentang Pencatatan Perkawinan, dalam hal ini ada 4 pasal, yaitu pasal 37, 38, 39 dan 40. Berikut ini akan disajikan beberapa pasal ini, yaitu sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
   a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan daripemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
   b. pas foto berwarna suami dan istri;
   c. KK;
   d. KTP-el; dan
   e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
   f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

(2) Pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
   a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Turhan Yang Maha Esa;
   b. pas foto berwarna suami dan isteri;
   c. Dokumen Perjalanan;
   d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
   e. KK;
   f. KTP-e1; dan
   g. izin dari negara atau perwakilan negaranya

Pasal 38

(1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwrenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan:
   a. kutipan akta perkawinan dari negara setempat; dan
   b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.

(2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan daripemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadapTuhan Yang Maha Esa; dan
b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami danistri.

Pasal 39

Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib dilaporkan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili dengan memenuhi persyaratan :
a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
b. kutipan akta perkawinan.

13. Paragraf 5 berisi tentang Pencatatan Pembatalan Perkawinan, disini berisi 1 pasal yaitu pasal 41. Adapun bunyi pasal 41 ini adalah sebagai berikut:

Pasal 4 1

Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk harus memenuhi persyaratan:
a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
b. kutipan akta perkawinan;
c. KK; dan
d. KTP-e1.

14. Paragraf 6 mengatur tentang Pencatatan Perceraian, disini berisi 2 pasal yaitu pasal 42 dan 43. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
    a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    b. kutipan akta perkawinan;
    c. KK; dan
    d. KTP-e1.
(2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 43

(1) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
    a. kutipan akta perceraian/bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
    b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
    c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
(2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan perceraian WNI dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
    a. dokumen yang sah tentang terjadinya perceraian dinegara setempat;

    b. kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan; dan
    c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau surat keterangan pindah luar negeri suami dan istri yangtelah bercerai.
(3) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alas an sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Paragraf 7 mengatur tentang Pencatatan Pembatalan Perceraian, disini ada 1 pasal yaitu pasal 44. Adapun bunyi pasal 44 ini adalah sebagai berikut:

Pasal 44

Pencatatan pembatalan perceraian persyaratan:
a. salinan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap;
b. kutipan akta perceraian;
c. KK; dand. KTP-e1.

16. Paragraf 8 mengatur tentang Pencatatan Kematian, disini ada 2 pasal yaitu pasal 45 dan 46. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
    a. surat kematian; dan

b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 46

(1) Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
a. kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat;
b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

(2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing, pencatatan kematian WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
a. surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat;
b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri

17. Paragraf 9 mengatur tentang Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak, disini ada 6 pasal yaitu pasal 47, 48, 49, 50, 51 dan 52. Berikut ini akan disajikan beberapa pasal pada paragrap ini, yaitu:

Pasal 47

Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
a. salinan penetapan pengadilan;
b. kutipan akta kelahiran anak;
c. KK orang tua angkat; dan
d. KTP-e1; atau
e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing

Pasal 48

(1) Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing olehWNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan pada instansi yang berwenang di Negara setempat.
(2) Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
    a. bukti pencatatan pengangkatan anak dari Negara setempat;
    b. kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing; dan
    c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tuaangkat.

(3) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
    a. salinan penetapan pengadilan atau surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan dari negarasetempat;
    b. kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warganegara asing; dan
    c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat.

(4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pencatatan pengangkatan anak warga Negara asing oleh WNI harus memenuhi persyaratan:
    a. memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
    b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Pasal 49

Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;

b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
c. kutipan akta kelahiran anak;
d. KK ayah atau ibu;
e. KTP-el; atau
f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing

Pasal 50

(1) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
    a. Kutipan akta kelahiran;
    b. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
    c. KK orang tua; dan
    d. KTP-e1.
(2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
    a. kutipan akta kelahiran;
    b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
    c. KK orang tua; dan
    d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.

Pasal 51

(1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
(2) Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak

Pasal 52

(1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
(2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran

maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

18. Paragraf 10 mengatur tentang Pencatatan Perubahan Nama, dalam hal ini ada 1 pasal, yaitu pasal 53. Adapun bunyi pasal 53 adalah sebagai berikut:

Pasal 53

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:
a. salinan penetapan pengadilan negeri;
b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
c. KK;
d. KTP-e1; dan
e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

19. Paragraf 11 mengatur tentang Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan, disini ada 4 pasal, yaitu pasal 54, 55, 56 dan 57. Adapun bunyi pasal ini adalah sebagai berikut:

Pasal 54

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
c. KK;
d. KTP-e1; dan
e. Dokumen Perjalanan.

Pasal 55

(1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dankutipan akta kelahiran sebagai WNI.
(2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia.
(3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik

Indonesia untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.

(4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Disdukcapil/Kabupaten Kota atau Perwakilan Republik Indonesia dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warganegara asing.

(5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Disdukcapil Kabupaten/Kota dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warganegara asing.

Pasal 56

Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

a. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
c. KK bagi Penduduk WNI; dan
d. KTP-el bagi Penduduk WNI

20. Paragraf 12 mengatur tentang Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya, dalam hal ini hanya ada 1 pasal, yaitu pasal 58. Adapun bunyi pasal 58 adalah sebagai berikut:

Pasal 58

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
c. KK; dan
d. KTP-e1.

(2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran

21. Paragraf 13 mengatur tentang Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil, disini ada 3 pasal yaitu pasal 59, 60 dan 61. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
(2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
    a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
    b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 60

Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
c. KK; dand. KTP-e1.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri

22. Bab III berisi tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disini berisi 11 pasal, yaitu pasal 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 dan 72. Berikut ini akan disajikan sebagian dari pasal tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pasal 62

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:
a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;
c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan ;
e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
f. efesien dan efektik.

Pasal 63

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dan Perwakilan Republik Indonesia dilaksanakan melalui tahapan :
a. pelaporan;
b. verifikasi dan validasi;
c. perekaman data; dan
d. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Pasal 64

(1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.
(2) WNI yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat dilaksanakan secara:
a. manual; dan/atau
b. daring (online).
(4) Pelaksanaan pelayanan pelaporan secara daring (online) pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi setiap daerah diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 65 (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK.(2) SIAK harus memiliki aplikasi pelaporan daring (online).

Pasal 65

(1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK.
(2) SIAK harus memiliki aplikasi pelaporan daring (online).

23. Bab IV berisi tentang Sanksi Administratif, disini ada 4 pasal, yaitu pasal 73, 74,

75 dan 76. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan teguran lisan dan teguran tertulis dan mempertimbangkan kemampuan Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 74

(1) Denda administratif dikenakan terhadap Penduduk WNIdan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bepergian tidak membawa KTP-el sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.
(2) Denda administratif dikenakan terhadap Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 75

Pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota yang melakukan tindakan memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 76

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73,Pasal 74, dan Pasal 75 diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Bab V mengatur tentang Ketentuan Lain-Lain, disini berisi 2 pasal yaitu pasal

77 dan 78. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Dalam hal terjadi Peristiwa Penting yang dialami oleh Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat diterbitkan surat keterangan oleh Disdukcapil Kabupaten/ Kota ditempat terjadinya Peristiwa Penting.
(2) Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri

Pasal 78

(1) Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat atau selama perkawinan termasuk perubahan dan pencabutannya dapat dicatatkan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan akta perjanjian perkawinan.
(2) Akta perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan akta notaris atau nama lainnya.

25. Bab VI mengatur tentang Ketentuan Peralihan berisi 1 pasal yaitu pasal 79.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 79

(1) Penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perkawinan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.
(2) Penerbitan KK karena perubahan data untuk perceraian yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perceraian yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

26. Bab VII mengatur tentang Ketentuan Penutup, disini ada 4 pasal yaitu pasal 80,

81, 82 dan 83, Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 80

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 81

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2OO8 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 82

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 83

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

b. Kelemahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan penyajian pasal-pasal di atas akhirnya penulis akan menganalisis kelemahan Peraturan Presiden ini jika dikaitkan dengan masalah pengangkatan anak. Adapun kelemahan tersebut adalah:

a) Agar anak angkat bisa dicatatkan pada Kantor Disdukcapil maka anak angkat tersebut harus sudah ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 47, yaitu sebagai berikut:
   Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
   1) Salinan penetapan pengadilan;
   2) Kutipan akta kelahiran anak;
   3) KK orang tua angkat;
   4) KTP-el; atau
   5) Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.

Jika diperhatikan bunyi pasal ini yaitu angka 1 bahwa anak angkat harus dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun salah satu syaratnya adalah harus ada salinan Putusan atau penetapan pengadilan. Karena peraturan pemerintah ini tidak berbentuk undang-undang, maka tidak boleh memberikan sanksi. Akibatnya adalah anak angkat masih sering didaftarkan sebagai anak kandung.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini juga dimasukan disini karena ada beberapa pasal yang terdapat dalam aturan ini mengatur tentang pengangkatan anak. Sebelum dibahas lebih jauh tentang kelemahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk terlebih dahulu akan dibahas gambaran secara umum pasal-pasalnya.

a. Gambaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Berikut ini akan penulis sajikan pasal-pasal dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum, disini ada 1 pasal menjelaskan tentang istilah-istilah yang ada pada peraturan menteri ini, yaitu sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

a. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan

kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.

b. Mutasi Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya.
c. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang ijin tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia.
d. Dan seterusnya

2. Bab II berisi tentang Hak dan Kewajiban, disini ada 2 pasal, yaitu pasal 2 dan 3.

Adapun bunyi pasal ini adalah sebagai berikut:

Pasal 2

Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

(1) Setiap penduduk dan penduduk sementara, wajib mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian kepada Pemerintah Daerah.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

3. Bab III berisi tentang NIK dan NIKS, disini hanya ada 1 pasal yaitu pasal 4.

Adapun bunyi pasal 4 ini adalah sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
(2) NIK diberikan pada saat yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia;
(3) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) NIK yang berlaku seumur hidup.

(4) Setiap penduduk sementara hanya diberikan 1 (satu) NIKS yang berlaku selama yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.

4. Bab IV berisi tentang Akta Pencatatan dan Kartu Tanda Penduduk, disini ada 3 pasal yaitu pasal 6, 7 dan 8. Adapun bunyi pasal ini adalah sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.

Pasal 7

(1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP.
(2) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) KTP.

Pasal 8

(1) Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
(2) KTP seumur hidup harus dilakukan penggantian, apabila penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal.

5. Bab V tentang Pendaftaran dan Pencatatan, untuk bagian pertama mengatur tentang Kelahiran, disini ada 3 pasal, yaitu pasal 9, 10 dan 11. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setempat, selambat-lambatnya :
   a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl. 1917 Nomor 129 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl;
   b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.

(2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat :
   a. Persetujuan Kepala Daerah, bagi yang tunduk pada Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl.
   b. Putusan Pengadilan, bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomr 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Stbl. 1917 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.

(3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
   a. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/bidan desa yang menolong kelahiran;
   b. Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
   c. Dokumen imigrasi orang tua bagi WNA.

Pasal 10

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diterbitkan Akta Kelahiran.

Pasal 11

Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setempat, setelah kembali ke Indonesia.

6. Bagian ke dua mengatur tentang perkawinan, disini ada 3 pasal yaitu pasal 12, 13, dan 14. Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

Pasal 12

(1) Setiap perkawinan yang sah dan atau lebih dilangsungkan menurut hukum agama yang bersangkutan, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat.
(2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data:
   a. Surat Pemberkatan Perkawinan;
   b. Akta perceraian bagi yang pernah cerai hidup;
   c. Akta kematian isteri/suami bagi duda/janda yang cerai mati;
   d. Dokumen imigrasi bagi WNA;
   e. Ijin rekomendasi dari kedutaan/perwakilan negara yang bersangkutan bagi WNA.

Pasal 13

Pelaporan perkawinan bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta Perkawinan.

Pasal 14

Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri, wajib melaporkan perkawinannya kepada Kepala Daerah setempat, setelah kembali ke Indonesia.

7. Bagian ke 3 (tiga) mengatur tentang Perceraian, disini berisi 3 pasal yaitu pasal 15, 16, 17. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Setiap perceraian yang sah atau telah mendapatkan penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat.
(2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data:
    a. Putusan pengadilan tentang penetapan Perceraian;
    b. Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam;
    c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 16

Pelaporan perceraian bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Akta Perkawinan yang bersangkutan.

Pasal 17

Penduduk yang melaksanakan perceraian di luar negeri, wajib melaporkan perceraiannya kepada Kepala Daerah setempat, setelah kembali ke Indonesia.

8. Bagian ke 4 mengatur tentang kematian, disini berisi 3 pasal yaitu pasal 18, 19 dan 20. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setempat, selambat-lambatnya :
    a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian, bagi yang tunduk pada Stbl. 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl.
    b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
(2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data:
    a. Surat keterangan kematian;
    b. Akta Kelahiran; dan
    c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 19

Setiap pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterbitkan Akta Kematian dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan.

Pasal 20

Setiap kematian penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setempat, setelah kembali ke Indonesia.

9. Bagian Ke 5 mengatur tentang Pengakuan dan Pengasahan Anak, disini ada 2 pasal yaitu pasal 21 dan 22. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak, dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat.
(2) Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data:
    a. Akta Kelahiran Anak;
    b. Akta Perkawinan orang tua;
    c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 22

Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

10. Bagian ke 6 mengatur tentang Pengangkatan Anak, disini berisi 2 pasal, yaitu pasal 23 dan 24. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setempat, dengan melampirkan data :
    a. Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak;
    b. Akta Kelahiran anak yang bersangkkutan;
    c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
(2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Pasal 24

Pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat, setelah kembali ke Indonesia.

11. Bagian ke 7 mengatur tentang Perubahan Nama, berisi 1 pasal saja yaitu pasal 25.

Adapun bunyi pasal 25 adalah sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Perubahan nama yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat dengan melampirkan data :
    a. Surat Penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri atau Pejabat yang berwenang;
    b. Akta Kelahiran;
    c. Akta Perkawinan;
    c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

(2) Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Penduduk.

12. Bagian ke 8 mengatur tentang Perubahan Status Kependudukan, disini ada 1 pasal yaitu pasal 26. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Penduduk sementara yang telah memperoleh ijin tinggal tetap dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat dengan melampirkan data :
    a. Kartu ijin tinggal menetap dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
    b. Paspor.
(2) Pelaporan memperoleh ijin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicatat dan diterbitkan KK dan KTP.

13. Bagian ke 9 mengatur tentang Perubahan Kewarganegaraan disini berisi 1 pasal yaitu pasal 27. Adapun bunyi pasal 27 itu adalah sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Perubahan kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan/ putusan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat, dengan melampirkan data :
    a. Surat Bukti Perubahan Status Kewarganegaraan;
    b. KK;
    c. KTP.
(2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan dicatat dan melakukan perubahan pada data kependudukan yang bersangkutan.

14. Bagian ke 10 mengatur tentang Perubahan dan Pembatalan Akta, disini ada 1 pasal yaitu pasal 28. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Setiap terjadi perubahan dan atau pembatalan akta pencatatan penduduk dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat.

(2) Terhadap pelaporan perubahan atau pembatalan akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Penduduk yang bersangkutan.

15. Bagian ke 11 mengatur tentang Pindah atau Datang, disini ada 2 pasal, yaitu pasal 29 dan 30. Adapun bunyi pasal ini adalah sebagai berikut:

Pasal 29

Setiap penduduk dan penduduk sementara yang pindah atau datang, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat.

Pasal 30

(1) Pelaporan kedatangan penduduk diterbitkan KK dan KTP.
(2) Pelaporan kedatangan warganegara asing dari luar negeri diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (Certificate for Non Citizen).

16. Bab VII berisi tentang Pelaporan, disini hanya ada 1 pasal yaitu pasal 31. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 31

Kepala Daerah melaporkan data penduduk hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk di daerahnya kepada Menteri Dalam negeri.

17. Bab VIII mengatur tentang Ketentuan Penutup, disini ada 3 pasal yaitu 32, 33 dan 34. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 32

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil Dalam Kerangka SIMDUK dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Sejak berlakunya Keputusan ini produk hukum Daerah yang mengatur penyelenggaraan pendaftaran penduduk paling lama 1 (satu) tahun, sudah diubah dan disesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 34

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

b. Kelemahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Jika diperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di atas dan dikaitkan dengan peraturan pengangkatan anak, maka terlihat ada beberapa kelemahan yaitu sebagai berikut:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sama dengan yang lainnya yang menentukan bahwa pendaftaran anak angkat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil salah satu syaratnya adalah adanya penetapan pengadilan untuk pengangkatan anak.

Ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setempat, dengan melampirkan data :
    a. Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak;
    b. Akta Kelahiran anak yang bersangkkutan;
    c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
(2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Pada realitanya di masyarakat mayoritas pengangkatan anak tidak ada mengajukan kepengadilan untuk minta penetapan sebagai anak angkat. Pada

umumnya masyarakat dalam administrasinya anak angkat seperti anak sendiri, karena selama ini tidak ada masalah sehingga mereka ingin praktis.

8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No.2 Tahun 1979 yang mengatur tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 ini dimasukkan disini karena berisi Penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/ pengangkatan anak. Dalam Surat Edaran ini mengatur masalah proses di pengadilan terutama berkaitan dengan pengangkatan anak.

a. Dasar Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983

Adapun yang menjadi dasar lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 ini adalah sebagai berikut:

1. Romawi I mengatur tentang Ketentuan Umum. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

   Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian hari kian bertambah. Baik yang merupakan suatu bagian tuntutan gugatan perkara, maupun yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak. Yang terakhir ini menunjukkan adanya perubahan/ pergeseran/ variasi-variasi pada motif dasarnya.

Keadaan tersebut merupakan gambaran, bahwa kebutuhan akan Pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan Pengadilan.

b. Isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No.2 Tahun 1979 yang mengatur tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak

1. Romawi II mengatur tentang Pengangkatan Anak Warga Negara Asing (Barat) Merupakan Suatu Ultimatum Remidium, Karena Adanya Aspek Keamanan Politik dan Budaya Bangsa. Disini ada 5 point, yaitu sebagai berikut:
    1. Dahulu hanya dikenal pengangkatan-pengangkatan anak di lingkungan masyarakat adat (Penduduk Asli), baik dengan dasar memperoleh keturunan *pancer* laki-Iaki atau tidak.
    2. Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang memungkinkan pengangkatan anak oleh seorang Pegawai Negeri, maka bertambah banyak para Pegawai Negeri mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bersifat administratif yang kebanyakan terdorong oleh keinginan agar memperoleh tunjangan dari Pemerintah.
    3. Di kota-kota besar banyak sekali terjadi perkara-perkara pengangkatan anak baik yang terang orang tua kandungnya rnaupun yang tidak, yang dilakukan dengan perantaraan yayasan-yayasan sosial.

4. Semula bagi yang dahulu termasuk lingkungan golongan penduduk Cina (Stb. 1917 No. 129) hanya dikenal adopsi terhadap anak-anak Iaki-laki dengan motif untuk memperoleh keturunan laki-laki, tetapi setelah yurisprudensi tetap menganggap sah pula pengangkatan anak perempuan, maka kemungkian bertambahnya permohonan semacam itu semakin besar. Undang-undang tentang Kewarganegaraan RI (Undang-Undang No. 62 Tahun 1958) merupakan suatu kesempatan yang dipergunakan oleh yang berkepentingan untuk melakukan pengangkatan anak melalui ketentuan Pasal 2 Undang-undang tersebut yang antara lain menyatakan bahwa anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga-negara RI, memperoleh kewarganegaraan RI apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri (Pengangkatan anak warga negara asing oleh orang tua angkat warga-negara Indonesia).

   Meskipun persyaratan untuk memperoleh kewarga-negaraan Indonesia dengan jalan pewarga-negaraan cukup rumit dan memakan banyak waktu, tetapi kenyataannya nampak makin banyak permohonan pengangkatan anak-anak warga-negara Cina oleh warga negara Indonesia yang jelas lebih terdorong keinginan untuk mendapat kewarga-negaraan Republik Indonesia, dari pada keinginan yang luhur yang pada azasnya mendasari permohonan pengangkatan anak tersebut.

5. Bertambahnya kemungkinan bagi warga-negara Indonesia untuk bergaul dengan warga-negara asing dalam kenyataannya telah menimbulkan hasrat dari pada warga-negara asing (Barat) untuk mengangkat anak, maka makin banyak terjadi pengangkatan anak anak Indonesia oleh warga-negara asing (Barat) yang menimbulkan permasalahan pengangkatan anak antar negara ("*Inter State")* atau *("Inter Country")* dan yang kesemuanya dimintakan pengesahannya kepada Pengadilan Negeri.

Disamping itu sering dilupakan bahwa terutama dalam hal pengangkatan anak W.N.I. oleh warga-negara asing, kepentingan negara dan bangsa ikut menentukan aspek-aspek keamanan politik dan budaya bangsa dalam kerangka perkembangan Negara Pancasila lebih-lebih dengan adanya ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Pengangkatan anak semacam itu seharusnya merupakan *Ultimum Remedium.*

2. Romawi III mengatur tentang Pengangkatan Perundang-undangan dalam Bidang Pengangkatan Anak Tidak Mencukupi, disini berisi 2 point. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

I. Sebagaimana kita ketahui peraturan perundang-undangan yang ada di bidang pengangkatan anak warga-negara Indonesia oleh warga negara asing temyata tidak mencukupi.

Juga merupakan kenyataan, bahwa cara perneriksaan maupun bentuk serta isi pertimbangan dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri di

bidang ini menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang tidak menguntungkan.

Pada hal sangat diharapkan dari putusan-putusan Pengadilan tersebut disamping agar dapat diperoleh pedoman-pedornan petunjuk petunjuk, arah serta kepastian pada perkembangan lernbaga Pengangkatan anak ini, juga diharapkan agar dalarn hal pengangkatan-pengangkatan anak W.N.I. oleh warga-negara asing, putusan-putusan Pengadilan semacam ini merupakan faktor determinant (rnenentukan). *EUROPEAN CONVENTION ON THE ADOPTION OF CHILDREN*, antara lain menetapkan bahwa pengangkatan anak antar negara (Inter State, Inter Country Adoption) dianggap sah atau sah sifatnya apabila dinyatakan oleh Pengadilan. Dengan perkataan lain penetapan atau putusan Pengadilan merupakan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak.

2. Mahkamah Agung menjumpai banyak kasus yang telah diputus oleh beberapa Pengadilan Negeri terutama di kota-kota besar, dalam putusan mana temyata ada kekurangan-kekurangan sebagai berikut:

   2.1. Pemeriksaan di muka sidang dilakukan terlalu summier seolah-olah hanya merupakan proforma saja, tanpa nampak adanya usaha untuk memperoleh gambaran dari motif yang menjadi latar belakangnya.

   Oleh karena itu dalam hal hanya didengar kedua pihak yaitu orang tua kandung si-anak dan calon orang tua angkatnya disertai

sebuah akte notaris yang berisi perbuatan pengangkatan anak tersebut, sebenarnya meyimpang dari pada dasar pandangan bahwa pangangkatan anak warga-negara Indonesia oleh warga-negara asing seharusnya merupakan suatu Ultimum Remedium.

2.2. Pertimbangan hukum tidak sempuma karena antara lain:

2.2.1. Tidak jelas norma hukum apa yang diterapkan.

2.2.2. Tidak menonjolkan, bahwa kepentingan si calon anak angkat tersebut yang harus diutamakan di atas kepentingan-kepentingan pihak-pihak orang tua angkat dengan menekankan segi-segi kesungguhan, kerelaan, ketulusan dan kesediaan menaggung segala konsekuensi dan akibat hukum bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pangangkatan anak itu terjadi.

2.2.3. Sering tidak diperhatikan bahwa dalam beberapa macam pengangkatan anak (anak W.N.A. diangkat oleh W.N.I. atau sebaliknya) terdapat aspek-aspek yang tidak kecil artinya bagi kepentingan negara kita sendiri yakni:

- kemungkinan berubahnya status kewarganegaraan calon anak angkat yang bersangkutan serta kemungkinan

penyelundupan secara legal terhadap ketentuan Pasal 2 UU No. 62 Tahun 1958 tentang kewarga-negaraan RI.[235]

- Sering tidak dipahami, bahwa perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yan dapat terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan anak tersebut bagi semua pihak yang sudah berlangsung/ berjalan untuk beberapa lama.

3. Romawi IV mengatur tentang hal-hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Menerima, Memeriksa dan Mengadili Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Anak. Pada romawi IV ini ada beberapa point, yaitu sebagai berikut:
    1. Pada garis besarnya permohonan-permohonan pengesahan/ Pengangkatan anak yang tidak dimasukkan dalam suatu gugatan perdata dapat dibedakan antara:

        A. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak antar W.N.I.

        B. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.L *(Inter Country Adoption).*

[235] UU No.62 Tahun 1958 Pasal 2 adalah " Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga-negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu".

2. Tentang Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia.

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan-permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar W.N.I. diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. 1. Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya voluntair),

1.1. Permohonan seperti ini hanya dapat diterima apabila telah temyata ada urgensi yang memadai.

Umpanya: Ada ketentuan-ketentuan undang-undang yang mengharuskan.

1.2. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan secara tertulis.

1.3. Dapat diajukan dan ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya.

Disamping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seseorang (sesuai pengertian dalam Pasal 123 RID).

Dalam hal didampingi/dibantu maka hal ini berarti pemohon/calon orang tua angkat harus tetap hadir dalam pemeriksaan di persidangan.

Begitu juga meskipun pemohon memakai seorang kuasa namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri.

1.4. Dibubuhi meterai secukupnya.

1.5. **Dialamatkan kepada Ketua** Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat.

Catatan : Penjelasan secara terperinci mengenai tempat tinggal/domisili anak lihat lampiran.

A. 2. Isi surat permohonan.

2.1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.

2.2. Juga harus nampak bahwa permohonan pengesahan Pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si-anak setelah Pengangkatan anak terjadi.

2.3. Isi petitum bersifat tunggal:

Yakni: tidak disertai *(in samenloop met)* petitum yang lain. Umpama : cukup dengan "agar si-anak dari B ditetapkan sebagai anak-angkat dari C" atau "agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah",

tanpa ditambah tuntutan lain seperti:

"agar ditetapkan anak bernama A tersebut, ditetapkan sebagai ahli waris dari C".

A. 3. Syarat-syarat bagi perbutan pengangkatan anak antar W.N.I. yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

3.1. Syarat bagi calon orang tua angkat: (pemohon).

3.1.1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antar orang tua kandung dengan orang tua angkat *(private adoption)* diperbolehkan.

3.1.2. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah *(single parent adoption)* diperbolehkan.

3.2. Syarat bagi calon anak yang diangkat:

3.2.1. Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah

diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.

3.2.2. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

2. B. Tentang permohonan pengesahan/ pengangkatan anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I. (Inter Country Adoption).

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili .....

Permohonan-permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I. *(Inter Country Adoption)* diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

B. 1. Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya voluntair).

1.1. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan secara tertulis.

1.2. Dapat diajukan dan ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya.

Disamping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seorang (sesuai pengertian dalam hal Pasal 123 RI.D).

Dalam hal didampingi/dibantu maka hal ini berarti pemohon/calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan.

Begitu juga meskipun pemohon memakai seorang kuasa, namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri.

1.3. Dibubuhi meterai yang secukupnya.

1.4. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak W.N.A. yang akan diangkat.

Catatan : Penjelasan secara terperinci mengenai tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat lihat lampiran.

B. 2. Isi surat Permohonan.

2.1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar-dasar yang mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.

2.2. Juga harus nampak bahwa perrnohonan/pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan

calon anak angkat W.N.A. yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si-anak setelah pengangkatan anak terjadi.

2.3. Isi petitum bersifat tunggal:

Yakni : tidak disertai *(in samenloop met)* petitum yang lain.

Umpama : cukup dengan : "agar si-anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C".

agar pengangkatan anak yang teJah dilakukan oJeh pemohon (C) terhadap anak B yang bemama A dinyatakan sah", tanpa ditambah tuntutan Jain seperti :

"agar ditetapkan anak bernama A tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari C".

atau

"agar anak bemama A tersebut ditetapkan berwarga negara RI mengikuti status kewarganegaraan ayah angkatnya bernama C tersebut.

B. 3. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.l. (Inter Country Adoption) yang harus dipenuhi antara Jain sebagai berikut :

3.1. Syarat bagi caJon orang tua angkat W.N.I. (pemohon).

3.1.1. Pengangkatan anak W.N.A. harus dilakukan melalui suatu Yayasan Sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa Yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak W.N.A. yang langsung dilakukan antara orang tua kandung W.N.A. dengan calon orang tua angkat W.N.I. *(private adoption)* tidak diperbolehkan.

3.1.2. Pangangkatan anak W.N.A. oleh seorang W.N.I. yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/ belum menikah *(single parent adoption)* tidak diperbolehkan.

3.2. Syarat bagi calon anak angkat W.N.A. yang diangkat.

3.2.1. Usia caJon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun,

3.2.2. Disertai penjelasan: tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat W.N.A. yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat W.N.I yang bersangkutan.

2. c. Tentang permohonan pengangkatan anak WNI oleh otang tua angkat WNA *(Inter Country Adoption).*

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan W.N.A. *(Inter Country Adoption)* diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

C. I. Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya voluntair).

C. 2. Isi surat Permohonan.

C. 3. Syarat-syarat bagi perbutan pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. (Inter Country Adoption) yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

3.1. Syarat bagi calon orang tua angkat W.N.A. (pemohon)

3.2. Syarat bagi calon anak angkat W.N.I. yang diangkat

3. PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN

A. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Perrnohonan-permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar W.N.I. diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

l. Pengadilan Negeri mendengar langsung.

2. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan antara lain sebagai berikut :

Surat-surat bukti :

3. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan.

B. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan-permohonan Pengesahan/pengangkatan anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I. diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri mendengar langsung.
2. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat rnenjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan antara lain sebagi berikut:
3. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan.

C. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan-permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

I. Pengadilan Negeri mendengar langsung.
2. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan antara lain sebagai berikut:

Surat-surat bukti :

3. Pengadilan Negeri dipersidangan :

5. Romawi IV. Berisi tentang PUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN-PERMOHONAN PENGESAHAN/PENGAANGKATAN ANAK.

A. Perrnohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar W.N.I.

B. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.A oleh orang tua angkat W.N.I. *(Inter Country Adoption).*

C. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. (Inter Country Adoption).

Mengenai hal :

A. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar W.N.1.

I. Merupakan "PENETAPAN".

2. Amar Penetapan berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN:

I. Menyatakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon..... alamat . terhadap anak ..... laki-laki/perempuan bemama ..... . umur/tanggal lahir ..... .

2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp ……..……

Mengenai hal :

A. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.l. *(Inter Country Adoption).*

DAN

B. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. *(Inter Country Adoption).*

l. Kedua-duanya merupakan " P U T U S A N ".

2. Sistimatik kedua jenis permohonan tersebut serupa dengan sistimatik putusan dalam perkara gugatan perdata yang terdiri dari dua bagian :

- tentang jalannya kejadian.
- tentang pertimbangan hukum.

3. Isi Putusan.

3.1. Dalam bagian "TENTANG JALANNYA KEJADIAN" agar secara lengkap dimuat pokok-pokok yang terjadi selama pemeriksaan dimuka sidang.

4. Amar Putusan

1. Dalam hal pengangkatan anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I. amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bemama……. ..... umur/tanggal lahir di …… sebagai anak angkat dari suami isteri .

2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp …….....……

.

2. Dalam hal pengangkatan anak W.N.l. oleh orang tua angkat W.N.A. amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama . ..... umur/tanggal lahir di ……. sebagai anak angkat dari suami isteri ……..... alamat .....

2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp …….....……

c. Kelemahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No.2 Tahun 1979 yang mengatur tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak

Berdasar paparan data di atas dan jika dikaitkan dengan pengangkatan anak maka masih ada kelemahan dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No.2 Tahun 1979 yang mengatur tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak ini adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung ini lebih fokus kepada hukum acara, misalnya bagaimana prosedur mengajukan permohonan pengangkatan anak, bagaimana prosesi persidangan dan bagaimana bentuk putusan hakim dan sama sekali tidak ada upaya untuk mencegah agar tidak ada lagi pemalsuan data dalam pengangkatan anak.
2. Proses pemeriksaan permohonan pengangakatan anak lebih bersifat formalitas saja, tidak terlalu menggali permasalahan secara mendalam, misalnya yang dihadirkan hanya pemohon dan orang tua anak yang akan melepaskan anaknya untuk diangkat oleh pemohon.

9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor U-335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982, tentang Anak Angkat.

a. Isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982

Kegiatan mengasuh, mendidik, merawat, membina, dan memastikan kesejahteraan anak terlantar merupakan usaha mulia seorang muslim dengan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Perbuatan yang demikian merupakan perilaku terpuji dan sangat dianjurkan oleh ajaran Islam. Dengan dasar yang demikian, maka hukum Islam memberikan kebolehan pengangkatan anak yang tujuannya untuk memastikan kesejahteraan anak agar menjadi insan yang unggul, kompetitif, dan berakhlak mulia.

Kenyataan yang demikian sebenarnya telah dibolehkan oleh MajelisUlama‟ Indonesia (selanjutnya disebut MUI) yang memberikan kebolehan dalam pengangkatan anak. Fatwa MUI MUI No. U.335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban

1402 H/10 Juni 1982 M, memberikan fatwa halal terhadap kegiatan pengangkatan anak. Hanya saja MUI menekankan bahwa kebolehan tersebut dengan catatan:

1) Bahwa Adopsi yang bertujuan untuk kepentingan anak angkat seperti pemeliharaan, pemberian bantuan dan sebagainya oleh Agama Islam diperbolehkan.
2) Orang-orang yang beragama Islam hendaknya mengadopsi yaitu mengangkat anak-anak yang beragama Islam, agar terjamin tetap terpelihara keislamannya.
3) Penagngkatan anak jangan sampai mengakibatkan hak kekeluargaan yang bisa dicapai dalam nasab keturunan, sehingga adopsi tidak mengakibatkan hak waris, wali mewakili dan sebagainya. Oleh karenanya apabila ayah dan ibu angkat akan memberikan sesuatu kepada anak angkatnya supaya dilakukan pada waktu sama-sama hidup sebagai hibah biasa

b. Kelemahan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982

Kelemahan fatwa MUI Nomor U-335/MUI/VI/1982 ini jika dikaitkan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1) Fatwa MUI ini tidak mengatur prosedur dan persyaratan pengangkatan anak, hanya melarang pengangkatan anak yang beda agama antara yang mengakat anak dan anak yang diangkat, misalnya larangan orang yang beragama Nasrani mengadopsi anak yang beragama Islam atau sebaliknya.
2) Karena hanya melarang pengangkatan anak beda agama, sehingga kedepan masalah pengangkatan anak ini masih berpotensi terjadi peanggaran, saeperti:
    a) Pengangkatan anak tidak melalui proses pengadilan
    b) Pemalsuan identitas anak angkat;

c) Pengembilan kembali anak angkat oleh orang tua aslinya;

d) Orang tua angkat melarang orang tua anak untuk bertemu dengan anaknya.

C. Ketidakadilan Regulasi Pengangkatan Anak

Berdasarkan gambaran peraturan perundangan pengangkatan anak di atas dan hasil penelitian penulis dilapangan maka berikut ini akan disajikan ketidakadilan regulasi pengangkatan anak di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Masih ada orang tua angkat yang tidak mencatatkan anak angkat pada akta kelahiran

Pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat 2a, yang berbunyi: "Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak".

Berdasarkan ketentuan ini bahwa anak angkat harus dicatatkan pada akta kelahiran yang disebut dengan catatan pinggir. Dengan adanya catatan pinggir maka anak angkat akan mengetahui bahwa dirinya adalah anak angkat, demikian juga dengan orang yang melihat akta tersebut akan langsung mengetahui bahwa yang berangkutan adalah anak angkat.

Berdasarkan penjelasan bapak Lukmanul Hakim,[236] bahwa selama ini belum ada warga masyarakat yang mengajukan permohonan untuk mencatatkan

[236] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Lukmanul Hakim, M.Pd, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kota Palangka Raya tanggal 10 Mei 2021.

anak angkatnya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya. Bagi warga masyarakat yang melakukan pengangkatan anak maka seyogyanya harus dicatatkan pada akta kelahiran, sebagai salah satunya syaratnya adalah harus ada penetapan dari pengadilan atas pengangkatan anak tersebut.

2. Masih ada orang tua angkat yang mengganti identitas anak angkat

Pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat 2a, yang berbunyi: "Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak".

Fakta di masyarakat tidak sedikit pasangan suami isteri mengangkat anak yang baru lahir kemudian sewaktu membuat akta kelahiran anak angkat tersebut nama orang tua anak angkat tersebut dicantumkan nama orang tua yang mengangkatnya seolah-olah anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri. Disamping itu juga anak angkat tidak dicatatkan pada akta kelahiran anak angkat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Helwina,[237] bahwa praktik penggantian identitas anak angkat ini terjadi karena tidak adanya sanksi hukum pada undang-undang atas penggantian identitas anak angkat. Lebih lanjut ibu Helwina menjelaskan bahwa saat ini masih ada kekosongan hukum yaitu belum

[237] Hasil wawancara dengan ibu Dr. Helwina Handayani, M.Si, Staf Khusus Sub.Bag Hukum dan Pengaduan pada Komisi Perlindungan Anak (KPA) Jakarta pada tanggal 11-10-2020.

adanya sanksi pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 atas penggantian identitas anak angkat[238].

Ketentuan pasal 39 ayat 2a ini sangat bagus dan selaras baik dengan hukum positif maupun hukum Islam, tapi pasal ini pelanggarannya tidak ada ketentuan sanksi pada undang-undang tersebut, akibat sering kali pengangkatan anak orang tua angkat mencantumkan namanya pada akta kelahiran akta kelahiran anak angkatnya.

Lebih lanjut ibu Helwina menjelaskan bahwa pemalsuan identitas anak angkat ini biasanya terjadi kalau anak yang diangkat tersebut baru lahir atau masih bayi dan belum mempunyai akta kelahiran.[239]

Pemalsuan identitas ini bisa berdampak pada anak, seperti berkaitan dengan perwalian ketika dia mau menikah dan waris ketika orang tua angkatnya meninggal dunia. misalnya ada kasus pengangkatan anak yang terjadi disalah satu desa di Palangka Raya. Ada seorang anak perampuan yang dipalsukan identitasnya oleh ayah angkatnya, ketika dia akan menikah, baru orang tua angkatnya memberitahukan, karena berkaitan dengan wali nikah. Setelah anak perempuan tersebut mengetahui siapa sebenarnya orang tua kandungnya, maka saat itu dia sangat terkejut dan dia selalu merasa sedih dan dapat merusak kebahagiannya setelah dia menikah.[240]

[238] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 39

[239] Hasil wawamcara dengan ibu Helwina, *Ibid.*

[240] Hasil wawancara dengan bapak Hilmi, penduduk desa Kereng Bangkirai pada tanggal 07-01-2021

Pada hukum Islam, Rasulullah saw melarang adanya tindakan tipu-menipu termasuk merubah identitas anak angkat, sebagaimana disebutkan dalam hadis beliau sebagai berikut:

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ ٱلأَسْقَعِ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ:
إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ ٱلْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ ٱلرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ، أَوْيُرِىَ عَيْنَهُ
مَالَمْ تَرَ،أَوْيَقُوْلُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَالَمْ يَقُلْ

> Artinya: "Diriwayatkan dari Watsilah bin Asqo" berkata, Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya di antara kebohongan paling besar adalah seseorang mengakukan diri kepada selain ayahnya, mengaku matanya melihat apa yang tidak dilihatnya dan berbicara mencatut nama Rasulullah saw. apa yang tidak beliau ucapakan.[241]

Syariat Islam juga melarang kepada anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka sendiri. Rasulullah saw. bersabda:[242]

مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوانْتَمَى إِلَى غَيْرِمَوالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ الْمُتَتَبِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

> Artinya: "Siapa saja mengaku ayah pada selain ayahnya sendiri dan berintima" pada selain tuannya maka laknat Allah akan terus mengikutinya hingga hari kiamat."

Pada penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan nasab anak yang diangkat dengan kedua orang tua kandungnya dan memberinya status seperti anak kandung, jelas haram dan tidak dibenarkan oleh Islam.

---

[241] Syaikh al-Qostholani, 2014, *Syarah Shohih Bukhori*, terj: Abu Nabil, Solo, Zam-Zam, hal. 619.

[242] Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, hal. 26.

Hukum Islam hanya mengakui dan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak dalam arti status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya.

Penetapan nasab merupakan dapat berdampak terhadap individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu wajib merealisasikannya dalam masyarakat, sehingga diharapkan nasabnya menjadi jelas. Di samping itu, dengan ketidakjelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisbahkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya.

3. Masih ada pengangkatan anak secara ilegal

Ada pasal yang mengharuskan bahwa pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan, hal ini terdapat pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 9 yang berunyi :

> "Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."

Pada pasal 1 ayat 9 tersebut pada ujung kalimatnya jelas tertulis berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ketentuan ini juga terdapat pada turunan undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu diatur pada:

a) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, pada pasal 23 berbunyi:

   Pasal 23:

   (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setempat, dengan melampirkan data:

   a. Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak;

   b. Akta Kelahiran anak yang bersangkutan;

   c. Dokumen Imigrasi bagi WNA

   (2) Pelaporan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

b) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pasal 47 berbunyi:

   Pasal 47

   Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
   (a). Salinan penetapan pengadilan;
   (b). Kutipan akta kelahiran anak;
   (c). KK orang tua angkat; dan
   (d). KTP-el; atau
   (e). Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan anak, pada pasal 20 berbunyi:

Pasal 20:
(1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
(2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

d) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, diatur dalam pasal 17 ayat (3) dan (4) yang berbunyi:

Pasal 17 Ayat (3) :

Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 Ayat (4):

Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke Departemen Sosial, instansi sosial dan instansi terkait.

Pada beberapa ketentuan di atas menyatakan bahwa pengangakatan anak harus melalui penetapan pengadilan, tapi dalam praktiknya di masyarakat pengangkatan anak hampir tidak ada yang melalui proses pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Palangka Raya dari tahun 2015 sampai sekarang tidak ada yang mengajukan permohonan pengangkatan anak, sebagaimana data di bawah ini:

Tabel 4

Data Perkara Masuk Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya

NO	TAHUN	PERKARA MASUK	PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK	JUMLAH
1	2015	691	-	691
2	2016	313	-	313
3	2017	853	-	853
4	2018	856	-	856
5	2019	992	-	992
	JUMLAH	3.705	-	3.705

Sumber Data: Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Palangka Raya

Demikian juga permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Palangka Raya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5

Data Perkara Masuk Pada Pengadilan Agama Palangka Raya

NO	TAHUN	PERKARA MASUK	PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK	JUMLAH
1	2013	539	1	540
2	2014	614	-	614
3	2015	598	-	598
4	2016	640	-	640
5	2017	583	-	583
6	2018	625	-	625
7	2019	701	-	701
	JUMLAH	4.300	1	4.301

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Palangka Raya

Dari tabel di atas selama 7 tahun ada 4.301 perkara yang masuk, namun permohonan pengangkatan anak Cuma 1 buah permohonan saja.

Penjelasan dari hakim ibu Zuraidah[243], bahwa masyarakat enggan untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan karena salah satu dari persyaratannya adalah kunjungan dari pekerja sosial ke rumah calon orang tua angkat. Lebih jauh ibu Helwina[244] menjelaskan bahwa tujuan dari pekerja sosial ini ke rumah Calon Orang Tua Angkat (COTA) adalah untuk memastikan:

d) Kondisi rumah COTA

e) Kemampuan ekonomi COTA;

f) Kecakapan COTA.

Survey dari pekerja sosial ini memerlukan waktu 6 s.d 12 bulan karena untuk memastikan agar anak angkat nantinya benar-benar terayomi dan tujuan pengangkatan anak itu tercapai sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang. Lamanya survey dari tenaga pekerja sosial inilah yang membuat warga masyarakat enggan untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

Jika pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan tujuan pengangkatan anak. Sebab kalau pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan, hakim akan mengabulkan permohonan tersebut kalau Calon Orang Tua Angkat (COTA) akan

[243] Hasil wawancara dengan ibu Hj. Zuraidah Khatimah, Hakim Seniur Pengadilan Agama Kota Palangka Raya pada tanggal 5 Januari 2021.

[244] Hasil wawancara dengan ibu Helwina Handayani, Staf Khusus Sub.Bag Hukum dan Pengaduan pada Komisi Perlindungan Anak (KPA) Jakarta tanggal 11-10-2020.

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Syarat yang paling penting adalah COTA memiliki kemampuan secara ekonomi dan sehat jasmani dan rohani.

Permasalahan yang pernah terjadi akibat pengangkatan anak illegal ini adalah:

Pertama, ada anak angkat yang dicabuli oleh ayah angkatnya. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca pada berita di bawah ini, yaitu:

DICABULI 2 TAHUN, ANAK ANGKAT DI LUWU LAHIRKAN BAYI PEREMPUAN[245]

KOMPAS.com – LK (54), seorang ayah di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, tega mencabuli NH (17), anak angkatnya selama dua tahun hingga melahirkan bayi perempuan. Kasatreskrim Polres Luwu AKP Faisal Syam mengatakan, pelaku melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2018 saat sang anak berusia 15 tahun. "Korban adalah pelajar SMA di Luwu, kelas 3 dan telah melahirkan anak perempuan di Puskesmas Bua pada pekan lalu," kata Faisal saat dikonfirmasi, Jumat (13/3/2020).

Pencabulan oleh LK terhadap NH dilakukan pertama kali di rumahnya. Selain itu, pelaku kerap mengulangi perbuatannya dengan mengancam pelaku tidak akan membiayai kebutuhan hidup dan sekolah korban. Dia menambahkan, korban memberanikan diri melaporkan hal tersebut usai melahirkan. "Jadi pada hari Rabu (4/3/2020) sekitar pukul 10.00 WITA, kakak korban mendatangi kantor Polsek Bua melaporkan kejadian yang telah dialami oleh adiknya yang diduga dilakukan oleh orangtua angkatnya," ujar Faisal.

[245]https://regional.kompas.com/read/2020/03/13/11034981/dicabuli-2-tahun-anak-angkat-di-luwu-lahirkan-bayi-perempuan, Di lihat pada tanggal 15-04-2020 Pukul 13.31 wib.

Sementara itu, Kapolres Luwu AKBP Fajar Dani Susanto mengatakan, terdapat 11 kasus penganiayaan, persetubuhan, pemerkosaan dan aborsi, yang menimpa anak-anak dan perempuan di tahun 2020. "Kasus tindak pidana terhadap perempuan dan anak saya menduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba, di mana tidak mungkin ada seorang orangtua, paman, atau saudara tega melakukan perbuatan di luar nalar kita," tutur Fajar. Nursamsi, Kepala Sub Bidang Pusat Pelayanan Terpadu, Perlindungan Perempuan dan Anak mengatakan, pihaknya memberikan pendampingan kepada korban. "Kami melakukan pendampingan dengan korban namun memang perlu hat-hati karena mengingat korban masih pelajar di bawah umur," jelas Nursamsi. Dia mengaku, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama kasus pelecehan seksual di Luwu cukup tinggi selama beberapa tahun terakhir.

Kedua, peristiwa kedua ini adalah pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang berakibat negatif yaitu anak angkat berselingkung dengan ayah angkat, dan ibu angkat menjadi korban. Berikut ini akan disajikan kutipan beritanya, yaitu:

> **10 TAHUN DIRAWAT BAK ANAK SENDIRI, ANAK ANGKAT TEGA HIANATI IBU, SELINGKUH DENGAN AYAH ANGKAT SAMPAI HAMIL**[246]
>
> Tengah viral curhat seorang wanita dikhianati anak angkat yang ia adopsi 10 tahun lalu. Dibesarkan layaknya anak kandung, siapa sangka gadis ini justru tega mengkhianati ibu angkatnya sendiri. Gadis berinisial M ini diketahui tega berselingkuh dengan ayah angkatnya.
>
> Bahkan dari perselingkuhan itu, kini M tengah hamil mengandung anak dari ayah angkatnya tersebut. Ibu angkat M yang berinisial NH tak menyangka

[246]https://newsmaker.tribunnews.com/2020/12/12/10-tahun-dirawat-bak-anak-sendiri-anak-angkat-tega-khianati-ibu-selingkuh-dengan-ayah-sampai-hamil.

anak angkat yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang kini justru menghacurkan rumah tangganya.

Seandainya saja pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan kemungkinan besar masalah-masalah seperti ini tidak akan terjadi. Hakim pada pengadilan akan berhati-hati dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak dan disamping itu juga persyaratan pengangkatan anak cukup banyak, tujuannya adalah untuk melindungi anak angkat.

BAB V

REKONTRUKSI HUKUM PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Prosedur Pengangkatan Anak di Beberapa Negara Tetangga

1. Negara Malaysia

Di Malaysia, salah satu cara untuk mengangkat anak adalah dengan memohon kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Berdasarkan fungsi Jabatan Kebajikan Masyarakat itu sendiri, yaitu mempunyai anak- anak yang bisa dijadikan sebagai anak angkat karena ia menjalankan fungsi penjagaan anak-anak yang terbuang atau teraniaya dan sebagainya, bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga bisa mendapatkan keluarga angkat agar mereka dapat terus menikmati kebahagiaan hidup berkeluarga seperti layaknya orang lain.[247]

Dalam menjalankan tugas sebagai keluarga untuk keluarga angkat ini, faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat ialah kebajikan anak tersebut. Untuk itu, berbagai informasi harus didapat dari pasangan yang mau mengangkat anak untuk memastikan kebajikan anak-anak itu terpelihara. Selain mengisi formulir, pasangan yang memohon untuk mendapatkan anak angkat akan diwawancara oleh penyedia laporan sosial mereka. Antara informasi yang harus diperoleh ialah latarbelakang sosial mereka serta kesanggupan mereka menjadi keluarga angkat, selain memenuhi syarat dalam Akta Perlindungan Kanak-kanak

[247] Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, dalam Kamaruzzaman Bustamam, *Prosedur Pengangkatan Anak di Perak, Malaysia (Analisis Pengangkatan Anak Angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping)*, Samarah**:** Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018, hal.52

1991 dan Akta Pengangkatan 1952 (untuk bukan Islam) atau Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (untuk orang Islam).

a. Pengangkatan Anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Taiping

Jabatan Kebajikan Masyarakat di Malaysia didirikan pada tahun 1946. Jabatan Kebajikan Masyarakat di Malaysia telah mengalami perubahan dalam memenuhi perannya di dalam pembangunan Negara Malaysia. Dimulai dengan keterlibatan menangani berbagai masalah yang timbul akibat perang dunia kedua, peran dan fungsi jabatan ini telah berkembang ke layanan pencegahan dan pemulihan dalam isu-isu sosial dan pembangunan masyarakat. Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berperan penting dalam Pembangunan sosial, dan telah ditempatkan di bawah Kementerian Pembanggunan Wanita, keluarga dan Masyarakat.[248]

Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan kepada golongan yang kurang mampu khususnya dan seluruh masyarakat umumnya. Layanan ini tidak hanya dari segi bantuan ekonomi (kesejahteraan material) bahkan juga bantuan yang berupa dukungan spiritual dan konseling kepada mereka yang bermasalah. Sesuai dengan tujuan pembentukan Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah memberi perlindungan/pemulihan kepada kumpulan sasaran jabatan (anak-anak,orang tua,orang miskin), membangun masyarakat dalam perubahan sikap dan peningkatan kemampuan untuk mandiri, mewujudkan masyarakat yang berbudaya

[248] Wan Azmi Ramli, *Dasar Sosial di Malaysia*, (Kuala Lumpur, Golden Books Center SdnBhd, 1993), hlm. 311.dikutip dari Kamaruzzaman Bustamam, *Prosedur Pengangkatan Anak di Perak, Malaysia (Analisis Pengangkatan Anak Angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping)*, Samarah, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018, hal.62

penyayang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan kebajikan dan pembangunan sosial yang profesional dan berbagi tanggung jawab yang strategis.[249]

Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah sebuah jabatan yang mempunyai peran penting dalam pembangunan sosial. Jadi, di dalam jabatan itu sendiri memiliki tatacara layanan terhadap pelanggan dalam melayani masyarakat yang memiliki masalah dan tidak mampu dengan tagline "Kebajikan Anda Komitmen Kami". Dengan itu Jabatan Kebajikan Masyarakat berjanji untuk memberikan layanan berkualitis dengan ramah dan berintegritasberdasarkan tujuan utama yaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasi bagi kelompok sasaran sepertilayanan anak-anak, orang papa, keluarga, orang tua, orang-orang cacat,dan korban bencana.[250]

b. Prosedur Pengangkatan Anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat

Pemerintah Malaysia berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak ini, didirikan oleh pemerintah satu lembaga yang berwenang dalam hal mengenai pengangkatan anak yaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Malaysia yang ingin melakukan pengangkatan.

[249] Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Profil dan Objektif Jabatan Kebajikan Masyarakat*, Diakses pada tanggal 21 November 2017 dari situs: http://www.jkm.perak.gov.my/index2.php? page=profil.

[250] Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Kumpulan Sasar Jabatan Kebajikan Masyarakat*, Diakses pada Tanggal 31 disember 2017 dari situs: http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r =portal/full&id= K3grQ3pRNVJUNGo2L2J4c1 NKeXIxUT09.

Menurut Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, ada beberapa persyaratan utama yang ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk permohonan mengambil anak angkat. Umumnya, kondisi yang ditetapkan sesuaidengan kebutuhan terbaik anak tersebut dan menjamin masa depannya. Di antara syarat-syarat perundangan yang perlu dipenuhi adalah:[251]

1. Warganegara Malaysia dan tinggal di Malaysia;
2. Berumur 25 hingga 60 tahun;
3. Memiliki Perkawinan secara sah dan telah menikah lebih dari 5 tahun;
4. Bagi perkawinan yang kurang dari 5 tahun dan mempunyai masalah kesehatan reproduktif atau kesehatan yang menyulitkan dalam proses kehamilan atau terlambat dalam perkawinan dapat melakukan permohonan;
5. Tidak berpeluang untuk mendapatkan anak karena faktor usia;
6. Pemohon yang masih lajang boleh dipertimbangkan dan perbedaan umur di antara pemohon dan anak-anak yang hendak diangkat harus lebih 21 tahun. Pemohon lelaki lajang hanya dibenarkan mengambil anak-anak lelaki;
7. Mempunyai pendapatan yang dapat menghidupi kebutuhan keluarga;
8. Harus sehat dari segi mental dan fisik;
9. Bersih dan tidak memiliki catatan pidana;

[251] Kamaruzzaman Bustamam, *Prosedur Pengangkatan Anak di Perak, Malaysia (Analisis Pengangkatan Anak Angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping)*, **Samarah:** Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018, hal.63-64.

10. Memiliki sifat dan akhlak yang mulia;
11. Keadaan tempat tinggal yang sesuai dan memadai;
12. Menganut agama yang sama dengan anak-anak itu;
13. Keutamaan kepada pemohon yang tidak mempunyai anak.

Bagi individu yang berminat untuk memohon mengadopsi anak, permohonannya dapat dilakukan dengan mengisi formulir permohonan yang diperbolehkan dalam kantor Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) dimana pemohon berdomisili/ tinggal atau melalui formulir yang dapat diunduh dari situs yang disediakan. Jika permohonan melalui telefon, sms, tertulis, faks, email, atau datang sendiri ke kantor haruslah mengisi formulir permohonan layanan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan didaftarkan dalam Buku Daftar Surat. Di antara dokumen yang harus disertakan adalah:[252]

1. Foto ukuran pasport (suami / istri);
2. Surat dukungan / konfirmasi dari Petugas Medis;
3. Fotocopy sertifikat nikah / sertifikat pendaftaran penikahan;
4. Fotocopy kartu identitas pemohon (suami dan istri);
5. Selain itu dokumen yang berhubungan seperti laporan gaji dan lain-lain.

Menurut Penolong Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, setelah permohonan diterima, pejabat dari Jabatan Kebajikan Masyarakat akan mendapatkan latar belakang kesesuaian keluarga

[252] Prosedur Kualiti Jabatan Kebajikan Masyarakat Utama 09, *Surat Tawaran Anak Pelihara*, No Keluaran 03, (PK JKM 09, 2008).

angkat dalam memelihara anak tersebut. diantaranya termasuk kesehatan, pekerjaan, pendapatan, kasih sayang, tanggungan, kemampuan menyekolahkan, kondisi rumah dan sebagainya untuk memastikan tidak terjadinya kasus pengabaian, penyiksaan dan sebagainya. Pemohon akan melalui satu sesi wawancara bersama Pengawai Kebajikan Masyarakat untuk tujuan penyediaan laporan social pemohon. Hal-hal yang akan di diskusikan dalam sesi tersebut adalah sebagai berikut:[25]

1. Menilai latar belakang sosial pemohon;
2. Menilai kesanggupan pemohon menjadi keluarga angkat;
3. Menjelaskan tentang implikasi menjadi keluarga angkat;
4. Pemohon harus sanggup memenuhi syarat menurut Undang- undang anak 2001, Akta Daftar Pengangkatan 1952 dan Akta Pengangkatan 1952 yang lebih sesuai;
5. Setelah semua proses di atas dilakukan, formulir permohonan akan diteliti oleh Penolong Pengarah Bagian Anak Pelihara apakah formulir yang diisi tersebut lengkap atau tidak. Kepada permohonan yang sudah lengkap, akan dikirim ke Direktur Kebajikan Masyarakat untuk persetujuan dalam waktu 14 hari.

Setelah semua pihak setuju dan permohonan diterima, maka akan dikeluarkan surat penawaran ke pemohon dalam waktu empat belas hari. Jika pemohon setuju dengan penawaran yang diberikan, pemohon akan datang mengunjungi anak di rumah anak kebajikan. Jika pemohon menerima anak yang ditawarkan, anak tersebut

akan diserahkan kepada pemohon beserta berkas-berkas yang berhubungan dengan kriteria hukum negara.[253]

c. Perlindungan Anak Menurut Akta Kanak-kanak 2001

Anak-anak di Malaysia, mereka yang masih dalam lingkungan usia anak-anak kan dijaga oleh negara berdasarkan beberapa undang- undang yang telah dibuat khusus untuk menjaga kepentingan dan memastikan hak-hak anak di Malaysia terpenuhi sesuai dengan kebutuhan hidupnya sebagai anak dibawah umur.

Menurut Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Undang-undang mengenai perlindungan terhadap anak-anak di Malaysia dapat dilihat sejak awal tahun 1947 dengan Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda, Akta Mahkamah Juvana 1947, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991. Walaupun begitu, kita mengetahui bahwa memiliki keperluan untuk mengubah arah konsep perlindungan terhadap anak-anak dan juga mengakui bahwa perlunya pembaharuan di dalam undang-undang sesuai dengan perkembangan zaman, jadi satu akta yang khusus dan konprehensif mengenai anak-anak telah direncanakan dan disetujui yaitu Akta Kanak-Kanak 2001 dan telah berlaku pada 1 Agustus 2002.[254]

[253] Kamaruzzaman, dkk, 2018, *Prosedur Pengangkatan Anak di Perak, Malaysia (Analisis Pengangkatan Anak Angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping)*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018, hal.63.

[254]Kamaruzzaman, dkk, 2018, *Ibid*, hal. 66.

Akta ini bertujuan untuk menyatukan dan memperbarui undang- undang yang berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan dan kesehatan anak-anak.Untuk anak-anak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan, mempunyai kriteria sebagai berikut:[255]

a. Anak-anak dilukai dalam bentuk fisik, emosi atau dianiayai dalam bentuk seks oleh orang tuanya atau penjaganya.
b. Disaat orang tuanya tidak melindungi atau tidak mungkin akan melindungianak-anak daricedera atau penganiayaan.
c. Orang tua atau penjaga anak-anak tidak layak atau telah mengabaikan atau tidak berupaya untuk menjalankan pengawasan dan pengawalan terhadap anak mereka.
d. Orang tua atau penjaga anak-anak mengabaikan atau keberatan untuk mengadakan pemeliharaan, makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak untuk anak tersebut.
e. Anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau penjaga atau telah dibuang oleh orang tuanya dan tidak ditemui keluarganya setelah dicari.
f. Anak-anak yang perlu diperiksa, diselidiki atau dirawat.
g. Anak-anak yang dapat mendatangkan bahaya kepada diri sendiri atau orang lain sedangkan orang tua atau penjaganya tidak mampu untuk mengawal anak tersebut.

[255] Undang-Undang Malaysia, *Akta Kanak-Kanak 2001*, sek. 17 (1), hal. 148-150

h. Anak dan orang tua berkelahi sehingga anak tersebut mengalami gangguan emosi.

i. Anak-anak yang berada di jalanan atau di toko-toko untuk meminta sedekah atau mengamen.

Setelah mendapat kepastian anak-anak tersebut memenuhi kriteria di atas, mereka akan mendapat pembelaan berdasarkan peraturan ini agar kehidupan mereka sejajar dengan kebutuhan hidup anak-anak yang lain. Dengan berlakunya Akta Kanak-Kanak 2001 ini, maka segala masalah dan kekurangan yang terkait anak-anak dapat dijaga dan dilindungi agar mendapat pemeliharaan dan perlindungan yang sewajarnya. Khususnya kepada anak-anak yang terlantar atau diabaikan oleh orang tuanya serta anak-anak yang disiksa oleh orang tuanya, maka ia berhak mendapat perlindungan dan pemeliharaan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat.

2. Negara Singapura

a. Latar Belakang Pengangkatan Anak di Singapura

Pengangkatan anak di Singapura pada dasarnya telah memiliki perundang•undangan sejak tahun 1939 yaitu Ordinance 18 of 1939. Saat ini, pengaturan pengangkatan anak berpedoman pada Adoption of Children Act berdasarkan bab IV Primarily Legislation ("Act").

Berdasarkan perundang•undangan tersebut, latar belakang pengangkatan anak juga semata•mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak sebagaimana dicantum pada pasal 5 huruf b "Act". Proses pengangkatan anak di Singapura telah difasilitasi dengan electronic filling system (menggunakan jaringan

internet) dengan menggunakan form•form baku. Permohonan pengangkatan anak beserta lampiran•lampirannya diajukan melalui electronic filling ke Pengadilan.

Walaupun di Singapura tidak diatur mengenai kewajiban tinggal bersama•sama untuk menumbuhkan dan mempertebal jalinan kasih sayang antara pihak yang mengangkat dengan anak angkat yang merupakan tahap pra pengangkatan anak, namun sebelum final hearing di Pengadilan, prosedur• prosedur yang ditempuh kompleks dan mungkin memerlukan waktu yang lama karena perhatian Pengadilan adalah kesejahteraan anak semata.

Proses pengangkatan anak di Singapura juga melibatkan Departemen Sosialnya (*Department of Social Welfare*) untuk kepentingan anak terutama sebagai Guardian in Adoption (GIA). Sesuai dengan pasal 10 huruf 3 "Act" tersebut bahwa Pengadilan akan menunjuk seseorang atau badan untuk bertindak sebagai GIA untuk mewakili kepentingan terbaik dari anak tersebut pada saat pemeriksaan (hearing) permohanan pengangkatan anak tersebut.

b. Persyaratan Pengangkatan Anak di Singapura

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengadopsi anak di negara Singapura, yaitu sebagai berikut:

1) Usia Anak

Usia anak yang akan diadopsi harus berusia di bawah 21 tahun . Ini sesuai dengan Bagian 3 (2) dari Undang• Undang Adopsi Anak Negara Singapura.[256]

2) Status Tempat Tinggal

Status seseorang yang akan mengadopsi anak di Singapura haruslah bertempat tinggal di singapura, yaitu warga Singapura atau Penduduk Tetap, atau punya pekerjaan tetap, Tanggungan tetap yang dianggap oleh pengadilan keluarga (*Family Court*) di Singapura. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (6) dari Adoption of children act.[257]

3) Usia Calon Orang Tua Angkat

Seseorang atau pasangan yang akan mengadopsi harus berusia minimal 25 tahun dan setidaknya 21 tahun lebih tua dari anak yang akan diadopsi. Jika seseorang/pasangan yang akan mengadopsi berusia di bawah 25 tahun dan atau kurang dari 21 tahun lebih tua dari anak, adopsi dapat diizinkan jika seseorang/pasangan itu dan anak masih punya hubungan darah, atau jika ada keadaan khusus lainnya membenarkan adopsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a (i) (ii) dari ACA.

Maksimum perbedaan usia antara adopter dan anak, baik suami/istri yang akan mengadopsi tidak boleh lebih dari 50 tahun lebih tua dari anak. Sebagai orangtua angkat, Anda harus bertanggung jawab untuk

[256] Adoption of Children Act (Chapter 4), (Original Enactment: Ordinance 18 of 1939), Revised Edition 1985, (30th March 1987), An Act to make provision for the adoption of infants, pasal 3 ayat 2.

[257] *Ibid.*, Pasal 4 ayat 6

memberikan pendidikan dan melindungi kesejahteraan anak adopsi sampai dia mandiri. Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki sarana fisik dan keuangan untuk melihat anak melalui perjalanan ini.

Status pernikahan.

Jika yang akan mengadopsi adalah laki•laki tunggal, maka tidak diperbolehkan untuk mengadopsi anak gadis, kecuali ada keadaan khusus untuk membenarkan adopsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 (3) dari ACA. Jika sudah menikah dan berniat untuk mengadopsi sendiri, maka harus memperoleh persetujuan dari pasangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 (5) dari ACA.[258]

c. Permohonan laporan studi

Jika seseorang atau pasangan suami isteri ingin mengadopsi anak asing atau anak dari MSF, maka pasangan tersebut diminta untuk mengajukan permohonan Laporan Studi Depan.

1) Pre•adopsi Briefing

Pihak yang ingin mengadopsi harus menghadiri wajib Pra•Adopsi Briefing (PAB) sebelum pasangan mengajukan permohonan untuk belajar di rumah atau memulai proses hukum adopsi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Pra•Adopsi Briefing

2) Dukungan dari negara asal

[258] *Ibid*, Pasal 4 ayat 5

Untuk warga non Singapura yang ingin mengadopsi Anak Asing harus mendapatkan dukungan dari negara asal seseorang yang akan mengadopsi melalui kedutaan harus mendukung dan mengakui adopsi yang akan dilakukan. Lalu mengirimkan surat berikut dukungan yang sudah dilengkapi dan disahkan oleh otoritas yang relevan dari negara asal sebelum memulai pengadopsian di Singapura.

3) Adopsi Pengesahan untuk Uni Eropa Nationals Singapura

Perintah adopsi dilakukan pada atau setelah 3 Januari 2014 tidak akan diakui secara otomatis di negara•negara:

a) Inggeris
b) Wales
c) Skotlandia
d) Irlandia Utara

Tidak akan dapat mengadopsi anak di Singapura. Untuk semua Warga lain dari Uni Eropa: Sebelum mengidentifikasi anak di Singapura dan mulai pada aplikasi adopsi, orang yang melakukan adopsi harus mengirimkan surat akhir dan disahkan dari negara.

d. Adopsi anak kedua dan selanjutnya

Sebelum mempertimbangkan mengadopsi anak lain, sangat dianjurkan untuk memastikan bahwa anak pertama yang akan diadopsi telah disesuaikan dan terikat dengan baik dengan keluarga dan lingkungan. Memperkenalkan anggota

baru kepada anggota keluarga pengadopsi terlalu cepat dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi anak yang diadopsi. Mungkin akan ada pertengkaran antar saudara.

Pengadopsi akan diminta untuk melakukan laporan studi rumah kedua pada keadaan saat ini. Laporan ini menilai seberapa siap pengadopsi untuk menjadi orang tua anak adopsi dan memperhitungkan kesejahteraan anak yang pertama kali diadopsi, ikatan orangtua•anak dan keadaan keluarga pengadopsi saat ini. mungkin harus menunggu setidaknya sembilan bulan dari tanggal pengadopsi mengadopsi anak tersebut (seperti yang ditunjukkan dalam Adopsi Order) sebelum pengadopsi dapat mendaftar untuk laporan kedua.

e. Cara mengadopsi anak di Singapura

ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengadopsi anak di Singapura, yaitu sebagai berikut:

1. Menghadiri Pra•Adopsi Briefing. Pra•Adopsi Briefing adalah wajib. pengadopsi harus menghadiri sebelum pengadopsi mengidentifikasi anak untuk diadopsi atau memulai proses adopsi.
2. Adopsi Endorsement untuk Uni Eropa Nationals Singapura. Perintah adopsi dilakukan pada atau setelah 3 Januari 2014 tidak akan diakui secara otomatis di negara•negara: a) Inggeris, b) Wales, c) Skotlandia dan d) Irlandia Utara. Untuk Nationals Inggris: Pengadopsi tidak akan dapat mengadopsi anak di Singapura. Untuk semua Warga lain dari Uni Eropa: Sebelum mengidentifikasi anak di Singapura dan mulai

pada aplikasi adopsi pengadopsi, pengadopsi harus mengirimkan surat akhir yang telah disahkan.

3. Mengidentifikasi anak untuk mengadopsi

   Pengadopsi dapat mengidentifikasi anak pengadopsi sendiri atau melalui MSF. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Bagaimana cara menemukan seorang anak untuk diadopsi.

4. Mendapatkan Persetujuan diaktakan dari orang tua anak

   Pengadopsi harus mendapatkan persetujuan diaktakan dari orang tua atau dari orang•orang berikut (jika orang tua tidak tersedia):

   a) wali anak;
   b) orang yang memiliki hak asuh sebenarnya anak;
   c) orang yang bertanggung jawab (yaitu memiliki kewajiban) untuk mendukung anak; atau
   d) orang tua atau wali dari orang tua kandung, jika orang tua biologis di bawah 21 tahun.

   Jika pengadopsi tidak dapat memperoleh persetujuan diaktakan dari orang•orang yang relevan di bawah (1) • (4) di atas, pengadopsi dapat memohon kepada Pengadilan untuk memiliki persetujuan mereka ditiadakan. Pengadilan dapat memutuskan untuk membuang persetujuan jika ada keadaan khusus yang membenarkan ini

5) Mendapatkan semua dokumen identifikasi anak

   pengadopsi harus mendapatkan dan memastikan bahwa semua dokumen berkaitan dengan identitas anak yang asli. Dokumen tersebut meliputi:

a) Sertifikat kelahiran anak

b) Paspor anak (jika anak adalah Resident Tetap)

6) Siapkan rincian diperinci dari biaya yang terlibat (jika ada) dalam memperoleh anak Bagian 11 dari Adopsi Anak Undang•Undang membatasi pembayaran atau imbalan lain dalam pertimbangan adopsi, kecuali dengan persetujuan dari Pengadilan.

Jika pengadopsi telah mengeeluarkan biaya selama transfer anak (misalnya apresiasi kepada orang tua, pembayaran kepada agen untuk jasa yang diberikan atau pihak lain), pengadilan keluarga mengharuskan pengadopsi untuk memberikan rincian jumlah, dengan bukti asli penerimaan. Keluarga Menerapkan untuk Adopsi ke Pengadilan.

7) Mengajukan permohonan ke Pengadilan Keluarga.

Jika pengadopsi telah menyelesaikan langkah 1 sampai 5, pengadopsi dapat melanjutkan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Keluarga. pengadopsi dapat melakukannya secara langsung atau melalui pengacara. Untuk informasi lebih lanjut seperti prosedur untuk mengirimkan aplikasi dan dokumen yang diperlukan, Sebuah Panduan Prosedural untuk Adopsi

8) Pengadilan menunjuk Wali•In•Adopsi untuk anak.

Pengadilan akan menginstruksikan pengadopsi atau pengacaranya untuk meminta persetujuan dari Direktur Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial dan Keluarga Pembangunan (MSF) untuk bertindak sebagai

Wali•In•Adopsi (GIA) untuk anak selama proses adopsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 (3) dari ACA.

GIA memiliki tugas menjaga kepentingan anak sedang dipertimbangkan untuk diadopsi. GIA melakukan penyelidikan sosial yang diperlukan dalam keadaan aplikasi adopsi dan menyerahkan surat pernyataan kepada Pengadilan Keluarga. Hal ini sesuai dengan Peraturan 7, Orde 68 dari Peraturan Pengadilan.

MSF akan meninjau permintaan Anda untuk Direktur Kesejahteraan Sosial menjadi GIA dan mengeluarkan izin jika diterima. Bila pengadopsi telah memperoleh persetujuan dari MSF, pengadopsi atau pengacaranya harus menyerahkannya ke Pengadilan Keluarga. Keluarga Pengadilan kemudian akan menunjuk Direktur Kesejahteraan Sosial sebagai GIA.

9) Menghadiri wawancara dengan MSF

GIA akan menunjuk Petugas Kesejahteraan Anak (Cwo) dari MSF untuk melakukan wawancara yang diperlukan mengenai keluarga dan status anak dan keadaan. pengadopsi perlu bekerja sama dengan Cwo ditunjuk dan memberikan informasi diminta.

Pengadopsi perlu untuk menghadiri semua wawancara di kantor MSF atau tempat lainnya yang diperlukan, dan juga memungkinkan Cwo untuk mengunjungi rumah pengadopsi. Setelah menyelesaikan investigasi, MSF akan mempersiapkan surat pernyataan (yang merupakan

penilaian terhadap aplikasi adopsi berdasarkan temuan dari penyelidikan sosial) ke Pengadilan Keluarga.

10) Terapkan untuk tanggal sidang

MSF akan mengirimkan surat pernyataan kepada pengadopsi atau pengacaranya ketika selesai dan memberitahu Family Court. Anda atau pengacara Anda akan mengirimkan affidavit ke Pengadilan Keluarga dalam waktu 2 minggu dan mengajukan permohonan tanggal sidang.

11) Mendengar Kasus

Pengadopsi atau pengacaranya harus hadir selama persidangan kasus ini. Pengadilan dapat memutuskan untuk memanggil pihak lain seperti Cwo dan orang tua alami anak untuk hadir selama persidangan.

12) Pendaftaran atau Return anak setelah sidang Pengadilan Keluarga.

Jika Pengadilan Keluarga hibah Adopsi Order, pengadilan keluarga akan menginformasikan pendaftran Kelahiran & Kematian, Imigrasi dan otoritas pemeriksaan (ICA) untuk penerbitan Akta Kelahiran baru bagi anak. pengadopsi atau pengacara pengadopsi akan menerima surat dari ICA untuk mengumpulkan Akta Kelahiran. Jika Pengadilan menolak aplikasi pengadopsi, maka harus kembali anak tsb untuk / keluarganya dengan biaya sendiri.

3. Negara Thailand

a. Persyaratan Pengangkatan Anak di Thailand

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi warga Negara Thailand yang ingin mengangkat anak adalah sebagai berikut:

1) Sertifikat Medis yang bertujuan untuk memverifikasi kesehatan fisik yang baik, stabilitas mental, dan ketidaksuburan (jika berlaku) untuk calon orangtua angkat;
2) Akte Kelahiran untuk orang tua (s), untuk keduanya jika sudah menikah;
3) Surat Surat nikah atau Bukti Pemutusan Perkawinan Sebelumnya atau akte kematian pasangan atau keputusan perceraian;
4) Bukti Pendudukan dan Penghasilan, dalam hal ini perlu adanya surat dari majikan;
5) Laporan Keuangan Lengkap yang dibuktikan dengan menunjukkan semua aset dan kewajiban;
6) Rekomendasi dari Dua Orang Bertanggung Jawab;
7) Lisensi Lancar dari Badan Adopsi Terlibat;
8) Foto-foto (baik jika menikah) Calon Adoptive Calon (s) - (4 masing-masing), 4,5 cm x 6 cm, dan anak-anak mereka (jika ada);
9) Pernyataan dari USCIS atau Petugas Konsuler yang mengkonfirmasi bahwa anak yang akan diadopsi akan menjadi penerima visa imigran.

Untuk warga AS yang tinggal di Thailand, unit visa Bagian Konsuler akan memberikan surat untuk efek ini. Untuk warga AS yang tidak tinggal di Thailand, bukti dari permohonan I-600A atau I-600 yang disetujui sudah cukup.)

b. Prosedur Pengangkatan Anak di Thailand

Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan bagi warga Negara Thailand yang ingin mengangkat anak, yaitu sebagai berikut:

1) Calon orang tua adopsi harus mendapatkan formulir aplikasi DSDW resmi (formulir ini dapat diperoleh dari DSDW atau dari salah satu LSM). Bentuk-bentuk ini memperoleh informasi biografi, kesehatan, dan keuangan tentang calon orang tua angkat.
2) Calon orang tua adopsi melibatkan agensi adopsi untuk melakukan studi di rumah (agensi ini juga harus diakui oleh DSDW - daftar agensi yang diakui tersedia dari DSDW).
3) Agen atau organisasi berlisensi mengumpulkan formulir aplikasi dan dokumen pendukung untuk diajukan ke DSDW. Aplikasi harus disertai dengan yang berikut:
    a) Belajar di rumah yang lengkap - Semua studi di rumah HARUS dilakukan atau didukung oleh salah satu lembaga yang disetujui oleh DSDW. Oleh karena itu, penelitian di rumah yang dilakukan oleh agen non-DSDW (mis. Studi di rumah yang dilakukan untuk prosedur I-600A) harus mendapatkan dukungan dari agen yang disetujui DSDW yang setuju untuk mengawasi penempatan pra-adopsi.
    b) Pernyataan Konfirmasi. Seorang agen adopsi yang mengawasi penempatan pra-adopsi harus mengkonfirmasi bahwa setelah adopsi diselesaikan berdasarkan hukum Thailand, itu juga akan dilegalisasi berdasarkan hukum negara tempat tinggal pemohon, sebagaimana berlaku.

c) Pernyataan Komitmen Formal. Jika calon orang tua adopsi tinggal di Thailand, pekerja sosial DSDW akan melakukan tiga kali kunjungan rumah setiap dua bulan dan mengawasi penempatan pra-adopsi anak. Jika dan ketika DSDW puas dengan penempatan pra-adopsi, DSDW melaporkan temuan mereka kepada Dewan Adopsi Anak (CAB) yang pada gilirannya akan menyetujui anak untuk adopsi. Jika calon orang tua adopsi tidak tinggal di Thailand, agen adopsi berlisensi A.S. harus secara formal berkomitmen untuk mengawasi penempatan pra-adopsi setidaknya enam bulan dan melakukan setidaknya tiga laporan kemajuan dua bulanan akan diberikan kepada DSDW.

4) Jika dokumentasi di atas dapat diterima, DSDW (atau salah satu dari empat LSM yang disebutkan sebelumnya dalam brosur ini) cocok dengan calon orang tua adopsi dengan seorang anak. Calon orang tua diberikan foto dan informasi tentang latar belakang dan kondisi kesehatan anak.

   (Catatan: DSDW berhak untuk meninjau dan menyelidiki kecocokan yang dilakukan oleh LSM.)

5) Calon orang tua adopsi harus memberi tahu DSDW apakah mereka ingin melanjutkan adopsi anak yang diusulkan. Aplikasi kemudian akan diberikan kepada Dewan Adopsi Anak (CAB) untuk ditinjau. Jika Dewan Adopsi Anak menyetujui kesesuaian calon orang tua adopsi untuk penempatan anak pra-adopsi, kasus tersebut dirujuk ke Menteri Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia untuk otorisasi resmi. (CATATAN: Langkah 4 dan 5 bersama sering kali membutuhkan enam bulan hingga satu tahun untuk menyelesaikannya.)

6) Ketika penempatan pra-adopsi disetujui, penunjukan yang pasti dilakukan oleh DSDW (atau salah satu LSM) untuk calon orang tua yang akan diwawancarai oleh Dewan Adopsi Anak. Pertemuan dengan Dewan pada dasarnya adalah formalitas. Jika menikah, kedua calon orangtua angkat harus menghadiri pertemuan ini. (CATATAN: Periode tunggu untuk penunjukan tersebut mungkin selama tiga bulan, tergantung pada jadwal CAB.)

7) DSDW akan mengeluarkan dokumen yang diperlukan untuk perjalanan anak, termasuk orang Thailand paspor. Dokumen-dokumen ini biasanya akan dikeluarkan pada hari yang sama dengan pertemuan dengan Dewan. Orang tua juga akan menerima anak pada hari yang sama. (Catatan: Kadang-kadang penerbitan dokumen lebih lama. DSDW menyarankan orang tua angkat untuk berencana tinggal di Thailand selama kurang lebih dua minggu.) Orang tua yang mengadopsi dari Thailand untuk kedua kalinya dapat meminta pekerja sosial DSDW mengantar anak ke Amerika Serikat bukannya muncul di hadapan Dewan Adopsi Anak sebagaimana diuraikan di bawah ini. Semua biaya perjalanan tersebut oleh pendamping adalah tanggung jawab orang tua angkat.

Pada titik ini, orang tua akan memenuhi syarat untuk mengajukan visa imigran AS yatim sesuai instruksi di bawah ini. Namun, adopsi Thailand tidak akan lengkap sampai langkah-langkah berikut terjadi:

a) Ketika calon orang tua adopsi telah kembali ke AS bersama anak tersebut dan setidaknya tiga laporan dua bulanan tentang penempatan pra-adopsi telah diserahkan ke DSDW, DSDW akan merujuk kasus tersebut ke Dewan

Adopsi Anak untuk persetujuan dari adopsi terakhir berdasarkan hukum Thailand.

b) Orang tua angkat harus mendaftarkan adopsi berdasarkan hukum Thailand dalam waktu enam bulan sejak pemberitahuan finalisasi oleh Dewan. Ini dapat dilakukan di Kedutaan Besar Thailand atau Konsulat di Amerika Serikat. (Harap dicatat bahwa pada titik ini, orang tua angkat harus membawa anak mereka ke kantor USCIS setempat untuk menyelesaikan visa dan prosedur kewarganegaraan untuk anak mereka).

B. Perbandingan Regulasi Pengangkatan Anak Negara Indonesia dan Negara Tetangga

Sub judul ini membahas mengenai pengaturan dan mekanisme pengangkatan anak di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Dengan semakin meningkatnya Praktik pengangkatan anak di Indonesia, maka dirasakan perlunya ada perbandingan dengan negara lain seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, agar menjadi bahan komparasi terciptanya pengaturan pengangkatan anak di Indonesia yang baik dan melindungi anak angkat itu sendiri.

Secara yuridis, regulasi yang mengatur mengenai pengangkatan anak di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sedangkan Singapura mengaturnya di dalam Adoption of Children Act dan Malaysia memiliki dua macam pengaturan yaitu Adoption Act dan Registration of Adoption Act.

Perbedaan pengaturan pengangkatan anak diantara empat negara, maka dapat dilihat perbedaan dan persamaannya.

1. Perbandingan Pengangkatan Anak Negara Indonesia dan Malaysia

a. Persamaan

Persamaan adopsi antara negara Indonesia dan Malaysia adalah terletak pada salah satu syaratnya, anak yang dapat di adopsi di Indonesia sama dengan di Malaysia, bahwa seorang anak yang beragama muslim hanya dapat di adopsi dengan orang tua angkat yang beragama muslim, demikian juga anak yang beragama non muslim hanya dapat di adopsi oleh orang tua angkat yang beragama non muslim juga. Sedangkan Calon Orang Tua Angkat Asing yang ingin mengadopsi anak dari dalam negeri mempunyai kedudukan yang paling akhir,

b. Perbedaan

1) Pada aturan hukum

a) Aturan Pengangkatan Anak/Adopsi Negara Indonesia :

Adapun aturan pengangkatan anak/adopsi di negara Indonesia adalah sebagai berikut:

(1) Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur adopsi Warga Negara Tionghoa di Indonesia;

(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

(3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

(4) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

(7) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

(8) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No.2 Tahun 1979 yang mengatur tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak;

(9) Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor U-335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982, tentang Anak Angkat.

b) Aturan Adopsi pada Negara Malaysia hanya di atur dalam UU Adopsi 1952

2) Di Indonesia, seseorang yang belum menikah di perbolehkan untuk melakukan adopsi anak sedang kan di Malaysia tidak diperbolehkan.

3) Lembaga yang menampung anak di Indonesia adalah Lembaga pengangkatan anak yang ditunjuk langsung oleh pemerintah yaitu

Yayasan Sayap Ibu (Jakarta) dan Yayasan Matahari Terbit (Surabaya) , sedangkan di Malaysia lembaga yang ditunjuk oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat.

4) Di Indonesia surat bukti pengangkatan anak namanya adalah Surat Penetapan/Pengangkatan Anak, sedangkan di Malaysia surat bukti yang di dapat adalah sertifikat adopsi.

5) Dalam hal pendaftaran:

a) Di Indonesia dapat melakukan pendaftaran di Pengadilan Negeri

b) Di Malaysia pendaftaran dapat di lakukan dengan 2 cara antara lain melalui Pengadilan Adopsi dan melalui Departemen Adopsi

2. Perbandingan Pengangkatan Anak Negara Indonesia dan Singapura

a. Persamaan

1) Tujuan pengangkatan anak negara Indonesia adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dan untuk mewujudkan kesejahteraan serta perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan (Permensos No.110/HUK/2009). Sedangkan tujuan pengangkatan anak di negara Singapura juga semata•mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak sebagaimana dicantum pada pasal 5 huruf b "Act".

2) Proses pengangkatan anak di negara Indonesia melibatkan Depatemen Sosial sedangkan di Negara Singapura juga melibatkan Departemen Sosialnya (*Department of Social Welfare*) untuk

kepentingan anak terutama sebagai Guardian in Adoption (GIA). Sesuai dengan pasal 10 huruf 3 “Act”.

3) Pengangkatan anak di negara Indonesia harus berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, demikian juga di negara Singapura.

b. Perbedaan

1) Proses pengangkatan anak di negara Indonesia masih dengan sistem manual. Sedangkan proses pengangkatan anak di Singapura telah difasilitasi dengan electronic filling system (menggunakan jaringan internet) dengan menggunakan form•form baku. Permohonan pengangkatan anak beserta lampiran• lampirannya diajukan melalui electronic filling ke Pengadilan.
2) Adopsi di negara Indonesia tidak dikenakan biaya oleh negara sedangkan adopsi di negara Singapura dikenakan biaya. Jika pengadopsi telah mengeluarkan biaya dengan transfer anak (misalnya apresiasi kepada orang tua, pembayaran kepada agen untuk jasa yang diberikan atau pihak lain), pengadilan keluarga mengharuskan pengadopsi untuk memberikan rincian jumlah, dengan bukti asli penerimaan. Keluarga Menerapkan untuk Adopsi ke Pengadilan.

b. Perbandingan Pengangkatan Anak Negara Indonesia dan Thailand

a. Persamaan

1) Negara Indonesia dan Thailand sama-sama mensyaratkan bahwa salah satu syarat dalam pengangkatan anak adalah harus ada bukti penghasilan dari kantor tempat ia bekerja atau dari majikan.
2) Persamaan ke 2 adalah negara Indonesia harus ada laporan dari pekerja sosial setelah ia melakukan home visit kepada calon orang tua angkat pada negara Thailand juga harus ada Pernyataan Komitmen Formal. Jika calon orang tua adopsi tinggal di Thailand, pekerja sosial DSDW akan melakukan tiga kali kunjungan rumah setiap dua bulan dan mengawasi penempatan pra-adopsi anak. Jika DSDW puas dengan penempatan pra-adopsi, DSDW melaporkan temuan mereka kepada Dewan Adopsi Anak (CAB) yang pada gilirannya akan menyetujui anak untuk adopsi.

b. perbedaan

1) Pada negara Indonesia tidak dicari Sertifikat Medis yang bertujuan untuk memverifikasi kesehatan fisik yang baik, stabilitas mental, dan ketidaksuburan calon orang tua angkat, sedngkan di Thailand dicari;
2) Pada negara Indonesia banyak regulasi yang mengatur anak angkat, pada negara Thailand tidak banyak regulasi yang mengatur anak angkat, tapi karena warga negara Thailand taat dengan aturan hukum sehingga persamasalahan anak angkat jarang terjadi.

5. Regulasi yang perlu diadopsi dari Negara Tetangga

Ada beberapa kelebihan regulasi anak angkat yang ada pada negara tetangga dan perlu diadopsi oleh negara Indonesia, yaitu:

a) Tidak perlu terlalu banyak regulasi pengangkatan anak seperti negara Malaysia tapi masyarakatnya sangat taat pada aturan hukum sehingga permasalahan pengangkatan anak hampir tidak pernah terjadi disana.

b) Perlu mencontoh proses pengangkatan anak seperti di negara Singapura yang telah difasilitasi dengan electronic filling system (menggunakan jaringan internet) dengan menggunakan form•form baku. Permohonan pengangkatan anak beserta lampiran•lampirannya diajukan melalui electronic filling ke Pengadilan.

C. Beberapa Putusan Pengadilan Berkaitan dengan Permohonan Pengangkatan Anak

Sebelum tahun 2006 pengajuan permohonan pengangkatan anak masih bersifat belum jelas. Pada Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), memungkinkan pengajuan permohonan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri baik pemohon tersebut beragama non muslim maupun beragama Islam, namun ada juga yang mengajukan permohonan pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama tanpa melihat apa agama pemohon tersebut.

Setelah berlaku Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, mulai saat itu permohonan pengangkatan anak sudah diatur yaitu bagi yang beragama Islam dapat mengajukan ke Pengadilan Agama, dan yang beragama non muslim dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri.

Berikut ini penulis akan menyajikan beberapa penetapan dari pengadilan tentang permohonan pengangkatan anak, yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Nomor 274/Pdt.P/2019/PA.Pdn

a. Pemohon

Pemohon I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

b. Duduk Perkara

Adapun yang menjadi duduk perkara dalam permohonan ini adalah: Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 274/Pdt.P/2019/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 1981 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/1982 tanggal 02 Maret 1982, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga;
2) Bahwa, pada tanggal 20 Juli 2012 ke dua orang tua yang bernama: AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG menyerahkan anak kandungnya yang bernama ANAK YANG DIMOHON ADOPSI kepada Pemohon I dan Pemohon II;
3) Bahwa, sejak para Pemohon menikah, para Pemohon dikarunia anak 5 (lima) orang yang bernama ANAK I PARA PEMOHON, ANAK II PARA PEMOHON, ANAK III PARA PEMOHON, ANAK IV PARA PEMOHON, ANAK V PARA PEMOHON, oleh karena itu pada tahun 2012 para Pemohon telah mengangkat seorang anak bernama ANAK I PARA PEMOHON, yang saat ini telah berusia 1 minggu, anak kandung dari sepasang suami isteri yang bernama AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG, yang dilakukan secara hukum adat, sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 25 Agustus 2019 yang ditanda tangani para Pihak dan diketahui oleh Kepala Kelurahan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah bernama LURAH serta disaksikan oleh para saksi yang bernama SAKSI I PENGANGKATAN ANAK dan SAKSI II PENGANGKATAN ANAK;

4) Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak tersebut, sedangkan para Pemohon mampu serta sanggup memenuhi kehidupan maupun kebutuhan anak yang diangkatnya, sesuai dengan Surat Keterangan Mampu Nomor: 474/384/2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;
5) Bahwa, ibu kandung dari anak tersebut adalah adik kandung dari Pemohon II;
6) Bahwa, selama anak tersebut dalam pemeliharaan para Pemohon, anak tersebut telah mendapatkan kasih sayang dari para Pemohon seperti anak kandung para Pemohon Sendiri:
7) Bahwa, para Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan kepada ANAK YANG DIMOHON ADOPSI hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri;
8) Bahwa, para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya;
9) Bahwa, Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Agama Pandan sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum.

c. Petitum

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap seorang anak yang bernama ANAK YANG DIMOHON ADOPSI lahir pada tanggal 14 Juli 2012 di Medan, jenis kelamin Laki-laki, anak dari AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon.

d. Bukti-Bukti Dalam Persidangan

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/1982 tanggal 2 Maret 1982, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor: 1201142509070019, tanggal 9 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.2;

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/15/10/1999 tanggal 1 April 1999, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama AYAH KANDUNG, Nomor: 1201031510080004, tanggal 8 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan Anak dari Pihak Pertama AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG (orang tua kandung ANAK YANG DIMOHON ADOPSI) dengan Pihak ke dua PEMOHON I dan PEMOHON II (orang tua angkat ANAK YANG DIMOHON ADOPSI), Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6) Fotocopi Surat Pernyataan dari Anak-anak Para Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dapot Parsaulian, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8) Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama PEMOHON I nomor : SKCK/4286/X/YAN.2.3/2019/INTELKAM TT, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9) Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama PEMOHON II nomor: SKCK/4287/X/YAN.2.3/2019/INTELKAM TT, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10) Fotokopi Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor: 463.3/844/Dinsos/2019 tanggal 6 September 2019,Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11) Fotokopi Buku Tabungan Bank SUMUT, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12) Fotokopi bukti Penghasilan atas nama Pemohon II, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.

e. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, pokok perkara ini adalah tentang pengangkatan anak, karenanya dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 20 Penjelasan Umum Undang- undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini merupakan kewenangan peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim telah memberikan penjelasan, saran dan nasehat kepada para Pemohon tentang hak dan kewajiban para Pemohon dalam hal pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak bernama ANAK YANG DIMOHON ADOPSI bin AYAH KANDUNG dengan alasan sejak lahir anak tersebut dalam perawatan para Pemohon dan tujuan para Pemohon adalah untuk memberikan penghidupan, pendidikan serta masa depan yang baik bagi anak tersebut dan orang tua anak tersebut telah rela dan setuju tentang pengangkatan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung anak yang diangkat (AYAH KANDUNG) yang pada pokoknya bahwa orang tua kandung anak tersebut rela dengan pengangkatan anak tersebut karena para Pemohon adalah beragama Islam yang baik dimasyarakat dan mampu

memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan tidak ada paksaan atau halangan selama dalam pengasuhan para pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi dimuka sidang, yang akan dipertimbangkan majelis hakim sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI; Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio), secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon dikaitkan keterangan saksi-saksi, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat diterima, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah menunjukkan domisili yang jelas para Pemohon, dimana Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG dan Kartu Keluarga atas nama AYAH KANDUNG secara formil dan materiil telah terpenuhi, serta bukti P.7 berupa akta keterangan kelahiran atas nama Dapot Parsaulian bin AYAH KANDUNG yang sekarang bernama ANAK YANG DIMOHON ADOPSI, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat dan secara materiil terbukti bahwa ANAK YANG DIMOHON ADOPSI Binti AYAH KANDUNG, adalah seorang anak laki-laki yang lahir pada 14 Juli 2012 dari pasangan AYAH KANDUNG dengan IBU KANDUNG.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan Anak dari Pihak Pertama AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG (orang tua kandung ANAK YANG DIMOHON ADOPSI) dengan Pihak ke dua PEMOHON I dan PEMOHON II (orang tua angkat ANAK YANG DIMOHON ADOPSI), yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12, berupa Fotokopi bukti Penghasilan atas nama Pemohon II, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan penghasilan Pemohon II yang bisa memberikan penghidupan yang layak kepada anak angkat para Pemohon, maka majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin kebutuhan anak yang akan diangkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan, yang secara formil telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan dan secara materiil, keterangan saksi tersebut saling berkaitan dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon, sehingga majelis berpendapat keterangan saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 39 ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dan terbukti sesuai fakta antara para Pemohon dengan orang tua kandung serta anak tersebut sama beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan kesediaan orang tua kandung menyerahkan anak kandungnya untuk dijadikan anak angkat oleh para Pemohon dengan alasan bahwa para pemohon dianggap mampu untuk merawat dan membina serta mendidik anak tersebut, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa para Pemohon mempunyai identitas yang jelas, sehingga hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak tersebut tidak akan terputus, hal mana sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa para pemohon dan calon anak angkatnya memeluk agama yang sama yaitu Islam, maka permohonan para pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi :[259]

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Artinya: "Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka hawatir terhadap (kesejehateraan) mereka; oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dipandang telah

[259] Q.S. An Nisa Ayat 9

mempunyai cukup alasan dan mengambil kesimpulan karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah pengangkatan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama ANAK YANG DIMOHON ADOPSI Bin AYAH KANDUNG, laki-laki, lahir 14 Juli 2012.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

f. Penetapan Hakim

Adapun Penetapan Hakim atas permohonan pengangkatan anak ini adalah sebagai berikut:

2) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
3) Menetapkan sah pengangkatan anak oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap seorang anak bernama ANAK YANG DIMOHON ADOPSI Binti AYAH KANDUNG , lahir 14 Juli 2012;
4) Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Zulpan, S.Ag, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para pemohon.

2. Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0067/Pdt.P/2017/PA.Kds

a. Pemohon

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus sebagai Pemohon I. Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Djarum, Pendidikan Sekolah Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus sebagai Pemohon II.

b. Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, Nomor: 0067/Pdt.P/2017/PA.Kds, telah mengajukan permohonan untuk melakukan permohonan Pengangkatan Anak dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 Nopember 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo

Kabupaten Kudus, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/14/XI/1996 tanggal 19 Nopember 1996 ;

2) Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum bernah bercerai;
3) Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum mempunyai keturunan;
4) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat mengangkat seorang anakperempuan bernama : Aprilia Putri Salsabila tempat tanggal lahir Semarang, 20 April 2016;
5) Bahwa anak tersebut pada awalnya ditemukan oleh Siti Rumini pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 bertempat di gang depan Swalayan ADA Setiabudi Banyumanik Semarang, kemudian bayi tersebut dibawa kerumah saudara sepupu Pemohon Kecamatan Banyumanik Kota Semarang kemudian bayi tersebut diserahkan ke Polsek Banyumanik kemudian sepupu Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sari tersebut memberi kabar kepada Pemohon bahwa telah ditemukan bayi perempuan untuk kiranya Pemohon I dan Pemohon II bersedia mengasuh anak tersebut karena selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
6) Bahwa pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II berinisiatif untuk mengasuh anak tersebut, kemudian Pemohon I dan Pemohon II datang menemui sepupu Pemohon tersebut di Polsek Banyumanik dan atas izin

dari Polsek Banyumanik Pemohon diperbolehkan untuk mengasuh anak tersebut;

7) Bahwa secara defacto pihak dari Polsek Banyumanik telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 27 September 2016 untuk dididik dan dirawat hingga anak tersebut dewasa seperti halnya orang tua merawat anak kandungnya;
8) Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak didasarkan pada penjelasan pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka permohonan Penetapan anak angkat harus dikabulkan;
9) Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10) Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

c. Petitum

Adapun yang menjadi petitum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kudus untuk memberikan penetapan sebagai berikut ;

1). Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2). Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak bernama : Aprilia Putri Salsabila;

3). Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

d. Bukti-Bukti Dalam Persidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat bukti berupa:

1) Foto kopi Surat dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus Nomor : 460/1696/05.02.2016 tentang pemberian izin Pengasuhan Anak Warga Negara Indonesia, (Bukti P.1);
2) Foto kopi Surat Laporan Sosial calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI) untuk izin Pengasuhan anak, dari Ketua PSAA "Assaidiyah" Kabupaten Kudus, (Bukti P.2);
3) Foto copi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ghiyats Nawwaf Su‟aada tertanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, (Bukti P. 3);
4) Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/106/VII/1999 tertanggal 30 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grbog, Kabupaten Kudus, (Bukti P.4);
5) Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Munandar Setyo samudro (Pemohon I), dengan NIK : 3319082610740002 tertanggal 28-06-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus, (Bukti P.5);

6) Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endah Setyawati (Pemohon II), dengan NIK : 3319085702740004 tertanggal 28-06-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus, (Bukti P.6);
7) Foto copi Kartu Keluarga Pemohon No. 3319021903130008 tertanggal 28 - 06-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Capilduk Kabupaten Kudus, (Bukti P.7);
8) Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman Prasetya, dengan NIK : 3319082602780006, tertanggal 04-09-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus, (Bukti P.8);

Surat-surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

e. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonannya pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dapat diberikan penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama Aprilia Putri Salsabila yang ditemukan oleh **Siti Rumini** pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 bertempat di gang depan Swalayan ADA Setiabudi Banyumanik Semarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P8, P9, P10, P11, P12 dan P.13 serta 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P8, P9, P10, P11, P12 dan P.13 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.10, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 30 Juli 1999 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Kudus.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P2, P3 dan P.4 maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, sehingga perkara ini adalah kewenangan rela tif Pengadilan Agama Kudus.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.13, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus, Nomor : 460/1696/05.02.2016 tentang pemberian izin Pengasuhan Anak Warga Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 dan P6, berupa Berita Acara Penyerahan Anak dan Permohonan Legalitas dari POLSEK Banyumanik Semarang, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II layak untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 berupa Foto kopi Akte Kelahiran atas nama Aprilia Putri Salsabila maka ternyata anak tersebut adalah anak ditemukan oleh Siti Rumini pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 bertempat di gang depan Swalayan ADA Setiabudi Banyumanik Semarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.11 dan P12, berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama Pemohon I dan Pe mohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah sehat dan layak untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perkara permohonan Pengangkatan Anak tersebut berdasarkan Hukum Islam yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam perawatan pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan Agama incassu Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat maupun alat bukti saksi-saksi serta keterangan pihak-pihak yang bersangkutan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah 11 tahun berumah tangga namun belum dikaruniai keturunan.

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup merawat anak adopsi sebagaimana anaknya sendiri ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai rasa sayang kepada anak adopsi, karena sudah 6 bulan ini mereka telah merawat dan membesarkan anak adopsi tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa, anak yang diadopsi pada awalnya ditemukan oleh Siti Rumini pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 bertempat di gang depan Swalayan ADA Setiabudi Banyumanik Semarang kemudian dirawat para Pemohon selama 6 bulan ini dan saat ini dimohonkan adopsi ke Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut sebagai berikut :

- Bahwa, Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak (Tabani) dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan batin, dunia dan akherat;
- Bahwa, dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran Agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan hukum/nashab dengan orang tua asalnya, sehingga kalau anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya tetap orang tua asalnya;
- Bahwa, antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah, sehingga terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua, wali, atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya;
- Bahwa, terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya‟ban 1402 H. atau tanggal 10 Juni 1982 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum tersebut maka permohonan pengangkatan anak telah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh peraturan perudang-undangan yang berlaku, telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang beragama Islam, telah menikah secara Islam pada tanggal 19 Nopember 1996 atau sudah 20 (dua puluh) tahun lebih, namun belum dikaruniai anak, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut maka permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud dan unsur-unsur pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya pada butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yanag merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 serta Fatwa Majelis Ulama Indoensia Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya‟ban 1402 H. atau tanggal 10 Juni 1982 M.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan semua pihak, maka permohonan Pemohon I dan

Pemohon II yang bermohon agar perbuatan hukumnya dalam pengangkatan anak yang bernama **Aprilia Putri Salsabila** dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 beserta penjelasannya, Panitera Pengadilan Agama Kudus diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Panitera Mahkamah Agung, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang –undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

f. Penetapan Hakim

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak bernama: Aprilia Putri Salsabila;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Panitera Mahkamah Agung, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1438 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus yang terdiri dari Drs. H. Tashin sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. serta Sulomo, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Tazkiyaturrobihah, S.Ag., M.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

3. Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 889/Pdt.P/2012/PN-Sbg

a. Pemohon

HJ. NAJIPAH PASARIBU : Umur 59 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jl. Batu Harimo Desa Sibuluan Indah Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah, disebut sebagai PEMOHON.

b. Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 29 Oktober 2012 dibawah Register Nomor: 889/Pdt.P/2012/PN-Sbg, yang pada pokoknya sebagai :

1) Bahwa Pemohon lahir di Barus pada tanggal 22 April 1953 dan telah berusia 59 tahun, sampai saat ini belum berumah tangga / belum menikah, dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada salah satu Instansi Pemerintahan di Sibolga;
2) Bahwa oleh karena Pemohon telah berusia 59 tahun, yang tidak ada lagi keinginan untuk berkeluarga ataupun menikah, karena walaupun menikah tidak ada lagi harapan untuk memiliki keturunan disebabkan faktor usia (lansia);
3) Bahwa mengingat kondisi kesehatan Pemohon yang sering mengalami sakit-sakitan disebabkan faktor usia yang sudah tua, yang hidup sendirian, sehingga tidak ada yang mengurus diri Pemohon, sehingga oleh karena hal tersebut Pemohon mengasuh 1 (satu) orang anak dari SUYANTO dan isterinya YUSNIDAR PINAYUNGAN, sejak lahir sampai sekarang anak tersebut sudah sekolah kelas 2 dua) SD;
4) Bahwa nama anak tersebut diberi nama DESI WINDA SARI, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 17 Desember 2003 di Sibolga, yang sejak lahir telah diasuh oleh Pemohon sehingga sudah seperti anak kandung Pemohon sendiri yang melekat dihati, oleh karena itu orang tua kandungnya yang bernama SUYANTO dan ibunya YUSNIDAR PINAYUNGAN, menyerahkannya kepada Pemohon untuk diasuh sebagai anaknya kandung;

5) Bahwa orang tua kandung si anak tersebut yang penghasilan yang sangat minim dan tidak mampu untuk membiayai kehidupan sehari-harinya maupun sekolah anak tersebut dikemudian hari;

6) Bahwa atas penyerahan anak tersebut kepada Pemohon untuk secara resminya dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2012 dihadapan saksi-saksi yang terdiri dari Pemerintah Setempat dan tokoh agama, dan anak tersebut bernama DESI WINDA SARI, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 17 Desember 2003 di Sibolga, akan diasuh dan dibesarkan sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;

7) Bahwa Pemohon bekerja pada salah satu Instansi Pemerintahan di Sibolga sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap sehingga dengan rasa senang hati dan berkeyakinan mampu mengasuh, merawat serta memberikan kebutuhan moril maupun materiel dan menyekolahkan anak tersebut demi masa depannya;

8) Bahwa setelah adanya penyerahan tersebut pemohon-pemohon mengurus rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan maksud supaya ada kepastian secara hukum untuk pemeliharaan anak tersebut demi masa depannya, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2012, No. 474.11/1250/2012;

c. Petitum

Adapun yang menjadi petitum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Pengangkatan anak (Adopsi) yang dilakukan oleh Pemohon tersebut diatas terhadap anak yang bernama DESI WINDA SARI, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 17 Desember 2003 di Sibolga anak dari SUYANTO dan YUSNIDAR PINAYUNGAN, tempat tinggal di Jl. Batu Harimo Desa Sibuluan Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah ;
3. Menyatakan bahwa segala hak keperdataan dari Pemohon melekat kepada anak tersebut semenjak keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

d. Bukti-Bukti Dalam Persidangan

Adapun yang dijadikan bukti-bukti dipersidangan adalah sebagai berikut:

1 Photocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Hj. Najipah Pasaribu, No. 1201036204530002, tertanggal 04 Juli 2011, diberi tanda P-1;

2. Photocopy Kartu Keluarga No. 1201032301080008, tertanggal 25 Maret 2011, diberi tanda P-2;
3. Photocopy Surat Keterangan No. 592/KL-SBI/2012, tertanggal 15 Oktober 2012, diberi Tanda P-3;
4. Photocopy Rekomendasi Adopsi Anak, No. 474.11/1250/2012, tertanggal 19 Oktober 2012, diberi tanda P-4;
5. Photocopy Surat Pernyataan Penyerahan, tertanggal 10 Oktober 2012, diberi tanda P-5;

6. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 1201CLT0203201017884, tertanggal 02 Maret 2010, diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat Pemohon juga untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

SAKSI I. JAM‟ANNUR PASARIBU : Umur 49 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jl. Kol. Bangun Siregar Lingk. III Desa Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa benar saksi mengenal Pemohon dengan baik karena dahulu Pemohon dan saksi bertetangga, akan tetapi diantara saksi dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
2. bahwa benar saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk Pengangkatan anak (Adopsi) yang bernama DESI WINDA SARI, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 17 Desember 2003 di Sibolga anak dari SUYANTO dan isterinya YUSNIDAR PINAYUNGAN, dihadapan saksi-saksi yang terdiri dari Pemerintah setempat dan tokoh agama;

SAKSI II. SYAFRIDA PASARIBU : Umur 62 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan, , Tempat tinggal di Jl. Batu Harimo Desa Sibuluan Indah Kec. Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. bahwa benar saksi mengenal Pemohon dengan baik karena dahulu Pemohon dan saksi bertetangga, akan tetapi diantara saksi dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga ;
2. bahwa benar saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk Pengangkatan anak (Adopsi) yang bernama DESI WINDA SARI, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 17 Desember 2003 di Sibolga anak dari SUYANTO dan isterinya YUSNIDAR PINAYUNGAN, dihadapan saksi-saksi yang terdiri dari Pemerintah setempat dan tokoh agama;
3. bahwa benar saksi mengetahui kehidupan kedua orang tua kandung anak tersebut tidak mampu dan tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan dimana ekonomi yang sangat minim sekali sehingga tidak mampu membiayai kehidupan anak tersebut sampai dewasa, dan saksi mengetahui Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga saksi yakin bahwa Pemohon mampu dan mapan untuk membelanjai dan menyekolahkan anak tersebut sampai dewasa.

SAKSI III. YUSNIDAR PINAYUNGAN : Umur 42 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. Perjuangan Lorong XI Pasir Bidang Kota Sibolga, memberikan kesaksian sebagai berikut:

1. bahwa benar saksi mengenal Pemohon dengan baik karena dahulu Pemohon dan saksi bertetangga, akan tetapi diantara saksi dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga;

2. bahwa benar saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk Pengangkatan anak (Adopsi) yang bernama DESI WINDA SARI, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 17 Desember 2003 di Sibolga anak dari SUYANTO dan isterinya YUSNIDAR PINAYUNGAN, dihadapan saksi-saksi yang terdiri dari Pemerintah setempat dan tokoh agama;
3. bahwa benar saksi mengetahui kehidupan kedua orang tua kandung anak tersebut tidak mampu dan tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan dimana ekonomi yang sangat minim sekali sehingga tidak mampu membiayai kehidupan anak tersebut sampai dewasa, dan saksi mengetahui Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga saksi yakin bahwa Pemohon mampu dan mapan untuk membelanjai dan menyekolahkan anak tersebut sampai dewasa.

e. Pertimbangan Hukum

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum dalam penetapan hakim atas permohonan pengangkatan anak ini, adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan saksi-saksi, bahwa anak tersebut yang pada pokoknya lebih terjamin diangkat (adopsi) oleh Pemohon dibandingkan diasuh oleh orang tua kandung anak tersebut, disebabkan ekonomi kurang mampu dan juga telah ikhlas melepaskan anaknya untuk diangkat (adopsi) oleh Pemohon;
2. Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta saksi-saksi dan juga surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-1, P-2, P-3, P-4,

P-5 dan P- 6 telah diperoleh fakta-fakta hukum yang saling berkaitan satu sama lain dan telah pula mendukung kebenaran Permohonan Pemohon tersebut;

3. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut anak yang diangkat oleh Pemohon tersebut akan lebih baik dan terjamin masa depannya bila berada dibawah pengasuhan Pemohon, oleh karena Pemohon mempunyai pekerjaan/penghasilan yang menetap bila dibandingkan dengan orang tua kandung anak tersebut;
4. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon-pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon-pemohon;
5. Memperhatikan UU No.23 Tahun 2006 Pasal 47 ayat (1,2,3) dan Undang-undang serta Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan itu.

f. Penetapan Hakim

Adapun yang menjadi penetapan hukum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Pengangkatan anak (Adopsi) yang dilakukan oleh Pemohon tersebut diatas terhadap anak yang bernama DESI WINDA SARI, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 17 Desember 2003 di Sibolga anak dari SUYANTO dan YUSNIDAR PINAYUNGAN, tempat tinggal di Jl. Batu Harimo Desa Sibuluan Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah ;

3. Menyatakan bahwa segala hak keperdataan dari Pemohon melekat kepada anak tersebut semenjak keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

D. Rekonstruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak UU No.35 Tahun2014, Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Penambahan Norma Hukum Baru pasal 89A

Berdasarkan fakta seperti diuraikan pada bab sebelumnya bahwa peraturan perundang-undangan pengangkatan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk pengangkatan anak diatur dalam pasal 39 s.d pasal 41.

Pada undang-undang ini sudah ada mencantumkan ketentuan tentang sanksi yaitu dari pasal 77 s.d 89 namun belum lengkap karena belum ada sanksi terhadap pelanggaran pasal 39 s.d 41 sehingga peluang untuk terjadi pelanggaran masih bisa terjadi. Misalnya dapat dilihat pada pasal 39 ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut:

> "Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak".

Pelanggaran terhadap pasal di atas ini tidak ada sanksinya, sehingga tidak sedikit anak angkat yang dirubah identitasnya, seperti pada akta kelahiran anak angkat dicantumkan nama orang tua yang mengangkatnya. Untuk mengatasi masalah ini penulis memberikan pendapat bahwa undang-undang ini perlu di rekonstruksi

yaitu dengan cara menambah norma hukum baru yaitu pasal tentang sanksi. Adapun pasal yang penulis usulkan adalah pasal 89 A, yaitu

Pasal 89A

(4) Setiap orang yang dengan sengaja tidak mencatatkan dalam akta kelahiran atas anak angkatnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2a) dapat dikenakan sanksi perdata berupa kewajiban mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
(5) Setiap orang yang dengan sengaja merubah identitas awal anak angkatnya pada akta kelahiran sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2a) dapat dikenakan sanksi perdata berupa kewajiban bagi orang tua angkat untuk memperbaiki identitas awal anak angkatnya sebagaimana mestinya;
(6) Setiap orang yang dikenakan sanksi perdata karena telah melanggar pasal 89A ayat (1) dan atau ayat (2) sebagaimana telah disebutkan di atas, jika dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung dari putusan pengadilan dia tidak melaksanakannya maka dapat dikenakan hukuman kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan kewajiban tetap melaksanakan sanksi perdata yaitu mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran serta tidak merubah identitas anak angkat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6

Rekonstruksi Berupa Penambahan Norma Hukum Baru pasal 89 A ayat (1), (2) dan (3) Pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

NO	Aturan Lama	Kelemahan	Rekonstruksi
1	UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat (2a) berbunyi: "Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak	Pasal 39 ayat (2a) ini tidak ada sanksi akibanya sering dilanggar oleh orang tua angkat	Penambahan Norma Hukum Baru Pasal 89A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yaitu: (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak mencatatkan dalam akta kelahiran atas anak angkatnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2a) dapat dikenakan sanksi perdata berupa kewajiban mencatatkan anak

	menghilangkan identitas awal Anak”		angkatnya pada akta kelahiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (2) Setiap orang yang dengan sengaja merubah identitas awal anak angkatnya pada akta kelahiran sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2a) dapat dikenakan sanksi perdata berupa kewajiban bagi orang tua angkat untuk memperbaiki identitas awal anak angkatnya sebagaimana mestinya; (3) Setiap orang yang dikenakan sanksi perdata karena telah melanggar pasal 89A ayat (1) dan atau ayat (2) sebagaimana telah disebutkan di atas, jika dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung dari putusan pengadilan dia tidak melaksanakannya maka dapat dikenakan hukuman kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan kewajiban tetap melaksanakan sanksi perdata yaitu mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran serta tidak merubah identitas anak angkat.

Dasar pemikiran penambahan dari norma hukum baru ini berupa pasal 89A ayat (1), (2) dan (3) ini adalah sebagai berikut:

1) Pada pasal 89A ayat (1) ini adalah mengatur tentang sanksi bagi orang tua angkat yang tidak mencatatkan anak angkatnya pada Akta Kelahiran. Adapun dasar pemikiran Pasal 89A ayat (1) adalah supaya orang tua angkat tidak ada lagi yang tidak mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran. Karena dengan adanya catatan pinggiran ini anak angkat akan mengetahui bahwa dia adalah anak angkat ketika dia melihat akta kelahirannya.

Pada pasal ini ditentukan bahwa sanksi bagi orang tua angkat yang tidak mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran anak angkatnya maka sanksinya hukuman perdata berupa kewajiban mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran yang disebut catatan pinggir.

2) Pasal 89A ayat (2) adalah mengatur tentang sanksi bagi orang tua angkat yang merubah data identitas awal anak, sanksi adalah berupa hukuman administrasi yaitu berupa kewajiban bagi orang tua angkat untuk memperbaiki identitas awal anak. Biasanya orang tua angkat yang merubah identitas awal anak angkat ini adalah orang tua angkat mencantumkan namanya pada akta kelahiran anak angkatnya. Semestinya yang dicantumkan pada akta kelahiran anak angkat adalah nama orang tua kandung anak angkat itu sendiri.

Dengan adanya ketentuan sanksi ini diharapkan tidak ada lagi orang tua angkat yang merubah identitas anak angkatnya.

3) Pasal 89A ayat (3) adalah mengatur tentang sanksi jika orang tua angkat melanggar ketentuan pasal 89A ayat (1) atau (2) sehinnga dikenakan sanksi perdata, namu jika sampai satu tahun yang bersangkutan tidak melaksanakannya maka orang tua akan akan dikenakan hukuman kurungan paling lama 1 bulan

dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dasar pemikiran dari pasal ini adalah agar orang tua angkat yang tidak melakukan pengangkatan anak benar-benar memenuhi administrasi yang telah ditetapkan. Dengan adanya ketentuan ini anak angkat benar-benar terjamin haknya yang berdampak pada kesejahteraan baginya.


CATATAN PINGGIR

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 126/Pdt.P/2012/PN.Pml tanggal 20 Juni 2012 bahwa anak laki-laki bernama MUHAMMAD IHSAN nomor Akta Kelahiran 09/5318/RT/2012 anak kandung dari Suami bernama SUHARTO dan PONIYAH telah ditetapkan sah sebagai anak angkat dari suami/istri SUKIRNO dan SITI UMI KULSUM

Pemalang, 27 Juni 2012

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pemalang

NI WAYAN SRINI, S.Sos, MSi.
NIP. 19680820 199201 2 001

Gambar 5
Akta Kelahiran dengan Catatan Pinggir

Agar undang-undang ditaati oleh warga masyarakat memang perlu adanya sanksi. Kaidah–kaidah sosial yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat memang harus mempunyai sanksi yaitu akibat hukum aturan yang dilanggarnya, baik kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat seperti kaidah sosial maupun kaidah hukum. Kaidah sosial dan hukum sama ada sanksinya, yang membedakan sanksi kaidah sosial dan sanksi hukum adalah kaidah sosial sanksinya tidak diatur oleh Undang – Undang, malainkan ditetapkan oleh masyarakat.

Sanksi hukum diatur oleh hukum, yang berupa Undang – Undang atau ketentuan Perundangan lainnya. Sanksi hukum diatur mengenai cara atau prosedur penegakannya, pihak-pihak yang menegakkannya seperti penegak hukum dan berat sanksi yang dikenakan.

Berdasarkan uraian di atas sanksi perdata adalah hukuman yang berupa daya paksa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah merugikan pihak lain karena perbuatan perdata yang dilakukan untuk membuat efek jera melalui gugatan dipengadilan.

2. Penambahan Norma Hukum Baru pasal 89B

Masih adanya pengangkatan anak secara ilegal di masyarakat yaitu tidak melalui putusan atau penetapan pengadilan seperti diuraikan pada bab IV dapat berdampak negatif. Faktor penyebabnya adalah karena pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak dikenakan sanksi.

Ketentuan tentang pengangkatan anak harus melalui putusan atau penetapan pengadilan diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 angka 9 yang berbunyi sebagai berikut:

> "Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."[260]

[260] Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Pasal 1 huruf 9.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angkat 9 di atas bahwa diakhir bunyi pasal tersebut ada kata berdasakan putusan atau penetapan pengadilan.

Ketentuan lain yang mengaharus pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 20 ayat (1) berbunyi: "Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan."

Untuk mengatasi masalah ini maka perlu dibuat norma hukum baru yaitu pasal 89B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89B

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 yaitu pengangkatan anak tanpa putusan atau penetapan pengadilan dapat dikenakan sanksi perdata berupa diwajibkan untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan setempat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
(4) Setiap orang yang dikenakan sanksi perdata karena telah melanggar pasal 89B ayat (1) sebagaimana telah disebutkan di atas, jika dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung dari putusan pengadilan dia tidak melaksanakannya maka dapat dikenakan hukuman kurungan paling lama 1 bulan 15 hari dan/atau denda paling banyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan kewajiban tetap melaksanakan sanksi perdata yaitu mengajukan permohonan penetapan anak angkat ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 7
Rekonstruksi Berupa Penambahan Norma Hukum Baru pasal 89B ayat (1), dan (2)
Pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

NO	Aturan Lama	Kelemahan	Rekonstruksi
1	Pasal 1 angka 9 "Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."	Kelemahan pasal 1 angka 9 ini adalah tidak ada sanksi hukumnya, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan ini selalu berulang-ulang	Perlu penambahan norma hukum baru yaitu pasal 89B ayat (1) dan ayat (2), yaitu: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 yaitu pengangkatan anak tanpa putusan atau penetapan pengadilan dapat dikenakan sanksi perdata berupa diwajibkan untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan setempat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku; (2) Setiap orang yangdikenakan sanksi perdata karena telah melanggar pasal 89B ayat (1) sebagaimana telah disebutkan di atas, jika dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung dari putusan pengadilan dia tidak melaksanakannya maka dapat dikenakan hukuman kurungan paling lama 1 bulan 15 hari dan/atau denda paling banyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan kewajiban tetap melaksanakan sanksi perdata yaitu mengajukan permohonan penetapan anak angkat ke Pengadilan

			sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak angkat. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.

Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa hukum sebagai alat yang merupakan sarana dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita – cita bangsa dan tujuan negara. Negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan hukum sebagai alat melalui pemberlakuan atau penindak berlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara Indonesia.[261]

Filosofi dari sudut filsafat ada dua masalah yang penting yang menjadi sumber hukum :

[261] Moh.Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 2.

a. Ukuran untuk menentukan bahwa sesuatu itu bersifat adil, karena hukum yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan keadilan maka hal – hal yang secara filosofis dianggap adil dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiil.
b. Faktor – faktor yang mendorong seseorang mau tunduk pada hukum. Hukum diciptakan agar ditaati, maka semua faktor yang dapat mendorong seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif.[262]

Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. Memandang hukum secara abstrak atau formal memang demikian benarnya.

Hukum yang bermanfaat bagi suatu masyarakat harus mencerminkan nilai moral dan nilai hukum dari masyarakat dimana suatu diberlakukan. Begitu juga dengan sistem hukum nasional Indonesia harus mencerminkan nilai moral dan nilai hukum yang terdapat dalam pancasila. Rendahnya wibawa hukum di masyarakat saat ini dikarenakan sistem hukum nasional belum sepenuhnya mencerminkan nilai moral dan nilai hukum berdasarkan pancasila.[263]

Upaya lain dalam mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan menjadikan nilai dasar Pancasila sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai

[262] SF. Marbun, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Jogjakarta, hal. 23.

[263] Maroni, 2012, *Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41 No.2 Tahun 2012, Fak. Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal.306.

Pancasila adalah nilai moral. Oleh sebab itu, nilai Pancasila juga dapat diwujudkan kedalam norma-norma moral. Norma-norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari disertasi ini, akhirnya penulis memberikan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum pengangkatan anak di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum berbasis nilai keadilan dengan alasan:
   a. Masih ada ditemukan di masyarakat orang tua angkat yang tidak mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran;
   b. Masih ada orang tua angkat yang merubah identitas anak angkatnya seperti nama orang tua kandung anak angkat diganti dengan nama orang tua angkatnya;
   c. Masih ada pengangkatan anak di masyarakat dilakukan secara ilegal, yaitu pengangkatan anak tidak melalui proses putusan atau penetapan pengadilan. Akibat praktik seperti ini bisa menjadi muara pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, seperti ada orang tua kandung yang mengambil lagi anak yang pernah diberikannya kepada orang lain, ada orang tua angkat yang yang menghalangi orang tua kandung untuk bertemu dengan anaknya, dan lain-lain.
2. Kelemahan hukum pengaturan pengangkatan anak di Indonesia yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2014 adalah sebagai berikut :
   a. Tidak ada sanksi hukum bagi orang tua angkat yang tidak mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran

b. Tidak ada sanksi hukum bagi orang tua angkat yang merubah atau menghilangkan identitas anak angkatnya.

c. Tidak ada sanksi hukum bagi warga masyarakat yang pengangkatan anak secara ilegal yaitu pengangkatan anak tidak berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan. Dampak pengangkatan anak secara ilegal ini adalah sering tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, akibat negatif yang pernah terjadi adalah ada orang tua angkat yang mencabuli anak angkatnya, dan ada juga orang tua angkat yang berselingkuh dengan anak angkatnya hingga hamil.

3. Perlu adanya rekonstruksi hukum pengaturan pengangkatan anak di Indonesia agar dapat berbasis nilai keadilan, yaitu:

a. Penambahan norma hukum baru yaitu pasal 89A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yaitu sanksi bagi orang tua angkat yang tidak mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran dan merubah identitas anak angkatnya. Adapun bunyi pasal 89A adalah sebagai berikut:

Pasal 89A

(4) Setiap orang yang dengan sengaja tidak mencatatkan dalam akta kelahiran atas anak angkatnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2a) dapat dikenakan sanksi perdata berupa kewajiban mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
(5) Setiap orang yang dengan sengaja merubah identitas awal anak angkatnya pada akta kelahiran sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2a) dapat dikenakan sanksi perdata berupa kewajiban bagi orang tua angkat untuk memperbaiki identitas awal anak angkatnya sebagaimana mestinya;
(6) Setiap orang yang dikenakan sanksi perdata karena telah melanggar pasal 89A ayat (1) dan atau ayat (2) sebagaimana telah disebutkan di atas, jika dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung dari putusan pengadilan dia tidak melaksanakannya maka dapat dikenakan hukuman kurungan paling lama

1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan kewajiban tetap melaksanakan sanksi perdata yaitu mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran serta tidak merubah identitas anak angkat.

b. Penambahan norma hukum baru yaitu pasal 89B ayat (1) dan ayat (2) berupa sanksi hukum bagi orang tua angkat yang mengangkat anak tidak melalui putusan atau penetapan pengadilan. Adapun bunyi pasal 89B adalah sebagai berikut:

Pasal 89B

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 yaitu pengangkatan anak tanpa putusan atau penetapan pengadilan dapat dikenakan sanksi perdata berupa diwajibkan untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan setempat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
(4) Setiap orang yang dikenakan sanksi perdata karena telah melanggar pasal 89B ayat (1) sebagaimana telah disebutkan di atas, jika dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung dari putusan pengadilan dia tidak melaksanakannya maka dapat dikenakan hukuman kurungan paling lama 1 bulan 15 hari dan/atau denda paling banyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan kewajiban tetap melaksanakan sanksi perdata yaitu mengajukan permohonan penetapan anak angkat ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran dari penulis untuk mengatasi permasalahan pengangkatan anak ini adalah sebagai berikut :

4. Pada jangka waktu yang dekat perlu merivisi undang-undang No.35 Tahun 2014 yaitu penambahan norma hukum baru tentang sanksi yaitu pasal 89A ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 89B ayat (1) dan ayat (2). Pada waktu panjang perlu dibuat dibuat Undang-Undang tentang pengangkatan anak yang khusus karena undang-undang pengangkatan anak yang ada sekarang ini masih terintegrasi dalam

undang-undang perlindungan anak dan hanya 3 pasal saja yaitu pasal 39 sampai pasal 41.

5. Perlu diadakaan sosialisasi tentang undang-undang pengangkatan anak, agar masyarakat bisa mengetahui dan diharapkan kedepan tidak ada lagi oang tua angkat yang merubah identitas anak angkat, dan juga tidak ada lagi pengangkatan anak yang secara ilegal. Pada saat ini masih ada warga masyarakat yang tidak memahami undang-undang pengangkatan anak dan prosedurnya.
6. Diharapkan para pembuat Undang-undang dapat dengan jeli melihat kekosongan aturan hukum tentang pengangkatan anak, mengingat lembaga pengangkatan anak ini akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak kearah kemajuan. Sehubungan dengan itu maka hukum pengaturan pengangkatan anak yang sudah ada ini perlu di rekonstruksi.

C. Implikasi Kajian

Untuk mengakhiri Disertasi ini maka penulis akan menyampaikan implikasi kajian, yaitu sebagai berikut:

3. Implikasi Teoritis

   Kepada pemerintah diharapkan adanya pengkajian yang mendalam terhadap aturan tentang pengangkatan anak, mengingat sampai sekarang masih seringnya ditemukan penyimpangan, sehingga dikemudian hari pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia dapat memberikan jaminan keamanan dan dan keadilan terhadap anak angkat.

4. Implikasi Praktis

Implikasi secara praktis adalah perlu adanya rekonstruksi hukum terhadap aturan hukum pengangkatan anak, karena sampai saat ini aturan pengangkatan anak ini sudah ketinggalan dengan perkembangan masyarakat.

a. Rekonstruksi hukum normatif

Sebagaimana diatur dalam undang-undang pengangkatan anak bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak angkat, sehubungan dengan itu maka pelanggaran terhadap aturan pengangkatan anak perlu diatasi agar masalah pengangkatan anak tidak akan terulang lagi.

Salah satu yang perlu mendapatkan perhatian adalah perlunya sanksi terhadap pelanggaran hukum pengangkatan anak, seperti sanksi terhadap pemalsuan identitas anak, dan pengangkatan anak secara ilegal.

b. Rekonstruksi Sosiologis

Pengangkatan anak harus sesuai prosedur hukum yang telah ditetapkan, maksudnya adalah agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum berkaitan dengan jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan Anak dan pelaporan.

Pengangkatan anak jika ditinjau dari aspek perlindungan hak anak diperlukan peningkatan bimbingan dalam kegiatan pengangkatan anak oleh Pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan: penyuluhan, konsultasi,

konseling, serta pendampingan. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak memerlukan pengawasan yang efektif oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak dan dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan secara tertulis adanya dugaan penyimpangan dan pelanggaran kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Dari Buku

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Diterjemah M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al Atsari, 2007, *Tafsir Ibnu katsir Jilid 6*, Jakarta, Pustaka Imam As-Syafi‟i

Abdul Anshori Ghofur, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada

Angkasa, 2010, *Filsafat Hukum (Materi Kuliah)*, Magister Ilmu Hukum Hukum UNSOED, Perwokerto

Andi Hamzah, 2004, *Kamus Hukum*, Bandung, Ghalia Indonesia

Ansori, Abdul Gafur, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gajah Mada Universisty Press, Yogyakarta

Andi Samsu Alam dan Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, Kencana

Arif Gosita, 2013, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer

Bahder Johan Nasution, 2014, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Moderen*, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014,

Bastian Tafal, 1985, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Jakarta, Rajawali Press

Bambang Sunggono,, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Bertling, *Pengantar dan asas-asas Huk um Adat*, Jakarta, Gunung Agung

Budiarto, 1991, cet ke-2., *Pengangkatan Anak ditinjau dari segi hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo

B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Daliyo J. B., 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenhallindo

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (cetakan ke II), Bandung, Kencana Prenada Media Group

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

Dewi Sartika, 2002, *Keduduk an Anak Angk at Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya*, Semarang, Pustaka Pelajar

Djaya S Meliala, 1996, *Adopsi (Pengangkatan Anak) dalam Yurisprudensi*, Bandung, Tarsito

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat, Bandung,* Bandung, Citra Aditya Bakti

Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Semarang, Bumi Aksara

Jimly Asshiddiqie, 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Grafika

John Rawls, 2009, *Teori Keadilan,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Johanes Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Rineka Cipta

Johnny Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing

Juhaya S. Praja, 2009, *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya, Lathifah Press

Khusdjono, *Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Benda Perkawinan Orang Tua Angkat (Studi Pada Masyarakat Tionghoa Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)*

K. Wantjik Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata Rbg/HIR*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Liek Wilardjo, 1990, *Realita dan Desiderata*, Yogyakarta, Duta Wacana University Press

Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Antony Lib

Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika

Muhamad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: Kencana

Musthofa Sy, 2002, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Malang

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Moh. Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

M. Budiarto, 1991, *Pengangkatan Anak ditinjau dari Segi Hukum,* Jakarta, Akademika Pressindo

M. Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan Janda, Duda dan AnakAngkat dalam HukumAdat*, Bandung, Bandung, Citra Aditya Bakti

M. Yahya Harahap, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Pustaka Kartini

Miftah Thoha, 2003, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Nasroen Harun dkk., 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya, PT.Bina Ilmu

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitiam Hukum dan Jurimetri,* Jakarta, Ghalia Indonesia

Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Bandung, Alumni

----------, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni

----------, 2006, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Semarang

----------, 2008, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Publishing

Sardar Ziauddin, 1996, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung; Mizan

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI-Press

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tnjauan Singkat,* Cet. Ke-11, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Press

Soerojo Wignjodipoero, 1994, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung

Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Sunarmi, *Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Batak Toba* (*Suatu Analisis Berdasarkan Hukum Adat*), Universitas Sumatera Utara

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty

Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika, Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

SF. Marbun, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Jogjakarta

Tim Penyusun, 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Thomas S. Kuhn, 1970, *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago Press, Chicago

Utrecht, 1996, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Intermasa

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju

W. Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Press

W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta, Balai Pustaka

Yusuf Qardawi, 1982, Ahli Bahasa Huamal Hamidi, *Halal Haram dalam Islam,* Jilid I dan II Surabaya, Bina Ilmu

Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

B. Jurnal

Abidin Abidin, Abdullah Kelib, 2018, *Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal USM Law Review Vol 1 No 1 Tahun 2018

Anna Triningsih, 2015, *Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law dan Common Law)*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015

Afifa Rangkuti, 2017, *Konsep Keadilan Dalam Persfektif Islam*, Tazkiya, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1, Januari-Juni 2017

Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012

Ashar Sinilele, Jurnal, Al Daulah, 2016, *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Luwu Utara*, Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016

Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, Fakultas Hukum Universitas Jambi

Busthanul Arifin, 2001. *Menghidupkan Kembali Norma-Norma Hukum Sipil Islam*, Mimbar Hukum. No. 54 Thn XII, Hal 62 dalam Ashar Sinilele, - Jurnal al daulah, Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016

Dessy Balaati, 2013, *"Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia",* Jurnal Lex Privatum, Vol. 1, No. 1, Januari-Maret 2013

Eman Sulaiman, 2016, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Ash Shahabah, Jurnal Pendididkan Dan Studi Islam

Fauzi Almubarok, 2018, *Keadilan Dalam Perspektif Iislam*, Jurnal ISTIGHNA, Vol. 1, No 2, Juli 2018 P-ISSN 1979-2824

Fransiska Hildawati Tambunan, 2013, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)*, Unnes Law Journal 2

Haedah Faradz, 2009, *Penangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 N0. 2 Mei 2009

Hasaziduhu Moho, 2019, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019| ISSN : 1829-7463 Universitas Dharmawangsa

Inge Dwisvimia, 2011, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September 2011

Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Kumpulan Sasar Jabatan Kebajikan Masyarakat*, Diakses pada Tanggal 31 disember 2017 dari situs: http://www.jkm.gov .my/jkm/index.php?r =portal/full&id= K3grQ3pRNVJUNGo2L2J4c1 NKeXIxUT09

----------, *Profil dan Objektif Jabatan Kebajikan Masyarakat*, Diakses pada tanggal 21 November 2017 dari situs: http://www.jkm.perak.gov.my/index2.php? page=profil

Kamaruzzaman Bustamam, *Prosedur Pengangkatan Anak di Perak, Malaysia (Analisis Pengangkatan Anak Angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping),* Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018, hal.63-64

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Juni 2020

Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, dalam Kamaruzzaman Bustamam, *Prosedur Pengangkatan Anak di Perak, Malaysia (Analisis Pengangkatan Anak Angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping),* Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018

Manullang, E. Fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Buku Kompas*, Jakarta dalam Subhan Amin, 2019, *Keadilan Dalam Persfektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, Jurnal El-Afkar Vol. 8 Nomor I, Januari-Juni 2019

Maryanto, 2011, *Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011

Maroni, 2012, *Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41 No.2 Tahun 2012, Fak. Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Muhammad Heriawan, 2017, *Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Persfektif Perlindungan Anak*, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017

Muhammad Helmi, 2015, *Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015)

Muhammad Rais, 2016, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Persfektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif*), Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016

Mukhidin, 2014, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September – Desember 2014

Mulyanto, 2009, *Pancasila Dasar Negara*, PT. Ghalia Bandung

M. Fauzan, 2001, *Permohonan Pengangkatan Anak bagi Keluarga Muslim adalah Wewenang Absolut Peradilan Agama*, dalam Mimbar Hukum, Al-Hikmah, Jakarta

Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya dalam Subhan Amin, 2019, *Keadilan Dalam Persfektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, Jurnal El-Afkar Vol. 8 Nomor I, Januari-Juni 2019

Prosedur Kualiti Jabatan Kebajikan Masyarakat Utama 09, *Surat Tawaran Anak Pelihara*, No Keluaran 03, (PK JKM 09, 2008).

Sahya Anggara, 2013, *Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal*, Jurnal, ISPO VOL. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2013, Bandung

Sewu, P. Lindawaty S, 2006, *Kegunaan Filsafat Hukum Dalam Mengupas Tuntas Permasalahan Hukum Kontekstual*, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Langlang buana, Vol. 5

(1),2006, hlm. 25-38, lihat Inge Dwisvimia, 2011, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No. 3 September 2011

Subhan Amin, 2019, *Keadilan Dalam Persfektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, Jurnal El-Afkar Vol. 8 Nomor I, Januari-Juni 2019

Sulaiman, 2018, *Paradigma Dalam Penelitian Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2, (Agustus, 2018)

Suhaimi, 2018, *Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal YUSTITIA Vol. 19 No. 2 Desember 2018

Susiana, 2011, Hak Anak Angkat terhadap Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55, Th. XIII (Desember, 2011)

Sukardi, 2018, *Adopsi Anak Dalam Hukum Islam*, Raheema, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 5, No. 2

Tower Sargent, Lyman, dalam Bahder Johan Nasution, 2014, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Moderen*, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014

Wan Azmi Ramli, *Dasar Sosial di Malaysia*, (Kuala Lumpur, Golden Books Center SdnBhd, 1993), hlm. 311.dikutip dari Kamaruzzaman Bustamam, *Prosedur Pengangkatan Anak di Perak, Malaysia (Analisis Pengangkatan Anak Angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping)*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018

Windi Arista, 2017, *Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Yang Berasal Dari Anak Saudara Kandung Menurut Hukum Adat*, Jurnal Hukum Uniski, Vol.6 No.1 Edisi Juli-Desember 2017

Zakki Adlhiyati, Achmad, 2019, Undang: Jurnal Hukum, *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*, Vol.2 No.2 Tahun 2019

Zakaria Ahmad, dalam Haedah Faradz, 2009, *Penangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 N0. 2 Mei 2009

C. Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dll

UUD 1945 Amandemen ke 4

Adoption of Children Act (Chapter 4), (Original Enactment: Ordinance 18 of 1939), Revised Edition 1985, (30th March 1987), An Act to make provision for the adoption of infants

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 *Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil*, LN No. 11 Tahun 1977, TLN No. 3098

Undang-Undang No.62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LN No. 113 Tahun 1958, TLN No. 1647

Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang UU No. 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*, LN No.32 Tahun 1979, TLN No. 3143

Undang-undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Malaysia, *Akta Kanak-Kanak 2001*

D. Dari Internet

Borneonews Online, https://www.borneonews.co.id/berita/36153-gubernur-kalimantan-tengah- sudah-adopsi-bayi-eliza-az-zahra, Minggu, 26-04-2020 pukul 10.18 wib

Dini Eka Wahyuni, S. STP, MT, Kasi Kelahiran, Kematian & Pengesahan Anak Disdukcapil Kota Pontianak, 2016, *Adopsi Anak Dalam Perspektif Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, Artikel, diposting pada laman web Disdukcapil yang lama pada tanggal 15 Desember 2016

Jimly Asshiddiqie, 2012, *Makalah Penegakan Hukum*, diakses dari google.com pada 25 Oktober 2020

Kompas. Com, https://regional.kompas.com/read/2020/03/13/11034981/dicabuli-2-tahun-anak-angkat-di-luwu-lahirkan-bayi-perempuan, Di lihat Kamis 16-04-2020 Pukul 13.31 wib.

http://www.lbhapik.or.id/adopsi

https://regional.kompas.com/read/2020/03/13/11034981/dicabuli-2-tahun-anak-angkat-di-luwu-lahirkan-bayi-perempuan, Di lihat pada tanggal 15-04-2020 Pukul 13.31 wib.

https://newsmaker.tribunnews.com/2020/12/12/10-tahun-dirawat-bak-anak-sendiri-anak-angkat-tega-khianati-ibu-selingkuh-dengan-ayah-sampai-hamil

https://www.kompasiana.com/villa/551957d6813311d8769de0ca/kasus-anak-angkat-diambil - orang-tua-aslinya-kembali, di akses pada tanggal 14-03-2012 pukul 21.38 wib

Musthofa Sy, *Arah Baru Pengangkatan Anak di Indonesia*, http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL/ Artikel

GLOSARIUM

Anak	: seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandugan.
Anak Angkat	: anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
Adopsi	: pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri
Burgerlik Wetbook (BW)	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
CAA	: Calon Anak Angkat
COTA	: Calon Orang Tua Angkat
Das Sollen	: suatu peraturan hukum yang bersifat umum
Das Sein	: suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat
Hak anak	: bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara
HAM	: Hak Asasi Manusia
Legal	: Sah atau sesuai prosedur
Ilegal	: Tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedur
Orang tua	: ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah/atau ibu angkat.
Perlindungan anak	: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pekerja Sosial	: petugas yang terlibat di semua tahapan pengangkatan anak, diawali dengan assessment yang harus dilakukan pada visitasi awal dengan tujuan sebagai landasan penyusunan laporan sosial yang merupakan syarat adopsi.
Penyandang Disabilitas	: setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak
PIPA	: Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak
Rekonstruksi	: Penyusunan kembali
Setiap orang	: orang perseorangan atau korporasi.
Staatsblad	: Lembar negara
Wali	: orang atau badan yang dalam kenyataan menjalankan kekusaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
WNI	: Warga Negara Indonesia
WNA	: Warga Negara Asing

CURIKULUM VITEI

Nama	: ABDUL KHAIR, S.H.,M.H
Tempat, Tgl. Lahir	: Pematang Benteng, 1 Desember 1968
Alamat	: Jl. Widuri II No.3 RT. 05 RW.06 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, G.Obos XII, Palangka Raya, Kalimantan Tengah Kode Pos 73112, No. HP : 0857 5422 0339
Email	: abdul.khair@iain-palangkaraya.ac.id
Pendidikan	: 1. S1, Fak. Hukum, STIH SA, Banjarmasin, 1994 2. S2, Fak. Hukum UII Yogyakarta, 2005 3. S3, PDIH, UNISSULA, 2021
Pekerjaan	: PNS Pada IAIN Palangka Raya
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Status Keluarga	: Menikah
Nama Isteri	: Hilwiah, S.Pd
Anak	: 1. Nina Mahmudah 2. Linda Mahfuzah 3. Airin Norwijayanti Azima
Karya Ilmiah	:

10. The Muallaf Nurturing Between In Map And Fact
11. Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak
12. Politik Hukum Perburuhan Indonesia
13. Electrik Comerce Ditinjau Dari Hukum Perdata
14. Praktik Jual Beli Barang Kadaluarsa di Kota Palangka Raya
15. Pembinaan dan Pemetaan Muallaf di Kalimantan Tengah
16. Dinamika Penataan Regulasi Penataan Syari‟ah
17. Kemadekan Hak Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya
18. Prinsip-Prinsip Negara Hukum Pada Piagam Madinah dan UUD 1945

Palangka Raya, 11 Desember 2021
Yang Membuat

ABDUL KHAIR

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Jalan Teuku Umar Nomor 10 – 12 Menteng, Jakarta Pusat 10350
Telepon (021) 3900833,31900659, Pengaduan (021) 31901556, Faxmile(021) 31901446
Situs : www.kpai.go.id

Nomor : B-1240/Sekrt-KPAI/10/2020 12 Oktober 2020
Lampiran : -
Hal : Keterangan Selesai Wawancara KPAI

Yang terhormat,
Ketua Program Doktor
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Di -
Semarang

Merujuk pada surat Saudara nomor : 629/A.1/PDIII-FH/SA/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal permohonan izin wawancara pada KPAI. Sehubungan dengan hal tersebut kami beritahukan bahwa saudara:

Nama : Abdul Khair, SH.,M.H
NIM : 10301800051
Program Doktor (S3) : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Telah selesai melaksanakan wawancara di **Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)** pada tanggal 08 Oktober 2020 dengan judul riset "Rekonstruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Keadilan."

Selanjutnya bila yang bersangkutan telah menyelesaikan riset, dapat menyampaikan 1 (satu) copy kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menambah referensi di perpustakaan kami.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Sekretariat KPAI

[redacted] SE., MM
NIK 1995111.098612.2.001


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية